



ANALISIS PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 2009-2013

**KERJASAMA
BADAN PUSAT STATISTIK
DAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2014**

**ANALISIS PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
2009-2013**

**KERJASAMA BADAN PUSAT STATISTIK DAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

KATA PENGANTAR

Publikasi “Analisis Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Daerah Istimewa Yogyakarta 2014” merupakan publikasi yang membahas berbagai aspek terkait dengan data PDRB periode 2009 sampai 2013, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

PDRB merupakan nilai tambah produksi barang dan jasa daerah yang disajikan menurut lapangan usaha dan dari sisi penggunaan. Data dan indikator turunan dari PDRB dapat digunakan sebagai ukuran kinerja ekonomi suatu wilayah/daerah dan perbandingan tingkat kemakmuran antar wilayah/daerah, tentunya dengan mengkorelasikan dengan data atau indikator lain yang relevan.

Publikasi ini menyajikan tentang analisis data PDRB menurut lapangan usaha seperti: struktur ekonomi, PDRB per kapita, inflasi, indeks perkembangan dan perbandingan tingkat kemakmuran antar kabupaten/kota, serta keterkaitan pertumbuhan ekonomi dengan tingkat pengangguran, kemiskinan, serta ketimpangan pendapatan dan wilayah. Di samping itu, disajikan pula analisis yang diturunkan dari data PDRB menurut penggunaan seperti: konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, ekspor, dan impor. Untuk memudahkan pembaca dalam memahami substansi pembahasan, publikasi ini dilengkapi dengan konsep/definisi dan metode penghitungan PDRB secara ringkas.

Semoga publikasi ini bermanfaat bagi Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), dan pihak terkait sebagai bahan dalam evaluasi dan penyusunan perencanaan pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kepada semua pihak yang telah berperan langsung maupun tidak langsung dalam menyusun dan menyempurnakan publikasi ini kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, Juli 2014

Badan Pusat Statistik
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Kepala,

J. Bambang Kristianto, MA
NIP : 19561223 197803 1 001

KATA SAMBUTAN

Kami menyambut baik diterbitkannya Publikasi “Analisis Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Daerah Istimewa Yogyakarta 2014”, sebagai hasil kerjasama antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Daerah Istimewa Yogyakarta dengan BPS Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Publikasi ini merupakan kelanjutan dari publikasi serupa tahun-tahun sebelumnya, tentunya dengan menampilkan fenomena yang berbeda.

Publikasi ini memuat indikator PDRB berikut indikator turunannya dan dilengkapi dengan pengertian dan definisi. Indikator-indikator tersebut bermanfaat untuk mengukur kegiatan ekonomi dan tingkat kemakmuran yang dicapai pada periode 2009-2013, yang berguna bagi pihak terkait (*stakeholder*) dalam perencanaan kegiatan ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dari sisi kebutuhan pemerintah daerah, hasil analisis yang menyajikan angka nominal maupun besaran dari indikator-indikator PDRB sangat diperlukan sebagai evaluasi implikasi program yang sudah berjalan dan juga sebagai masukan baik dalam proses perencanaan daerah maupun dalam penentuan kebijakan daerah. Bagi kalangan swasta, informasi yang disajikan dapat digunakan dalam menentukan strategi bisnisnya, sedangkan bagi masyarakat umum, informasi yang disajikan dalam publikasi ini dapat digunakan sebagai bahan untuk menilai keberhasilan peranan Pemerintah dalam melaksanakan *social control*. Bagi akademisi, data dan analisis dalam publikasi ini dapat berguna untuk literatur maupun kajian lebih lanjut.

Kami berharap publikasi ini dapat dimanfaatkan secara optimal oleh para pihak terkait, dan diharapkan pula bahwa publikasi ini serta publikasi tahun-tahun mendatang akan lebih baik, dalam format, substansi maupun penyajiannya dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Pada kesempatan ini, kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Daerah Istimewa Yogyakarta beserta jajarannya atas segala usaha yang telah dilakukan untuk menyelesaikan publikasi ini. Mudah-mudahan kerjasama antara BAPPEDA Daerah Istimewa Yogyakarta dengan BPS Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta akan semakin kokoh dan dapat memberikan sumbangan kepada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Yogyakarta, Juli 2013

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta
Kepala,

Drs. Tavip Agus Rayanto, M.Si.

NIP : 19641107 199103 1 004

ABSTRAKSI

Visi pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang akan dicapai dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009-2013 adalah **“Pemerintah Daerah yang katalistik dan masyarakat mandiri yang berbasis keunggulan daerah serta sumber daya manusia yang berkualitas unggul dan beretika”**. Untuk mewujudkan visi tersebut Pemerintah DIY menitikberatkan pada empat misi pembangunan yang dua diantaranya adalah melalui penguatan fondasi kelembagaan dan memantapkan struktur ekonomi daerah berbasis pariwisata yang didukung potensi lokal dengan semangat kerakyatan menuju masyarakat yang sejahtera dan melalui pemantapan prasarana dan sarana daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan publik.

Selama kurun waktu lima tahun terakhir (2009-2013) pembangunan perekonomian DIY dapat diidentifikasi melalui informasi statistik yang direpresentasikan melalui beberapa indikator makro yang utamanya diturunkan dari data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Kerangka analisis yang digunakan untuk memperoleh gambaran perekonomian DIY selama periode tersebut meliputi: struktur ekonomi wilayah, pola pertumbuhan sektoral, pola pertumbuhan menurut penggunaan, keterkaitan pertumbuhan ekonomi dengan tingkat pengangguran dan kemiskinan, serta tingkat ketimpangan pendapatan rumah tangga dan antarwilayah.

Dilihat secara nominal perekonomian DIY selama lima tahun terakhir terus berkembang. Nilai PDRB Provinsi DIY atas dasar harga berlaku tahun 2013 mencapai Rp63,69 triliun, sedangkan nilai atas dasar harga konstan 2000 mencapai Rp 24,57 triliun dengan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 5,40 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Nilai PDRB per kapita atas dasar harga berlaku tahun 2013 mencapai Rp17,72 juta atau naik 46,62 persen selama lima tahun terakhir.

Kegiatan ekonomi DIY bertumpu pada empat sektor andalan yaitu: Perdagangan, Hotel dan Restoran; Jasa-Jasa; Pertanian; serta Industri Pengolahan, yang mendominasi sebesar 68,50 persen dari total PDRB. Apabila dilihat menurut kabupaten/kota, perekonomian Provinsi DIY terutama didukung oleh Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta dengan total kontribusi sekitar 57,18 persen.

Laju pertumbuhan ekonomi DIY tahun 2013 terutama didorong oleh kinerja kepariwisataan dan kinerja pemerintah daerah. Sektor industri pengolahan menjadi *leading sectors* sebagai dampak pesatnya peningkatan kinerja produksi setelah tahun sebelumnya mengalami kontraksi. Di samping itu iklim pertumbuhan yang tinggi (di atas lima persen) juga terjadi di semua sektor lain, kecuali sektor pertanian dan sektor penggalian.

Investasi yang masuk DIY masih belum diikuti tingkat efisiensi penanaman modal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal ini tercermin dari nilai *Incremental Capital Output Ratio* (ICOR) DIY pada tahun 2013 masih relatif tinggi sebesar 5,63, lebih rendah dari tahun sebelumnya (5,79) namun masih tergolong tinggi dari nilai ideal yang berkisar pada nilai 4.

Sumber pertumbuhan ekonomi DIY pada tahun 2013 didominasi oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran dengan andil pertumbuhan sekitar 1,31 persen terhadap pertumbuhan total sebesar 5,40 persen, disusul andil pertumbuhan sektor industri pengolahan

dan sektor jasa-jasa masing-masing sebesar 0,98 persen. Dari sisi penggunaan, sumber pertumbuhan ekonomi terutama dari komponen konsumsi rumah tangga dengan andil 2,81 persen. Selama periode 2009-2013 rata-rata pertumbuhan ekonomi DIY mencapai 5,19 persen per tahun, lebih tinggi dibanding periode sebelumnya yang sebesar 4,95 persen per tahun.

Kinerja ekonomi antarwilayah kabupaten/kota selama rentang 2009-2013 terlihat relatif beragam berdasarkan Tipologi Klassen. Pada tahun 2013, tercatat hanya Kota Yogyakarta sebagai daerah maju dan cepat tumbuh, sehingga beberapa tahun ke depan masih berpotensi untuk tumbuh terus. Sementara itu, Kabupaten Sleman termasuk daerah berkembang cepat bersama Kabupaten Bantul meskipun Sleman lebih berpotensi untuk menjadi daerah maju dan cepat tumbuh mendampingi Kota Yogyakarta. Kabupaten Kulonprogo dan Kabupaten Gunungkidul menjadi daerah tertinggal meskipun posisi relatifnya sudah lebih baik.

Secara umum, pertumbuhan ekonomi Provinsi DIY memberi dampak pada pengurangan tingkat pengangguran dan jumlah penduduk miskin, karena laju pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dibandingkan dengan laju pertumbuhan tenaga kerja. Relatif rendahnya pengangguran terbuka pada tahun 2013 disinyalir akibat membaiknya kinerja pertumbuhan semua sektor ekonomi kecuali sektor pertanian dan sektor pertambangan.

Salah satu indikator makro di bidang ketenagakerjaan yang dapat diamati antara lain adalah angka elastisitas kesempatan kerja selama periode 2009-2013 yang sebesar 0,24. Angka ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan pertumbuhan ekonomi sebesar 1 (satu) persen akan meningkatkan serapan tenaga kerja sebesar 0,24 persen. Dengan angkatan kerja sebanyak 1,85 juta orang pada tahun 2013, maka setiap 1 persen pertumbuhan ekonomi baru mampu menyerap sekitar 4,4 ribu orang. Hal ini berarti dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi DIY periode 2009–2013 sebesar 5,19 persen per tahun hanya mampu menyerap sekitar 22,7 ribu tenaga kerja per tahun.

Melihat hubungan pertumbuhan ekonomi dan elastisitas kesempatan kinerja yang terjadi tersebut ternyata pertumbuhan ekonomi DIY cenderung masih mencirikan kegiatan yang padat modal karena elastisitas kesempatan kerja selama periode lima tahun terakhir hanya sebesar 0,24 persen per tahun. Hal ini memberikan sinyal bahwa tingkat pengangguran dapat ditekan lebih rendah lagi dengan mendorong pertumbuhan ekonomi ke sektor-sektor yang kegiatan usahanya padat karya sehingga mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja.

Tingkat kemiskinan secara relatif terus menurun, yaitu dari 17,23 persen di tahun 2011 turun menjadi 15,03 persen di September 2013. Inflasi DIY yang tergolong tinggi mempengaruhi perubahan garis kemiskinan sehingga di tahun 2013 meningkat menjadi Rp303.843,- per kapita per bulan. Ketimpangan distribusi pendapatan penduduk yang dicerminkan oleh angka rasio Gini pada Maret 2013 mengalami peningkatan jika dibanding tahun sebelumnya namun angka September 2013 kembali turun menjadi 41,64 persen. Hal ini menunjukkan bahwa distribusi pendapatan penduduk masih timpang, meskipun masih dalam kriteria ketimpangan moderat. Kondisi serupa juga dijelaskan oleh ketimpangan menurut Kriteria Bank Dunia, yaitu persentase pendapatan yang dapat dinikmati oleh 40 persen penduduk berpendapatan terendah juga semakin berkurang, meskipun masih termasuk dalam kriteria tingkat ketimpangan sedang.

Kesenjangan yang dialami DIY tidak hanya terjadi pada tingkat rumahtangga atau masyarakat, namun diikuti dengan peningkatan disparitas regional yang tercermin dari Indeks Williamson yaitu sebesar 44,32 persen pada tahun 2009 menjadi 47,08 persen pada tahun 2013.

Meningkatnya indeks tersebut menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan antar regional kabupaten/kota juga semakin tinggi.

Berdasarkan hasil analisis *Shift share* dengan periode amatan tahun 2009-2013, dari lima kabupaten/kota yang ada tidak ada yang terkategori mengalami pertumbuhan pesat, meskipun di periode amatan sebelumnya, 2008-2012, Kabupaten Sleman tercatat sebagai daerah dengan pertumbuhan ekonomi pesat. Di periode analisis 2009-2013 ini Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta masuk kategori daerah yang cenderung berpotensi (kuadran III). Kabupaten Bantul dan Gunungkidul masuk dalam kategori daerah yang sedang berkembang (kuadran II), sedangkan Kabupaten Kulonprogo masih belum bergeser dan berada dalam kategori daya saingnya lemah (kuadran IV).

Yogyakarta, Juli 2014

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	ii
KATA SAMBUTAN	iii
ABSTRAKSI	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	x
I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	2
1.2. Dasar Pelaksanaan	5
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sasaran	7
1.5. Manfaat	7
1.6. Lokasi Kegiatan	7
1.7. Sumber Pendanaan	7
1.8. Lingkup Pekerjaan	7
II METODOLOGI	8
2.1. Konsep dan Definisi	9
2.2. Penghitungan PDRB menurut Lapangan Usaha	12
2.3. Penghitungan PDRB menurut Penggunaan	23
2.4. Kualitas Pertumbuhan Ekonomi	27
III PDRB MENURUT LAPANGAN USAHA	44
3.1. Struktur Ekonomi	46
3.2. Peranan Kelompok Sektor Ekonomi	48
3.3. PDRB Per Kapita	50
3.4. Inflasi IHK versus Inflasi PDRB	51
3.5. Indeks Perkembangan Sektoral	53
3.6. Perbandingan Nilai PDRB Antar Kabupaten/ Kota	55
3.7. Perbandingan Nilai PDRB Antar Provinsi	60
IV PDRB MENURUT PENGGUNAAN	63
4.1. Struktur PDRB Penggunaan	65
4.2. Pertumbuhan Ekonomi dari Sisi Permintaan	72
V KUALITAS PERTUMBUHAN EKONOMI	75
5.1. Pertumbuhan Ekonomi	76
5.2. Penduduk dan Tenaga Kerja	83
5.3. Kemiskinan dan Ketimpangan	90
5.4. Disparitas Antar Kabupaten/ Kota	94
5.5. Kualitas Pertumbuhan Ekonomi	100
VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	103
6.1. Kesimpulan	104
6.2. Rekomendasi	107
DAFTAR PUSTAKA	109
LAMPIRAN	111

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1 Distribusi Persentase PDRB D.I. Yogyakarta menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku, 2007–2013	47
Tabel 3.2 Perkembangan PDRB Per Kapita D.I. Yogyakarta, 2009–2013	51
Tabel 3.3 Inflasi IHK dan Inflasi PDRB D.I.Yogyakarta, 2008-2013	52
Tabel 3.4 Indeks Perkembangan PDRB D.I.Yogyakarta menurut Lapangan Usaha, 2009-2013 (2000 = 100)	54
Tabel 3.5 Nilai PDRB Kabupaten/ Kota di D.I.Yogyakarta Atas Dasar Harga Berlaku, 2009 – 2013	56
Tabel 3.6 Nilai PDRB Kabupaten/Kota menurut Lapangan Usaha di D.I. Yogyakarta Atas Dasar Harga Berlaku, 2013	58
Tabel 3.7 Kontribusi Sektor-sektor Dominan PDRB atas Dasar Harga Berlaku menurut Kabupaten/ Kota di D.I.Yogyakarta, 2009 – 2013	58
Tabel 3.8 Kontribusi Sektor-sektor Dominan PDRB atas Dasar Harga Konstan menurut Kabupaten/ Kota di D.I.Yogyakarta, 2009, 2011, 2013	59
Tabel 3.9 Nilai PDRB Per Kapita menurut Kabupaten/ Kota di D.I. Yogyakarta Atas Dasar Harga Berlaku, 2009 – 2013	60
Tabel 3.10 Ringkasan PDRB Provinsi –Provinsi di Indonesia, 2013	61
Tabel 4.1 Nilai PDRB DI Yogyakarta Harga Berlaku menurut Penggunaan, 2009–2013	66
Tabel 4.2 Struktur PDRB menurut Penggunaan, 2009 – 2013	67
Tabel 4.3 Pola Konsumsi Rumah Tangga menurut Kabupaten/ Kota di DIY, 2000 dan 2013	68
Tabel 4.4 Struktur Konsumsi Pemerintah DIY menurut Sumber Pembiayaan, 2009 – 2013	69
Tabel 4.5 Struktur Konsumsi Pemerintah DIY menurut Jenis Pembiayaan, 2009 – 2013	69
Tabel 4.6 Nilai dan Andil Investasi Fisik terhadap PDRB dan ICOR DIY, 2009–2013	71
Tabel 4.7 Pertumbuhan PDRB menurut Penggunaan, 2009–2013	73
Tabel 5.1 Pertumbuhan Ekonomi Sektoral di DI Yogyakarta 2011–2013, Rata-rata Pertumbuhan Per Tahun 2009-2013, dan Andil Pertumbuhan Tahun 2013	77

	Halaman
Tabel 5.2 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di DI Y 2011–2013, Rata-rata Pertumbuhan Per Tahun 2009–2013 dan Andil Pertumbuhan 2013	80
Tabel 5.3 Pertumbuhan Ekonomi menurut Penggunaan di DIY, 2011–2013, Rata-rata Pertumbuhan Per Tahun 2009–2013, dan Andil Pertumbuhan Tahun 2013	83
Tabel 5.4 Rata-rata Pertumbuhan Kesempatan Kerja, Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi, Elastisitas Kesempatan Kerja dan Penyerapan Tenaga Kerja menurut Sektor di DIY, 2011–2013	87
Tabel 5.5 Produktivitas Tenaga Kerja, Rata-rata Pertumbuhan Produksi dan Tenaga Kerja Per Tahun, dan Rata-rata Pertumbuhan PTK Sektoral di DIY, 2011–2013	89
Tabel 5.6 Indikator Ketimpangan Pendapatan Penduduk DIY, 2009–2013	94
Tabel 5.7 Pangsa Regional menurut Kabupaten/ Kota di DIY, 2009–2013	96
Tabel 5.8 <i>Proportional Shift</i> menurut Kabupaten/ Kota di DIY, 2009–2013	97
Tabel 5.9 <i>Different Shift</i> menurut Kabupaten/ Kota di DIY, 2009–2013	98
Tabel 5.10 Rekapitulasi Perubahan PDRB dan Nilai Pergeseran Netto di DIY, 2009–2013	98
Tabel 5.11 Kategori Pertumbuhan Kabupaten/ Kota di DIY, 2009–2013	100

DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar 1.1	Arus Lingkar Perekonomian Tertutup	3
Gambar 1.2	Arus Lingkar Perekonomian Terbuka	4
Gambar 2.1	Diagram Perbandingan Laju Pertumbuhan dan PDRB Per Kapita	30
Gambar 2.2	Bagan Konsep Penduduk dan Tenaga Kerja	32
Gambar 2.3	Plot Pengeluaran Per Kapita dan Garis Kemiskinan	36
Gambar 2.4	Kurva Lorenz	39
Gambar 3.1	Produk Domestik Regional Bruto D.I.Yogyakarta, 2007–2013	45
Gambar 3.2	Peranan Sektoral PDRB Atas Dasar Harga Berlaku D.I. Yogyakarta, 2013.	48
Gambar 3.3a	Distribusi Persentase PDRB atas Dasar Harga Berlaku, D.I. Yogyakarta menurut Kelompok Sektor, 2009–2013.....	49
Gambar 3.3b	Distribusi Persentase PDRB atas Dasar Harga Konstan 2000, D.I. Yogyakarta menurut Kelompok Sektor, 2009–2013	50
Gambar 3.4	Nilai PDRB menurut Kabupaten/ Kota di D.I. Yogyakarta Atas Dasar Harga Berlaku, 2009–2013.....	57
Gambar 4.1	Persentase Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku di DIY, 2009–2013	66
Gambar 4.2	Persentase Pengeluaran Konsumsi Pemerintah DIY menurut Jenisnya, 2009–2012	69
Gambar 5.1	Plot PDRB Per Kapita dan Laju Pertumbuhan Ekonomi menurut Kabupaten/ Kota di DIY Tahun 2009	81
Gambar 5.2	Plot PDRB Per Kapita dan Laju Pertumbuhan Ekonomi menurut Kabupaten/ Kota di DIY Tahun 2013	82
Gambar 5.3	Angka Beban Tanggungan Penduduk DIY, 2009-2013.....	84
Gambar 5.4	Perkembangan TPAK Penduduk DIY menurut Daerah, 2009–2013	85
Gambar 5.5	Perkembangan TKK dan TPT Penduduk DIY, 2009–2013	86
Gambar 5.6	Plot Produktivitas TK dan Laju Pertumbuhan Ekonomi menurut Sektor di DIY Tahun 2011	89
Gambar 5.7	Plot Produktivitas TK dan Laju Pertumbuhan Ekonomi menurut Sektor di DIY Tahun 2013.....	90
Gambar 5.8	Persentase Penduduk Miskin di DIY dan Nasional, 2009-2013.....	91
Gambar 5.9	Indeks Kedalaman (P_1) dan Indeks Keparahan (P_2) Kemiskinan di DIY, 2009-2013	92
Gambar 5.10	Kurva Lorenz DIY Hasil Susenas September 2013.....	93
Gambar 5.11	Rasio Gini dan KBD (Persentase Pendapatan yang Diterima oleh 40 persen Penduduk Berpendapatan Terendah) di DIY, 2009–2013.....	93
Gambar 5.12	Indeks Williamson DIY, 2009-2013	95

Gambar 5.13	Hubungan Laju Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran, Kemiskinan dan Gini Rasio, 2009-2013.....	101
Gambar 5.14	Realisasi Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Target RPJMD 2009-2013 (%)	102

DAFTAR LAMPIRAN

Tabel Lampiran	Halaman
Tabel 1 Produk Domestik Regional Bruto D.I. Yogyakarta Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha Tahun 2009–2013	112
Tabel 2 Produk Domestik Regional Bruto D.I. Yogyakarta Atas Dasar Harga Konstan menurut Lapangan Usaha Tahun 2009–2013	113
Tabel 3 Susunan Agregat PDRB Per Kapita D.I. Yogyakarta menurut Lapangan Usaha Tahun 2009–2013	114
Tabel 4 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto D.I. Yogyakarta Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha Tahun 2009–2013	115
Tabel 5 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto D.I. Yogyakarta Atas Dasar Harga Konstan 2000 menurut Lapangan Usaha Tahun 2008–2012	116
Tabel 6 Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto D.I. Yogyakarta Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha Tahun 2009–2013..	117
Tabel 7 Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto D.I. Yogyakarta Atas Dasar Harga Konstan 2000 menurut Lapangan Usaha Tahun 2009–2013	118
Tabel 8 Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto D.I. Yogyakarta menurut Lapangan Usaha Tahun 2009–2013	119
Tabel 9 Indeks Harga Implisit Berantai Produk Domestik Regional Bruto D.I. Yogyakarta menurut Lapangan Usaha Tahun 2009–2013	120
Tabel 10 Inflasi Atas Dasar Indeks Harga Implisit Berantai PDRB D.I. Yogyakarta menurut Lapangan Usaha Tahun 2009–2013	121
Tabel 11 Laju Pertumbuhan Ekonomi D.I. Yogyakarta menurut Lapangan Usaha Tahun 2009–2013	122
Tabel 12 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kulonprogo Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha Tahun 2009–2013.....	123
Tabel 13 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kulonprogo Atas Dasar Harga Konstan 2000 menurut Lapangan Usaha Tahun 2009–2013	124
Tabel 14 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kulonprogo menurut Lapangan Usaha Tahun 2009–2013	125
Tabel 15 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bantul Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha Tahun 2009–2013.....	126
Tabel 16 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bantul Atas Dasar Harga Konstan 2000 menurut Lapangan Usaha Tahun 2009–2013	127
Tabel 17 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bantul menurut Lapangan Usaha Tahun 2009–2013	128
Tabel 18 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Gunungkidul Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha Tahun 2009–2013.....	129

		Halaman
Tabel 19	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Gunungkidul Atas Dasar Harga Konstan 2000 menurut Lapangan Usaha Tahun 2009–2013	130
Tabel 20	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gunungkidul menurut Lapangan Usaha Tahun 2009–2013	131
Tabel 21	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sleman Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha Tahun 2009–2013.....	132
Tabel 22	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sleman Atas Dasar Harga Konstan 2000 menurut Lapangan Usaha Tahun 2009–2013	133
Tabel 23	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sleman menurut Lapangan Usaha Tahun 2009–2013	134
Tabel 24	Produk Domestik Regional Bruto Kota Yogyakarta Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha Tahun 2009–2013	135
Tabel 25	Produk Domestik Regional Bruto Kota Yogyakarta Atas Dasar Harga Konstan 2000 menurut Lapangan Usaha Tahun 2009–2013	136
Tabel 26	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Yogyakarta menurut Lapangan Usaha Tahun 2009–2013.....	137
Tabel 27	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku menurut Penggunaan D.I.Yogyakarta Tahun 2009–2013.....	138
Tabel 28	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2000 menurut Penggunaan D.I.Yogyakarta Tahun 2009–2013.....	139
Tabel 29	Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku menurut Penggunaan D.I.Yogyakarta Tahun 2009–2013.....	140
Tabel 30	Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2000 menurut Penggunaan D.I.Yogyakarta Tahun 2009–2013	141
Tabel 31	Laju Pertumbuhan Ekonomi Atas Dasar Harga Berlaku menurut Penggunaan D.I. Yogyakarta Tahun 2009–2013	142
Tabel 32	Laju Pertumbuhan Ekonomi Atas Dasar Harga Konstan 2000 menurut Penggunaan D.I. Yogyakarta Tahun 2009–2013	143
Tabel 33	Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto menurut Penggunaan D.I. Yogyakarta Tahun 2009–2013	144
Tabel 34	Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto menurut Penggunaan D.I. Yogyakarta Tahun 2009–2013	145
Tabel 35	Indikator Kemiskinan D.I. Yogyakarta 2009-2013	146

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada hakekatnya pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan dan kesempatan kerja, pemeratakan distribusi pendapatan masyarakat, dan meningkatkan keterkaitan ekonomi antarsektor maupun antarwilayah/antarnegara. Oleh karenanya arah pembangunan ekonomi adalah untuk mengusahakan agar pendapatan masyarakat dan wilayah/negara meningkat yang diiringi dengan pemerataan distribusinya.

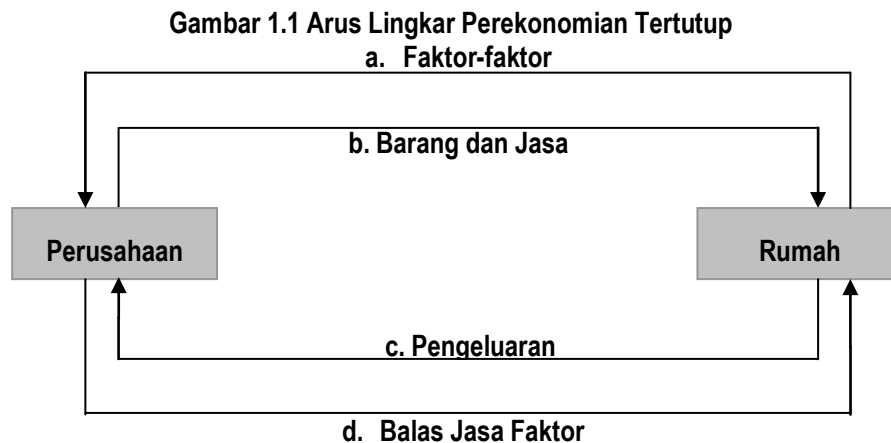
Perencanaan pembangunan ekonomi memerlukan ketersediaan berbagai macam data statistik sebagai dasar pijakan untuk menentukan strategi kebijakan, agar sasaran pembangunan dapat dicapai dengan tepat. Strategi dan kebijakan yang telah diambil pada masa lalu perlu dimonitor dan dievaluasi implikasi hasil-hasilnya. Untuk itu, berbagai data statistik yang bersifat kuantitatif yang disajikan dalam beberapa indikator makro sangat diperlukan untuk memberikan gambaran tentang kondisi suatu daerah dilihat dari perspektif masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang.

Demikian pula berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah DI Yogyakarta dalam mencapai visi dan misi pembangunan daerahnya perlu dievaluasi dengan menggunakan indikator-indikator yang dapat dihitung/diukur baik dalam aspek sosial maupun ekonomi. Hasil evaluasi tersebut akan digunakan sebagai dasar perencanaan pembangunan ekonomi pada tahap berikutnya, sehingga harapan untuk mengembangkan ketahanan sosial budaya dan sumber daya berkelanjutan dapat terwujud.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan salah satu indikator keberhasilan suatu proses pembangunan. Proses pembangunan ekonomi pada hakekatnya adalah upaya meningkatkan kapasitas perekonomian agar mampu menciptakan atau memperluas lapangan kerja yang pada akhirnya akan mendorong terwujudnya kesejahteraan bagi seluruh rakyat dan pemerataan distribusi pendapatan masyarakat. Oleh karena itu, strategi dan kebijakan ekonomi pembangunan haruslah difokuskan pada sektor riil dan sektor finansial termasuk pembangunan infrastruktur yang mampu meningkatkan akselerasi pertumbuhan ekonomi.

Dalam kehidupan sehari-hari, transaksi ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat secara sederhana dapat dibedakan menjadi dua kelompok besar yaitu kelompok produsen (perusahaan) dan kelompok konsumen (rumah tangga). Produsen menggunakan faktor produksi yang berasal dari konsumen dan digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa. Konsumen memiliki faktor produksi berupa tanah, tenaga, modal dan kewirausahaan yang diberikan pada perusahaan dan menerima balas jasanya berupa sewa tanah, upah/gaji,

bunga modal dan keuntungan. Balas jasa yang diterima ini disebut nilai tambah, yang selanjutnya digunakan oleh konsumen untuk membeli barang dan jasa dari produsen untuk dikonsumsi. Transaksi dari kedua kelompok ini, yang satu merupakan pemakai barang dan jasa, dan yang lain merupakan produsennya, berkesinambungan sehingga membentuk siklus perekonomian yang bisa membesar dan mengecil. Untuk melihat perputaran perekonomian yang sederhana antar kelompok perusahaan dan kelompok rumah tangga di dalam **sistem perekonomian tertutup** atau di dalam suatu daerah yang tidak melaksanakan transaksi ekonomi dengan daerah lain dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut :

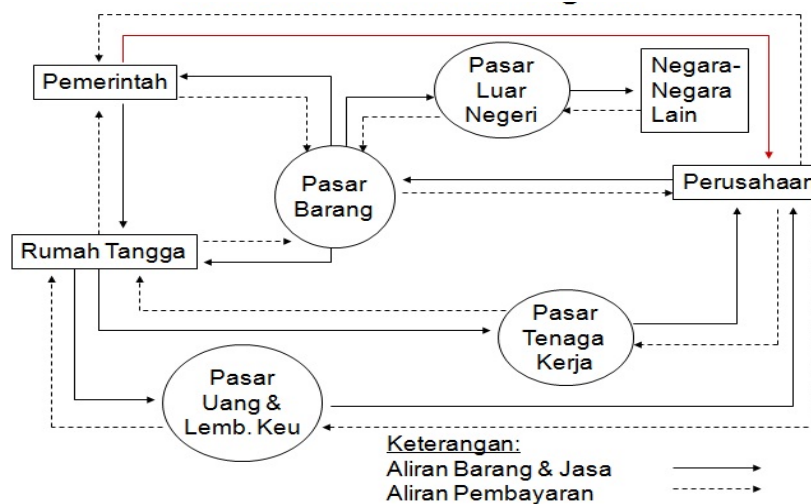


Keterangan :

- a. Menunjukkan arus penyediaan faktor-faktor produksi oleh rumah tangga.
- b. Menunjukkan arus barang dan jasa yang dibeli rumah tangga.
- c. Menunjukkan arus uang yang dikeluarkan rumah tangga untuk konsumsi.
- d. Menunjukkan arus uang yang dikeluarkan perusahaan sebagai balas jasa faktor produksi.

Dalam kenyataannya barang dan jasa yang digunakan baik untuk konsumsi maupun barang modal, tidak semuanya berasal dari dalam negeri tetapi bisa juga sebagian dari luar negeri (impor). Begitu pula sebaliknya, barang dan jasa yang dihasilkan di dalam negeri tidak semuanya digunakan di dalam negeri tetapi sebagian digunakan oleh luar negeri (ekspor). Seluruh aktivitas dan transaksi perdagangan tersebut akan tergambar dalam sistem perekonomian terbuka yang strukturnya sedikit lebih rumit dibandingkan dengan perekonomian sistem tertutup. Interaksi perdagangan antara pelaku ekonomi domestik dengan luar negeri akan menyebabkan terjadinya aliran devisa baik masuk maupun keluar wilayah. Dalam hal pendapatan regional, pengertian luar negeri termasuk juga mencakup luar daerah/wilayah. Siklus kegiatan ekonomi dalam sistem perekonomian terbuka tersebut ditampilkan dalam Gambar 1.2.

Gambar 1.2 Arus Lingkaran Perekonomian Terbuka



Dengan melihat siklus ekonomi di atas, dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Regional adalah sebagaimana diuraikan dalam pengertian Produk Domestik Regional Bruto berikut ini:

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator makro yang penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah pada suatu periode tertentu. PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah (*value added*) yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha atau jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit kegiatan ekonomi di suatu daerah pada suatu periode tertentu. Secara kuantitatif, PDRB merupakan nilai barang dan jasa yang dihitung atas dasar harga berlaku (*at current price*) dan atas dasar harga konstan (*at constant price*). PDRB atas dasar harga berlaku digunakan untuk melihat besaran kue ekonomi dan perubahan struktur ekonomi, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk melihat pertumbuhan ekonomi riil (perubahan volume produksi).

PDRB disebut juga sebagai suatu neraca regional di mana muatannya dapat dipisahkan sebagai PDRB sektoral pada sisi kiri dan PDRB menurut penggunaan pada sisi kanan. Manfaat PDRB antara lain digunakan sebagai dasar penghitungan laju pertumbuhan ekonomi, untuk melihat struktur ekonomi suatu wilayah, sebagai proksi pendapatan per kapita, dan sebagai indikator disparitas regional. Kemampuan pengelolaan unit ekonomi yang tinggi di suatu daerah/wilayah akan berdampak pada kemakmuran masyarakatnya, oleh karena itu angka PDRB juga digunakan sebagai alat pembanding tingkat kemakmuran antar daerah/ wilayah.

Dalam pengertian lain, data PDRB menggambarkan kemampuan suatu daerah/ wilayah dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya. Oleh karena itu, nilai PDRB yang dihasilkan oleh masing-masing daerah/wilayah sangat tergantung pada potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia dan teknologi (faktor produksi) di daerah/ wilayah tersebut. Kondisi terbatasnya sumber daya alam dan penyediaan faktor-faktor produksi

serta kemampuan dalam pengelolaannya tersebut menyebabkan besaran PDRB bervariasi antar daerah/wilayah.

Perspektif tinjauan secara spasial PDRB melalui analisis antarregion menurut kabupaten/kota akan memberikan gambaran perbedaan pola tentang hasil-hasil pembangunan ekonomi antar kabupaten/kota. Perbedaan tersebut antara lain disebabkan oleh perbedaan kepemilikan sumber daya alam, kondisi infrastruktur, dan faktor produksi yang tersedia beserta kemampuan manajemen pengelolaannya. Alhasil dari adanya perbedaan tersebut dapat menyebabkan kesenjangan ekonomi antar kabupaten/ kota.

Kebijakan ekonomi disusun antara lain mengutamakan landasan berbagai macam indikator makro seperti: PDRB, inflasi, investasi, ekspor–impor, dan lain–lain, sesuai dengan sifatnya yang ditujukan untuk memberikan “*warning*”. Penggunaan indikator makro ke dalam bentuk perencanaan program yang lebih spesifik memerlukan kajian empiris sehingga dapat diidentifikasi aspek pertumbuhan, keterbandingan antarwilayah, dan pemerataan pembangunan. Aspek pertumbuhan ekonomi terkait erat dengan masalah ketenagakerjaan dan kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi seyogyanya dapat menyerap angkatan kerja yang secara alamiah terus bertambah. Meningkatnya serapan tenaga kerja diharapkan berdampak terjadinya pengurangan tingkat pengangguran dan kemiskinan. Oleh karena itu, analisis PDRB dengan menggunakan data pada level provinsi dan kabupaten/kota ini disusun dalam rangka memfasilitasi kebutuhan para penentu kebijakan (*decision maker*) dalam merumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan bidang ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

1.2 Dasar Pelaksanaan

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pmbangunan Daerah;

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.02/2012 Tentang Standar Biaya Umum Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.02/2013;
9. Peraturan Kepala BPS Nomor 56 Tahun 2012 Tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Tahun 2013;
10. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
11. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, Lembaga Teknis Daerah, dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
12. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 tanggal 21 Desember 2012 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2013;
13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
15. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2012 Tentang Standar Harga Barang dan Jasa Daerah;
16. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 78 Tahun 2012 tanggal 21 Desember 2012 Tentang Penjabaran APBD Tahun 2013.
17. DPA BAPPEDA No. 29/DPA/2014 Tanggal 27 Desember 2013.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud dari pekerjaan Penyusunan Analisis PDRB DIY 2009-2013 adalah memperoleh data dan analisisnya yang dapat digunakan sebagai bahan perencanaan pembangunan ekonomi di DIY di tahun-tahun berikutnya.

1.3.2 Tujuan

Adapun tujuan Penyusunan Analisis PDRB DI Yogyakarta Tahun Anggaran 2014 adalah:

1. Menyediakan angka PDRB DIY dan Kabupaten/Kota 2009-2013 dan turunannya;
2. Menyediakan hasil analisis PDRB DIY dan Kabupaten/Kota Tahun 2009-2013 menurut Sektor dan Subsektor;
3. Menyediakan rekomendasi sebagai bahan kebijakan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi di DIY.

1.4 Sasaran

Data PDRB DIY Tahun 2009-2013 menurut lapangan usaha dan menurut penggunaan.

1.5 Manfaat

Manfaat hasil Penyusunan Analisis PDRB Provinsi DIY 2009–2013 adalah untuk menjadi dasar rekomendasi kebijakan perencanaan pembangunan dengan memperrtimbangkan perolehan nilai tambah dari semua kegiatan ekonomi di DIY yang dibutuhkan pada tahun 2014 dan sesudahnya.

1.6 Lokasi Kegiatan

Lokasi kegiatan pengumpulan data dan perhitungan serta analisis di seluruh wilayah Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.

1.7 Sumber Pendanaan

Sumber dana pelaksanaan pekerjaan Penyusunan Analisis PDRB Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2014 dibebankan pada Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Daerah DIY Tahun 2014.

1.8 Lingkup Pekerjaan

Lingkup kegiatan Penyusunan Analisis PDRB DIY Tahun Anggaran 2009-2013 meliputi:

1. Menyediakan angka PDRB DIY dan Kabupaten/Kota se DIY 2009-2013 menurut lapangan usaha dan penggunaan;
2. Menganalisis laju pertumbuhan ekonomi daerah menurut lapangan usaha dan penggunaan tahun 2009-2013;
3. Menganalisis gambaran dan dinamika struktur perekonomian daerah serta besarnya peranan masing-masing sektor dan subsektor Tahun 2009-2013;
4. Menganalisis tingkat pertumbuhan ekonomi dan struktur ekonomi kabupaten/kota di DIY tahun 2009-2013;
5. Menganalisis tingkat inflasi sektoral atas dasar harga produsen tahun 2009-2013;
6. Menganalisis pendapatan perkapita penduduk, disparitas pendapatan, dan disparitas regional tahun 2009-2013;
7. Menganalisis tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan penduduk di DIY, kota dan desa tahun 2009-2013.

BAB II

METODOLOGI

2.1 Konsep dan Definisi

2.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah/ wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit kegiatan ekonomi dalam suatu daerah/ wilayah pada suatu periode tertentu. Data PDRB dapat dihitung dengan tiga pendekatan, yaitu:

a. Pendekatan Produksi

Menurut pendekatan produksi, PDRB merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha/ ekonomi dalam suatu daerah/ wilayah pada suatu periode tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit ekonomi tersebut dalam analisis ini dikelompokkan menjadi 9 lapangan usaha/ sektor, yaitu: 1. *Pertanian*; 2. *Pertambangan dan Penggalian*; 3. *Industri Pengolahan*; 4. *Listrik, Gas, dan Air Bersih*; 5. *Konstruksi*; 6. *Perdagangan, Hotel, dan Restoran*; 7. *Pengangkutan dan Komunikasi*; 8. *Keuangan, Real Estat, dan Jasa Perusahaan*; 9. *Jasa-jasa*.

b. Pendekatan Pengeluaran

Menurut pendekatan pengeluaran, PDRB merupakan jumlah semua komponen permintaan akhir di suatu daerah/ wilayah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Komponen permintaan akhir meliputi: *pengeluaran konsumsi rumah tangga*, *pengeluaran konsumsi lembaga swasta nirlaba*, *pengeluaran konsumsi pemerintah*, *pembentukan modal tetap domestik bruto*, *perubahan inventori/ stok*, dan *ekspor neto*.

c. Pendekatan Pendapatan

Menurut pendekatan pendapatan, PDRB merupakan jumlah seluruh balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu daerah/ wilayah pada jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Komponen balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah: *upah dan gaji*, *sewa tanah*, *bunga modal*, dan *keuntungan*; semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDRB mencakup juga *penyusutan barang modal tetap* dan *pajak tak langsung neto (pajak tak langsung dikurangi subsidi)*. Jumlah semua komponen pendapatan ini per sektor disebut sebagai nilai tambah bruto sektoral. Oleh karena itu, PDRB merupakan jumlah dari nilai tambah bruto seluruh sektor (lapangan usaha).

Angka PDRB hasil perhitungan dari **ketiga pendekatan** tersebut **secara teoritis akan sama**. Selanjutnya, PDRB seperti yang diuraikan di atas disebut sebagai PDRB atas dasar **harga pasar** karena mencakup **penyusutan** dan **pajak tak langsung neto**.

2.1.2 Turunan Produk Domestik Regional Bruto

a. PDRB atas dasar Harga Pasar

PDRB atas dasar harga pasar adalah jumlah nilai tambah bruto (*gross value added*) yang dihasilkan oleh seluruh sektor ekonomi di suatu daerah/ wilayah, termasuk penyusutan dan pajak tak langsung neto.

b. Produk Domestik Regional Neto (PDRN) atas dasar Harga Pasar

PDRN atas dasar harga pasar merupakan PDRB atas dasar harga pasar dikurangi dengan penyusutan. Penyusutan yang dimaksud adalah nilai susutnya barang-barang modal tetap yang digunakan dalam proses produksi selama setahun.

c. PDRN atas dasar Biaya Faktor

PDRN atas dasar biaya faktor adalah PDRN atas dasar harga pasar dikurangi pajak tak langsung neto. Pajak tak langsung neto merupakan pajak tak langsung yang dipungut pemerintah dikurangi dengan subsidi pemerintah. Baik pajak tak langsung maupun subsidi, keduanya dikenakan terhadap barang dan jasa yang diproduksi atau dijual. Pajak tak langsung bersifat menaikkan harga jual, sedangkan subsidi sebaliknya. Selanjutnya, PDRN atas dasar biaya faktor disebut sebagai **Pendapatan Regional**.

d. PDRB per Kapita

PDRB per kapita adalah PDRB dibagi dengan **jumlah penduduk pada pertengahan tahun**. Terdapat dua ukuran PDRB per kapita, yaitu PDRB per kapita atas dasar harga berlaku (nominal) dan PDRB per kapita atas dasar harga konstan (riil).

2.1.3 Metode Penghitungan

2.1.3.1 Penghitungan PDRB atas dasar Harga Berlaku

Penghitungan PDRB atas dasar harga berlaku dilakukan dengan dua metode, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Pada metode langsung dikenal ada tiga macam pendekatan penghitungan yaitu pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran, dan pendekatan pendapatan. Sedangkan metode tidak langsung diperlukan dalam penghitungan PDRB jika data tidak tersedia (belum lengkap). Metode tidak langsung adalah metode penghitungan dengan cara alokasi menggunakan indikator produksi yang sesuai, seperti: jumlah produksi fisik, tenaga kerja, penduduk, dan alokator lainnya.

2.1.3.2 Penghitungan PDRB atas dasar Harga Konstan

Penghitungan PDRB atas dasar harga konstan bertujuan untuk melihat pertumbuhan PDRB secara riil. Dikenal empat cara untuk menghitung nilai tambah atas dasar harga konstan, yaitu revaluasi, ekstrapolasi, deflasi, dan deflasi berganda.

a. Revaluasi

Prinsip metode revaluasi adalah menilai barang dan jasa pada tahun berjalan dengan menggunakan harga pada tahun dasar. Dalam hal ini, tahun dasar yang dipakai adalah tahun 2000. Nilai tambah bruto atas dasar harga konstan diperoleh dari selisih antara output dan biaya antara masing-masing atas dasar harga konstan. Dalam praktek, sangat sulit melakukan revaluasi terhadap biaya antara yang digunakan dalam proses produksi, karena selain mencakup komponen input yang sangat banyak, data harga yang tersedia juga tidak dapat memenuhi semua keperluan tersebut. Oleh karena itu, biaya antara atas dasar harga konstan biasanya diperoleh dari perkalian antara output atas dasar harga konstan dengan rasio tertentu. Rasio tersebut diperoleh dari hasil bagi biaya antara dengan output pada tahun dasar.

b. Ekstrapolasi

Menurut metode ekstrapolasi, nilai tambah atas dasar harga konstan 2000 diperoleh dengan cara mengalikan nilai tambah pada tahun dasar 2000 dengan indeks produksi. Indeks produksi sebagai ekstrapolator dapat merupakan indeks dari masing-masing produksi yang dihasilkan ataupun indeks dari berbagai indikator produksi seperti tenaga kerja, jumlah perusahaan dan lainnya, yang dianggap cocok dengan jenis kegiatannya.

Ekstrapolasi dapat juga dilakukan terhadap output pada tahun dasar 2000. Dengan mengalikan output atas dasar harga konstan dengan rasio tetap nilai tambah terhadap output pada tahun dasar 2000, maka diperoleh perkiraan nilai tambah atas dasar harga konstan.

c. Deflasi

Menurut metode deflasi, nilai tambah atas dasar harga konstan 2000 diperoleh dengan cara membagi nilai tambah atas dasar harga berlaku pada tahun berjalan dengan indeks harga yang sesuai. Indeks harga yang dimaksud dapat juga dipakai sebagai inflator, dalam keadaan di mana nilai tambah atas dasar harga berlaku justru diperoleh dengan mengalikan nilai tambah atas dasar harga konstan dengan indeks harga tersebut.

d. Deflasi Berganda

Dalam metode deflasi berganda ini, yang dideflasi adalah output dan biaya antaranya, sedangkan nilai tambah atas dasar harga konstan diperoleh dari selisih antara output dengan biaya antara hasil deflasi tersebut. Indeks harga yang digunakan sebagai deflator untuk penghitungan output atas dasar harga konstan biasanya menggunakan indeks harga produsen atau indeks harga perdagangan besar (IHPB) sesuai dengan cakupan komoditasnya. Sedangkan deflator untuk biaya antara adalah indeks harga dari komponen input terbesar. Pada kenyataannya sangat sulit melakukan deflasi terhadap biaya antara, karena selain komponennya terlalu banyak, juga karena indeks harganya belum tersedia

secara baik. Oleh karena itu dalam penghitungan harga konstan, deflasi berganda ini belum banyak dipakai.

2.1.4 Penyajian

Data PDRB yang digunakan dalam buku Analisis PDRB Provinsi DIY ini terdiri dari PDRB menurut sektor/ lapangan usaha dan menurut penggunaan, yang disajikan atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan 2000. Nilai PDRB juga disajikan dalam bentuk angka indeks yaitu indeks perkembangan, indeks berantai, dan indeks harga implisit. **Indeks perkembangan** diperoleh dengan membagi nilai tambah pada tahun tertentu dengan nilai tambah pada tahun dasar 2000 dikalikan 100. Indeks ini menunjukkan tingkat perkembangan agregat pendapatan dari suatu tahun terhadap tahun dasarnya. Formulasi Indeks Perkembangan, sebagai berikut:

$$IP_t = \frac{PDRB_t - PDRB_0}{PDRB_0} \times 100\% \quad \dots\dots\dots(2.1)$$

Indeks berantai diperoleh dengan membagi nilai tambah pada tahun tertentu dengan nilai tambah pada tahun sebelumnya dikalikan 100. Apabila indeks berantai dikurangi dengan 100, maka diperoleh **angka laju pertumbuhan**.

$$IB_t = \frac{PDRB_t - PDRB_{t-1}}{PDRB_{t-1}} \times 100\% \quad \dots\dots\dots(2.2)$$

Indeks harga implisit diperoleh dengan membagi nilai tambah atas dasar harga berlaku dengan nilai tambah atas dasar harga konstan 2000 pada tahun yang sama dikalikan 100. Indeks ini menunjukkan tingkat perkembangan harga di level produsen. Selanjutnya, apabila dari indeks harga implisit ini dibuatkan indeks berantainya, akan terlihat tingkat perkembangan harga suatu tahun terhadap tahun sebelumnya (laju inflasi).

$$II_t = \frac{PDRB_{adhb}_t}{PDRB_{adhk}_t} \times 100\% \quad \dots\dots\dots(2.3)$$

$$IIB_t = \frac{II_t - II_{t-1}}{II_{t-1}} \times 100\% \quad \dots\dots\dots(2.4)$$

2.2 Penghitungan PDRB menurut Lapangan Usaha

Sebelum tahun 1960-an, kegiatan ekonomi dikelompokkan dalam tiga sektor, yaitu sektor primer, sektor sekunder dan sektor tersier. Dewasa ini pengelompokan kegiatan ekonomi sektoral dibagi dalam 9 (sembilan) sektor utama. Seringkali pengertian sektor juga dimaknai sebagai lapangan usaha atau industri.

Pengelompokan 9 lapangan usaha/sektor utama masih dirinci lagi menjadi subsektor. Sektor utama tersebut adalah: pertanian; pertambangan dan penggalan;

industri pengolahan; listrik, gas, dan air bersih; konstruksi; perdagangan, hotel, dan restoran; pengangkutan dan komunikasi; keuangan, real estat, dan jasa perusahaan; dan terakhir sektor jasa-jasa.

Jika dipadankan dengan pengelompokan kegiatan ekonomi sebelum tahun 1960-an, maka sektor pertanian dan sektor pertambangan dan penggalian yang sangat tergantung pada sumber daya alam termasuk ke dalam **Sektor Primer**. Sektor industri pengolahan; listrik, gas, dan air bersih; serta konstruksi di mana inputnya sebagian besar berasal dari sektor primer termasuk ke dalam **Sektor Sekunder**. Sedangkan sektor lainnya yang merupakan sektor penunjang dari kedua kelompok sektor tersebut diklasifikasikan sebagai **Sektor Tersier**.

2.2.1 Sektor Pertanian

2.2.1.1 Ruang Lingkup

Sektor pertanian mencakup segala pengusaha dan pemanfaatan benda-benda biologis (hidup) yang diperoleh dari alam dengan tujuan untuk konsumsi sendiri atau dijual. Sektor pertanian mencakup subsektor tanaman bahan makanan, tanaman perkebunan, peternakan dan hasil-hasilnya, kehutanan, dan perikanan. Subsektor tanaman bahan makanan meliputi segala kegiatan yang menghasilkan komoditi bahan makanan. Subsektor tanaman perkebunan meliputi segala kegiatan yang menghasilkan komoditi tanaman perkebunan baik yang diusahakan oleh rakyat maupun oleh perusahaan perkebunan. Subsektor peternakan dan hasil-hasilnya meliputi segala kegiatan pembibitan dan budidaya segala jenis ternak dan unggas dengan tujuan untuk dikembangbiakkan, dibesarkan, dipotong, dan diambil hasil-hasilnya, baik yang dilakukan oleh rakyat maupun oleh perusahaan peternakan. Subsektor kehutanan mencakup kegiatan penebangan segala jenis kayu serta pengambilan daun-daunan, getah-getahan dan akar-akaran, termasuk di sini kegiatan perburuan. Subsektor perikanan mencakup kegiatan penangkapan, pembenihan, budidaya segala jenis ikan dan biota ikan lainnya, baik yang berada di air tawar maupun air asin.

2.2.1.2 Metode Penghitungan

Nilai tambah sektor pertanian diperkirakan melalui pendekatan produksi. Pendekatan ini didasarkan pada pertimbangan tersedianya data produksi dan harga untuk masing-masing komoditi pertanian.

Secara umum, nilai output diperoleh dari hasil perkalian antara seluruh produksi yang dihasilkan dengan harga produsennya. Menurut sifatnya, output dibedakan atas output utama dan ikutan. Di samping itu, diperkirakan juga besarnya persentase pelengkap bagi komoditi lain yang belum dicakup. Total output suatu subsektor merupakan penjumlahan dari nilai output utama dan ikutan seluruh komoditi ditambah dengan nilai pelengkap.

2.2.1.3 Sumber Data

Sumber data produksi pertanian diperoleh dari Seksi Statistik Pertanian Bidang Produksi BPS Provinsi DIY serta dari Dinas Pertanian Pemda DIY. Data harga diperoleh dari hasil survei harga produsen yang tersedia di Bidang Distribusi BPS Provinsi DIY, sedangkan data tentang rasio biaya antara diperoleh dari hasil survei Struktur Ongkos Usaha Tani.

2.2.2 Sektor Pertambangan dan Penggalian

2.2.2.1 Ruang Lingkup

Kegiatan pertambangan dan penggalian adalah kegiatan yang mencakup penggalian, pemboran, penyaringan, pencucian, pemilihan dan pengambilan segala macam barang tambang, mineral dan barang galian yang tersedia di alam, baik berupa benda padat, cair maupun gas. Penambangan dan penggalian ini dapat dilakukan di bawah tanah maupun di atas permukaan bumi. Sifat dan tujuan kegiatan tersebut yaitu untuk menciptakan nilai guna dari barang tambang dan galian sehingga memungkinkan untuk dimanfaatkan, dijual, atau diproses lebih lanjut.

Seluruh jenis komoditi yang dicakup dalam sektor pertambangan dan penggalian dapat dikelompokkan ke dalam tiga subsektor, yaitu : pertambangan migas, pertambangan non migas dan penggalian.

Subsektor penggalian mencakup penggalian dan pengambilan segala jenis barang galian seperti batu-batuan, pasir, dan sebagainya yang pada umumnya berada di atas permukaan bumi.

2.2.2.2 Metode Penghitungan

Output dari kegiatan penggalian diperoleh berdasarkan hasil perkalian antara kuantum barang yang dihasilkan dengan harga per unit barang tersebut. Biaya antara diperoleh dengan mengalikan rasio biaya antara dengan output.

Penghitungan output dan nilai tambah bruto atas dasar harga konstan untuk subsektor penggalian menggunakan metode revaluasi.

2.2.2.3 Sumber Data

Data produksi diperoleh dari Dinas Pertambangan Pemda DIY. Rasio biaya antara dan nilai tambah bruto diperoleh dari hasil Survei Khusus Pendapatan Regional (SKPR).

2.2.3 Sektor Industri Pengolahan

2.2.3.1 Ruang Lingkup

Sektor industri pengolahan dibedakan menjadi dua subsektor yaitu, subsektor industri migas dan bukan migas. Subsektor industri migas terdiri dari pengilangan minyak bumi dan gas alam cair. Di wilayah DIY hanya terdapat industri bukan migas yang dalam

pengelolaannya dikelompokkan menjadi industri besar/ sedang, dan industri kecil/ kerajinan rumah tangga.

Acuan jenis kegiatan industri bukan migas berdasarkan dua digit kode Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia (KLUI) yang dimulai dengan angka tiga. Jenis kegiatan industri bukan migas dibagi ke dalam 9 (sembilan) kelompok/ golongan kegiatan utama, yaitu:

31. Industri Makanan, Minuman, dan Tembakau
32. Industri Tekstil, Barang Kulit dan Alas Kaki
33. Industri Kayu, dan Barang dari Kayu Lainnya
34. Industri Kertas dan Barang Cetak
35. Industri Pupuk, Kimia dan Barang dari Karet
36. Industri Semen dan Barang Galian Bukan Logam
37. Industri Logam Dasar Besi dan Baja
38. Industri Alat Angkutan, Mesin dan Peralatannya
39. Industri Pengolahan Lainnya

Untuk golongan industri logam dasar besi dan baja (kode 37) tidak terdapat di wilayah DIY.

2.2.3.2 Metode Penghitungan

Metode penghitungan output atas dasar harga berlaku menggunakan pendekatan produksi, di mana jumlah tenaga kerja dipakai sebagai indikatornya. Untuk penghitungan atas dasar harga konstan digunakan metode ekstrapolasi, dengan ekstrapolator adalah indeks produksi hasil survei tahunan Industri Besar Sedang (IBS) dan survei IKKR (Industri Kecil dan Kerajinan Rumah tangga). Output atas dasar harga konstan diperoleh dari perkalian antara pertumbuhan jumlah tenaga kerja dengan output per tenaga kerja pada tahun dasar (2000).

2.2.3.3 Sumber Data

Data jumlah tenaga kerja diperoleh dari publikasi tahunan Statistik Industri Besar Sedang BPS Provinsi DIY. Data output per tenaga kerja diperoleh dari Tabel Input-Output (I-O) Provinsi DIY tahun 2010.

2.2.4 Sektor Listrik, Gas, dan Air Bersih

2.2.4.1 Ruang Lingkup

Sektor ini terdiri dari 3 subsektor, yaitu subsektor listrik, gas kota, dan air bersih. Khusus subsektor gas kota tidak terdapat di wilayah DIY.

Subsektor listrik mencakup pembangkitan dan penyaluran tenaga listrik, baik yang diselenggarakan oleh Perusahaan Umum Listrik Negara (PLN) maupun perusahaan Non-PLN seperti pembangkitan listrik oleh Perusahaan Pemerintah Daerah, dan listrik yang diusahakan oleh swasta (perorangan maupun perusahaan), dengan tujuan untuk dijual.

Listrik yang dibangkitkan atau yang diproduksi meliputi listrik yang dijual, dipakai sendiri, hilang dari transmisi, dan listrik yang dicuri.

Subsektor air bersih mencakup proses pembersihan, pemurnian dan proses kimiawi lainnya untuk menghasilkan air minum, serta pendistribusian dan penyalurannya secara langsung melalui pipa dan alat lain ke rumah tangga, instansi pemerintah maupun swasta.

2.2.4.2 Metode Penghitungan

Metode penghitungan output atas dasar harga berlaku menggunakan pendekatan produksi dengan jumlah kwh yang dijual sebagai indikator produksi pada subsektor listrik dikalikan dengan harga jual. Sedangkan untuk subsektor air bersih yaitu dengan mengalikan antara jumlah produksi dengan harga tiap tahunnya.

Untuk penghitungan output atas dasar harga konstan diperoleh melalui pendekatan revaluasi, yaitu perkalian antara produksi tiap tahun dengan harga tahun dasar (tahun 2000).

2.2.4.3 Sumber Data

Data produksi, harga, dan biaya antara diperoleh dari PLN Wilayah VI Yogyakarta untuk subsektor listrik, dan dari PDAM Kabupaten/ Kota se DIY untuk subsektor air bersih. Data tersebut didapat dari hasil kompilasi data sekunder.

2.2.5 Sektor Konstruksi

2.2.5.1 Ruang Lingkup

Sektor konstruksi mencakup kegiatan yang hasil akhirnya berupa bangunan/ konstruksi yang menyatu dengan lahan tempat kedudukannya, baik digunakan sebagai tempat tinggal atau sarana lainnya. Pada umumnya kegiatan sektor konstruksi terdiri dari berbagai kegiatan meliputi: pembuatan, pembangunan, pemasangan, dan perbaikan semua jenis bangunan.

2.2.5.2 Metode Penghitungan

Nilai tambah bruto dihitung dengan menggunakan rasio total nilai tambah bruto terhadap total output. Output atas dasar harga konstan dihitung dengan metode deflasi, dan Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) bangunan sebagai deflator.

2.2.5.3 Sumber Data

Data output, rasio upah/ gaji, surplus usaha, pajak tak langsung neto, dan penyusutan diperkirakan dari hasil Survei Konstruksi Tahunan BPS Provinsi DIY.

2.2.6 Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran

2.2.6.1 Ruang Lingkup

Sektor perdagangan, hotel dan restoran terdiri dari tiga subsektor, yaitu perdagangan, hotel, dan restoran. Subsektor perdagangan meliputi kegiatan membeli dan menjual barang untuk suatu tujuan penyaluran/ pendistribusian tanpa merubah sifat barang.

Dalam penghitungannya, subsektor perdagangan dikelompokkan dalam dua jenis kegiatan yaitu perdagangan besar dan perdagangan eceran. Perdagangan besar mencakup kegiatan pengumpulan dan penjualan kembali oleh pedagang dari produser atau importir ke pedagang besar lainnya, pedagang eceran, perusahaan, dan lembaga yang tidak mencari untung. Sedangkan pedagang eceran mencakup kegiatan pedagang yang pada umumnya melayani konsumen perorangan atau rumah tangga.

Subsektor hotel mencakup kegiatan penyediaan akomodasi yang menggunakan sebagian atau seluruh bangunan sebagai tempat penginapan. Yang dimaksud akomodasi di sini adalah hotel berbintang maupun tidak berbintang, serta tempat lainnya yang digunakan untuk menginap seperti: losmen, motel, dan sejenisnya.

Subsektor restoran mencakup usaha penyediaan makanan dan minuman jadi yang pada umumnya dikonsumsi di tempat penjualan.

2.2.6.2 Metode Penghitungan

Metode yang digunakan untuk menghitung nilai tambah pada subsektor perdagangan adalah metode arus barang. Dengan cara ini, output dihitung berdasarkan besarnya margin perdagangan yang timbul akibat perdagangan barang-barang dari sektor pertanian, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, serta barang-barang impor.

Output atas dasar harga berlaku dari subsektor hotel diperoleh dengan pendekatan produksi yaitu dengan mengalikan jumlah tenaga kerja dengan rata-rata output per tenaga kerja. Sedangkan output atas dasar harga konstan dihitung dengan menggunakan metode deflasi, dan Indeks Harga Konsumen (IHK) Umum sebagai deflator.

Output atas dasar harga berlaku pada subsektor restoran diperoleh dengan mengalikan banyaknya tenaga kerja dengan rata-rata output per tenaga kerja. Sedangkan nilai tambah bruto dihitung melalui perkalian rasio nilai tambah bruto dengan outputnya. Output dan nilai tambah bruto atas dasar harga konstan diperoleh dengan metode deflasi dan IHK kelompok makanan sebagai deflator.

2.2.6.3 Sumber Data

Rasio margin perdagangan diperoleh dari Tabel I-O Provinsi DIY tahun 2010, sedangkan rasio nilai tambah yang digunakan berasal dari survei khusus tahun 2010. Data indikator produksi dan IHK diperoleh dari Bidang Statistik Distribusi BPS Provinsi DIY.

2.2.7 Sektor Pengangkutan dan Komunikasi

2.2.7.1 Ruang Lingkup

Sektor ini mencakup dua subsektor, yaitu subsektor pengangkutan dan komunikasi. Cakupan kegiatan subsektor pengangkutan terdiri dari jasa angkutan rel, angkutan jalan raya, angkutan laut, angkutan sungai, danau dan penyeberangan, angkutan udara, serta jasa penunjang angkutan. Khusus kegiatan angkutan laut, angkutan sungai, danau dan penyeberangan tidak terdapat di Provinsi DIY. Kegiatan pengangkutan meliputi pemindahan penumpang dan barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan alat angkut atau kendaraan, baik bermotor maupun tidak bermotor. Sedangkan jasa penunjang angkutan mencakup kegiatan yang sifatnya menunjang kegiatan pengangkutan seperti terminal, parkir, dan pergudangan.

Subsektor komunikasi terdiri dari kegiatan pos/ giro dan telekomunikasi, serta jasa penunjang komunikasi. Pos/ giro mencakup kegiatan pemberian jasa kepada pihak lain dalam hal pengiriman surat, wesel, dan paket pos yang diusahakan oleh PT Pos Indonesia. Telekomunikasi meliputi kegiatan pemberian jasa kepada pihak lain dalam hal pengiriman berita melalui telegram, telepon, dan telex yang diusahakan oleh PT Telkom dan PT Indosat. Jasa penunjang komunikasi meliputi kegiatan seperti wartel (warung telekomunikasi), warnet (warung internet), dan telepon seluler (ponsel).

2.2.7.2 Metode Penghitungan

Output atas dasar harga berlaku untuk jasa angkutan rel diperoleh dengan pendekatan produksi, di mana output merupakan penjumlahan hasil penjualan karcis dan pendapatan lain yang berkaitan dengan angkutan kereta api. Output atas dasar harga konstan diperoleh dengan metode ekstrapolasi, dan jumlah penumpang dan barang sebagai ekstrapolator.

Pada angkutan jalan raya, output atas dasar harga berlaku diperoleh dengan pendekatan produksi. Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan pendekatan ekstrapolasi, dan jumlah kendaraan sebagai ekstrapolator.

Untuk angkutan udara, output atas dasar harga berlaku diperoleh dengan pendekatan produksi, sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan pendekatan ekstrapolasi, dan jumlah penumpang dan barang sebagai ekstrapolator.

Untuk subsektor komunikasi, output atas dasar harga berlaku diperoleh dengan pendekatan produksi. Sedangkan output dan nilai tambah bruto atas dasar harga konstan diperoleh dengan metode ekstrapolasi.

2.2.7.3 Sumber Data

Data mengenai indikator produksi, output dan nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku untuk jasa angkutan rel diperoleh dari laporan keuangan PT Kereta Api Indonesia

(PT KAI). Indikator produksi untuk angkutan jalan raya bersumber dari Kanwil Departemen Perhubungan. Rasio nilai tambah didapat dari Tabel I-O Provinsi DIY tahun 2010.

Data indikator produksi angkutan udara diperoleh dari laporan P.T. Angkasa Pura I. Indikator harga dan rasio nilai tambah bruto diperoleh dari survei khusus terhadap perusahaan penerbangan.

Pada subsektor komunikasi, data indikator produksi dan harga diperoleh dari P.T Pos Indonesia, P.T Telkom dan lembaga/ instansi terkait, sedangkan rasio nilai tambah diperoleh dari SKPR.

2.2.8 Sektor Keuangan, Real Estat, dan Jasa Perusahaan

2.2.8.1 Ruang Lingkup

Sektor ini dikelompokkan dalam 5 (lima) subsektor, yaitu bank, lembaga keuangan bukan bank, jasa penunjang keuangan, real estat, dan jasa perusahaan.

a. Subsektor Bank

Kegiatan yang dicakup dalam subsektor bank adalah kegiatan yang memberikan jasa keuangan pada pihak lain seperti: menerima simpanan terutama dalam bentuk giro dan deposito, memberikan kredit/ simpanan, baik kredit jangka pendek/ menengah dan panjang, mengirim uang, membeli dan menjual surat-surat berharga, dan sebagainya.

Dilihat dari segi fungsinya, perusahaan bank dapat merupakan Bank Sentral, Bank Umum, Bank Devisa, Bank Pembangunan, Bank Tabungan, dan Bank Desa. Sedangkan jika ditinjau dari segi kepemilikannya, dapat dikelompokkan dalam Bank Pemerintah, Bank Swasta Nasional dan Bank Asing. Jika ditinjau dari segi penciptaan uang giral dan uang kartal dikenal dua jenis bank, yaitu Bank Primer dan Bank Sekunder.

b. Subsektor Lembaga Keuangan Bukan Bank

Subsektor ini meliputi asuransi, lembaga dana pensiun, pegadaian dan lembaga pembiayaan.

c. Subsektor Jasa Penunjang Keuangan

Subsektor ini mencakup kegiatan pedagang valuta asing, pasar modal, dan jasa penunjang lainnya.

d. Subsektor Real Estat

Subsektor ini mencakup usaha persewaan bangunan dan tanah, baik bangunan tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal seperti: perkantoran, pertokoan, serta usaha persewaan tanah persil.

e. Subsektor Jasa Perusahaan

Subsektor ini mencakup kegiatan pemberian jasa hukum (advokat dan notaris), jasa akuntansi dan pembukuan, jasa pengolahan dan penyajian data, jasa bangunan/ arsitek dan teknik, jasa periklanan dan riset pemasaran, jasa persewaan mesin dan peralatan. Semua jasa ini biasanya diberikan berdasarkan sejumlah bayaran atau kontrak.

- 1) Jasa hukum (advokat/ pengacara, notaris). Advokat/ pengacara adalah ahli hukum yang berwenang bertindak sebagai penasihat atau pembela perkara dalam pengadilan, baik perkara pidana maupun perdata. Sedangkan notaris adalah orang yang ditunjuk dan diberi kuasa (oleh Departemen Kehakiman) untuk mensahkan dan menyaksikan pembuatan surat perjanjian, akte, dan sebagainya.
- 2) Jasa akuntansi dan pembukuan. Jasa akuntansi dan pembukuan adalah usaha jasa pengurusan tata buku dan pemeriksaan pembukuan termasuk juga jasa pengolahan data dan tabulasi yang merupakan bagian dari jasa akuntansi dan pembukuan.
- 3) Jasa pengolahan dan penyajian data. Jasa pengolahan dan penyajian data adalah usaha jasa pengolahan dan penyajian data yang sifatnya umum, baik secara elektronik maupun manual atas dasar balas jasa atau kontrak, termasuk di dalamnya adalah jasa komputer programming dan sebagainya yang ada hubungannya dengan kegiatan komputer.
- 4) Jasa bangunan, arsitek dan teknik. Jasa bangunan, arsitek dan teknik adalah usaha jasa konsultasi bangunan arsitek/perancang bangunan, jasa survei geologi, penyelidikan tambang/pencarian bijih logam untuk pertambangan dan jasa penyelidikan sejenisnya.
- 5) Jasa periklanan dan riset pemasaran. Jasa periklanan dan riset adalah suatu kegiatan usaha yang memberikan pelayanan kepada pihak lain (perusahaan/perorangan) dalam bentuk pembuatan dan pemasangan iklan, yang bertujuan untuk menyampaikan informasi, membujuk dan mengingatkan kepada konsumen tentang produk dari suatu perusahaan/usaha yang dalam penyampaianya dapat melalui berbagai media massa seperti: audio visual (TV, bioskop), radio, halaman surat kabar/majalah, poster dan sebagainya.
- 6) Jasa persewaan mesin dan peralatan. Jasa persewaan mesin dan peralatan adalah usaha persewaan mesin dan peralatan untuk keperluan pertanian, pertambangan, dan ladang minyak, industri pengolahan, konstruksi, penjualan dan mesin-mesin keperluan kantor.

2.2.8.2 Metode Penghitungan

Untuk subsektor bank, pendekatan yang digunakan dalam penghitungan nilai tambah bruto (NTB) atas dasar harga berlaku adalah pendekatan pendapatan. Output dari hasil usaha perbankan adalah penerimaan atas jasa pelayanan bank yang diberikan kepada pemakainya.

Dalam output bank, dimasukkan pula imputasi jasa bank yang besarnya sama dengan selisih antara bunga yang diterima dengan bunga yang dibayarkan. Dengan demikian, **output bank** mencakup jasa yang dalam penghitungan Bank Indonesia terdiri dari **imputasi jasa, penerimaan netto dari transaksi devisa, provisi dan komisi, pendapatan operasional lainnya**. Sedangkan untuk nilai tambah bruto atas dasar harga konstan menggunakan metode deflasi dan sebagai deflator adalah IHK Umum.

Pada prinsipnya output dari asuransi adalah selisih antara premi yang diterima dan klaim yang dibayarkan. Untuk asuransi yang mengasuransikan kembali premi yang diterima ke perusahaan reasuransi, penghitungan outputnya menggunakan persamaan berikut:

$$\text{Output asuransi} = \text{premi netto} - \text{klaim netto} + \text{pendapatan lain} \dots\dots (2.5)$$

$$\text{Premi netto} = \text{premi} - \text{premi reasuransi}$$

$$\text{Klaim netto} = \text{klaim} - \text{klaim reasuransi}$$

Output dan nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku dari kegiatan dana pensiun diperoleh dengan metode produksi. Sedangkan output dan nilai tambah bruto atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode ekstrapolasi dan jumlah pensiunan sebagai ekstrapolator.

Output dan nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku dari kegiatan pegadaian diperoleh dengan pendekatan produksi. Output dan nilai tambah bruto atas dasar harga konstan diperoleh dengan pendekatan ekstrapolasi, dan jumlah nasabah sebagai ekstrapolator.

Output persewaan bangunan tempat tinggal dihitung dengan pendekatan produksi. Sebagai indikator produksi adalah jumlah rumahtangga yang dikelompokkan menjadi: penyewa rumah, pengontrak rumah, penyewa beli, penghuni rumah dinas, dan penghuni rumah milik sendiri. Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode deflasi dan IHK kelompok perumahan sebagai deflatornya. Output persewaan bangunan bukan tempat tinggal diperoleh dari perkalian antara luas bangunan yang disewakan dengan rata-rata tarif sewa per meter persegi. Output atas dasar harga konstan diperoleh dengan metode ekstrapolasi, dan luas bangunan disewakan sebagai ekstrapolator.

Output atas dasar harga berlaku untuk jasa perusahaan dihitung dengan pendekatan produksi. Sedangkan output atas dasar harga konstan dihitung dengan metode ekstrapolasi, dan jumlah tenaga kerja sebagai ekstrapolator.

2.2.8.3 Sumber Data

Pada subsektor bank, output maupun struktur inputnya diperoleh langsung dari Bank Indonesia Yogyakarta. Untuk asuransi, rasio biaya antara diperoleh dari hasil survei data sekunder, begitu juga untuk kegiatan dana pensiun. Untuk pegadaian, indikator

produksi dan rasio nilai tambah didapat dari laporan keuangan Perum Pegadaian. Subsektor jasa penunjang keuangan datanya diperoleh dari hasil survei data sekunder.

Data usaha persewaan bangunan tempat tinggal diperoleh berdasarkan hasil SUSENAS (Survei Sosial Ekonomi Nasional) dan hasil Sensus Penduduk (SP). Sedangkan data produksi usaha persewaan bukan tempat tinggal diperoleh dari hasil penelitian dan SKPR.

Pada subsektor jasa perusahaan, rasio biaya antara diperoleh dari hasil SKPR, sedangkan data jumlah perusahaan diperoleh dari hasil Sensus Ekonomi (SE).

2.2.9 Sektor Jasa-jasa

2.2.9.1 Subsektor Jasa Pemerintahan Umum

2.2.9.1.1 Ruang Lingkup

Subsektor ini dipecah menjadi, jasa administrasi pemerintahan dan pertahanan, dan jasa pemerintahan lainnya.

Subsektor jasa pemerintahan umum mencakup kegiatan semua departemen dan non departemen, badan/ lembaga tinggi negara, kantor-kantor dan instansi yang berhubungan dengan jasa administrasi pemerintahan dan pertahanan.

2.2.9.1.2 Metode Penghitungan

Estimasi nilai tambah bruto didasarkan pada pengeluaran pemerintah untuk belanja pegawai dan perkiraan penyusutan. Perkiraan nilai tambah bruto atas dasar harga konstan dihitung dengan cara ekstrapolasi terhadap nilai tambah dengan menggunakan indeks jumlah pegawai sebagai ekstrapolator.

2.2.9.1.3 Sumber Data

Data yang dipakai untuk penghitungan subsektor jasa pemerintahan umum adalah:

1. Realisasi APBN, Dirjen Anggaran Departemen Keuangan.
2. Realisasi Anggaran Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan, data kepegawaian, data gaji dan tunjangan pegawai.
3. Data jumlah pegawai daerah dari Badan Kepegawaian Daerah.
4. Statistik Keuangan Pemerintah Daerah (K1, K2, K3), BPS.
5. Realisasi APBD, DPPKA Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.

2.2.9.2 Subsektor Jasa Swasta

2.2.9.2.1 Ruang Lingkup

Subsektor ini dipecah menjadi jasa sosial dan kemasyarakatan, jasa hiburan dan rekreasi, serta jasa perorangan dan rumah tangga.

Jasa Sosial Kemasyarakatan meliputi kegiatan jasa pendidikan, kesehatan, riset/ penelitian, palang merah, panti asuhan, panti wreda, Yayasan Pemeliharaan Anak Cacat (YPAC), rumah ibadat, dan sejenisnya yang dikelola swasta.

Jasa Perorangan dan Rumahtangga, meliputi segala jenis kegiatan jasa yang melayani perorangan/rumahtangga, terdiri dari :

1. Jasa perbengkelan/ reparasi kendaraan bermotor, mencakup perbaikan kecil-kecilan dari kendaraan roda empat, roda tiga, dan roda dua.
2. Jasa perbengkelan/ reparasi lainnya seperti perbaikan atau reparasi: jam, televisi, radio, lemari es, mesin jahit, sepeda dan barang-barang rumahtangga lainnya.
3. Jasa pembantu rumahtangga mencakup koki, tukang kebun, penjaga malam, pengasuh bayi/ anak, dan sejenisnya.
4. Jasa perorangan lainnya mencakup tukang binatu, tukang cukur, tukang jahit, tukang semir sepatu, dan sebagainya.

2.2.9.2.2 Metode Penghitungan

Output atas dasar harga berlaku untuk subsektor jasa swasta, selain jasa perorangan dan rumahtangga, diperoleh dengan menggunakan metode produksi. Sedangkan output dan nilai tambah bruto atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode ekstrapolasi, dan indeks produksi sebagai ekstrapolator.

2.2.9.2.3 Sumber Data

Data indikator produksi untuk jasa sosial/kemasyarakatan diperoleh dari Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial. Indikator produksi untuk jasa hiburan dan kebudayaan diperoleh dari Dinas Pariwisata Pemda DIY. Data indikator produksi dan rasio biaya antara untuk jasa perorangan/rumahtangga diperoleh dari hasil SKPR.

2.3 Penghitungan PDRB menurut Penggunaan

PDRB menurut penggunaan terdiri dari komponen-komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga, konsumsi lembaga swasta tidak mencari untung (nirlaba), konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto, perubahan inventori/ stok, ekspor dan impor barang dan jasa.

2.3.1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga

Pengeluaran konsumsi rumah tangga mencakup seluruh pengeluaran barang dan jasa dikurangi penjualan neto barang bekas dan sisa yang dilakukan oleh rumah tangga selama satu tahun. Sumber data utama perkiraan nilai konsumsi rumah tangga adalah hasil pengolahan SUSENAS BPS Provinsi DIY. Sedangkan untuk harga setiap jenis bahan yang dikonsumsi (harga konsumen) diperoleh dari hasil pengolahan Survei Biaya Hidup (SBH) BPS Provinsi DIY.

Dari hasil SUSENAS, diperoleh rata-rata konsumsi per kapita per minggu untuk bahan makanan dan rata-rata nilai konsumsi per kapita per bulan untuk non makanan. Untuk memperoleh nilai konsumsi bahan makanan sebulan dengan cara konsumsi per kapita per minggu dikalikan tiga puluh dibagi tujuh. Nilai konsumsi bahan makanan dan bukan makanan setahun diperoleh dengan cara nilai konsumsi per kapita per bulan dikali dua belas dikalikan jumlah penduduk pertengahan tahun (angka proyeksi). Perkiraan nilai konsumsi rumah tangga untuk tahun yang tidak tersedia data SUSENAS dengan menggunakan koefisien elastisitas permintaan terhadap pendapatan (*income elasticity of demand*) untuk kelompok konsumsi makanan dan untuk kelompok pengeluaran non makanan.

Untuk kelompok makanan, nilai konsumsi atas dasar harga berlaku diperoleh dengan cara mengalikan nilai konsumsi dalam satuan kuantum dengan harga konsumen atau harga eceran. Sedangkan nilai konsumsi atas dasar harga konstan diperoleh dengan metode revaluasi, artinya konsumsi dalam satuan kuantum dikalikan dengan harga tahun dasar PDRB. Nilai konsumsi rumah tangga untuk bukan makanan atas dasar harga konstan tahun 2009-2013 diperoleh dengan cara deflasi, yaitu membagi konsumsi harga berlaku dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) yang sesuai. Pengeluaran konsumsi rumah tangga ini telah dilengkapi dengan perkiraan besarnya konsumsi makanan/minuman di luar rumah.

2.3.2 Pengeluaran Konsumsi Lembaga Swasta yang Tidak Mencari Untung (Nirlaba)

Lembaga swasta yang tidak mencari untung adalah lembaga swasta yang dalam operasinya tidak bertujuan mencari keuntungan. Lembaga swasta yang tidak mencari untung terdiri dari lembaga/badan swasta yang memberikan pelayanan atas jasa kepada masyarakat, seperti: organisasi serikat buruh, persatuan para ahli/persatuan profesi, organisasi politik, badan-badan keagamaan, lembaga penelitian, dan organisasi-organisasi kesejahteraan masyarakat yang tujuan dari kegiatan tersebut tidak mencari untung.

Perkiraan besarnya nilai konsumsi lembaga swasta yang tidak mencari untung diperoleh dari hasil penghitungan Survei Khusus Lembaga Non-Profit (SKLNP). Sektor jasa ini meliputi jasa lembaga non-profit yang melayani rumah tangga dikategorikan sebagai lembaga swasta yang tidak mencari untung, seperti kegiatan panti asuhan dan tempat ibadah.

Dari hasil penghitungan Nilai Produksi Bruto menurut lapangan usaha, diperoleh perkiraan nilai konsumsi lembaga swasta yang tidak mencari untung, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2000.

2.3.3 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah

Pengeluaran konsumsi pemerintah mencakup pengeluaran untuk belanja pegawai, penyusutan barang modal, dan belanja barang (termasuk belanja perjalanan, pemeliharaan, dan pengeluaran lain yang bersifat rutin) dikurangi penerimaan dari produksi barang dan

jasa yang dihasilkan. Pengeluaran konsumsi pemerintah tersebut meliputi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Data mengenai belanja pegawai, belanja barang dan belanja rutin lainnya serta perkiraan belanja pembangunan yang merupakan belanja rutin diperoleh dari realisasi pengeluaran pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pengeluaran pemerintah pusat diperoleh dari Kantor Perbendaharaan Negara (KPN), sedangkan untuk pengeluaran pemerintah daerah dalam hal ini daerah otonom tingkat provinsi, kabupaten/kota dan tingkat desa diperoleh dari daftar K1, K2 dan K3 dari BPS. Apabila diteliti lebih jauh maka pengeluaran pemerintah terdiri dari dua kelompok, yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Pengeluaran rutin terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, subsidi dan pengeluaran lainnya. Dari kelompok pengeluaran rutin yang dihitung sebagai pengeluaran konsumsi pemerintah adalah belanja pegawai, belanja barang dan pengeluaran rutin lainnya. Subsidi tidak dimasukkan, karena pengeluarannya merupakan transfer.

Kelompok pengeluaran pembangunan yang tujuan utamanya untuk peningkatan sarana dan prasarana fisik di segala bidang merupakan investasi pemerintah. Tetapi pembiayaan yang bersifat rutin, seperti pengeluaran untuk riset dan pengembangan ilmu pengetahuan, dimasukkan sebagai konsumsi pemerintah.

2.3.4 Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTDB)

Pembentukan modal tetap domestik bruto didefinisikan sebagai pengadaan, pembuatan, dan pembelian barang-barang modal baru yang berasal dari dalam negeri (domestik) dan barang modal baru ataupun barang bekas dari luar negeri termasuk luar wilayah/daerah. Barang modal adalah peralatan yang digunakan untuk memproduksi dan biasanya mempunyai umur pemakaian satu tahun atau lebih.

Adapun PMTDB dapat dibedakan atas:

- a. Pembentukan modal dalam bentuk bangunan/konstruksi.
- b. Pembentukan modal dalam bentuk mesin-mesin dan alat-alat perlengkapan.
- c. Pembentukan modal dalam bentuk alat angkutan/kendaraan.
- d. Pembentukan modal untuk barang modal lainnya.

Ditinjau dari sudut kepemilikan, PMTDB dapat dihitung berdasarkan pengeluaran untuk pembelian barang modal oleh masing-masing pelaku usaha (9 sektor). Sementara kalau ditinjau dari jenis barang modal itu sendiri, maka pembentukan modal dapat dihitung berdasarkan arus barang (*commodity flows*).

Perkiraan nilai PMTDB atas dasar harga berlaku diperoleh dengan cara menghitung nilai barang-barang modal yang masuk ke region dan barang modal yang masuk antar region atau antar pulau, ditambahkan dengan persentase tertentu terhadap nilai produksi bruto sektor konstruksi/ bangunan.

Sedangkan perkiraan nilai PMTDB atas dasar harga konstan tahun 2000 diperoleh dengan cara mendeflate/ membagi nilai pembentukan modal tetap bruto (nilai barang impor) atas dasar harga berlaku dengan IHPB barang impor, dan dengan IHPB sektor industri untuk barang modal antar pulau.

Data mengenai investasi diperoleh dari BI Yogyakarta dan Badan Kerjasama Penanaman Modal (BKPM) Pemda DIY.

2.3.5 Perubahan Inventori

Pengertian inventori adalah persediaan barang-barang pada akhir tahun baik berasal dari pembelian yang akan dipakai sebagai input pada suatu kegiatan ekonomi atau untuk dijual lagi, maupun barang yang dihasilkan oleh unit-unit produksi yang belum dijual, baik barang yang sudah jadi maupun yang sedang dalam proses.

Perubahan inventori/stok pada suatu tahun diperoleh dari seluruh nilai inventori/stok pada akhir tahun dikurangi dengan seluruh nilai inventori/stok pada akhir tahun sebelumnya (pada awal tahun yang bersangkutan).

Perubahan inventori penghitungannya ditaksir sebagai **residual** karena tidak tersedianya data yang diperlukan untuk membuat perkiraan perubahan inventori. Dengan demikian, inventori merupakan **sis**a (termasuk **diskrepansi statistik**), yaitu PDRB yang telah dihitung menurut lapangan usaha dikurangi konsumsi rumah tangga, konsumsi lembaga swasta yang tidak mencari untung, konsumsi pemerintah, PMTDB dan ekspor neto (ekspor - impor) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan.

2.3.6 Ekspor dan Impor

Ekspor dan Impor merupakan kegiatan transaksi barang dan jasa antara penduduk suatu region dengan penduduk region lain atau dengan luar negeri. Kegiatan ekspor dan impor dirinci sebagai berikut:

- a. Ekspor dan impor dengan negara lain.
- b. Ekspor dan impor antar region/provinsi.

Data yang tersedia mengenai kegiatan ekspor dan impor di tingkat region masih sangat terbatas. Kegiatan ekspor dan impor ditingkat region ini meliputi: kegiatan transaksi yang dilakukan langsung dengan luar negeri dan antar pulau atau antar provinsi. Dari nilai ekspor dan impor luar negeri maupun antar pulau masing-masing tahun diperoleh nilai ekspor dan impor atas dasar harga berlaku. Untuk memperoleh nilai ekspor atas dasar harga konstan 2000 dengan cara sebagai berikut; nilai ekspor di-*deflate* dengan IHPB umum ekspor tanpa minyak, dan nilai impor di-*deflate* dengan IHPB umum kelompok impor.

Nilai barang yang keluar antarpulau atau antarregion atas dasar harga konstan 2000 diperoleh dengan cara men-*deflate* masing-masing dengan IHPB umum.

Data mengenai ekspor dan impor luar negeri diperoleh dari statistik tahunan ekspor dan impor terbitan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) Provinsi DIY. Sementara untuk barang yang keluar dan masuk antarpulau/provinsi diperoleh dengan cara rekonsiliasi antarseluruh komponen penggunaan PDRB.

2.4 Kualitas Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran suatu wilayah. Suatu wilayah mengalami pertumbuhan secara ekonomi bila terjadi peningkatan kapasitas produksi dari semua kegiatan ekonomi di dalam wilayahnya secara terukur. Selama beberapa dekade, pembangunan daerah selalu berupaya memperoleh pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tanpa melihat apakah pertumbuhan tersebut bermanfaat bagi kesejahteraan penduduk secara merata atau tidak. Perkembangan selanjutnya, para pengambil kebijakan pembangunan daerah mulai memperhitungkan manfaat pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat, sehingga tingkat pemerataan mulai menjadi suatu indikator bagi kesejahteraan.

Model pertumbuhan ekonomi mengacu pada fungsi produksi yang diperkenalkan oleh **Cobb-Douglass** (Mankiw, 2004), yaitu:

$$Y_t = T_t K_t^\alpha L_t^\beta \dots\dots\dots(2.6)$$

di mana:

- Y_t = tingkat produksi (output) pada periode t
- T_t = tingkat teknologi pada periode t
- K_t = jumlah stok modal pada periode t
- L_t = jumlah tenaga kerja pada periode t
- α = produktivitas modal
- β = produktivitas tenaga kerja

Formula di atas dapat dituliskan dalam bentuk persamaan fungsi berikut:

$$Y = f(T, K, L)$$

Dari rumusan fungsi produksi Cobb-Douglas tampak bahwa pertumbuhan ekonomi berkorelasi positif terhadap teknologi, kapital, dan tenaga kerja. Pertumbuhan ekonomi dapat terjadi karena peningkatan teknologi, kapital atau tenaga kerja.

Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas adalah pertumbuhan ekonomi yang berorientasi pada penciptaan kesempatan kerja dan berpihak pada penurunan angka kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi diharapkan dapat memperluas kesempatan kerja sehingga dapat menyerap tenaga kerja secara berkesinambungan. Kesempatan kerja

yang semakin luas akan meningkatkan serapan tenaga kerja sehingga menjadi faktor penting dalam upaya penurunan tingkat kemiskinan. Di samping itu, pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat menjadi indikator semakin tingginya pendapatan masyarakat sehingga tingkat kemiskinan menjadi semakin berkurang.

2.4.1 Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Istilah “proses” berarti mengandung unsur dinamis, perubahan atau perkembangan. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi biasanya dilihat dalam kurun waktu tertentu. Jika kurun waktu yang diamati dalam satu tahun, maka pertumbuhan ekonomi direpresentasikan dalam indeks berantai PDRB atas dasar harga konstan dikurangi 100 persen atau diformulasikan sebagai berikut:

$$LPE = \frac{PDRB_t - PDRB_{(t-1)}}{PDRB_{(t-1)}} \times 100\% \quad \dots\dots\dots(2.7)$$

di mana :

LPE = Laju pertumbuhan ekonomi

$PDRB_t$ = Produk Domestik Regional Bruto tahun ke t

$PDRB_{(t-1)}$ = Produk Domestik Regional Bruto tahun ke (t-1)

Jika pertumbuhan ekonomi diamati dalam suatu periode waktu beberapa tahun, maka rata-rata pertumbuhan ekonomi per tahun dihitung dengan formula:

$$r = \left(\sqrt[n-1]{\frac{PDRB_{t_n}}{PDRB_{t_0}}} - 1 \right) \times 100 \quad \dots\dots\dots(2.8)$$

di mana :

r = Rata-rata pertumbuhan ekonomi per tahun

n = Jumlah tahun periode (dihitung mulai dari 1 sampai dengan n)

t_n = Tahun terakhir periode

t_0 = Tahun awal periode

Andil terhadap pertumbuhan ekonomi dapat dilihat baik dari sisi lapangan usaha, wilayah (kabupaten/kota), maupun penggunaan. Ukuran andil terhadap pertumbuhan ekonomi dihitung dengan formula berikut:

$$Andil_{it} = \frac{(LPE_{it} \times DP_{i(t-1)})}{100} \quad \dots\dots\dots(2.9)$$

$Andil_i$ = Andil sektor/ wilayah/ komponen ke-i terhadap pertumbuhan ekonomi

LPE_i = Laju pertumbuhan ekonomi sektor/ wilayah/ komponen ke-i

$DP_{i(t-1)}$ = Distribusi persentase sektor/ wilayah/ komponen ke-i terhadap total PDRB pada tahun sebelumnya

i = 1, 2, ..., 9

t = tahun observasi

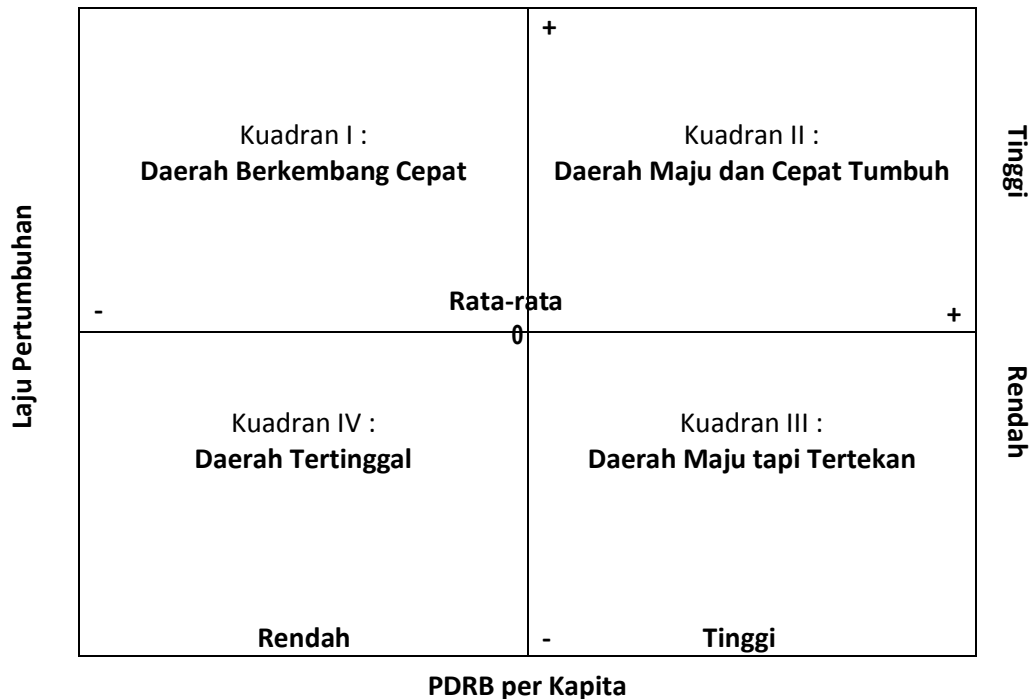
Laju pertumbuhan ekonomi yang dikaitkan dengan PDRB per kapita suatu wilayah, dapat digunakan untuk membandingkan secara relatif posisi wilayah tersebut terhadap wilayah lainnya. Perbandingan absolut antar kabupaten/kota atau menurut Sjafrizal (1997) disebut sebagai **Tipologi Klassen** disajikan pada Gambar 2.1 dalam bentuk "**diagram empat kuadran**", di mana sumbu vertikal menggambarkan tingkat pertumbuhan ekonomi, sedangkan sumbu horisontal menggambarkan rata-rata PDRB per kapita. Pada tengah masing-masing sumbu (vertikal dan horisontal) digambarkan garis tegak lurus pada masing-masing sumbu. Garis-garis ini menggambarkan rata-rata tingkat pertumbuhan ekonomi (tegak lurus dengan garis vertikal) dan rata-rata PDRB per kapita (tegak lurus dengan garis horisontal). Garis-garis tersebut membagi bidang grafik menjadi 4 (empat) kuadran. Selanjutnya searah putaran jarum jam, empat kuadran tersebut disebut dengan kuadran I (terletak di sudut kiri atas), kuadran II (terletak di sudut kanan atas), kuadran III (terletak di sudut kanan bawah), dan kuadran IV (di sudut kiri bawah).

Apabila suatu kabupaten/ kota menempati kuadran I, berarti kabupaten/ kota tersebut mempunyai PDRB per kapita di bawah rata-rata DIY, namun mempunyai tingkat pertumbuhan di atas rata-rata pertumbuhan DIY. Sedangkan apabila terletak di kuadran II, berarti kabupaten/kota tersebut mempunyai PDRB per kapita maupun tingkat pertumbuhan di atas rata-rata DIY. Suatu titik di kuadran III menggambarkan PDRB per kapita di atas rata-rata PDRB per kapita DIY, namun tingkat pertumbuhannya di bawah rata-rata tingkat pertumbuhan DIY. Selanjutnya dengan mudah dapat diinterpretasikan bahwa suatu titik di kuadran IV menggambarkan PDRB per kapita di bawah rata-rata PDRB per kapita DIY, dan juga tingkat pertumbuhannya di bawah tingkat pertumbuhan DIY.

Kabupaten/kota di kuadran I disebut "daerah berkembang cepat", menunjukkan bahwa PDRB per kapitanya relatif masih rendah, sehingga Pemerintah Daerah harus memberikan perhatian khusus untuk mengembangkannya. Namun demikian, karena tingkat pertumbuhan yang relatif tinggi, kabupaten/kota tersebut masih berpeluang dipacu untuk mengejar daerah lain. Kabupaten/ kota yang terletak di kuadran II disebut "daerah maju dan cepat tumbuh" yang secara relatif menunjukkan daerah-daerah sudah maju perekonomiannya, dan akan lebih cepat maju karena mempunyai tingkat pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapita yang relatif tinggi dibanding dengan rata-rata DIY. Kabupaten/kota yang terletak di kuadran III merupakan "daerah maju tapi tertekan", secara absolut sudah mencapai tingkat perekonomian yang tinggi namun tingkat pertumbuhannya relatif lebih rendah dibanding dengan rata-rata DIY. Sementara kabupaten/kota yang

digambarkan di kuadran IV disebut “daerah tertinggal”, sangat perlu mendapat perhatian khusus karena dibanding daerah-daerah lainnya relatif lebih rendah baik dari segi besaran PDRB per kapita maupun tingkat pertumbuhannya.

Gambar 2.1
Diagram Perbandingan Laju Pertumbuhan dan PDRB Per Kapita



2.4.2 Penduduk dan Tenaga Kerja

Penduduk merupakan sumber daya yang penting dalam pembangunan. Keberadaan mereka dapat menjadi faktor yang mendukung atau menghambat pembangunan, tergantung kualitasnya. Kualitas penduduk dapat diukur dengan beberapa indikator, antara lain:

2.4.2.1 Angka Beban Tanggungan (*Dependency Ratio*)

Angka beban tanggungan menunjukkan tingkat ketergantungan penduduk yang dianggap tidak produktif (usia kurang dari 15 tahun atau 65 tahun ke atas) terhadap penduduk usia produktif (15 tahun sampai 64 tahun). Formula yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$DR = \frac{Jml\ Penduduk_{0-14} + Jml\ Penduduk_{65+}}{Jml\ Penduduk_{15-64}} \dots\dots\dots(2.10)$$

Tinggi rendahnya angka ketergantungan dapat dibedakan tiga golongan, yaitu angka ketergantungan rendah bila kurang dari 30, angka ketergantungan sedang bila 30-40,

dan angka ketergantungan tinggi bila lebih dari 41. Angka beban tanggungan masih merupakan indikator yang sangat sederhana karena produktivitas penduduk hanya dilihat dari usia, bukan dari kegiatan produktifnya (angkatan kerja).

2.4.2.2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Kesempatan memperoleh pekerjaan telah dirumuskan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD'45) pasal 27 ayat 2. Setiap penduduk yang mampu dan mau bekerja diharapkan akan memperoleh pekerjaan yang sesuai disertai dengan jaminan perlindungan kerja yang manusiawi, termasuk di dalamnya memperoleh upah yang cukup untuk hidup layak. Namun harapan tersebut masih jauh dari kenyataan yang terjadi.

Dalam konsep ketenagakerjaan yang digunakan oleh BPS atas saran dari *the International Labor Organization (ILO)*, penduduk dibagi menjadi 2 (dua) golongan yaitu penduduk usia kerja dan penduduk bukan usia kerja. **Penduduk usia kerja** adalah penduduk yang berusia 15 tahun atau lebih, yang digolongkan lagi menjadi 2 (dua) yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. **Angkatan kerja** adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja, dan yang sedang mencari pekerjaan (pengangguran). **Bukan angkatan kerja** adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang kegiatannya tidak bekerja maupun mencari pekerjaan atau penduduk usia kerja dengan kegiatan sekolah, mengurus rumah tangga, dan lainnya, seperti cacat mental atau sebab lain sehingga tidak produktif.

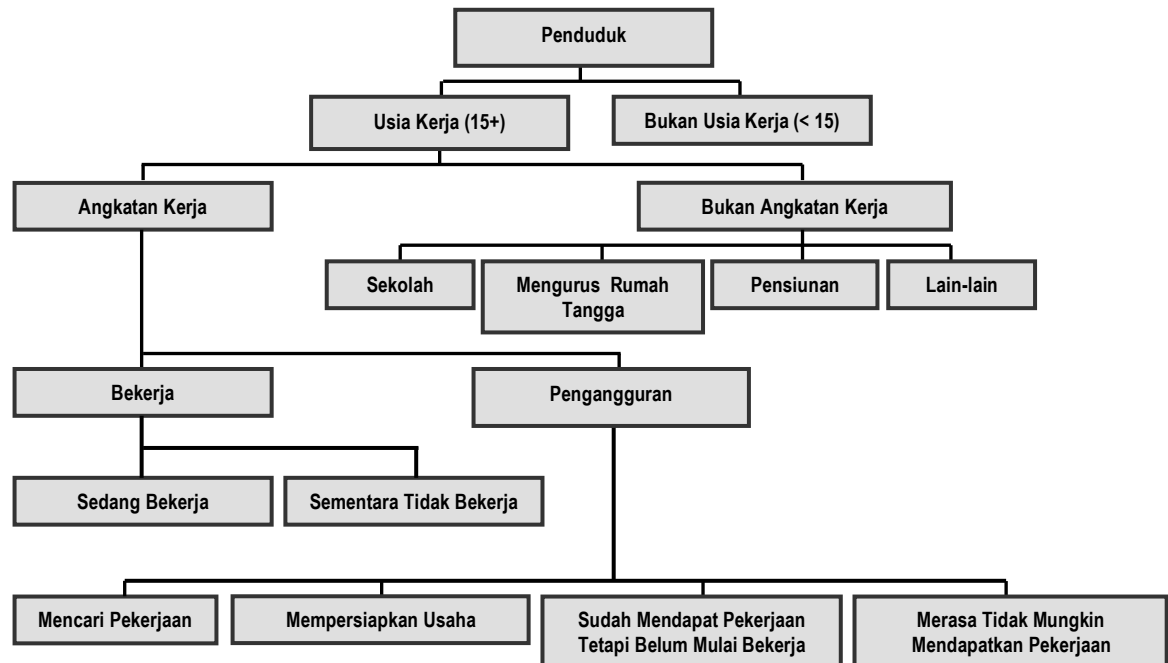
Penduduk **bekerja** adalah penduduk yang memiliki kegiatan ekonomi dalam rangka memperoleh penghasilan, paling sedikit satu jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu; termasuk kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha/ kegiatan ekonomi. **Penduduk yang mempunyai pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja** adalah mereka yang mempunyai pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja karena berbagai sebab, seperti: sakit, cuti, menunggu panen, mogok, dan sebagainya. **Pengangguran terbuka** adalah mereka yang sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Konsep tersebut digambarkan dalam Gambar 2.2.

Beberapa konsep pokok ketenagakerjaan adalah:

- **Mencari pekerjaan** adalah kegiatan dari mereka yang berusaha mendapat pekerjaan. Kegiatan mencari pekerjaan tidak terbatas dalam jangka waktu seminggu yang lalu saja, tetapi bisa dilakukan beberapa waktu yang lalu di mana seminggu yang lalu masih dalam status menunggu jawaban lamaran. Jadi dalam kategori mencari pekerjaan juga dimasukkan mereka yang sedang memasukkan lamaran.
- **Penghasilan** mencakup upah/gaji termasuk semua tunjangan, bonus dan hasil usaha berupa sewa, bunga dan keuntungan, baik berupa uang atau natura/barang.

- **Hari kerja** adalah hari di mana seseorang melakukan kegiatan bekerja paling sedikit 1 jam terus menerus.
- **Jam kerja** adalah waktu yang dinyatakan dalam jam yang dipergunakan untuk bekerja.

Gambar 2.2
Bagan Konsep Penduduk dan Tenaga Kerja



Sumber: BPS

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja merupakan perbandingan antara jumlah angkatan kerja (bekerja dan pengangguran) dengan jumlah penduduk usia kerja, dan biasanya dinyatakan dalam persen.

$$TPAK = \frac{\text{Jumlah Angkatan Kerja}}{\text{Jumlah Penduduk Usia Kerja}} \times 100\% \dots\dots\dots(2.11)$$

TPAK digunakan untuk mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang aktif secara ekonomi di suatu daerah atau wilayah. Selain itu, TPAK juga digunakan untuk menunjukkan besaran relatif dari pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang-barang dan jasa dalam suatu perekonomian.

2.4.2.3 Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)

Tingkat Kesempatan Kerja diukur dengan menggunakan rasio jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang sedang bekerja minimal 1 jam secara berturut-turut ataupun mempunyai pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja di periode pencacahan terhadap total angkatan kerja.

$$TKK = \frac{\text{Jumlah penduduk bekerja}}{\text{Jumlah angkatan kerja}} \times 100\% \dots\dots\dots(2.12)$$

TKK digunakan untuk mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja yang bekerja atau sementara tidak bekerja di suatu daerah atau wilayah.

Untuk keperluan analisis lebih lanjut, dapat dihitung **laju pertumbuhan kesempatan kerja (r_{KK})**, yaitu perbandingan antara selisih jumlah kesempatan kerja dalam 2 (dua) periode waktu terhadap jumlah kesempatan kerja pada periode waktu awal, dan biasanya dinyatakan dalam persen. Indikator ini digunakan untuk menyajikan laju pertumbuhan penduduk yang bekerja.

$$r_{KK} = \frac{B_t - B_{t-1}}{B_{t-1}} \times 100 \% \quad \dots\dots\dots(2.13)$$

di mana:

B_t = Jumlah penduduk yang bekerja tahun t

B_{t-1} = Jumlah penduduk yang bekerja tahun t-1

2.4.2.4 Tingkat Pengangguran

Tingkat pengangguran merupakan salah satu target prioritas pembangunan yang perlu diturunkan. Tingkat pengangguran diindikasikan dengan beberapa ukuran, yaitu:

- **Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT):**

Tingkat pengangguran terbuka merupakan perbandingan antara jumlah pencari kerja dengan jumlah angkatan kerja, dan biasanya dinyatakan dalam persen. Kegunaannya adalah memberi indikasi tentang persentase penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran di suatu daerah atau wilayah.

$$TPT = \frac{\text{Jumlah pencari kerja}}{\text{Jumlah angkatan kerja}} \times 100 \% \quad \dots\dots\dots(2.14)$$

2.4.2.5 Elastisitas Kesempatan Kerja (EKK)

Dalam neraca ketenagakerjaan biasanya dilihat jumlah angkatan kerja dan jumlah kesempatan kerja yang tersedia. Jika angkatan kerja lebih besar dari kesempatan kerja, maka akan terjadi pengangguran. Dengan kata lain, laju pertumbuhan angkatan kerja yang lebih besar dari laju pertumbuhan kesempatan kerja mengakibatkan peningkatan laju pertumbuhan pengangguran, demikian pula berlaku sebaliknya.

Secara makro, laju pertumbuhan ekonomi akan mempengaruhi laju pertumbuhan kesempatan kerja. Hubungan kedua variabel tersebut dijelaskan oleh elastisitas kesempatan kerja yang dirumuskan sebagai berikut:

$$E_{KK} = \frac{r_{KK}}{r_{PDRB}} \quad \dots\dots\dots(2.15)$$

di mana:

- E_{KK} = Elastisitas kesempatan kerja
 r_{KK} = Laju pertumbuhan kesempatan kerja
 r_{PDRB} = Laju pertumbuhan ekonomi

Semakin tinggi elastisitas kesempatan kerja berarti setiap laju pertumbuhan ekonomi akan mampu menciptakan kesempatan kerja yang lebih luas.

2.4.2.6 Produktivitas Tenaga Kerja (PTK)

Produktivitas tenaga kerja merupakan indikator kemampuan tenaga kerja dalam penciptaan nilai tambah. Pada kajian ini, produktivitas tenaga kerja diukur dengan membandingkan nilai tambah (PDRB) terhadap jumlah tenaga kerja yang terlibat pada setiap sektor. Oleh karena itu, produktivitas tenaga kerja yang dimaksud di sini merupakan produktivitas selama satu tahun.

$$PTK_i = \frac{PDRB_i}{TK_i} \dots\dots\dots(2.16)$$

di mana:

- PTK_i = Produktivitas tenaga kerja sektor ke-i
 $PDRB_i$ = PDRB sektor ke-i
 TK_i = Jumlah tenaga kerja sektor ke-i

Laju pertumbuhan produktivitas menunjukkan perkembangan produktivitas pada kurun waktu tertentu.

2.4.3 Kemiskinan dan Ketimpangan

Pembangunan daerah dilaksanakan untuk mencapai tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi menjadi lebih berarti jika diikuti oleh peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata. Kegiatan perekonomian yang bermuara pada orientasi pemerataan akan mengurangi masalah kemiskinan.

2.4.3.1 Indikator Kemiskinan

Ukuran kemiskinan secara umum dibedakan atas kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut didasarkan pada ketidakmampuan individu untuk memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak. Konsep ini dikembangkan di Indonesia dan dinyatakan sebagai *"inability of the individual to meet basic needs"* (Tjondronegoro, Soejono dan Hardjono, 1993). Konsep tersebut sejalan dengan Amartya Sen (Meier, 1989) yang menyatakan bahwa kemiskinan adalah *"the failure to have certain minimum capabilities"*. Definisi tersebut mengacu pada standar kemampuan minimum

tertentu, yang berarti bahwa penduduk yang tidak mampu mencukupi kebutuhan minimum tersebut dapat dianggap sebagai miskin

Pengukuran kemiskinan dilakukan dengan cara menetapkan **nilai standar kebutuhan minimum**, baik untuk makanan dan non makanan, yang harus dipenuhi seseorang untuk dapat hidup secara layak. Nilai standar kebutuhan minimum tersebut digunakan sebagai **garis pembatas** untuk memisahkan antara penduduk miskin dan tidak miskin. *Uppal (1985)* menyebutkan garis pembatas tersebut sebagai **garis kemiskinan (*poverty line*)** atau **batas kemiskinan (*poverty threshold*)**.

Garis kemiskinan sesungguhnya merupakan sejumlah rupiah yang diperlukan oleh setiap individu untuk dapat membayar kebutuhan makanan setara **2.100 kilo kalori per kapita per hari** dan kebutuhan minimum non-makanan yang mendasar, seperti perumahan, pakaian, kesehatan, pendidikan, transportasi, dan aneka barang dan jasa lainnya. Biaya untuk membayar 2.100 kilo kalori per kapita per hari disebut sebagai **Garis Kemiskinan Makanan (GKM)** dan biaya untuk membayar kebutuhan minimum non makanan mendasar disebut sebagai **Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM)**. Individu dengan pengeluaran lebih rendah dari Garis Kemiskinan disebut sebagai penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan atau penduduk miskin. **Persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan** merupakan **indikator kemiskinan** yang sering digunakan dan biasa disebut **Head Count Index (HCI)**.

Kajian tentang kemiskinan tidak cukup hanya mempelajari jumlah dan persentase penduduk miskin saja yang diukur dari metode HCI. Salah satu kelemahan metode HCI adalah tidak memperhitungkan kedalaman kemiskinan serta ketimpangan sebaran pada kelompok miskin (*distribution among the poor*). Dua indikator berikut ini merupakan masalah yang menarik untuk dikaji dalam melihat perubahan tingkat hidup penduduk miskin. Indikator tersebut adalah **Indeks Kedalaman Kemiskinan (*poverty gap index* atau P_1)** dan **Indeks Keparahan Kemiskinan (*poverty severity index* atau P_2)**.

Penurunan angka pada P_1 mengindikasikan adanya perbaikan secara rata-rata pada kesenjangan antara standar hidup penduduk miskin dan garis kemiskinan. Hal ini juga berarti bahwa rata-rata dari penduduk miskin cenderung mendekati garis kemiskinan, yang mengidentifikasi berkurangnya kedalaman dari insiden kemiskinan. Sedangkan penurunan dari P_2 mengidentifikasi berkurangnya (membaiknya) ketimpangan di antara penduduk miskin.

Pada tahun 1994 **Foster, Greer, dan Thorbecke (FGT)** memperkenalkan suatu rumusan yang mengandung tiga jenis indikator kemiskinan. Rumusan FGT inilah yang kemudian digunakan sebagai indikator kedalaman dan keparahan kemiskinan, dengan formula sebagai berikut :

$$P_{\alpha} = (1/N) \sum_{j=1}^Q \left(\frac{(Z - Y_j)}{Z} \right)^{\alpha} \dots\dots\dots(2.17)$$

di mana: P_{α} = Indeks kemiskinan ($\alpha = 0,1,2$)

N = Jumlah penduduk

Z = Garis kemiskinan

Y_j = Pengeluaran perkapita penduduk di bawah garis kemiskinan Z

Q = Banyaknya penduduk miskin

Pengeluaran penduduk miskin perkapita dapat langsung dihitung dari hasil SUSENAS yang menggambarkan perbedaan antara pengeluaran si miskin (*proxy* pendapatan) dengan garis kemiskinan. Perbedaan tersebut dinyatakan dengan :

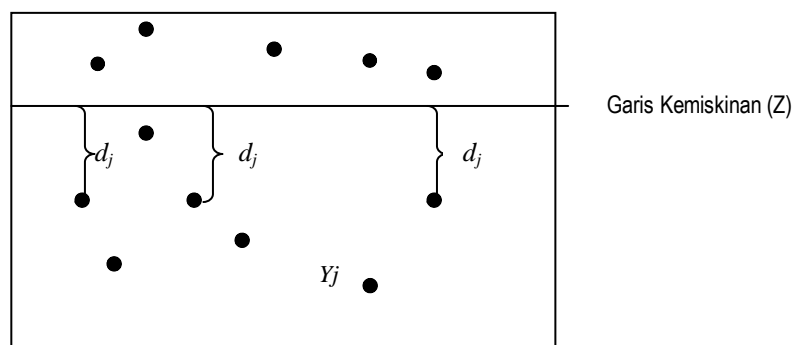
$$d_j = Z - Y_j \dots\dots\dots(2.18)$$

bila persamaan ini dimasukkan ke dalam rumus FGT di atas, maka akan diperoleh :

$$P_{\alpha} = (1/N) \sum_{j=1}^Q \left(\frac{(d_j)}{Z} \right)^{\alpha} \dots\dots\dots(2.19)$$

dimana d_j/Z disebut **rasio kesenjangan kemiskinan (*poverty gap ratio*)**.

Gambar 2.3
Plot Pengeluaran Per kapita dan Garis Kemiskinan



Gambar 2.3 adalah *plotting* pengeluaran per kapita (Y_j) dengan garis kemiskinan (Z). Jarak antara pengeluaran perkapita penduduk miskin terhadap batas kemiskinan ditunjukkan oleh setiap titik d_j yang terdistribusikan di bawah garis kemiskinan. **Golongan penduduk sekitar garis miskin** relatif lebih mudah ditanggulangi, tetapi **rentan terhadap perubahan harga**. Jika harga naik menyebabkan garis kemiskinan bergeser ke atas, maka mereka yang berada di atas garis kemiskinan akan mudah jatuh ke dalam kategori penduduk miskin. Sebaliknya, jika terjadi penurunan harga menyebabkan garis kemiskinan bergeser ke bawah, maka mereka akan masuk ke dalam kategori penduduk tidak miskin. Golongan penduduk seperti inilah yang dikenal sebagai ***the near non-poor*** yang sensitif terhadap perubahan harga.

Dari rumusan FGT diperoleh tiga macam indeks, yaitu :

1. Jika $\alpha = 0$ maka $P_0 = Q/N$ rasio ini tidak lain adalah **Head Count Index**, dan bila dikalikan dengan 100 menjadi **persentase penduduk miskin**. Jika 20 persen dari total penduduk diklasifikasikan sebagai miskin, maka $P_0 = 0,2$.
2. Jika $\alpha = 1$ maka P_1 menunjukkan ukuran **Indeks Kedalaman Kemiskinan (poverty gap index)**. P_1 merupakan persentase rata-rata kesenjangan antar pengeluaran penduduk miskin di bawah garis kemiskinan terhadap jumlah seluruh penduduk (baik yang di bawah atau di atas garis kemiskinan). Misal $P_1 = 0,15$ ini berarti bahwa kesenjangan antara total pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, jika dirata-ratakan terhadap seluruh rumah tangga (baik rumah tangga miskin atau tidak miskin) adalah sebesar 15 persen. Karena nilai P_1 belum menggambarkan kesenjangan riil yang dihadapi oleh penduduk miskin, maka nilai P_1 harus dikoreksi dengan jumlah penduduk yang berada di atas GK dengan rumus:

$$\frac{P_1}{P_2} = \sum_{j=1}^Q \left(\frac{(Z - Y_j)}{Q} \right) \dots\dots\dots(2.20)$$

Rasio P_1/P_2 merupakan persentase rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, atau dengan kata lain rasio tersebut merupakan rata-rata kesenjangan taraf hidup yang diukur dengan pengeluaran.

3. Jika $\alpha = 2$ maka P_2 menunjukkan ukuran **Indeks Keparahan Kemiskinan (poverty severity index atau distribution sensitive index)** yang menggambarkan ketimpangan antar penduduk miskin. Tidak seperti dua ukuran terdahulu, ukuran ini sensitif terhadap penyebaran pengeluaran (*proxy* pendapatan) yang terjadi di antara penduduk miskin, dan juga dapat dipakai untuk mengetahui intensitas kemiskinan (*severity*). Ukuran ini dianggap yang paling memenuhi aksioma-aksioma untuk ukuran kemiskinan yang diinginkan oleh berbagai literatur, termasuk *Amartya Sen* (1976) dengan '*transfer axiom*'-nya, yaitu jika terjadi transfer pengeluaran dari penduduk miskin kepada penduduk yang lebih miskin berarti secara rata-rata telah terjadi suatu penurunan kemiskinan (BPS, 1992).

2.4.3.2 Indikator Ketimpangan Pendapatan

Para pengamat ekonomi banyak yang menaruh perhatian pada permasalahan distribusi pendapatan atau pembagian pendapatan seperti diawali oleh *Sundrum* (1973) serta *King* dan *Weldon* (1975). Dalam waktu relatif singkat bermunculan para ahli ekonomi yang melakukan penelitian seperti *Hendra Esmara* (1974 dan 1978), kemudian *Parera* (1977) atau *Sam F. Poli* (1978). Tetapi sebagian besar hanya bertujuan mengetahui gambaran ketimpangan/ kesenjangan/ *gap* dalam pembagian pendapatan, yang biasanya

dinyatakan dalam ukuran **Gini Ratio**. Sedangkan pengukuran jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan dan ketimpangan di antara mereka masih jarang dilakukan.

Selama ini, pemerintah di banyak negara berkembang dalam kebijakan politik dan ekonominya lebih menekankan kepada pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dalam upaya terciptanya kemakmuran bagi penduduknya. Terdapat dua pilihan antara: memperbesar 'kue' terlebih dahulu, baru kemudian dibagi merata, atau dilakukan pembagian secara merata terlebih dahulu berapapun besar 'kue' yang diperoleh. Namun terlepas dari polemik dikhotomi tersebut, pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan lebih berarti jika terjadi pemerataan yang hasilnya dapat dinikmati masyarakat luas.

2.4.3.2.1 Rasio Gini (*Gini Ratio*)

Untuk melihat ketimpangan pendapatan penduduk, salah satu indikator yang sering dipakai adalah Rasio Gini. Ide dasar perhitungan Rasio Gini sebenarnya berasal dari upaya pengukuran luas suatu kurva (selanjutnya disebut **Kurva Lorenz**) yang menggambarkan distribusi pendapatan untuk seluruh kelompok pengeluaran. Secara ilustrasi, luas kurva Lorenz merupakan luas daerah di bawah garis diagonal yang dibatasi dengan kurva pada suatu persegi empat. Perbandingan antara luas daerah Kurva Lorenz dengan luas daerah di bawah garis diagonal dapat diperoleh nilai Rasio Gini. Secara matematis, untuk menghitung Rasio Gini dapat menggunakan persamaan berikut :

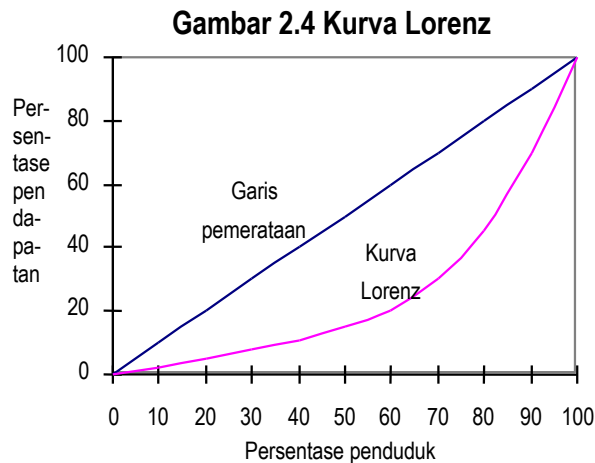
$$\text{Rasio Gini} = 1 - \sum_{i=1}^k \frac{P_i(Q_i + Q_{i-1})}{10.000} \dots\dots\dots(2.21)$$

di mana : P_i = Persentase penduduk pada kelas pengeluaran ke-i

Q_i = Persentase kumulatif jumlah pengeluaran pada kelas pengeluaran ke-i

k = Jumlah kelas pengeluaran yang dibentuk.

Nilai Rasio Gini berkisar antara 0 hingga 1. Semakin **mendekati 1** maka dikatakan tingkat ketimpangan pendapatan penduduk makin melebar, atau mendekati **ketimpangan sempurna**. Sebaliknya, semakin **mendekati 0** distribusi pendapatan penduduk semakin merata, atau mendekati **pemerataan sempurna**. Menurut **Harry T. Oshima**, nilai Rasio Gini dibagi menjadi tiga tingkatan. Jika nilai Rasio Gini kurang dari 0,3 masuk dalam kategori ketimpangan "**rendah**"; nilainya antara 0,3 hingga 0,5 masuk dalam kategori ketimpangan "**moderat**"; dan jika nilainya **lebih besar dari 0,5** dikatakan berada dalam ketimpangan "**tinggi**".



2.4.3.2.2 Kriteria Bank Dunia

Ukuran lain yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan penduduk adalah Kriteria Bank Dunia. Ukuran ini membagi penduduk menjadi tiga kelompok pendapatan, yakni kelompok 40 persen berpendapatan terendah, 40 persen berpendapatan menengah dan 20 persen berpendapatan tertinggi.

Berdasarkan Kriteria Bank Dunia, tingkat ketimpangan diukur dengan besarnya bagian pendapatan yang dinikmati oleh 40 persen penduduk yang berpendapatan terendah dengan batasan sebagai berikut :

- Tingkat ketimpangan **rendah**, jika 40 persen penduduk berpendapatan terendah menerima lebih dari 17 persen jumlah pendapatan.
- Tingkat ketimpangan **moderat**, jika 40 persen penduduk berpendapatan terendah menerima 12 sampai dengan 17 persen jumlah pendapatan.
- Tingkat ketimpangan **tinggi**, jika 40 persen penduduk berpendapatan terendah menerima **kurang dari 12** persen jumlah pendapatan.

2.4.4 Disparitas Antar Kabupaten/Kota

Selain tingkat ketimpangan pendapatan, disparitas ekonomi juga dapat digambarkan dengan disparitas sektoral antar wilayah. Indikator disparitas antar wilayah merupakan ukuran yang menunjukkan ada atau tidaknya kesenjangan antar wilayah dalam hal potensi ekonomi, keberhasilan pembangunan, atau kombinasi antara berbagai aspek secara sektoral.

2.4.4.1 Indeks Ketimpangan Regional

Indeks Williamson adalah salah satu ukuran ketimpangan antar wilayah (region). Pengukuran ini didasarkan pada variasi hasil-hasil pembangunan ekonomi antar region (yang berupa besaran PDRB). Kriteria pengukuran adalah: semakin besar nilai indeks,

semakin besar pula tingkat perbedaan ekonomi masing-masing region dengan rata-ratanya; sebaliknya, **semakin kecil nilai indeks menunjukkan tingkat pemerataan antar region yang semakin baik.**

Indeks Williamson dirumuskan sebagai berikut:

$$IW = \frac{\sqrt{\sum_i (y_i - \bar{y})^2 \frac{f_i}{n}}}{\bar{y}} \dots\dots\dots(2.22)$$

di mana:

IW : Indeks Williamson

y : Rata-rata pendapatan (PDRB) di Provinsi DIY

y_i : Rata-rata pendapatan (PDRB) di region ke-i

f_i/n : Proporsi jumlah penduduk region ke-i terhadap jumlah penduduk Provinsi DIY

i : 1,2, ..., 5 (Kabupaten/ kota di Provinsi DIY).

2.4.4.2 Analisis Pergeseran (*Shift Share Analysis*)

Analisis Shift-Share (SS) merupakan salah satu metode analisis penting yang umum digunakan dalam studi-studi ekonomi regional. Metode ini digunakan untuk mengidentifikasi sumber-sumber pertumbuhan regional, menelusuri jejak kecondongan dan sebab-sebab perubahan dalam lapangan kerja, serta menentukan besar dan arah perubahan industri regional. Disamping itu analisis SS juga digunakan sebagai alat dalam analisis deskriptif untuk memproyeksikan pertumbuhan ekonomi regional dan sebagai alat analisis dalam riset pembangunan pedesaan.

Analisis Shift-Share (SS) merupakan teknik yang relatif sederhana untuk mengevaluasi posisi relatif dan perubahan struktur suatu perekonomian lokal (misalnya kabupaten atau propinsi) dalam hubungannya dengan perekonomian acuan (nasional). Metode analisis ini bertitik tolak pada anggapan dasar bahwa pertumbuhan ekonomi suatu daerah atau wilayah dipengaruhi oleh 3 komponen utama, yakni:

- a. **Pertumbuhan nasional (*national growth component*)**, perubahan output atau pendapatan (atau indikator ekonomi lainnya seperti jumlah kesempatan kerja) suatu wilayah yang disebabkan oleh perubahan nasional secara umum, perubahan kebijaksanaan ekonomi nasional, atau perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi perekonomian seluruh wilayah dan sektor secara seragam.

- b. **Pertumbuhan sektoral (*industrial mix component*)**, timbul karena perbedaan permintaan output akhir, ketersediaan bahan baku, kebijaksanaan sektoral, serta perilaku dan kinerja struktur pasar setiap sektor nasional.
- c. **Pertumbuhan daya saing wilayah (*competitive effect component*)**, terjadi karena peningkatan atau penurunan output atau pendapatan suatu wilayah yang lebih cepat atau lambat dari wilayah lainnya.

Perubahan nilai tambah bruto (NTB) atau PDRB suatu sektor *i* di suatu wilayah *j* dalam 2 periode, yaitu periode *o* dan periode *t* dirumuskan sebagai berikut:

$$\Delta Q_{ij}^t = Q_{ij}^t - Q_{ij}^o$$

$$\Delta Q_{ij}^t = Q_{ij}^o (Y_t/Y_o - 1) + Q_{ij}^o (Q_i^t/Q_i^o - Y_t/Y_o) + Q_{ij}^o (Q_{ij}^t/Q_{ij}^o - Q_i^t/Q_i^o) \dots\dots\dots (2.23)$$

Dari persamaan diatas dapat kita asumsikan bahwa pertumbuhan suatu sektor pada suatu wilayah disebabkan oleh 3 komponen pertumbuhan yang telah dibahas sebelumnya, yaitu:

Keterangan:

PR_{ij} = Pangsa Regional sektor *i* pada wilayah *j*

PS_{ij} = Proportional Shift (pergeseran proporsional) sektor ke-*i* pada wilayah *j*

DS_{ij} = Different Shift (pergeseran yang berbeda) sektor ke-*i* pada wilayah *j*

Y_o dan Y_t = Total PDRB Wilayah pada tahun 0 dan pada tahun *t*

Q_{ij}^o dan Q_{ij}^t = PDRB sektor *i* propinsi *j* pada tahun 0 dan pada tahun *t*

Q_i^o dan Q_i^t = Total PDRB Wilayah sektor *i* pada tahun 0 dan pada tahun *t*

$$PR_{ij} = Q_{ij}^o \left\{ \frac{Y_t}{Y_o} - 1 \right\} \dots\dots\dots (2.24)$$

$$PS_{ij} = Q_{ij}^o \left\{ \frac{Q_i^t}{Q_i^o} - \frac{Y_t}{Y_o} \right\} \dots\dots\dots (2.25)$$

$$DS_{ij} = Q_{ij}^o \left\{ \frac{Q_{ij}^t}{Q_{ij}^o} - \frac{Q_i^t}{Q_i^o} \right\} \dots\dots\dots (2.26)$$

Analisis SS dapat dibagi ke dalam 2 bagian:

1) Analisis Pangsa Regional (*Share Analysis*)

Untuk melihat struktur atau posisi relatif provinsi-provinsi atau kabupaten-kabupaten dalam kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh di Indonesia atau di tingkat propinsi. Sebagai indikator bisa dipergunakan nilai output, nilai tambah, atau

jumlah tenaga kerja yang bekerja. Share analysis akan mengukur proporsi dari, misalnya, PDRB kabupaten terhadap PDRB propinsi. Oleh sebab itu bila nantinya ditemukan satu atau beberapa kabupaten di suatu propinsi memiliki pangsa yang tinggi maka kabupaten tersebut dikatakan memiliki kontribusi yang tinggi terhadap pembentukan atau pertumbuhan PDRB propinsi. Disamping itu analisis ini juga digunakan untuk melihat peranan/kontribusi sektor yang signifikan di suatu wilayah.

2) Analisis Pergeseran (*Shift Analysis*)

Dalam analisis pertumbuhan regional komponen pergeseran lebih penting daripada komponen PR. Total pergeseran (total shift) terdiri dari:

- ∞ Perubahan secara proporsional atau Proportionality Shift (PS) mengukur sejauh mana laju pertumbuhan pada suatu sektor di suatu wilayah berbeda dengan pertumbuhan sektor yang sama di tingkat wilayah. Jadi PS memperlihatkan struktur ekonomi dan perubahannya di suatu wilayah.
- ∞ Perubahan yang berbeda atau Different Shift (DS) terjadi apabila laju pertumbuhan pada suatu sektor di suatu wilayah lebih tinggi daripada laju pertumbuhan pada sektor yang sama di wilayah lain. Perbedaan ini mencerminkan posisi keuntungan lokasi (*locational advantage position*) suatu wilayah yang mempunyai dampak positif terhadap pertumbuhan satu atau beberapa sektor tertentu di wilayah tersebut.

Berdasarkan besaran PS dan DS beberapa wilayah dalam suatu daerah dapat di kelompokkan ke dalam 4 kategori sebagai berikut:

Kategori I (PS positif dan DS positif) adalah wilayah dengan pertumbuhan sangat pesat (*rapid growth region*),

Kategori II (PS negatif dan DS positif) adalah wilayah yang pertumbuhannya tertekan tapi berkembang (*depressed region* yang berkembang),

Kategori III (PS positif dan DS negatif) adalah wilayah yang tertekan namun cenderung berpotensi (*depressed region* yang berpotensi)

Kategori IV (PS dan DS negatif) adalah wilayah *depressed region* dengan daya saing lemah dan juga peranan terhadap wilayah rendah.

Keunggulan analisis *shift share* antara lain:

1. Memberikan gambaran mengenai perubahan struktur ekonomi yang terjadi, walau analisis *shift share* tergolong sederhana.
2. Memungkinkan seorang pemula mempelajari struktur perekonomian dengan cepat.
3. Memberikan gambaran pertumbuhan ekonomi dan perubahan struktur dengan cukup akurat.

Kelemahan Analisis *Shift-Share*, yaitu:

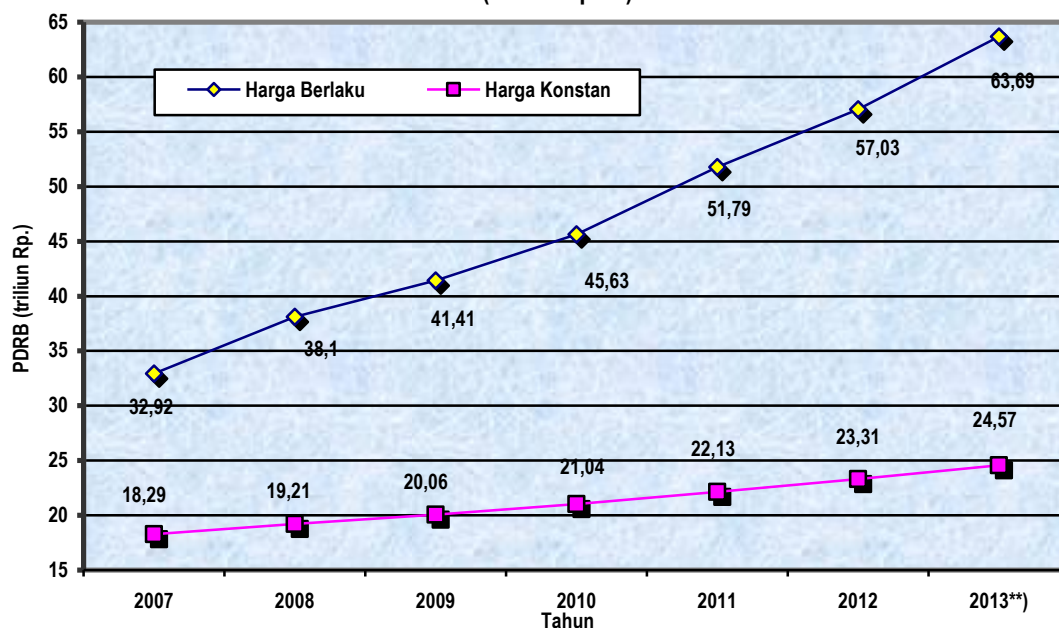
1. Hanya dapat digunakan untuk analisis *ex-post*.
2. Masalah *benchmark* berkenaan dengan *homothetic change*, apakah t atau $(t+1)$ tidak dapat dijelaskan dengan baik.
3. Ada data periode waktu tertentu di tengah tahun pengamatan yang tidak terungkap.
4. Analisis ini sangat berbahaya sebagai alat peramalan, mengingat bahwa *regional shift* tidak konstan dari suatu periode ke periode lainnya.
5. Tidak dapat dipakai untuk melihat keterkaitan antarsektor.
6. Tidak ada keterkaitan antardaerah.

BAB III

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO MENURUT LAPANGAN USAHA

Tahun 2013 merupakan tahun terakhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009-2013. Kinerja perekonomian Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) selama kurun waktu 2009-2013 tampak semakin membaik yang ditunjukkan oleh selalu meningkatnya nilai nominal Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari tahun ke tahun (Gambar 3.1). Pada tahun 2009 nilai PDRB atas dasar harga berlaku sebesar Rp41,41 triliun dan pada tahun 2013 sudah mencapai Rp63,69 triliun. Ini berarti pula bahwa secara nominal PDRB meningkat sebesar Rp22,28 triliun selama lima tahun. Jika dilihat atas dasar harga konstan 2000, nilai PDRB tahun 2009 sebesar Rp20,06 triliun kemudian meningkat menjadi Rp24,57 triliun pada tahun 2013. Peningkatan nilai PDRB terjadi di semua sektor. Dengan demikian, secara riil PDRB naik sekitar 4,5 triliun rupiah, dan rata-rata pertumbuhan ekonomi DIY selama periode 2009-2013 mencapai 5,19 persen per tahun.

Gambar 3.1 Produk Domestik Regional Bruto D.I Yogyakarta, 2007-2013
(triliun rupiah)



Pertumbuhan ekonomi DIY tahun 2013 mengalami percepatan dibanding tahun sebelumnya. Hal ini ditunjukkan dengan laju pertumbuhan ekonomi DIY yang mencapai 5,40 persen, sementara tahun 2012 pertumbuhan ekonomi DIY sebesar 5,32 persen. Bahkan, pertumbuhan ekonomi DIY tahun 2013 tersebut juga merupakan angka tertinggi selama sepuluh tahun terakhir. Tiga besar sumber pertumbuhan tahun 2013 berturut-turut

adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor industri pengolahan, dan sektor jasa-jasa, sedangkan andil pertumbuhan terkecil adalah sektor pertambangan dan penggalian.

Kondisi luas wilayah DIY yang sekitar 3,2 ribu km² memiliki sumber daya alam yang terbatas dengan skala pengembangan industri pengolahan tidak sebesar provinsi lain di Jawa dan memang DIY tidak memprioritaskan pembangunannya ke arah industrialisasi. Perekonomian DIY lebih mengandalkan sektor tersier terutama sektor-sektor yang mencakup kegiatan kepariwisataan. Bergairahnya industri komoditas hasil kerajinan memang terkait erat dengan permintaan pasar yaitu pelaku pariwisata.

3.1 Struktur Ekonomi

Struktur ekonomi suatu daerah/wilayah menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah/wilayah terhadap kemampuan berproduksi dari setiap sektor ekonomi. Struktur ekonomi terbentuk dari besaran nilai tambah yang dapat diciptakan oleh masing-masing sektor. Dengan melihat kontribusi masing-masing sektor terhadap pembentukan PDRB, maka dapat diketahui seberapa besar peranan suatu sektor dalam menunjang perekonomian daerah.

Selama periode 2009-2013 struktur perekonomian DIY masih didominasi oleh 4 (empat) sektor, yaitu sektor jasa-jasa; sektor perdagangan, hotel dan restoran; sektor pertanian; serta sektor industri pengolahan (Tabel 3.1). Porsi sektor jasa-jasa bersama sektor perdagangan, hotel dan restoran cenderung meningkat setiap tahun, sedangkan peranan sektor pertanian dan sektor industri pengolahan cenderung menurun. Dampak dari kecenderungan menurunnya rumah tangga usaha pertanian selama sepuluh tahun terakhir (Hasil Sensus Pertanian 2013, BPS) menjadi bagian penyebab turunnya kontribusi sektor pertanian dari tahun ke tahun.

Apabila dicermati kontribusi gabungan sektor perdagangan dan jasa-jasa terlihat selalu meningkat. Fenomena ini menunjukkan, bahwa perekonomian DIY mengalami pergeseran dari perekonomian agraris menuju niaga-jasa tidak mengarah ke industrialisasi. Ini memberikan ciri khas tersendiri yang berbeda dengan proses perkembangan ekonomi beberapa provinsi lain terutama di Pulau Jawa. Oleh karenanya Pemerintah DIY dalam *road map* perencanaannya tidak mengarahkan kebijakan industrialisasi dalam mengembangkan DIY ke depan.

Terkait DIY yang menyandang predikat sebagai “kota pariwisata, kota pelajar/kota pendidikan dan kota budaya, maka industri yang dikembangkan tentunya yang mendukung kegiatan pariwisata, pendidikan, pelestarian budaya. Untuk mendukung potensi ekonomi DIY tersebut maka digerakkan dan dikembangkan ekonomi kreatif yang mempunyai konektivitas tinggi dengan sektor pariwisata, budaya, dan pendidikan.

Kecenderungan meningkatnya rata-rata luas lahan yang dikuasai petani selama sepuluh tahun terakhir ternyata tidak mampu mendorong naiknya kontribusi sektor pertanian selama periode 2009-2013. Bila pada tahun 2009 sektor pertanian masih mempunyai andil sekitar 15,38 persen, pada tahun 2013 turun menjadi 13,91 persen. Lebih cepatnya pertumbuhan di luar sektor pertanian terutama pada sektor tersier berdampak terhadap menurunnya kontribusi sektor pertanian pada tahun 2013.

Tabel 3.1 Distribusi Persentase PDRB D.I. Yogyakarta menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku, 2009 – 2013

Lapangan Usaha	2009	2010	2011	2012	2013 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pertanian	15,38	14,56	14,24	14,65	13,91
Pertambangan dan Penggalian	0,71	0,67	0,70	0,67	0,65
Industri Pengolahan	13,35	14,02	14,36	13,34	13,77
Listrik, Gas dan Air Bersih	1,35	1,33	1,31	1,28	1,25
Konstruksi	10,70	10,59	10,78	10,85	10,85
Perdagangan, Hotel, dan Restoran	19,72	19,74	19,79	20,09	20,65
Pengangkutan dan Komunikasi	9,20	9,03	8,83	8,60	8,48
Keuangan, Real Estat dan Jasa Perusahaan	9,88	9,98	9,96	10,30	10,27
Jasa-jasa	19,71	20,07	20,05	20,23	20,16
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Keterangan: **) Angka sangat sementara
 Sumber : BPS Provinsi D.I.Yogyakarta

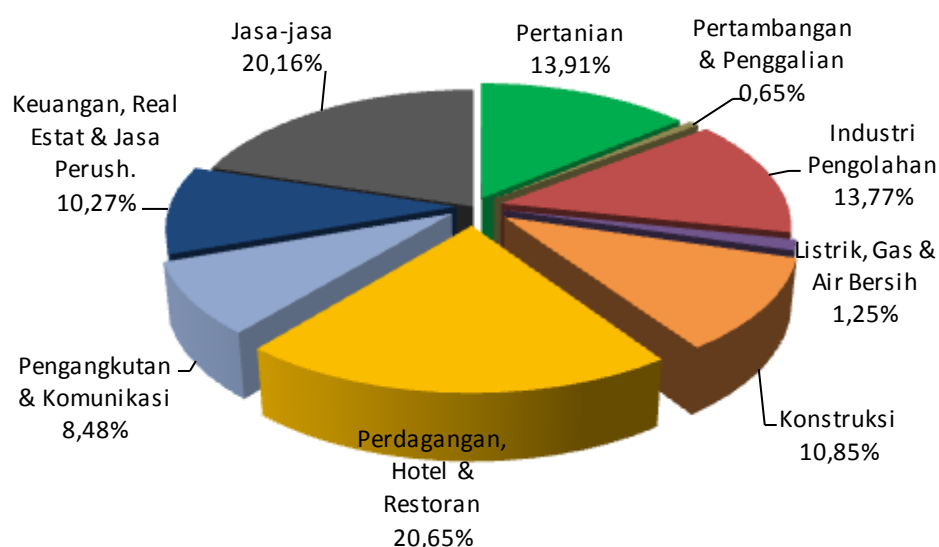
Dalam kurun waktu 2009-2013 kontribusi sektor industri pengolahan cenderung mengalami fluktuasi naik dan turun. dari 13,35 persen di tahun 2009 naik menjadi 14,36 persen pada tahun 2011. Pada tahun 2012 kontribusi sektor industri pengolahan turun yaitu hanya sebesar 13,34 persen. Melambatnya produksi industri pada tahun 2012 dipengaruhi oleh situasi perekonomian dunia yang kurang kondusif akibat krisis finansial global. Kondisi tersebut berdampak pada menurunnya permintaan ekspor sehingga mengerem produk industri dari DIY terutama industri barang-barang dari kayu. Dampak ini terasa pada sektor ini di tahun 2012, sehingga kontribusi sektor industri mengalami penurunan. Namun pada tahun 2013 geliat produk industri DIY mulai bergairah lagi yang ditunjukkan oleh naiknya kontribusi sektor industri.

Kontribusi sektor konstruksi pada tahun 2013 relatif sama dengan tahun 2012. Kegiatan pembangunan bangunan tempat tinggal, hotel dan gedung perkantoran serta perbaikan jalan mendorong perkembangan sektor konstruksi. Seperti tahun 2012, kontribusi sektor konstruksi terhadap pembentukan PDRB DIY tahun 2013 sebesar 10,85 persen.

Sektor perdagangan, hotel dan restoran mengalami sedikit kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jika pada tahun 2012 sektor ini menyumbang 20,06 persen, di tahun 2013 naik menjadi 20,65 persen. Ternyata sektor perdagangan, hotel dan restoran sekarang memberikan kontribusi terbesar dalam perekonomian DIY melewati kontribusi sektor jasa-jasa yang kontribusinya 20,16 persen.

Sebelum tahun 2009 peranan sektor jasa-jasa merupakan sektor yang paling dominan di DIY, tetapi sejak tahun 2009 telah digeser oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran. Namun demikian mulai tahun 2010 hingga tahun 2012 kontribusinya telah kembali meningkat menjadi yang teratas yaitu di atas 20 persen, sementara sektor perdagangan, hotel, dan restoran baru melewati di atas 20 persen pada tahun 2012. Struktur ekonomi DIY bergeser kembali di tahun 2013 dengan menempatkan sektor perdagangan, hotel, dan restoran sebagai penyumbang terbesar nilai tambah daerah, dan urutan tertinggi berikutnya disumbangkan oleh sektor jasa-jasa, sektor pertanian, dan sektor industri pengolahan.

Gambar 3.2 Peranan Sektoral PDRB Atas Dasar Harga Berlaku D.I. Yogyakarta, 2013



Seperti halnya dengan struktur perekonomian DIY atas harga berlaku, struktur perekonomian DIY dari sisi harga konstan menunjukkan hal yang sama. Porsi sektor perdagangan, hotel dan restoran dan sektor keuangan, real estat, dan jasa perusahaan cenderung meningkat setiap tahun, sedangkan peranan sektor pertanian dan sektor industri pengolahan cenderung menurun.

3.2 Peranan Kelompok Sektor Ekonomi

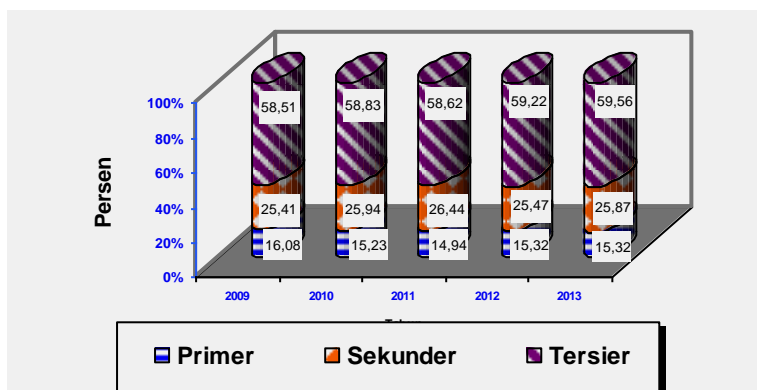
Berdasarkan sifat output barang jasa yang dihasilkan, sembilan sektor ekonomi yang tercakup dalam PDRB dapat diagregasi dalam tiga kelompok besar, yaitu sektor primer, sektor sekunder, dan sektor tersier. Disebut sektor primer bila outputnya masih

tergantung pada sumber daya alam, seperti sektor pertanian dan pertambangan. Sektor yang inputnya berasal dari sektor primer disebut sektor sekunder. Yang termasuk sektor sekunder ini adalah sektor industri pengolahan; listrik, gas, dan air bersih; serta konstruksi. Sektor-sektor lainnya, yaitu sektor perdagangan, hotel, dan restoran; sektor pengangkutan dan komunikasi; sektor keuangan, real estat, dan jasa perusahaan; serta sektor jasa-jasa dikelompokkan ke dalam sektor tersier.

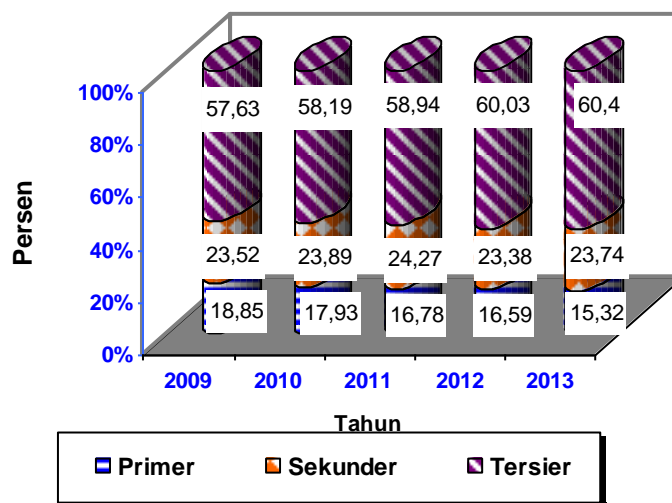
Besaran peran ketiga kelompok sektor terhadap pembentukan PDRB DIY selalu mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2013 peranan sektor primer tercatat sebesar 14,57 persen, atau mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 15,32 persen. Penurunan ini terutama dari menurunnya kontribusi subsektor tanaman bahan makanan dari 10,76 persen menjadi hanya 9,90 persen pada tahun 2013. Di sisi lain kontribusi sektor sekunder relatif stabil, yaitu sebesar 25,47 persen di tahun 2012 dan menjadi 25,87 persen di tahun 2013. Kondisi tersebut disebabkan karena tiga sektor yang tercakup kontribusinya relatif stabil. Demikian pula sektor tersier pada tahun 2013 relatif tidak banyak berubah peranannya yaitu pada porsi 59,56 persen setelah tahun sebelumnya juga sebesar 59,22 persen.

Sejalan dengan komposisi struktur PDRB atas harga berlaku, peranan ketiga kelompok sektor dalam struktur PDRB atas harga konstan terhadap pembentukan PDRB selalu mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2013 peranan sektor primer tercatat sebesar 15,87 persen, relatif mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 16,59 persen. Penurunan ini terjadi pada semua subsektor pertanian dan juga subsektor penggalian. Di sisi lain, kontribusi sektor sekunder hanya meningkat yaitu dari 23,38 persen menjadi hanya 23,74 persen. Ketiga subsektor yang tercakup semua meningkat tetapi hanya kecil. Kondisi serupa juga terjadi pada kelompok sektor tersier yaitu pada tahun 2013 relatif sedikit meningkat peranannya dari sebesar 60,03 persen di tahun 2012 menjadi sebesar 60,40 persen di tahun 2013. Hal ini menunjukkan bahwa penurunan kontribusi di sektor primer teralokasi merata ke peningkatan kontribusi sektor sekunder dan sektor tersier.

Gambar 3.3a Distribusi Persentase PDRB D.I. Yogyakarta Atas Dasar Harga Berlaku menurut Kelompok Sektor, 2009 - 2013



Gambar 3.3b Distribusi Persentase PDRB D.I. Yogyakarta Atas Dasar Harga Konstan menurut Kelompok Sektor, 2009 - 2013



Selama periode analisis tampak bahwa kontribusi sektor primer menunjukkan kecenderungan yang semakin menurun, sedangkan kontribusi sektor sekunder relatif stagnan dan sektor tersier relatif meningkat. Makna dari fenomena ekonomi ini adalah laju output sektor tersier semakin lebih pesat dibandingkan laju output yang terjadi di sektor primer dan sekunder (Gambar 3.3a dan 3.3b).

3.3 PDRB Per Kapita

Salah satu indikator untuk mengukur tingkat kemakmuran penduduk suatu daerah/wilayah adalah dengan melihat angka PDRB per kapita. PDRB per kapita diperoleh dari hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh sektor ekonomi di suatu daerah (PDRB) dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk berpengaruh terhadap nilai PDRB per kapita. Di sisi lain besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. Data penduduk yang digunakan adalah hasil proyeksi Sensus Penduduk (SP) tahun 2010 serta hasil *backcasting*-nya.

Peningkatan secara nyata nilai PDRB per kapita DIY atas dasar harga berlaku dari tahun ke tahun terus dirasakan hingga tahun 2013. Selama periode tahun 2009-2013 PDRB per kapita atas dasar harga berlaku naik sebesar 46,62 persen. Nilai PDRB per kapita tahun 2009 tercatat sebesar Rp12,08 juta, kemudian terus meningkat hingga mencapai Rp17,72 juta di tahun 2013. Sementara untuk kenaikan PDRB per kapita secara riil dapat dilihat dari nilai PDRB berdasarkan harga konstan 2000. Nilai riil PDRB per kapita terus mengalami kenaikan dari sebesar Rp5,86 juta tahun 2009 menjadi Rp6,83 juta di tahun 2013, atau terjadi kenaikan sebesar 16,71 persen (Tabel 3.2).

Tabel 3.2 Perkembangan PDRB Per Kapita D.I. Yogyakarta, 2009 – 2013

Uraian	2009	2010	2011	2012	2013 ^{*)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PDRB adh. Berlaku (juta rupiah)	41.407.049	45.625.589	51.785.150	57.034.383	63.690.318
PDRB adh. konstan 2000 (juta rupiah)	20.064.257	21.044.042	22.131.774	23.309.218	24.567.476
Penduduk pertengahan tahun (orang) ¹⁾	3.426.637	3.457.769	3.487.325	3.514.762	3.594.854
PDRB per kapita adh. Berlaku:(rupiah)	12.083.874	13.195.095	14.849.534	16.227.097	17.717.081
PDRB per kapita adh. konstan 2000 (rupiah)	5.855.379	6.086.017	6.346.347	6.631.806	6.834.068
Pertumbuhan PDRB per kapita adh. berlaku (%)	7,61	9,20	12,54	9,28	9,18
Pertumbuhan PDRB per kapita adh. konstan (%)	3,41	3,94	4,28	4,50	3,05

Sumber : BPS Provinsi D.I.Yogyakarta

Ket : 1) Hasil Backcasting dan Proyeksi SP 2010

**) Angka sangat sementara

3.4 Inflasi IHK (Indeks Harga Konsumen) vs. Inflasi PDRB (Indeks Harga Implisit)

Angka inflasi dihitung berdasarkan indeks harga. Inflasi yang populer adalah inflasi yang diturunkan dari indeks harga konsumen (inflasi IHK) yang merupakan gambaran perkembangan harga pada tingkat konsumen. Jenis inflasi yang lain adalah inflasi yang diturunkan dari indeks harga implisit PDRB (selanjutnya disebut inflasi PDRB), yaitu ukuran tingkat harga yang dihitung sebagai rasio PDRB nominal terhadap PDRB riil dikali dengan 100. Inflasi PDRB ini dapat dipandang sebagai gambaran perkembangan harga di tingkat produsen.

Walaupun sama-sama merupakan perkembangan harga, antara inflasi IHK dan inflasi PDRB ada beberapa perbedaan yang mendasar, terutama dalam hal metode penghitungannya. Perbedaan pertama adalah inflasi PDRB mencerminkan harga semua barang dan jasa **yang diproduksi di wilayah domestik**, sedangkan inflasi IHK menghitung harga berbagai barang dan jasa baik produk domestik maupun impor **yang dibeli** oleh konsumen.

Perbedaan kedua, terletak pada perbedaan pemberian bobot atas harga dari masing-masing barang dan jasa, sebelum diolah dan muncul sebagai angka tunggal untuk keseluruhan tingkat harga. Inflasi IHK dihitung dari perubahan harga sekeranjang belanjaan barang dan jasa (372 komoditas) yang **tetap** di wilayah perkotaan (Yogyakarta) pada suatu periode/tahun dengan harga di tahun dasar (2007). Barang dan jasa tersebut masing-

masing mempunyai bobot yang telah ditentukan melalui survei biaya hidup (SBH) mengenai komposisi komoditas yang dikonsumsi masyarakat sehari-hari dan survei ini tidak dilaksanakan setiap tahun. Inflasi PDRB membandingkan harga berbagai barang dan jasa yang *diproduksi saat ini* di wilayah perkotaan dan pedesaan dengan harga barang dan jasa yang sama pada tahun dasar (2000). Dengan demikian, jumlah barang dan jasa yang digunakan untuk menghitung inflasi PDRB dapat berubah atau menyesuaikan diri secara otomatis dari waktu ke waktu.

Inflasi IHK di sini merupakan tingkat perubahan IHK Umum pada posisi bulan Desember tahun berjalan dibandingkan dengan IHK Umum bulan Desember tahun sebelumnya. Inflasi PDRB merupakan perubahan harga rata-rata di tingkat produsen pada tahun berjalan dibandingkan dengan rata-rata harga produsen pada tahun sebelumnya.

Tabel 3.3 Inflasi IHK dan Inflasi PDRB D.I.Yogyakarta, 2009-2013 (persen)

Uraian	2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Inflasi IHK	2,93	7,38	3,88	4,31	7,32
Inflasi PDRB	4,06	5,06	7,92	4,57	5,95

Sumber : BPS Provinsi D.I.Yogyakarta

Tabel 3.3 menunjukkan perkembangan angka inflasi IHK dan inflasi PDRB DIY selama periode 2009-2013. Tampak bahwa selama periode tersebut fluktuasi inflasi IHK lebih tinggi dibanding inflasi PDRB. Sentimen pasar terhadap inflasi IHK lebih mudah berpengaruh karena efeknya langsung dirasakan bagi masyarakat dan pelaku usaha ketika mereka melakukan transaksi jual beli barang dan jasa. Biasanya fluktuasi inflasi IHK erat terkait dengan proses distribusi barang sehingga adanya sedikit gangguan jalur distribusi saja langsung bisa mempengaruhi tingkat inflasi. Fluktuasi inflasi IHK yang tinggi menunjukkan adanya perbedaan yang besar antara penyediaan dan permintaan barang. Hal ini di samping diakibatkan oleh terganggunya jalur distribusi, biasanya juga disebabkan oleh jumlah produksi barang dan jasa di suatu wilayah yang tidak mampu memenuhi kebutuhan konsumennya.

Pada tahun 2009 Kota Yogyakarta mengalami inflasi yang terendah dibanding dengan inflasi tahun-tahun sebelumnya dan juga dalam periode 2009-2013, yaitu 2,93 persen. Faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya inflasi yang terjadi di Indonesia merupakan dampak keseluruhan dari eksternal dan internal. Akibat dari krisis ekonomi global menyebabkan permintaan dunia menurun, dan berimbas dengan terjadinya penurunan harga komoditas di pasaran internasional, tak terkecuali di Indonesia. Faktor penyebab internal antara lain diakibatkan oleh tidak adanya kebijakan pemerintah yang menyebabkan *pricing shock* seperti menaikkan tarif dasar listrik (TDL) dan atau bahan bakar minyak (BBM) sepanjang tahun 2009. Penyebab lain berupa cukupnya pasokan komoditas

kepada masyarakat dan lancarnya distribusi barang saat menjelang natal dan tahun baru menyebabkan harga barang di pasaran tidak melonjak. Di sisi lain, melonjaknya harga bahan makanan pokok sebagai akibat dari anomali musim di tahun 2010 merupakan pemicu utama terjadinya inflasi Yogyakarta hingga mencapai 7,38 persen, jauh lebih tinggi bila dibandingkan dengan angka inflasi tahun 2009. Pada tahun 2011 dan 2012 Yogyakarta mengalami inflasi yang relatif kecil. Hal ini tidak terlepas dari dampak reponsif pemerintah yang secara terukur melakukan impor komoditas pokok dan melakukan intervensi pasar untuk menjaga keseimbangan permintaan dan penawaran dalam mengendalikan harga di pasar sehingga mampu menekan inflasi sebesar 3,88 persen pada tahun 2011 dan juga tertekannya inflasi 2012 pada angka 4,31 persen.

Perkembangan gejolak harga selama tahun 2013 menunjukkan peningkatan yang nyata. Hal ini terlihat dari angka inflasi yang naik cukup drastis dibanding tahun sebelumnya, yaitu mencapai 7,32 persen. Melonjaknya inflasi tersebut terutama dipicu oleh tingginya inflasi di kelompok bahan makanan, kelompok transpor, komunikasi, dan jasa keuangan, kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau masing-masing sebesar 12,31 persen, 10,45 persen, dan 8,15 persen.

Di sisi lain, perkembangan harga ditingkat produsen dicerminkan oleh perkembangan indeks implisit (lihat Tabel 8. lampiran). Pola perkembangan indeks ini menunjukkan hal senada dengan perkembangan harga di tingkat konsumen. Perkembangan harga di tingkat produsen hingga tahun 2012 mencapai 259,25 persen atau meningkat lebih dari 2,5 kali lipat dibandingkan harga pada tahun 2000. Perkembangan harga produsen tertinggi dicapai oleh sektor listrik, gas dan air (346,94 %), diikuti berturut-turut oleh sektor jasa-jasa (297,48 %), konstruksi (280,92 %), sektor industri (279,09 %), keuangan (256,35 %), sektor perdagangan, hotel dan restoran mencapai 251,72 persen, dan sektor penggalian (248,42%). Sementara sektor pertanian dan sektor pengangkutan dan komunikasi menunjukkan kenaikan harga produsen yang lebih lambat, yaitu masing-masing hanya mengalami kenaikan indeks menjadi 237,55 persen dan 196,80 persen.

3.5 Indeks Perkembangan Sektoral

Indeks perkembangan merupakan gambaran perkembangan nilai tambah tahun berjalan dibandingkan dengan tahun dasar. Indeks perkembangan sektoral dapat digunakan sebagai indikator untuk mengetahui sektor-sektor mana yang berkembang cepat, lambat atau bahkan menurun sejak tahun dasar (2000). Selanjutnya, dengan menelusuri besaran indeks ini akan dapat diketahui sektor yang prospektif pada masa yang akan datang.

Seperti tahun sebelumnya, di tahun 2013 sektor listrik dan air bersih DIY mempunyai indeks perkembangan atas dasar harga berlaku terbesar, yaitu sekitar 799,22. Indeks ini menunjukkan bahwa sektor listrik tersebut mampu berkembang sekitar 8 (delapan) kali lipat dibanding keadaan tahun 2000. Tetapi, indeks perkembangan ini belum terbebas dari pengaruh kenaikan harga, dan seperti diketahui bahwa PT. PLN secara

bertahap terus menaikkan tarif listrik sebagai akibat dari pengurangan subsidi BBM. Sementara jika dilihat indeks perkembangan atas dasar harga konstan yang telah terbebas dari pengaruh inflasi, maka indeks sektor listrik dan air bersih sebesar 230,37, yang berarti mengalami kenaikan sekitar 2,3 kali lipat dibandingkan tahun 2000.

Tabel 3.4 Indeks Perkembangan PDRB D.I.Yogyakarta menurut Lapangan Usaha, 2009-2013 (2000 = 100)

Lapangan Usaha	PDRB Berlaku					PDRB Konstan				
	2009	2010	2011	2012	2013**)	2009	2010	2011	2012	2013**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Pertanian	229,73	239,75	266,06	301,48	319,73	131,44	131,07	128,37	133,75	134,60
Pertambangan dan Penggalian	250,44	259,53	308,20	323,67	354,83	118,20	119,23	133,50	136,14	142,83
Industri Pengolahan	255,15	295,20	343,07	351,27	404,78	120,48	128,92	137,67	134,56	145,04
Listrik, Gas, & Air Bersih	562,09	608,99	678,05	730,01	799,22	186,19	193,64	201,88	216,28	230,37
Konstruksi	470,57	513,26	592,60	656,92	733,59	204,28	216,66	232,32	246,19	261,14
Perdagangan, Hotel & Restoran	310,19	342,20	389,24	435,23	499,63	158,11	166,53	175,17	186,90	198,49
Pengangkutan & Komunikasi	330,49	357,47	396,77	425,45	468,57	184,69	195,28	210,90	223,99	238,09
Keuangan, Real Estat & Jasa Perusahaan	348,44	387,80	439,38	500,53	557,35	162,13	172,44	186,14	204,66	217,42
Jasa - jasa	336,59	377,75	428,20	475,84	529,61	138,95	147,90	157,47	168,63	178,03
PDRB	307,16	338,45	384,15	423,08	472,46	148,84	156,11	164,18	172,91	182,24

Keterangan: **) Angka sangat sementara

Sumber: BPS Provinsi D.I.Yogyakarta

Di beberapa tahun terakhir, sektor konstruksi cukup prospektif di DIY. Tercatat indeks perkembangan sektor konstruksi ini atas dasar harga berlaku pada tahun 2013 sebesar 733,59 dan atas dasar harga konstan sebesar 261,14. Sebagai daerah yang cukup unik, menyandang berbagai predikat seperti kota budaya, kota pelajar/pendidikan, dan kota pariwisata, dengan masih mempertahankan budaya jawa, menyebabkan DIY merupakan wilayah yang menarik sebagai tempat hunian. Hal ini mendorong investor lokal maupun nasional untuk mengembangkan bisnis properti di DIY. Selain itu adanya pembangunan proyek prasarana fisik seperti pembangunan *fly over* di lintas jalan lingkar, pembukaan jalur jalan dan perbaikan jalan raya dan jembatan di beberapa wilayah DIY, serta giatnya pembangunan perumahan dan perhotelan mempercepat pergerakan indeks perkembangan sektor konstruksi.

Sektor listrik dan air bersih serta sektor konstruksi yang berkembang relatif cepat menunjukkan pembangunan fisik di Yogyakarta dalam kurun lima tahun terakhir

berkembang pesat. Dalam konteks keterkaitan antarsektor perekonomian maka sektor pengangkutan dan komunikasi juga berkembang sebagai akibat *multiplier effect* dari perkembangan dua sektor tersebut di atas. Berkembangnya sektor pengangkutan dan komunikasi dapat dilihat dari indeks perkembangan yang cukup tinggi pada tahun 2013, baik atas dasar harga berlaku (468,57) maupun harga konstan (238,09).

Di sisi lain dengan melihat indeks perkembangan secara riil, tampak bahwa sektor konstruksi, sektor angkutan dan komunikasi, sektor listrik, gas, dan air bersih, sektor keuangan, real estat, dan jasa perusahaan, serta sektor perdagangan, hotel dan restoran mempunyai indeks perkembangan yang cukup tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa sektor-sektor tersebut berkembang relatif lebih cepat di DIY dan mempunyai prospek yang cukup cerah di masa mendatang.

3.6 Perbandingan Nilai PDRB Antar Kabupaten/Kota

Daerah Istimewa Yogyakarta dengan memiliki luas wilayah sekitar 3.185,8 km² terbagi ke dalam 5 (lima) wilayah administratif kabupaten/kota, yaitu:

1. Kabupaten Kulonprogo
2. Kabupaten Bantul
3. Kabupaten Gunungkidul
4. Kabupaten Sleman
5. Kota Yogyakarta.

Sejak diberlakukannya kebijakan otonomi daerah, masing-masing kabupaten/kota mempunyai hak dalam hal mengatur kebijakan fiskal dan menentukan arah pembangunan. Hal ini menyebabkan perkembangan kinerja perekonomian daerah/wilayah sangat tergantung pada strategi pembangunan ekonomi yang diterapkan oleh pembuat kebijakan (*decision maker*) di tingkat kabupaten/kota.

Antara *nation* dan *region* ada beberapa kesamaan pengertian sehingga dalam menganalisis perekonomian makro suatu daerah dapat mengacu pada analisis perekonomian nasional. Meskipun demikian terdapat juga perbedaan prinsip yang menyebabkan analisis perekonomian nasional tidak dapat diterapkan secara mutlak di tingkat regional. Satu hal yang secara nyata membedakan *region* dengan *nation* adalah bahwa *region* tidak mempunyai kedaulatan sebagaimana *nation*. Hal ini menyebabkan adanya **keterbukaan hubungan antar-region**, sehingga arus barang dan jasa antardaerah sangat bebas, tidak seperti *nation* di mana arus barang dan jasa dari dan ke luar negeri harus melalui pihak bea dan cukai. Keterbukaan antar-region ini menyebabkan teori ekonomi tertutup sangat muskil diterapkan pada tingkat regional. Di satu sisi, adanya keterbukaan antar-region memungkinkan hubungan spasial yang sangat kuat antar *region*. Adanya hubungan spasial menyebabkan perkembangan perekonomian suatu daerah sangat mungkin dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi daerah di sekitarnya baik positif maupun negatif.

Tabel 3.5 Nilai PDRB Kabupaten/Kota di D.I.Yogyakarta Atas Dasar Harga Berlaku, 2009 – 2013 (juta rupiah)

Kabupaten/Kota/	2009	2010	2011	2012	2013**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kulonprogo	3 286 278	3 547 056	3 867 136	4.196.448	4.641.905,46
Bantul	8 147 860	9 076 401	10 097 345	11.242.151	12.729.839,71
Gunungkidul	5 987 783	6 624 572	7 250 682	7.962.605	8.893.404,83
Sleman	12 503 760	13 611 725	15 097 600	16.696.582	19.105.499,43
Kota Yogyakarta	10 607 237	11 777 579	12 962 435	14.327.563	15.981.933,35
DIY	41 407 049	45 625 589	51.785.150	57.037.833	63.690.318,30

Keterangan: **) Angka sangat sementara

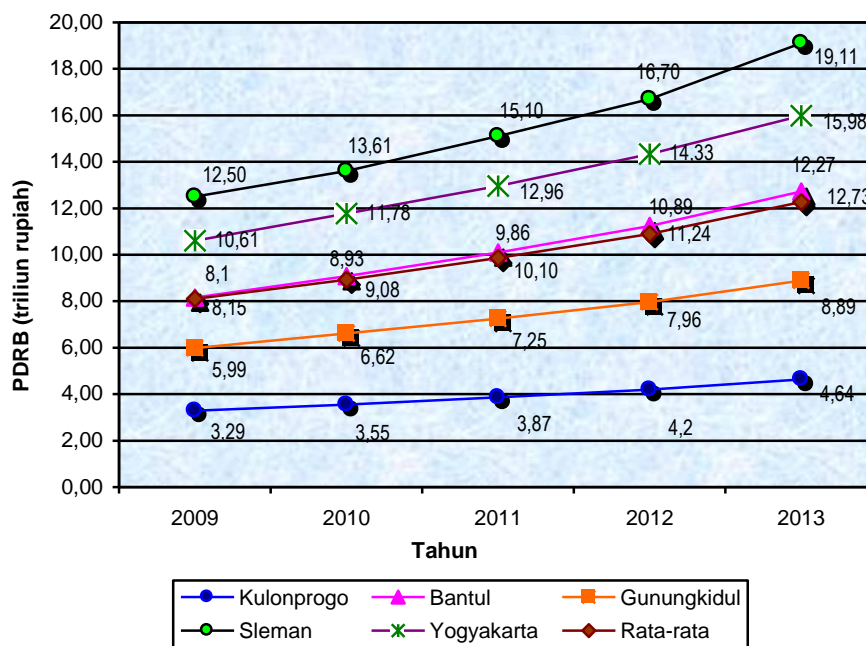
Sumber: BPS Provinsi D.I.Yogyakarta

Menganalisis kinerja perekonomian kelima kabupaten/kota di DIY memang tidak dapat dipisahkan dari **analisis spasial (tata ruang/geografis)**, karena kelima wilayah tersebut kemungkinan besar mempunyai keterkaitan erat secara sosial demografis. Namun, untuk sekedar membandingkan perkembangan perekonomian makro secara relatif antardaerah, maka dapat dilakukan dengan melihat besaran PDRB yang dihasilkan oleh masing-masing kabupaten/kota sebagai indikator makro.

Tabel 3.5 di atas memperlihatkan perbandingan nilai nominal PDRB antar waktu dan antar daerah. Sebagai penyanggah utama perkembangan Kota Yogyakarta, ternyata Kabupaten Sleman menghasilkan nilai PDRB terbesar "secara relatif" dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya. Sementara nilai PDRB terkecil ada di Kabupaten Kulonprogo. Untuk lebih memudahkan melihat perbandingan antardaerah dan pergeseran selama lima tahun, maka tabel di atas dapat diilustrasikan pada Gambar 3.4.

Dari Gambar 3.4 terlihat bahwa selama kurun waktu 5 (lima) tahun, kinerja perekonomian Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta melampaui rata-rata DIY. Angka rata-rata DIY diperoleh dari jumlah PDRB kabupaten/kota se- DIY dibagi dengan jumlah kabupaten/kota. Kondisi tersebut menunjukkan, bahwa kedua wilayah merupakan penopang perekonomian di DIY. Kemudian, kinerja ekonomi Kabupaten Bantul relatif sama dengan rata-rata DIY, sedangkan kinerja ekonomi Kabupaten Gunungkidul maupun Kabupaten Kulonprogo masih di bawah rata-rata DIY. Posisi ini selama kurun waktu tersebut bertahan tidak terjadi pergeseran, artinya tidak ada kabupaten/kota yang dapat melampaui wilayah lainnya. Yang menjadi catatan khusus adalah bahwa wilayah dengan nilai PDRB tinggi (Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta) pada periode 2009-2013 melonjak tajam dibandingkan wilayah lain.

Gambar 3.4 Nilai PDRB menurut Kabupaten/Kota di D.I.Yogyakarta Atas Dasar Harga Berlaku, 2009 - 2013 (triliun rupiah)



Perbedaan nilai PDRB antar kabupaten/kota sangat tergantung pada sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki serta ditunjang dengan teknologi yang tersedia. Kabupaten **Gunungkidul** dengan luas wilayah hampir setengah wilayah DIY, ternyata sampai dengan tahun 2013 hanya menempati urutan **keempat** dalam hal besaran nilai PDRB yang dihasilkan. Hal ini disebabkan perekonomian Kabupaten Gunungkidul masih ditopang oleh sektor pertanian dengan kondisi sebagian besar lahan pertanian pegunungan berbatu sehingga cara penanaman dan produktivitas komoditas pertaniannya juga tidak seperti di lahan pertanian subur. Sementara itu, Kota **Yogyakarta** dengan luas wilayah terkecil tetapi mampu mencapai nilai PDRB yang lebih besar (urutan **kedua**). Sebagai ibu kota DIY, Kota Yogyakarta merupakan pusat pemerintahan dan ditunjang oleh sarana dan prasarana serta teknologi yang lebih memadai, sehingga terdapat banyak aktivitas ekonomi di setiap sektor.

Kekuatan daya saing ekonomi antarkabupaten/kota di DIY menarik untuk dicermati. Apabila di atas sudah terbandingkan besaran nilai PDRB maka lebih jauh perbandingan struktur dan kontribusi sektor PDRB menurut lapangan usaha dapat dilihat di Tabel 3.6 dan 3.7. Melalui tabel-tabel tersebut dapat dilihat komposisi nilai tambah bruto sektor kegiatan ekonomi yang membentuk PDRB dan keunggulan masing-masing daerah menurut sektor kegiatan ekonomi. Kabupaten Gunungkidul lebih dominan di sektor pertanian dan sektor pertambangan dan penggalian dibandingkan kabupaten/kota lainnya. Kabupaten Sleman lebih unggul di sektor industri pengolahan; sektor konstruksi; serta sektor perdagangan, hotel, dan restoran. Sedangkan Kota Yogyakarta lebih unggul di sektor listrik, gas, dan air

bersih; sektor pengangkutan dan komunikasi; sektor keuangan, real estat, dan jasa perusahaan; serta sektor jasa-jasa.

Tabel 3.6 Nilai PDRB Kabupaten/Kota menurut Lapangan Usaha di D.I. Yogyakarta Atas Dasar Harga Berlaku, 2013^{*}) (juta rupiah)**

Lapangan Usaha	Kulonprogo	Bantul	Gunungkidul	Sleman	Yogyakarta
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pertanian	985.507	2.239.466	2.720.629	2.153.451	35.572
Pertambangan & Penggalian	36.684	98.745	135.206	90.599	662
Industri Pengolahan	585.909	2.142.812	767.162	2.274.445	1.305.602
Listrik, Gas, & Air Bersih	35.844	124.112	75.512	208.066	246.075
Konstruksi	269.980	1.333.501	773.087	2.135.294	1.171.420
Perdagangan, Hotel & Restoran	715.396	2.055.059	1.159.258	3.872.092	3.494.900
Pengangkutan & Komunikasi	375.562	770.174	495.428	922.507	2.222.297
Keuangan, Real Estat & Jasa Perusahaan	255.377	787.194	435.246	1.861.498	2.288.101
Jasa – jasa	936.190	1.691.088	1.401.078	3.178.630	3.562.936
PDRB	4.196.448	11.242.151	7.962.605	16.696.582	14.327.563

Sumber : BPS Provinsi D.I.Yogyakarta

Tabel 3.7 Kontribusi Sektor-sektor Dominan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut Kabupaten/Kota di D.I.Yogyakarta, 2009, 2011, 2013 (persen)

Kabupaten/kota	Sektor Dominan	Kontribusi		
		2009	2011	2013 ^{***})
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kulonprogo	1. Pertanian	24,11	23,68	22,87
	2. Jasa-jasa	19,92	21,10	22,31
	3. Perdagangan	16,40	16,97	17,27
Bantul	1. Pertanian	20,94	19,88	19,32
	2. Industri	18,75	19,73	19,06
	3. Perdagangan	17,85	17,82	18,55
Gunungkidul	1. Pertanian	35,82	33,84	33,31
	2. Jasa-jasa	16,95	17,30	17,95
	3. Perdagangan	14,87	14,60	14,56
Sleman	1. Perdagangan	22,82	22,87	23,26
	2. Jasa-jasa	18,50	18,85	18,81
	3. Industri	14,18	14,39	13,90
Yogyakarta	1. Perdagangan	23,24	24,06	24,88
	2. Jasa-jasa	24,48	24,74	24,42
	3. Pengangkutan	16,37	15,89	15,38

Keterangan: **) Angka sangat sementara

Sumber : BPS Provinsi D.I.Yogyakarta

Tabel 3.8 Kontribusi Sektor-sektor Dominan PDRB Atas Dasar Harga Konstan menurut Kabupaten/Kota di D.I.Yogyakarta, 2009, 2011, 2013 (persen)

Kabupaten/kota	Sektor Dominan	Kontribusi		
		2009	2011	2013**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kulonprogo	1. Pertanian	27,46	26,52	25,54
	2. Jasa-jasa	17,02	18,25	19,90
	3. Perdagangan	16,99	17,64	17,81
Bantul	1. Pertanian	24,32	22,04	20,81
	2. Perdagangan	19,76	20,11	20,68
	3. Industri	16,16	16,54	15,70
Gunungkidul	1. Pertanian	39,79	36,70	35,26
	2. Perdagangan	14,63	14,93	15,07
	3. Jasa-jasa	12,98	13,65	14,36
Sleman	1. Perdagangan	22,29	22,77	23,33
	2. Jasa-jasa	17,23	17,65	18,05
	3. Industri	15,11	15,07	14,13
Yogyakarta	1. Perdagangan	24,95	25,30	25,34
	2. Jasa-jasa	20,84	20,63	20,64
	3. Pengangkutan	19,61	19,95	20,63

Keterangan: **) Angka sangat sementara

Sumber : BPS Provinsi D.I.Yogyakarta

Dalam era otonomi daerah saat ini arah kebijakan perencanaan pembangunan ekonomi daerah akan sangat berpengaruh terhadap peningkatan PDRB. Kemudahan dalam berinvestasi, seperti dalam hal perijinan dan lain-lain yang dapat menarik investor asing sangat diperlukan untuk meningkatkan kinerja ekonomi daerah.

Salah satu hal yang menjadi masalah klasik dalam perekonomian adalah pemerataan kesejahteraan, selain masalah efisiensi. Pencapaian PDRB yang tinggi tanpa disertai pemerataan pendapatan maka akan menimbulkan kesenjangan ekonomi. Untuk melihat secara akurat seberapa jauh pemerataan pendapatan yang diperoleh masyarakat masih sangatlah sulit. Salah satu indikator yang cukup mendukung untuk melihat tingkat kesejahteraan masyarakat adalah dengan melihat nilai PDRB per kapita. Angka tersebut diperoleh dengan cara membagi nilai PDRB yang dihasilkan oleh suatu daerah/wilayah dengan jumlah penduduknya. Hanya saja dari angka PDRB per kapita secara individu belum dapat diketahui seberapa jauh disparitas pendapatan dalam suatu region, sehingga perlu membandingkan dengan daerah/wilayah lain sehingga disparitas antar-region dapat diketahui.

Gambaran kesenjangan antardaerah antara lain dapat dilihat dengan membandingkan nilai PDRB per kapita antarkabupaten/kota di DIY. Kota Yogyakarta selama lima tahun terakhir menjadi wilayah dengan nilai PDRB per kapita tertinggi. Selama tahun 2013, secara nominal rata-rata pendapatan penduduk Kota Yogyakarta mencapai Rp40,47 juta, dibanding dengan yang diterima oleh penduduk Kabupaten Kulon Progo lebih dari 3,4 kali lipat. Bahkan jika dibanding dengan pendapatan yang diterima oleh penduduk

Kabupaten Sleman juga masih di atas 2,4 kali lipat, meskipun Kabupaten Sleman memiliki nilai nominal PDRB tertinggi di DIY (Tabel 3.9).

Tabel 3.9 Nilai PDRB Per Kapita menurut Kabupaten/Kota di D.I. Yogyakarta Atas Dasar Harga Berlaku, 2009 - 2013 (rupiah)

Kabupaten/Kota/	2009	2010	2011	2012	2013**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kulonprogo	8.480.872	9.120.975	9.910.472	10.671.984	11.770.582
Bantul	9.060.104	9.956.746	10.960.3317	12.114.961	13.564.996
Gunungkidul	8.864.564	9.807.962	10.694.252	11.628.655	12.980.950
Sleman	11.634.944	12.451.096	13.634.545	14.976.756	16.920.504
Yogyakarta	27.220.030	30.303.585	33.189.951	36.363.267	40.472.989
DIY	12.083.874	13.195.095	14.849.534	16.227.097	17.981.852

Keterangan: **) Angka sangat sementara
Sumber : BPS Provinsi D.I.Yogyakarta

3.7 Perbandingan Nilai PDRB Antarprovinsi

Peran ekonomi provinsi-provinsi di Pulau Jawa terhadap ekonomi nasional cukup besar. Pada Tabel 3.10 terlihat bahwa provinsi-provinsi yang menduduki peringkat 4 besar adalah provinsi-provinsi yang berada di Pulau Jawa, Yaitu DKI Jakarta (16,40 %), Jawa Timur(14,88 %), Jawa Barat(14,07 %) dan Jawa Tengah(8,27 %). Secara keseluruhan Pulau Jawa mempunyai andil dalam pembentukan PDB sebesar 57,62 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. DKI Jakarta sebagai pusat pemerintahan, perdagangan dan jasa, sedangkan provinsi Jawa Timur, Jawa Barat dan Jawa Tengah lebih banyak didominasi oleh aktivitas Industri pengolahan, Perdagangan dan Pertanian. Pemberi kontribusi terbesar ke 5 diduduki oleh Provinsi Riau.

D.I. Yogyakarta dengan kontribusi hanya 1,47 persen memiliki peringkat terendah di Pulau Jawa, dan urutan ke-20 dibandingkan 33 provinsi lainnya dengan kontribusi hanya sebesar 0,94 persen. Rendahnya peringkat DIY dikarenakan wilayah ini dalam perkembangannya memang merupakan daerah pusat pendidikan dan kebudayaan sehingga tidak banyak aktivitas ekonomi yang berskala besar berlokasi di wilayah ini. Kedudukan PDRB D.I Yogyakarta berada diatas 13 provinsi lainnya, berturut-turut yaitu Kalteng, Sulteng, NTB, Sulut, Papua barat, Sultra, NTT, Kep. Babel, Bengkulu, Sulbar, Maluku, Gorontalo dan Maluku Utara, dengan kontribusi masing-masing dibawah 1 (satu) persen.

Seperti halnya peringkat PDRB atas harga berlaku, peringkat PDRB 33 provinsi menurut harga konstan menunjukkan peringkat yang relatif sama. Pulau jawa tetap menempati peringkat pertama, dimana DKI, Jatim, Jabar dan Jateng menduduki berturut-turut peringkat 1 hingga 4. D.I. Yogyakarta menduduki peringkat 18 atau dua level lebih

baik dibandingkan dengan PDRB atas dasar harga yang berlaku. Kedudukan PDRB D.I Yogyakarta berada diatas 15 lainnya, yaitu Papua, Kalteng, Sulut, Sulteng, Jambi, NTB, Sultra, NTT, Papua barat, Kep. Babel, Bengkulu, Sulbar, Maluku, Maluku Utara dan Gorontalo.

Tabel 3.10 Ringkasan PDRB Provinsi –Provinsi di Indonesia, 2013

PROPINSI	PDRB		Pertum buhan 2013	Kontribusi (%)		Peringkat	
	ADHB	ADHK 2000		thd. Pulau	thd. 33 Prov.	Berlaku	Konstan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Sumatera	1.804.588.262,34	553.400.393,74	5,27	100,00	23,81	II	II
01. Aceh	103.045.560,96	38.012.966,70	4,18	5,71	1,36	13	14
02. Sumatra Utara	403.933.051,11	142.537.121,58	6,01	22,38	5,33	7	5
03. Sumatra Barat	127.099.945,69	46.640.235,57	6,18	7,04	1,68	12	12
04. Riau	522.241.425,61	109.073.137,08	2,61	28,94	6,89	5	7
05. Kepulauan Riau	100.310.415,69	49.667.224,63	6,13	5,56	1,32	14	11
06. Jambi	85.558.313,54	21.979.276,97	7,88	4,74	1,13	17	23
07. Sumatra Selatan	231.683.035,00	76.409.764,00	5,98	12,84	3,06	9	9
08. Kep. Bangka Belitung	38.934.840,59	12.905.012,96	5,29	2,16	0,51	28	28
09. Bengkulu	27.388.245,81	10.052.308,47	6,21	1,52	0,36	29	29
10. Lampung	164.393.428,33	46.123.345,78	5,97	9,11	2,17	11	13
Jawa	4.394.417.861,49	1.637.075.815,39	6,14	243,51	57,99	I	I
11. DKI Jakarta	1.255.925.781,82	477.285.245,38	6,11	69,60	16,57	1	1
12. Jawa Barat	1.070.177.137,57	386.838.839,69	6,06	59,30	14,12	3	3
13. Banten	244.548.138,03	105.856.068,16	5,86	13,55	3,23	8	8
14. Jawa Tengah	623.749.617,33	223.099.740,34	5,81	34,56	8,23	4	4
15. DI Yogyakarta	63.690.318,30	24.567.476,12	5,40	3,53	0,84	20	19
16. Jawa Timur	1.136.326.868,44	419.428.445,69	6,55	62,97	14,99	2	2
Bali dan Nusa Tenggara	191.299.041,52	69.951.240,85	5,84	10,60	2,52	V	V
17. Bali	94.555.773,32	34.787.962,78	6,05	5,24	1,25	15	17
18. Nusa Tenggara Barat	56.277.969,79	20.417.221,33	5,69	3,12	0,74	23	24
19. Nusa Tenggara Timur	40.465.298,41	14.746.056,74	5,56	2,24	0,53	27	27
Kalimantan	657.262.860,59	217.261.483,86	3,49	36,42	8,67	III	III
20. Kalimantan Barat	84.956.229,91	36.075.103,43	6,08	4,71	1,12	18	16
21. Kalimantan Tengah	63.515.466,70	22.999.676,51	7,37	3,52	0,84	21	20
22. Kalimantan Selatan	83.361.788,42	36.196.218,23	5,18	4,62	1,10	19	15
23. Kalimantan Timur	425.429.375,56	121.990.485,69	1,59	23,57	5,61	6	6
Sulawesi	365.534.747,33	134.936.046,15	7,84	20,26	4,82	IV	IV
24. Sulawesi Utara	53.401.101,43	22.872.162,72	7,45	2,96	0,70	24	22
25. Gorontalo	11.752.198,97	3.646.550,61	7,76	0,65	0,16	32	33
26. Sulawesi Tengah	58.641.176,09	22.979.401,05	9,38	3,25	0,77	22	21
27. Sulawesi Selatan	184.783.059,05	64.284.430,52	7,65	10,24	2,44	10	10
28. Sulawesi Barat	16.184.012,69	6.112.645,40	7,16	0,90	0,21	30	30
29. Sulawesi Tenggara	40.773.199,10	15.040.855,84	7,28	2,26	0,54	26	26
Maluku dan Papua	165.016.098,35	48.445.781,66	11,31	9,14	2,18	VI	VI
30. Maluku	13.245.347,34	5.111.309,39	5,14	0,73	0,17	31	31
31. Maluku Utara	7.725.420,01	3.656.304,12	6,12	0,43	0,10	33	32
32. Papua	93.136.604,41	24.616.649,43	14,84	5,16	1,23	16	18
33. Papua Barat	50.908.726,59	15.061.518,72	9,30	2,82	0,67	25	25
33 PROPINSI	7.578.118.871,62	2.661.070.761,64	5,90	419,94	100,00		

Sementara dari sisi PDRB atas dasar harga berlaku, di tingkat regional Kawasan Jawa, Bali dan Nusa tenggara (JABALNUSRA), posisi PDRB D.I. Yogyakarta berada di atas NTT atau berada pada peringkat ke-7 dibandingkan dengan sejumlah 9 provinsi di kawasan Jabalnusra. Posisi DIY tidak berbeda bila dilihat dari sisi perbandingan PDRB atas dasar harga konstan, yaitu di peringkat ke-7 atau di atas Provinsi NTB dan NTT.

BAB IV

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO MENURUT PENGUNAAN

Pada bab terdahulu telah dibahas PDRB dari sisi lapangan usaha atau produksi. Selanjutnya, dalam bab ini dibahas besaran PDRB dari sisi penggunaan (*expenditure*). Bagian ini menjelaskan alokasi penggunaan nilai tambah yang dihasilkan sektor produksi oleh masing-masing pelaku ekonomi dalam bentuk barang konsumsi akhir (*final goods*). PDRB menurut penggunaan meliputi komponen: konsumsi, pembentukan modal tetap domestik bruto (PMTDB), ekspor dan impor, serta perubahan inventori.

Mengawali kajian PDRB dari sisi pengeluaran terlebih dahulu dibahas mengenai peranan pelaku ekonomi dalam menjalankan roda perekonomian. Dalam sistem perekonomian, pelaku ekonomi residen di suatu wilayah domestik dapat diklasifikasikan menjadi lima kelompok berdasarkan Sistem Neraca Nasional 2008 yang diterbitkan PBB, yaitu:

1. Rumah tangga
2. Pemerintah
3. Korporasi Non Keuangan
4. Korporasi Keuangan
5. Lembaga Non Profit yang melayani rumah tangga.

Jika terjadi transaksi antara residen dan non residen, maka klasifikasi di atas ditambah:

6. Kelompok luar daerah / luar negeri.

Masing-masing institusi tersebut berperan sebagai pelaku ekonomi, di mana antara satu institusi dengan yang lainnya dapat dibedakan berdasarkan fungsi dan perilakunya dalam sistem perekonomian.

Pada tingkat paling dasar, rumah tangga menyediakan sumber daya berupa faktor-faktor produksi yang dibutuhkan oleh korporasi untuk memproduksi barang dan jasa. Faktor produksi tersebut dapat berupa: tenaga kerja, tanah, modal, dan kewiraswastaan (*entrepreneurship*). Sebagai balas jasanya, rumah tangga menerima pembayaran dari korporasi berupa: upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal, dan keuntungan (*profit* dan *dividen*).

Berkebalikan dengan peran rumah tangga, korporasi mempekerjakan dan memberi balas jasa atas faktor yang disediakan oleh rumah tangga. Tugas korporasi adalah memproduksi barang dan jasa yang kemudian dikonsumsi oleh rumah tangga, pemerintah, korporasi lain dan pasar luar daerah/luar negeri. Korporasi juga memainkan peran vital

dalam pembentukan investasi berupa pengadaan mesin dan peralatan, tanah dan bangunan, serta kapasitas produksi lainnya.

Seperti halnya korporasi, pemerintah memainkan berbagai peran dalam perekonomian seperti penyediaan layanan publik untuk kesehatan, pendidikan, pertahanan dan keamanan, penegakan hukum dan kegiatan lainnya. Kemudian, pemerintah memberikan balas jasa berupa upah dan gaji kepada pegawainya yang juga merupakan bagian dari kelompok rumah tangga. Untuk memenuhi konsumsinya, pemerintah memerlukan barang dan jasa konsumsi akhir dari perusahaan. Dalam bidang pembentukan modal, pemerintah juga mengeluarkan dana melalui pembangunan infrastruktur jalan baru, jembatan, bangunan untuk sarana umum seperti: rumah sakit, sekolah, dan lainnya. Pada akhirnya, pemerintah memungut pajak dari individu dan perusahaan untuk mendanai konsumsi pemerintah, termasuk pembayaran transfer kepada penduduk yang memerlukan berupa subsidi baik langsung maupun tidak langsung.

Kelompok jasa keuangan berperan menjalankan fungsi intermediasi keuangan seperti: bank, perusahaan asuransi, dana pensiun, dan lain-lain. Institusi ini tidak memproduksi output secara fisik, sehingga kegiatan mereka biasanya dikelompokkan terpisah dari korporasi. Peran kelompok ini adalah menyediakan layanan untuk menjembatani kepentingan antara penyedia dana/penabung (kreditor) dan peminjam (debitor). Penabung bisa berasal dari rumah tangga, korporasi, pihak asing, dan badan-badan lainnya yang melayani publik. Sebagai pihak penyelenggara dan penyedia dana, institusi jasa keuangan mempunyai peran yang sangat strategis dalam mendukung baik pembangunan ekonomi maupun pembangunan di bidang lainnya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Adapun kelompok luar daerah/luar negeri memberikan sumbangan langsung dalam hal kegiatan transaksi ekspor dan impor, baik untuk transaksi dengan daerah lain maupun dengan pihak luar negeri. Meningkatnya ketergantungan antardaerah/negara karena dampak globalisasi (pasar bebas), maka masuknya arus investasi dari luar cenderung meningkat. Arus modal ini sangat berperan dalam menutup kekurangan tabungan domestik untuk pembiayaan investasi dan belanja konsumsi yang diperlukan penduduk.

4.1 Struktur PDRB Penggunaan

4.1.1 Konsumsi Rumah Tangga

Nilai konsumsi yang dibelanjakan oleh rumah tangga pada tahun 2013 tercatat sebesar Rp33,29 triliun dari total nilai PDRB DIY sebesar Rp63,69 triliun atau mencapai sekitar 52,27 persen. Ini berarti ada peningkatan karena di tahun 2012 konsumsi rumah tangga sebesar 51,46 persen. Relatif tingginya persentase konsumsi rumah tangga dalam penggunaan PDRB menunjukkan bahwa komponen ini masih berperan besar untuk menggerakkan perekonomian daerah (Tabel 4.1 dan Gambar 4.1).

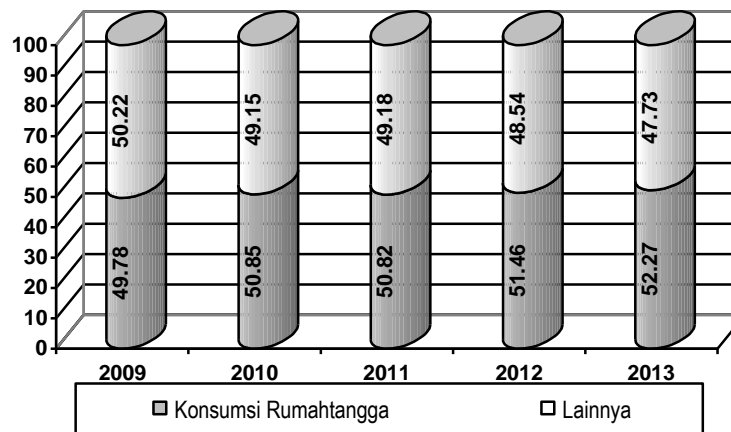
Tabel 4.1 Nilai PDRB atas Dasar Harga Berlaku menurut Penggunaan di DI Yogyakarta, 2009–2013 (juta rupiah)

Jenis Penggunaan	2009	2010	2011	2012*	2013**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran konsumsi rumah tangga	20.610.786	23.198.963	26.319.415	29.350.917	33.293.526
a. Makanan	9.608.852	10.936.141	12.408.752	13.863.666	16.180.636
b. Bukan Makanan	11.001.934	12.262.821	13.910.663	15.487.251	17.112.890
2. Pengeluaran konsumsi lembaga swasta nirlaba	1.171.357	1.437.471	1.724.961	1.953.486	2.269.996
3. Pengeluaran konsumsi pemerintah	10.789.365	11.717.424	13.066.881	14.773.182	16.809.335
4. Pembentukan modal tetap bruto	13.964.317	15.027.836	16.466.550	17.868.279	19.908.292
5. Perubahan Inventori	1.025.286	823.693	859.193	974.105	994.294
6. Diskrepansi statistik	600.545	634.701	984.496	-94.416	-120.913
7. Ekspor barang & jasa :	15.989.976	17.873.357	20.145.476	23.528.777	26.907.824
a. Antar negara / luar negeri	1.116.017	1.226.875	1.299.105	1.463.315	1.692.622
b. Antar provinsi	14.873.959	16.646.482	18.846.371	22.065.462	25.215.202
Dikurangi :					
8. Impor barang & jasa :	22.744.584	25.087.856	27.781.823	31.319.947	36.372.036
a. Antar negara / luar negeri	538.717	640.380	635.518	737.578	860.560
b. Antar provinsi	22.205.867	24.447.476	27.146.305	30.582.369	35.511.476
P D R B	41.407.049	45.625.589	51.785.150	57.034.383	63.690.318

Sumber : BPS Provinsi D.I.Yogyakarta

Ket : * angka sementara; ** angka sangat sementara

Gambar 4.1 Persentase Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku di DIY, 2009-2013



Menurut jenis pengeluarannya, pada periode 2009–2013 persentase konsumsi non makanan selalu lebih besar dibanding konsumsi makanan, dan kondisi di tahun 2013 porsi perbandingannya sebesar 26,41 persen dan 25,41 persen terhadap total PDRB pada tahun 2013 (Tabel 4.2). Karakteristik seperti ini umumnya ditemui pada penduduk perkotaan, di mana konsumsi non makanan mendominasi pengeluaran rumah tangga seiring dengan meningkatnya tingkat kesejahteraan penduduk. Hukum Engel menyatakan, bahwa dengan meningkatnya tingkat pendapatan penduduk maka porsi makanan akan semakin berkurang.

Tabel 4.2 Struktur PDRB menurut Penggunaan di DIY, 2009 – 2013 (persen)

Jenis Penggunaan	2009	2010	2011*	2012 ^{*)}	2013 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran konsumsi rumah tangga	49,78	50,85	50,82	51,46	52,27
a. Makanan	23,21	23,97	23,96	24,31	25,41
b. Bukan Makanan	26,57	26,88	26,86	27,15	26,87
2. Pengeluaran konsumsi lembaga swasta nirlaba	2,83	3,15	3,33	3,43	3,56
3. Pengeluaran konsumsi pemerintah	26,06	25,68	25,23	25,90	26,39
4. Pembentukan modal tetap bruto	33,72	32,94	31,80	31,33	31,26
5. Perubahan Inventori	2,48	1,81	1,66	1,71	1,56
6. Diskrepansi statistik	1,45	1,39	1,90	-0,17	-0,19
7. Ekspor barang & jasa :	38,62	39,17	38,90	41,25	42,25
a. Antar negara / luar negeri	2,70	2,69	2,51	2,57	2,66
b. Antar provinsi	35,92	36,48	36,39	38,69	39,59
Dikurangi :					57,11
8. Impor barang & jasa :	54,93	54,99	53,65	54,91	1,35
a. Antar negara / luar negeri	1,30	1,40	1,23	1,29	55,76
b. Antar provinsi	53,63	53,58	52,42	53,62	52,27
P D R B	41.407.049	45.625.589	51.785.150	57.034.383	63.690.318
%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Provinsi D.I.Yogyakarta

Ket: *) angka sementara; **) angka sangat sementara

Kecenderungan besarnya porsi konsumsi nonmakanan dalam konsumsi rumah tangga di DIY terkait dengan konsumsi penduduk di Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul yang telah mengarah pada pola konsumsi penduduk perkotaan yang ditandai dengan konsumsi nonmakanan relatif besar. Pola konsumsi rumah tangga menurut kabupaten/ kota terlihat pada Tabel 4.3.

Selama tahun 2000-2013 terdapat pergeseran yang cukup signifikan porsi makanan pada rumah tangga di DIY yakni dari 60,11 persen pada tahun 2000 menjadi 47,87 persen pada tahun 2013. Akibatnya porsi konsumsi nonmakanan naik dari 39,89 persen pada tahun 2000 menjadi 52,13 persen pada tahun 2013. Kondisi tersebut menggambarkan perbedaan peradaban pola konsumsi dari orientasi untuk makanan bergeser ke orientasi kebutuhan selain makanan.

Pola pergeseran yang sama juga terjadi di kabupaten/kota dengan tingkat kecepatan yang berbeda. Empat kabupaten/kota tercatat mengalami pengurangan porsi makanan relatif cepat dengan tingkat perubahan mencapai dua digit selama empat belas tahun terakhir, sedangkan Kabupaten Gunungkidul tercatat mengalami perubahan yang relatif lebih lambat. Hal ini sejalan dengan asumsi dasar ekonomi yang menyebutkan bahwa semakin tinggi pendapatan dan tingkat pendidikan penduduk atau rumah tangga suatu daerah maka porsi konsumsi nonmakanannya akan semakin lebih besar dibanding makanan. Logika dasar ilmu sosial budaya juga mengatakan semakin berkembang dan majunya peradaban maka kecenderungan orientasi kebutuhan bergeser ke selain makanan.

Lebih jauh bila dicermati pola konsumsi kabupaten/kota tahun 2013, terlihat bahwa porsi konsumsi non makanan di Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul lebih tinggi dari konsumsi makanan. Kondisi ini mengisyaratkan bahwa secara ekonomi dan sosial budaya daerah-daerah ini lebih maju dibandingkan Kabupaten Kulon Progo dan Gunungkidul.

Tabel 4.3 Pola Konsumsi Rumah Tangga menurut Kabupaten/ Kota di DIY, 2000 dan 2013 (persen)

Kabupaten/ Kota	2000		2013		Perubahan Persentase Makanan
	Makanan	Non Makanan	Makanan	Non Makanan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Kulonprogo	67,61	32,39	55,08	44,92	-12,53
2. Bantul	62,51	37,49	49,50	50,50	-13,01
3. Gunungkidul	65,59	34,41	60,02	39,98	-5,57
4. Sleman	59,62	40,38	44,52	55,48	-15,10
5. Yogyakarta	50,59	49,41	39,75	60,25	-10,84
DIY	60,11	39,89	47,87	52,13	-12,24

Sumber : BPS Provinsi D.I.Yogyakarta, diolah dari data SUSENAS

4.1.2 Konsumsi Pemerintah

Dalam tatanan kehidupan bernegara lembaga eksekutif pemerintah tidak hanya berperan dalam menyusun regulasi atau membuat kebijakan untuk mengatur kehidupan bernegara. Pemerintah juga turut melaksanakan kegiatan ekonomi melalui instrumen belanja pemerintah. Peran pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat masih sangat dibutuhkan seperti penyelenggaraan pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, atau dalam bentuk intervensi program lainnya yang diperuntukkan membantu penduduk yang berpenghasilan rendah. Kegiatan dimaksud selain membutuhkan anggaran yang tertuang dalam RAPBN(D), juga memerlukan biaya operasional yang merupakan pengeluaran untuk konsumsi penyelenggaraan administrasi pemerintahan atau disingkat Konsumsi Pemerintah.

Pengeluaran konsumsi pemerintah dalam pembentukan PDRB DIY tercatat sebesar Rp. 16,81 triliun pada tahun 2013 atau andilnya sekitar 26,39 persen terhadap PDRB. Meskipun selama lima tahun terakhir terjadi fluktuasi andil konsumsi pemerintah, namun kecenderungannya semakin meningkat sejak tahun 2012 setelah di tahun 2011 berada pada posisi terendah (Tabel 4.1 dan Tabel 4.2). Indikasi ini menegaskan bahwa peran pemerintah melalui kebijakan fiskalnya masih cukup dominan untuk menggerakkan perekonomian DIY.

Mencermati Konsumsi Pemerintah menurut sumber pembiayaan, terlihat bahwa ketergantungan pada pembiayaan dari alokasi APBN masih cukup besar yakni mencapai 54,03 persen pada tahun 2012. Selama lima tahun terakhir sumber pembiayaan dari alokasi pemerintah pusat selalu lebih besar dari 50 persen (Tabel 4.4). Adapun sumber belanja

pemerintah daerah yang berasal dari APBN antara lain berasal dari dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK) dan dana dekonsentrasi.

Tabel 4.4 Struktur Konsumsi Pemerintah menurut Sumber Pembiayaan di DIY, 2009 – 2013 (persen)

Sumber Pembiayaan	2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. APBD Provinsi dan Kab/Kota	46,12	46,6	43,33	45,97	n/a
2. Alokasi Pemerintah Pusat	53,88	53,4	56,67	54,03	n/a
Total Nilai (juta rupiah)	10.789.365	11.717.424	13.066.881	14.764.647	16.809.335
%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Provinsi DIY, hasil pengolahan K1, K2 dan Neraca Pemerintah Pusat

Ket: * angka sementara; ** angka sangat sementara; n/a: belum tersedia

Berdasarkan alokasi, sebagian besar konsumsi Pemerintah DIY dihabiskan untuk belanja pegawai yang mencapai 67,83 persen pada tahun 2012, sedangkan sisanya sebesar 32,17 persen untuk belanja barang (Tabel 4.5).

Selama periode 2009–2012, terdapat kecenderungan komposisi belanja pegawai semakin mengecil, yaitu proporsinya tercatat sebesar 72,26 persen pada tahun 2009 menjadi 67,83 persen pada tahun 2012. Namun demikian, proporsi ini tergolong tinggi sebagai akibatnya komposisi anggaran untuk belanja barang dan jasa relatif kecil (Tabel 4.5).

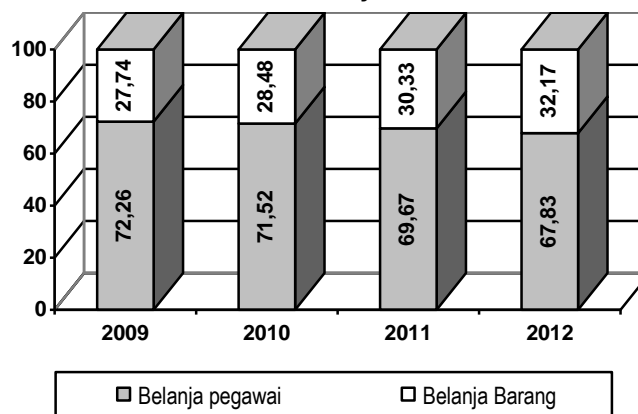
Tabel 4.5 Struktur Konsumsi Pemerintah menurut Jenis Pembiayaan di DIY, 2009 – 2013 (persen)

Jenis Pembiayaan	2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Belanja Pegawai	72,26	71,52	69,67	67,83	n/a
2. Belanja Barang	27,74	28,48	30,33	32,17	n/a
Total Nilai (miliar rupiah)	10.789.365	11.717.424	13.066.881	14.764.647	16.809.335
%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Provinsi DIY, hasil pengolahan K1, K2 dan Neraca Pemerintah Pusat

Ket: *) angka sementara; **) angka sangat sementara

Gambar 4.2 Persentase Pengeluaran Konsumsi Pemerintah DIY menurut Jenisnya, 2009-2012



4.1.3 Investasi

Kesinambungan pertumbuhan ekonomi memerlukan adanya penanaman modal atau investasi baru, baik investasi asing maupun domestik. Pembangunan ekonomi memerlukan keterlibatan kegiatan produksi barang dan jasa di seluruh sektor ekonomi dan diperlukan dana untuk membiayai aktivitas tersebut. Investasi sangat diperlukan untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya adanya peningkatan investasi membuka peluang penambahan penyerapan tenaga kerja. Oleh karena itu kegiatan investasi diharapkan dapat menciptakan perluasan lapangan kerja baru bagi penduduk sehingga mereka dapat meningkatkan kesejahteraannya.

Dalam buku *A System of National Account (SNA)* yang diterbitkan oleh PBB (*United Nations*), dijelaskan bahwa realisasi investasi di suatu daerah/wilayah pada tahun tertentu sama dengan penjumlahan nilai pembentukan modal tetap (domestik) bruto (PMTB) dan perubahan inventori. PMTB menggambarkan investasi fisik domestik yang telah direalisasikan pada tahun tertentu secara kumulatif. Sedangkan inventori (stok) menggambarkan output suatu sektor yang belum selesai diproses, dapat berbentuk barang setengah jadi, atau bahkan input yang belum digunakan, dan barang jadi yang belum terjual.

Pada tahun 2013 nilai investasi fisik (PMTB) di DIY mencapai Rp19,91 triliun atau naik sekitar Rp2,04 triliun dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar Rp17,87 triliun. Peningkatan tersebut lebih besar dibanding tahun sebelumnya yang naik sekitar Rp1,40 triliun. Selama lima tahun terakhir, perkembangan investasi fisik di DIY cukup pesat yang didorong oleh tingginya perkembangan sektor perdagangan, keuangan, industri, dan jasa-jasa. Pada tahun 2013 komponen PMTB tumbuh lebih cepat yaitu sebesar 5,02 persen setelah tumbuh 4,96 persen pada tahun sebelumnya.

Menurut komposisinya dalam PDRB, sumbangan investasi fisik terhadap PDRB tercatat 36,20 persen tahun 2009 dan menjadi 32,63 persen pada tahun 2013 (Tabel 4.6). Salah satu indikator ekonomi untuk melihat tingkat efisiensi penanaman modal di suatu daerah/wilayah, ukuran yang biasa digunakan adalah ICOR (*Incremental Capital Output Ratio*). Indikator ini merupakan rasio antara nilai investasi dengan pertambahan output dalam periode tertentu. Dalam tulisan ini, indikator ICOR yang dihitung adalah konsep ICOR dengan *time-lag* 0, artinya bahwa investasi yang ditanam pada tahun tertentu akan menghasilkan tambahan output pada tahun itu juga. Untuk memudahkan perhitungan karena keterbatasan data yang tersedia, maka sebagai pendekatan ICOR digunakan ICVAR (*Incremental Capital Value Added Ratio*).

Tabel 4.6 Nilai dan Andil Investasi Fisik terhadap PDRB dan ICOR di DIY, 2009–2013

Uraian	2009	2010	2011	2012 ^{*)}	2013 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Investasi Fisik / PMTDB (juta rupiah)	13.964.317 (33,72)	15.027.836 (32,94)	16.466.550 (31,80)	17.868.279 (31,33)	19.908.292 (31,26)
2. Perubahan Inventori (juta rupiah)	1.025.286 (2,48)	823.693 (1,81)	859.193 (1,66)	870.524 (1,53)	873.381 (1,37)
3. PMTDB + Perubahan Inventori (juta rp)	14.989.604 (36,20)	15.851.530 (34,74)	17.325.743 (33,46)	18.738.803 (32,86)	20.781.673 (32,63)
4. ICOR, Investasi = PMTDB (lag 0)	6,31	5,68	5,35	5,19	5,09
5. ICOR, Investasi = PMTDB + Perubahan Inventori (lag 0)	7,28	6,33	5,97	5,79	5,63

Sumber : BPS Provinsi D.I.Yogyakarta, data diolah

Keterangan : Angka dalam kurung adalah *share* terhadap PDRB

* angka sementara; ** angka sangat sementara

Selama periode tahun 2009–2013, ICVAR DIY tercatat relatif agak tinggi yaitu selalu di atas dari 5 (lima) dan mencapai nilai tertinggi pada tahun 2009 yaitu 7,28. Namun demikian, ICVAR Provinsi DIY mempunyai kecenderungan terus membaik (angkanya menurun) hingga tahun 2013 mencapai 5,63. Angka ICVAR 5,63 di tahun 2013 menunjukkan bahwa untuk mendapatkan pertumbuhan ekonomi sebesar satu persen diperlukan pertumbuhan investasi sebesar 5,63 persen. Nilai ICVAR ini masih relatif tinggi dan termasuk dalam kategori kurang efisien karena menurut Widodo (1990) angka ICVAR yang memiliki produktivitas investasi yang baik adalah yang berkisar antara 3–4.

4.1.4 Ekspor dan Impor

Modal sosial posisi Provinsi DIY sebagai daerah tujuan wisata dan kota pendidikan, menjadikan daerah ini di samping sebagai pusat pemasaran bagi produk-produk dari daerah lain, juga membuka peluang melakukan upaya ekspor ke luar wilayah. Aktivitas wisata juga menjadikan DIY sebagai produsen dari berbagai industri kerajinan untuk memenuhi permintaan wisatawan.

Besaran absolut nilai ekspor Provinsi DIY tahun 2013 tercatat sebesar Rp26,91 triliun, yang terdiri dari ekspor luar negeri Rp1,69 triliun dan Rp25,22 triliun untuk ekspor antarprovinsi. Dibanding tahun 2012 nilai pencapaian ekspor ini jauh lebih baik.

Ekspor antar provinsi yang dilakukan langsung oleh wisatawan diperkirakan memberi dampak cukup besar bagi perkembangan nilai ekspor. Transaksi dagang yang terjadi antara wisatawan dan pedagang dapat berpeluang membentuk jaringan pemasaran produk-produk domestik ke daerah-daerah lainnya. Komoditas yang dominan dalam ekspor antar provinsi adalah produk sektor industri, sedangkan dalam ekspor jasa didominasi oleh jasa hotel dan restoran, serta jasa angkutan dan komunikasi yang dinikmati oleh wisatawan.

Sumbangan ekspor barang dan jasa terhadap PDRB pada tahun 2013 mencapai 42,25 persen atau terjadi kenaikan sekitar 1 poin dibanding tahun sebelumnya. Ekspor barang dan jasa ini didominasi oleh ekspor dalam negeri yaitu menyumbang sebesar 39,59 persen terhadap PDRB sedangkan ekspor luar negeri hanya sebesar 2,66 persen. Jika dilihat perkembangannya selama lima tahun terakhir peranan ekspor luar negeri cenderung stabil dari 2,56 persen pada tahun 2009 menjadi 2,66 persen pada tahun 2013 (**Tabel Lampiran 29**). Hal ini menggambarkan kecenderungan tidak kompetitifnya produk-produk domestik dibandingkan dengan produk impor dari luar negeri seperti China. Salah satu penyebab kurang daya saingnya adalah harga yang lebih tinggi sebagai dampak biaya bahan baku yang tinggi pula karena banyak pelaku industri mendatangkan bahan baku dari luar DIY.

Sementara itu, nilai impor barang dan jasa tahun 2013 tercatat sebesar Rp36,37 triliun, melampaui nilai ekspor pada tahun yang sama, sehingga nilai ekspor neto DI Yogyakarta bertanda negatif yang berarti barang dan jasa yang diimpor lebih besar dari barang dan jasa yang diekspor ke luar wilayah.

Sumbangan impor dalam PDRB cenderung meningkat dari 54,87 persen pada tahun 2009 menjadi 57,11 persen pada tahun 2013. Beberapa komoditas yang diimpor di samping untuk memenuhi konsumsi domestik, juga digunakan untuk konsumsi para wisatawan baik nusantara maupun mancanegara. Fenomena ini dapat menjelaskan bahwa impor yang dilakukan oleh pelaku ekonomi di DIY sebagian diekspor kembali karena tidak dikonsumsi seluruhnya.

4.2 Pertumbuhan Ekonomi dari Sisi Permintaan

Kebijakan pertumbuhan ekonomi merupakan aspek terpenting dalam setiap perumusan kebijakan makro yang disusun oleh pemerintah, selain upaya untuk menekan laju inflasi, menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan, maupun menjaga stabilitas nilai tukar mata uang serta defisit neraca pembayaran (Nellis dan Parker, 2003). Pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi dan stabil merupakan target yang ingin dicapai oleh setiap pemangku kepentingan (*stakeholder*) pembangunan, baik itu pemerintah maupun pihak-pihak lain yang terlibat.

Sebagai bagian dari sisi komponen pengeluaran PDRB konsumsi rumah tangga tahun 2013 mencatat pertumbuhan sebesar 5,82 persen, lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tumbuh 6,74 persen. Menurut jenis pengeluaran, kelompok makanan pada tahun 2013 tumbuh sebesar 4,72 persen, lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 5,28 persen. Pertumbuhan kelompok nonmakanan juga melambat dari 8,03 persen tahun 2012 menjadi 6,75 persen pada tahun 2013. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga ini didorong oleh meningkatnya jumlah penduduk dan membaiknya pendapatan rumah tangga. Meningkatnya jumlah penduduk menuntut pengeluaran yang lebih besar baik untuk makanan maupun nonmakanan. Membaiknya

pendapatan rumah tangga akan mendorong permintaan yang lebih tinggi untuk barang dan jasa yang lebih berkualitas.

Kemudian, investasi fisik (PMTB) pada tahun 2013 tumbuh sedikit lebih cepat dari 4,96 persen pada tahun 2012 menjadi sebesar 5,02 persen pada tahun 2013. Kondisi ini dipengaruhi oleh kondisi makro ekonomi DIY pada tahun 2013 yang lebih baik jika dibandingkan dengan tahun 2012 sehingga memberi sinyal positif untuk melakukan investasi. Meningkatnya PMTB ini merupakan hal yang baik karena akan meningkatkan kemampuan perekonomian daerah untuk mencapai pertumbuhan yang lebih tinggi. Namun demikian, masih diperlukan terobosan baru dan upaya terus menerus untuk meningkatkan investasi di DIY baik oleh pelaku ekonomi dalam negeri maupun asing karena semakin besar investasi maka semakin besar pula barang dan jasa yang dihasilkan. Diharapkan dengan semakin besar tenaga kerja yang diserap maka semakin besar pula nilai tambah yang akan diciptakan.

Tabel 4.7 Pertumbuhan PDRB menurut Penggunaan di DIY, 2009–2013 (persen)

Jenis Penggunaan	2009	2010	2011*	2012 ^{*)}	2012 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran konsumsi rumah tangga	6,75	7,28	6,95	6,74	5,82
a. Makanan	3,93	5,50	5,72	5,28	4,72
b. Bukan Makanan	9,50	8,93	8,05	8,03	6,75
2. Pengeluaran konsumsi lembaga swasta nirlaba	19,40	16,22	13,89	8,90	8,84
3. Pengeluaran konsumsi pemerintah	7,55	2,88	5,29	5,26	5,31
4. Pembentukan modal tetap bruto	3,21	3,41	4,62	4,96	5,02
5. Perubahan Inventori	-21,01	-21,71	5,18	5,13	-4,96
6. Diskrepansi statistik	-7,97	-9,07	-183,79	125,90	11,25
7. Ekspor barang & jasa :	3,14	6,43	6,71	7,65	6,38
a. Antar negara / luar negeri	-10,31	8,15	0,41	7,96	9,01
b. Antar provinsi	4,85	6,24	7,41	7,62	6,10
<u>Dikurangi :</u>					
8. Impor barang & jasa :	3,38	4,78	4,22	6,87	5,86
a. Antar negara / luar negeri	-18,57	11,07	-7,76	5,11	5,97
b. Antar provinsi	4,25	4,58	4,61	6,93	5,85
P D R B	4,43	4,88	5,17	5,32	5,40

Sumber : BPS Provinsi D.I.Yogyakarta

Ket: *) angka sementara; **) angka sangat sementara

Sisi pengeluaran lainnya yaitu konsumsi pemerintah, pada tahun 2013 tumbuh sebesar 5,31 persen sedikit lebih tinggi dibanding pertumbuhan tahun 2012 yang tumbuh sebesar 5,26 persen. Relatif tingginya pertumbuhan konsumsi pemerintah ini antara lain didorong oleh melonjaknya belanja upah/gaji sebagai akibat kebijakan pemerintah memberikan remunerasi untuk beberapa instansi vertikal selain 20 kementerian/lembaga yang sudah diberikan pada tahun 2012.

Ekspor DIY pada tahun 2013 tumbuh sebesar 6,38 persen lebih lambat dibanding tahun 2012 yang tumbuh sebesar 7,65 persen. Melambatnya pertumbuhan ekspor ini disebabkan oleh melambatnya ekspor antarwilayah yang tumbuh lebih rendah dari 7,62 persen pada tahun 2012 menjadi 6,10 persen pada tahun 2013. Meskipun ekspor luar negeri tumbuh lebih cepat dari 7,96 persen pada tahun 2012 menjadi 9,01 persen pada tahun 2013 namun karena porsi ekspor luar negeri yang relatif kecil maka kenaikan pertumbuhannya tidak mampu mendorong ekspor secara keseluruhan untuk tumbuh lebih cepat.

Melihat pertumbuhan ekspor luar negeri DIY selama lima tahun terakhir kondisinya masih belum menggembirakan. Pada tahun 2009 ekspor luar negeri mengalami kontraksi sebesar -10,31 persen, meskipun di tahun 2012 dan 2013 mampu bangkit dan tumbuh mengesankan yaitu sebesar 7,96 persen dan 9,01 persen. Keadaan ini antara lain disebabkan oleh persaingan global yang semakin kompetitif terutama membanjirnya produk-produk dari Cina yang harganya lebih murah. Oleh karena itu, perlu usaha yang lebih keras dari semua *stakeholders* terutama dari industri pengolahan kita untuk dapat menghasilkan produk-produk yang berkualitas dengan harga bersaing.

Pada tahun 2013 pertumbuhan impor DIY mengalami perlambatan dari 6,87 persen pada tahun 2012 menjadi 5,86 persen pada tahun 2013. Perlambatan tersebut bersumber dari perlambatan pertumbuhan impor antarprovinsi yaitu dari 6,93 persen menjadi 5,85 persen. Sebaliknya, impor luar negeri mengalami percepatan pertumbuhan yaitu dari 5,11 persen menjadi 5,97 persen.

BAB V

KUALITAS PERTUMBUHAN EKONOMI

Sejumlah upaya dapat dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan produksi domestik sehingga diharapkan meningkatkan permintaan kebutuhan tenaga kerja dan lapangan kerja domestik. Akumulasi dari pertumbuhan output atau produksi barang dan jasa dalam suatu negara/wilayah menciptakan pertumbuhan ekonomi negara/wilayah tersebut. Terciptanya lapangan kerja domestik dari adanya peningkatan pertumbuhan produksi tersebut memberi kesempatan semakin banyak tenaga kerja yang terserap dan selanjutnya berimbas pada meningkatnya pendapatan penduduk domestik dan meningkatnya kesejahteraan.

Pengaruh dari membaiknya pertumbuhan ekonomi adalah meningkatnya perluasan kesempatan kerja, sehingga menurunkan penduduk yang menganggur, dan juga secara makro akan meningkatnya kesejahteraan atau menurunnya tingkat kemiskinan. Permasalahan akan muncul jika peningkatan produksi dibawa ke luar wilayah dan dinikmati oleh penduduk di luar wilayah tersebut, maka pertumbuhan ekonomi bukan merupakan prospek yang kompetitif bagi tingkat kesejahteraan penduduk domestik.

5.1 Pertumbuhan Ekonomi

Banyak indikator ekonomi yang digunakan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk mengukur capaian keberhasilan pembangunan, di samping sebagai tolok ukur perencanaan dan intervensi kebijakan. Laju dan andil pertumbuhan merupakan contoh indikator ekonomi yang digunakan tersebut yang dapat diamati secara sektoral, penggunaan nilai tambah, maupun spasial wilayah kabupaten/kota. Oleh karena itu diharapkan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dapat mengambil kebijakan pada sektor, kabupaten/kota, atau komponen penggunaan sehingga dapat memacu pertumbuhan ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

5.1.1 Pertumbuhan menurut Sektor

Pada tahun 2013 laju pertumbuhan ekonomi DIY mencapai 5,40 persen, bertambah 0,08 poin dibanding dengan laju pertumbuhan ekonomi tahun 2012 yang mencapai 5,32 persen. Besaran angka laju pertumbuhan ekonomi tersebut mengindikasikan bahwa perekonomian DIY semakin membaik. Beberapa sektor yang mengalami pertumbuhan semakin cepat adalah: sektor industri pengolahan; sektor listrik, gas dan air bersih; sektor pengangkutan dan komunikasi; sektor keuangan, real estat dan jasa perusahaan; sektor perdagangan, hotel dan restoran; sektor konstruksi; serta sektor jasa-jasa. Sektor pertambangan dan penggalian meskipun tumbuh lebih cepat dibanding tahun sebelumnya

tetapi masih di bawah lima persen. Sektor pertanian mengalami perlambatan karena hanya mampu tumbuh 0,63 persen padahal tahun 2012 mampu tumbuh 4,19 persen.

Sebanyak sembilan sektor pembentuk PDRB semua mengalami pertumbuhan positif. Sektor industri pengolahan yang pada tahun 2012 sempat mengalami pertumbuhan minus hingga mencapai -2,26 persen, pada tahun 2013 pertumbuhannya tertinggi yaitu 7,81 persen. Tingginya pertumbuhan tersebut didorong meningkatnya produksi di industri makanan, industri tekstil dan kulit, industri barang-barang dari kayu, industri kertas dan barang cetakan, serta industri barang galian bukan logam. Hanya industri kimia yang tidak mampu tumbuh positif.

Pertumbuhan tertinggi berikutnya dicapai oleh sektor listrik, gas, dan air bersih yaitu sebesar 6,54 persen. Sektor keuangan, real estat dan jasa perusahaan yang tahun sebelumnya merupakan sektor dengan pertumbuhan tertinggi, tahun 2013 tumbuh 6,23 persen. Peningkatan kinerja perbankan yang mencapai 14,47 persen masih menjadi sumber utama pertumbuhan sektor keuangan.

Tabel 5.1 Pertumbuhan Ekonomi Sektoral di DI Yogyakarta 2011–2013, Rata-rata Pertumbuhan Per Tahun 2009-2013, dan Andil Pertumbuhan Tahun 2013 (persen)

Sektor	2011	2012 ^{*)}	2013 ^{**)}	Rata-rata 2009-2013	Andil Pertumbuhan 2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pertanian	-2,06	4,19	0,63	0.60	0.10
2. Pertambangan & Penggalian	11,96	1,98	4,92	4.85	0.03
3. Industri Pengolahan	6,79	-2,26	7,81	4.75	0.98
4. Listrik, Gas & Air Bersih	4,26	7,13	6,54	5.47	0.06
5. Konstruksi	7,23	5,97	6,07	6.33	0.60
6. Perdagangan, Hotel, & Restoran	5,19	6,69	6,20	5.85	1.31
7. Pengangkutan & Komunikasi	8,00	6,21	6,30	6.56	0.70
8. Keuangan, Real Estat, & Jasa Perusahaan	7,95	9,95	6,23	7.61	0.64
9. Jasa-jasa	6,47	7,09	5,57	6.39	0.98
PDRB	5,17	5,32	5,40	5.19	5.40

Sumber : BPS Provinsi D.I.Yogyakarta

Ket: *) angka sementara; **) angka sangat sementara

Perkalian kontribusi sektor pada periode sebelumnya dengan laju pertumbuhan sektor menghasilkan andil pertumbuhan sektor tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi daerah (PDRB). Andil terhadap pertumbuhan ekonomi tahun 2013 yang sebesar 5,40 persen terutama diberikan oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran yang mampu tumbuh sebesar 6,20 persen. Berkembangnya pariwisata di DIY memberi *multiflier effect* yang kuat terhadap dinamika kehidupan sektor perdagangan, hotel dan restoran. Selain itu, sektor jasa-jasa dan sektor industri pengolahan yang masing-masing tumbuh sebesar 5,57 persen dan 7,81 persen juga mempunyai andil cukup besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi DIY. Kekuatan pertumbuhan sektor jasa-jasa ada pada peran

pemerintah yang semakin besar dalam perekonomian DIY. Hal ini mencerminkan bahwa semakin besarnya anggaran yang disiapkan Pemerintah untuk menyediakan fasilitas publik sesuai kebutuhan penduduk. Penyumbang andil pertumbuhan terbesar berikutnya adalah sektor pengangkutan dan komunikasi yang tumbuh hingga 6,30 persen. Semakin padatnya penerbangan angkutan udara melalui Bandara Adi Sucipto memicu pertumbuhan sektor pengangkutan dan komunikasi, di samping efek dari predikat kota pendidikan sehingga mendorong pertumbuhan fantastis jumlah kendaraan bermotor tiap tahun terutama roda dua.

Pemberi andil pertumbuhan terbesar berikutnya adalah sektor keuangan, real estat, dan jasa perusahaan. Andil pertumbuhan sektor ini sedikit lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya meskipun laju pertumbuhannya lebih rendah. Sektor konstruksi andil pertumbuhannya juga mengesankan setelah sektor keuangan seiring dengan peningkatan angka pertumbuhannya. Sementara itu, pertumbuhan sektor pertanian yang relatif kecil menyebabkan andil pertumbuhan sektor ini juga hanya menyumbang 0,1 persen.

Rata-rata pertumbuhan ekonomi DIY per tahun dalam periode 2009-2013 mencapai 5,19 persen. Capaian pertumbuhan ini meningkat dibanding periode sebelumnya yang tumbuh rata-rata 4,95 persen-per tahun. Rata-rata pertumbuhan per tahun tertinggi adalah sektor keuangan, real estat dan jasa perusahaan sebesar 7,61 persen. Rata-rata pertumbuhan sektor keuangan, real estat dan jasa perusahaan selama lima tahun ini yang sangat tinggi ini didorong oleh pertumbuhan perbankan yang meningkat hingga lebih dari 10 persen. Hal ini terkait oleh berbagai program stimulan pinjaman lunak yang ditawarkan oleh pemerintah melalui sektor keuangan dalam rangka percepatan pertumbuhan usaha mikro dan kecil (UMK).

Urutan rata-rata pertumbuhan tertinggi kedua adalah sektor pengangkutan dan komunikasi yang mencapai 6,56 persen. Pendorong lajunya pertumbuhan sektor pengangkutan dan komunikasi selama periode tersebut adalah pertumbuhan angkutan udara dan komunikasi yang mencapai 13,9 persen per tahun. Hal ini disebabkan oleh *brand-image* DIY sebagai daerah tujuan wisata dan pusat pendidikan sehingga mendorong tingginya permintaan angkutan udara dan komunikasi terutama pada hari-hari libur nasional dan libur sekolah.

Rata-rata pertumbuhan sektor jasa-jasa pada periode 2009-2013 sebesar 6,39 persen per tahun terutama didorong oleh pertumbuhan pemerintahan umum yang mencapai 6,46 persen per tahun. Kendati Pemerintah melakukan upaya efisiensi pegawai dengan program penerimaan pegawai yang *zero growth*, namun adanya perbaikan sistem pengupahan pegawai mendorong pertumbuhan belanja pegawai yang cukup besar. Di samping itu subsektor jasa swasta juga mampu tumbuh 6,25 persen per tahun.

Rata-rata pertumbuhan tertinggi berikutnya adalah sektor konstruksi yang mencapai 6,33 persen per tahun. Pertumbuhan sektor konstruksi yang sangat tinggi pada

periode tersebut terutama karena kesadaran berbagai pihak terhadap peningkatan sarana dan prasarana fisik, terutama bangunan, cukup tinggi. Bahkan, peningkatan prasarana fisik berupa jalan, jembatan dan bangunan untuk memfasilitasi pengembangan pariwisata terus ditingkatkan sebagai wujud kepedulian pemerintah terhadap masyarakat.

Sektor pertanian menunjukkan rata-rata pertumbuhan terendah, yaitu 0,60 persen per tahun. Hal ini lebih disebabkan situasi iklim yang sangat dominan dalam mempengaruhi produktivitas hasil pertanian, di samping semakin berkurangnya lahan pertanian. Kondisi ini dapat menjadi momentum bagi pemerintah dan berbagai pihak terkait untuk lebih mengoptimalkan kinerja sehingga ketersediaan dan ketahanan pangan dari sektor pertanian tetap terjaga.

Andil sektoral yang terbesar dalam laju pertumbuhan ekonomi DIY pada tahun 2013 berasal dari sektor perdagangan, hotel dan restoran yaitu sebesar 1,31 persen. Kondisi ini besar dipengaruhi oleh peran sektor perdagangan yang semakin kokoh memimpin struktur perekonomian DIY seiring dengan kerangka rencana pembangunan yang dikembangkan berdasarkan potensi DIY sebagai daerah tujuan wisata dan pendidikan di Indonesia. Subsektor yang mendorong besarnya andil sektor perdagangan adalah perdagangan besar dan eceran serta restoran.

Urutan andil berikutnya diberikan oleh sektor jasa-jasa dan sektor industri pengolahan yang masing-masing sebesar 0,98 persen. Andil sektor jasa-jasa terutama dari subsektor pemerintahan umum yang menunjukkan bahwa ketergantungan ekonomi DIY terhadap pemerintah masih cukup tinggi. Geliat sektor industri pengolahan terutama didorong oleh pertumbuhan industri pengolahan makanan, minuman, dan tembakau.

Sektor pengangkutan dan komunikasi memberikan andil pertumbuhan sebesar 0,70 persen karena kinerja angkutan udara dan komunikasi yang meningkat signifikan. Pertumbuhan angkutan jalan raya, angkutan udara, dan komunikasi tumbuh sangat signifikan sehingga mengangkat andil sektor tersebut. Andil sektor keuangan, real estat, dan jasa perusahaan yang sebesar 0,64 persen utamanya digerakkan oleh pertumbuhan subsektor bank dan sewa bangunan. Perkembangan sektor bangunan juga cukup tinggi juga mendorong andil pertumbuhannya yang sebesar 0,60 persen. Sementara sektor pertanian, sektor listrik, gas dan air bersih, serta sektor pertambangan dan penggalian memberi andil sebesar 0,19 persen terhadap pertumbuhan ekonomi DIY pada tahun 2013.

Sejalan dengan misi pembangunan daerah DIY maupun target RPJMD pada tahun 2013, tampak bahwa kondisi ekonomi berkembang sesuai dengan arah perencanaan, yaitu antara lain sebagai daerah tujuan wisata dan pendidikan. Hal ini memberikan bukti bahwa visi dan misi pembangunan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah sangat relevan karena hasil pembangunan memberikan korelasi yang signifikan dengan kebijakan perencanaan.

5.1.2 Pertumbuhan menurut Kabupaten/Kota

Wilayah DIY hanya mencakup empat kabupaten dan satu kota. Besaran laju pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di DIY pada tahun 2013 terlihat semakin mengarah konvergen karena semua kabupaten/kota tumbuh pada kisaran 5,05-5,65 persen. Pertumbuhan ekonomi tertinggi masih dimiliki oleh Kota Yogyakarta, yakni sebesar 5,64 persen, meskipun pertumbuhan Kota Yogyakarta tersebut lebih rendah dibanding tahun sebelumnya. Pergerakan poin pertumbuhan terbesar dicapai Kabupaten Gunungkidul, yaitu bertambah 0,32 poin sehingga pertumbuhan tahun 2013 menjadi 5,16 persen. Rata-rata pertumbuhan per tahun dalam periode 2009-2013 tertinggi juga terjadi di Kota Yogyakarta, yaitu sebesar 5,51 persen. Namun dilihat dari andil yang diberikan Kota Yogyakarta sebesar 1,46 persen terhadap pertumbuhan ekonomi DIY tahun 2013, ternyata lebih rendah dibandingkan andil yang diberikan oleh pertumbuhan di Kabupaten Sleman yang mencapai 1,70 persen. Posisi andil yang diberikan Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman sudah mencapai 3,16 persen terhadap pertumbuhan ekonomi DIY yang sebesar 5,40 persen.

Dilihat dari sisi kemampuan wilayah, perbedaan nilai PDRB antar kabupaten/kota sangat tergantung pada sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki serta ditunjang dengan teknologi yang tersedia. Kabupaten **Gunungkidul** dengan luas wilayah hampir setengah wilayah DIY, ternyata pada tahun 2013 masih menempati urutan **keempat** dalam hal besaran nilai PDRB yang dihasilkan. Hal ini tidak terlepas oleh kondisi perekonomian Kabupaten Gunungkidul yang masih bertumpu oleh sektor pertanian (33 persen), sementara sektor-sektor penopang seperti perdagangan, sektor jasa-jasa, dan sektor industri kontribusinya masih di bawah 20 persen. Memang berbeda dengan Kota **Yogyakarta** yang dengan luas wilayah terkecil tetapi mampu mencapai nilai PDRB yang lebih besar (urutan **kedua**) karena mobilitas sektor selain pertanian porsi terbesar ada di kota. Sebagai ibu kota DIY, Kota Yogyakarta merupakan pusat pemerintahan dan ditunjang oleh sarana dan prasarana serta teknologi yang lebih memadai.

Tabel 5.2 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di DI Y 2011–2013, Rata-rata Pertumbuhan Per Tahun 2009-2013 dan Andil Pertumbuhan 2013 (persen)

Kabupaten/ Kota/ Provinsi	2011	2012*	2013**	Rata-rata 2009-2013	Andil Pertumbuhan 2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Kulonprogo	4,95	5,01	5,05	4,51	0,42
2. Bantul	5,27	5,34	5,57	5,29	1,03
3. Gunungkidul	4,33	4,84	5,16	4,62	0,79
4. Sleman	5,19	5,45	5,70	5,20	1,70
5. Yogyakarta	5,64	5,76	5,64	5,51	1,46
DIY	5,17	5,32	5,40	5,19	5,40

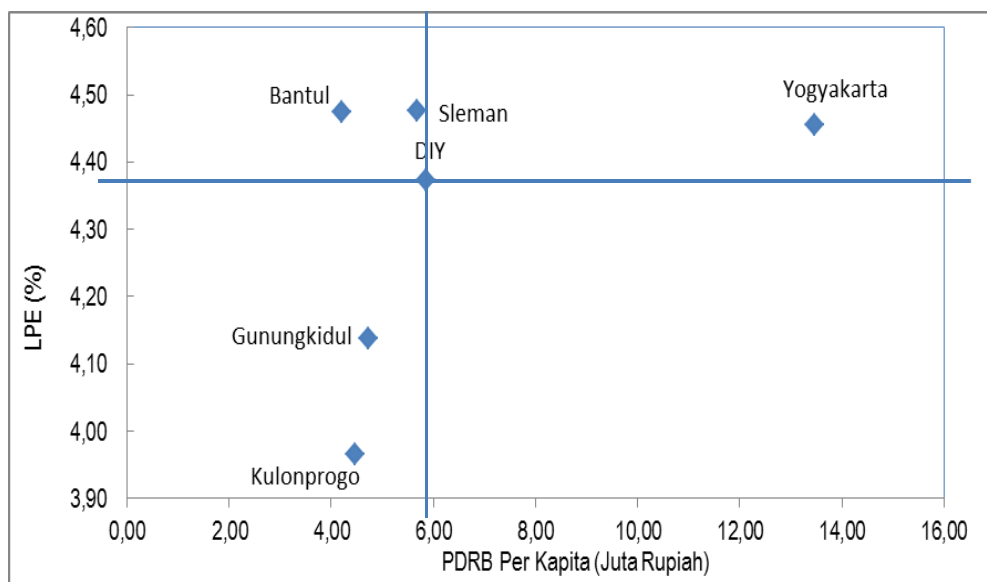
Sumber : BPS Provinsi D.I.Yogyakarta

Ket: * angka sementara; ** angka sangat sementara

Selain Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul juga memberikan andil cukup besar terhadap pertumbuhan DIY tahun 2013, yaitu sebesar 1,03 persen. Seiring dengan perkembangan roda ekonomi sektor-sektor yang semakin meningkat diharapkan Kabupaten Bantul mampu mengurangi “kesenjangan ekonomi” antar wilayah di DIY.

Tingkat kesenjangan ekonomi antar wilayah pada periode 2009–2013 dapat dilihat dari posisi masing-masing kabupaten/kota terhadap Pemda DIY pada **bidang pencaran (*scattered plot*)** antara laju pertumbuhan ekonomi dan nilai PDRB per kapita yang diperkenalkan oleh Klassen dengan sebutan **Tipologi Klassen**, dapat dilihat pada Gambar 5.1 dan Gambar 5.2 berikut.

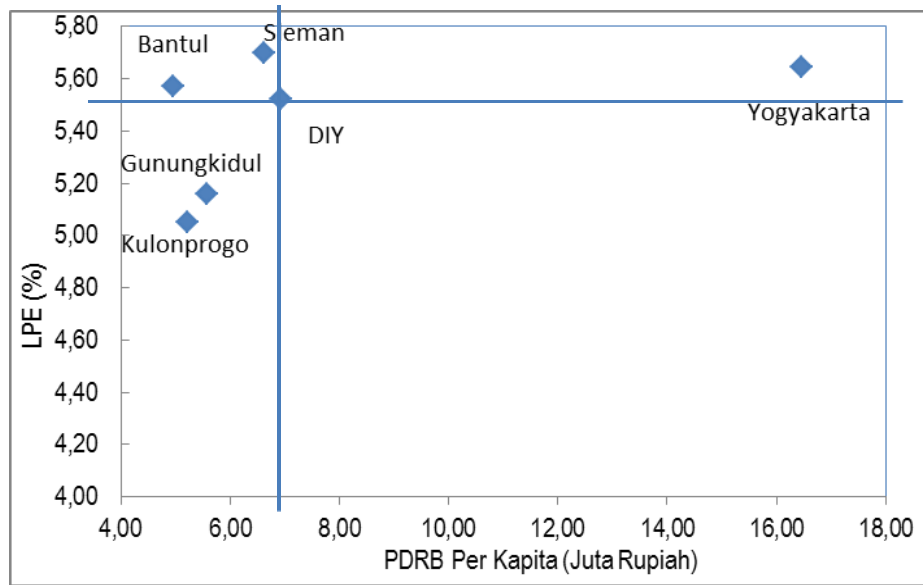
Gambar 5.1 Plot PDRB Per Kapita dan Laju Pertumbuhan Ekonomi menurut Kabupaten/ Kota di DIY Tahun 2009



Pada tahun 2008, Kota Yogyakarta menjadi daerah maju dan cepat tumbuh. Demikian juga Sleman menjadi daerah yang berkembang cepat. Bantul, Gunungkidul, dan Kulon Progo berada pada kuadran IV artinya tiga kabupaten tersebut merupakan daerah tertinggal untuk perbandingan lokal DIY. Tahun 2009, posisinya sedikit bergeser karena Bantul masuk di kuadran I sebagai daerah berkembang cepat bersama Sleman. Kota Yogyakarta tangguh sebagai daerah maju dan berkembang cepat. Sementara Kulon Progo dan Gunungkidul tetap sebagai daerah tertinggal (Gambar 5.1).

Posisi kabupaten/kota tidak mengalami pergeseran yang berarti pada tahun 2013 dibanding dengan tahun 2009. Hanya kondisi relatif di masing-masing kuadran yang terjadi pergeseran. Posisi Bantul masih rentan untuk jatuh di kuadran IV atau daerah tertinggal, sedangkan Sleman mendekati kudaran I sebagai daerah maju dan berkembang pesat meskipun nampaknya masih perlu beberapa tahun ke depan (Gambar 5.2).

Gambar 5.2 Plot PDRB Per Kapita dan Laju Pertumbuhan Ekonomi menurut Kabupaten/ Kota di DIY Tahun 2013



Gambaran Tipologi Klassen menurut kabupaten/ kota wilayah DIY di atas menunjukkan bahwa kesenjangan antarwilayah di DIY masih menjadi kendala dalam pembangunan daerah. Kendala tersebut tidak dapat diatasi dengan mudah apabila belum adanya kebijakan pemerataan pembangunan secara frontal, seperti mengarahkan mega investasi ke Kabupaten Kulonprogo dan Gunungkidul agar dua kabupaten ini mampu mengejar ketertinggalannya dengan tiga daerah lain.

5.1.3 Pertumbuhan menurut Penggunaan

Penggunaan nilai tambah (PDRB) yang dihasilkan oleh sektor-sektor ekonomi di DIY, meliputi untuk konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, konsumsi lembaga nirlaba, pembentukan modal tetap bruto, perubahan inventori, dan ekspor neto. Hingga tahun 2013 pertumbuhan tertinggi masih dimiliki oleh komponen konsumsi lembaga nirlaba (*non-profit institution*), yaitu mencapai 8,84 persen. Komponen lain yang tumbuh cukup tinggi adalah ekspor barang dan jasa meskipun diimbangi pertumbuhan impor yang cukup tinggi juga. Komponen konsumsi rumah tangga dan komponen konsumsi pemerintah masing-masing tumbuh sebesar 5,82 persen dan 5,31 persen. Komponen pembentukan modal bruto meskipun pertumbuhannya paling rendah namun tampak kompetitif yaitu sebesar 5,02 persen (Tabel 5.3).

Dilihat perkembangan dalam periode 2009-2013, rata-rata pertumbuhan komponen konsumsi lembaga nirlaba juga menunjukkan pertumbuhan yang sangat pesat, yakni sebesar 11,92 persen per tahun. Komponen ekspor barang dan jasa juga tumbuh cukup tinggi yaitu 6,79 persen per tahun. Sementara impor barang dan jasa mendampingi dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 5,43 persen per tahun. Konsumsi rumah tangga

yang kecenderungan angka pertumbuhannya semakin menurun selama empat tahun terakhir, rata-rata pertumbuhannya masih tinggi yaitu 6,7 persen per tahun. Komponen konsumsi pemerintah dan komponen pembentukan modal tetap bruto masing-masing tumbuh di bawah lima persen per tahun.

Andil penggunaan terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi DIY pada tahun 2013 pada komponen konsumsi rumah tangga yakni mencapai 2,81 persen. Hal ini menunjukkan bahwa konsumsi rumah tangga masih menjadi penggerak utama pertumbuhan PDRB menurut penggunaan. Seiring dengan semakin membaiknya perekonomian global, aktivitas ekonomi ekspor dan impor barang dan jasa dari dan ke DIY juga tumbuh serta memberikan andil yang cukup besar, yakni masing-masing sebesar 2,81 persen dan 2,52 persen

Kendati andil yang diberikan oleh komponen impor barang dan jasa cukup besar namun menurut ekonom UGM, Samsubar Saleh, hal ini tidak perlu dirisaukan karena barang-barang impor tersebut bersifat in-elastis. Artinya kebutuhan barang-barang tersebut tidak terpengaruh oleh fluktuasi harga, seberapa pun tetap dibeli dan didatangkan ke DIY karena memang merupakan kebutuhan mendasar bagi sebagian masyarakat khususnya mahasiswa/pelajar. Contoh barang-barang tersebut antara lain peralatan elektronik, sepeda motor, komputer, *notebook*, *smartphone*, dan sejenisnya.

Tabel 5.3 Pertumbuhan Ekonomi menurut Penggunaan di DIY, 2011–2013, Rata-rata Pertumbuhan Per Tahun 2009–2013, dan Andil Pertumbuhan Tahun 2013 (persen)

Komponen Penggunaan	2011	2012*	2013**	Rata-rata 2009-2013	Andil Pertumbuhan 2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.Konsumsi Rumah Tangga	6,95	6,74	5,82	6,70	2,81
2.Konsumsi Lembaga Nirlaba	13,89	8,90	8,84	11,92	0,27
3.Konsumsi Pemerintah	5,29	5,26	5,31	4,68	1,07
4.Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	4,62	4,96	5,02	4,50	1,32
5.Perubahan Inventori***	26,42	45,43	-4,96	-10,80	-0,15
6.Ekspor Barang & Jasa	6,71	7,65	6,38	6,79	2,81
7.Impor Barang & Jasa	4,22	6,87	5,86	5,43	2,52
PDRB	5,17	5,32	5,40	5,19	5,40

Sumber : BPS Provinsi D.I.Yogyakarta

Ket: * angka sementara; ** angka sangat sementara; *** Sisa/Residual

5.2 Penduduk dan Tenaga Kerja

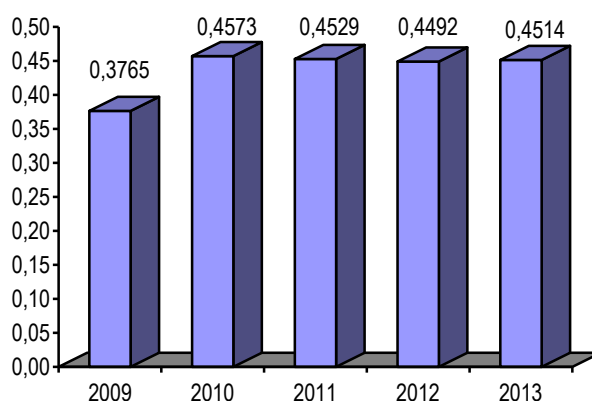
Sumber daya manusia (SDM) merupakan modal dasar pembangunan suatu wilayah. Eksistensi SDM yang berkualitas merupakan kekuatan yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Kualitas penduduk dapat dilihat dari beberapa indikator penduduk dan ketenagakerjaan. Antara lain: angka beban tanggungan (*dependency ratio*), tingkat partisipasi angkatan kerja, tingkat kesempatan kerja, serta tingkat pengangguran terbuka.

5.2.1 Angka Beban Tanggungan (*Dependency Ratio*)

Pada tahun 2013 tercatat angka beban tanggungan penduduk DIY sebesar 0,45. Artinya, setiap 100 orang penduduk DIY yang produktif secara ekonomis harus menanggung beban 45 orang penduduk nonproduktif. Sebagian di antara penduduk yang menjadi tanggungan tersebut masih bersekolah, sebagian yang lain sudah tidak produktif karena berusia lanjut.

Dibanding keadaan pada tahun 2010 angka beban tanggungan menunjukkan penurunan, yaitu dari 0,46 pada tahun 2010 terus menurun hingga 0,45 pada tahun 2013. Terjadinya penurunan tersebut menunjukkan bahwa beban yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif terhadap usia nonproduktif semakin berkurang. Namun angka ketergantungan tersebut masuk dalam kelompok tinggi, karena lebih dari 41. Rasio beban tanggungan penduduk DIY yang cukup tinggi merupakan salah satu faktor penghambat pembangunan ekonomi daerah, karena sebagian pendapatan yang diperoleh oleh golongan yang produktif harus dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan mereka yang belum/tidak produktif.

Gambar 5.3 Angka Beban Tanggungan Penduduk DIY, 2009-2013



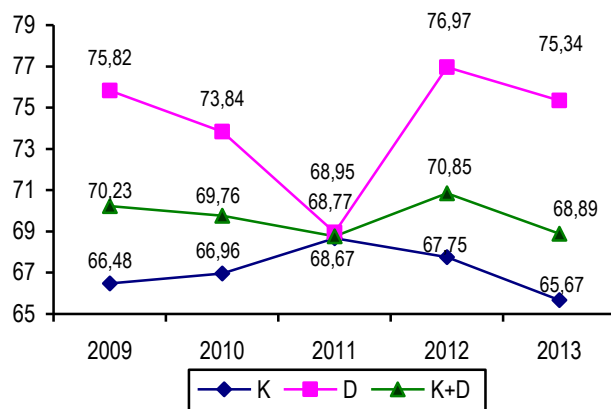
5.2.2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi yang penting dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi sebagai pengejawantahan pertumbuhan produksi suatu wilayah. Tenaga kerja yang berkualitas adalah tenaga kerja yang dilengkapi dengan pengetahuan dan keahlian melalui pendidikan, pelatihan, dan magang/pengalaman. Tenaga kerja seperti inilah merupakan modal manusia (*human capital*) yang sangat diperlukan oleh dunia usaha dalam upaya meningkatkan produktivitas, yang menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi.

TPAK menunjukkan ketersediaan angkatan kerja di antara penduduk usia kerja (15 tahun ke atas). Ketersediaan angkatan kerja menunjukkan kemampuan penduduk dalam

beraktivitas secara ekonomi, karena mencakup jumlah penduduk yang bekerja dan penduduk yang berupaya untuk memperoleh pekerjaan.

Gambar 5.4 Perkembangan TPAK Penduduk DIY menurut Daerah, 2009-2013 (persen)



TPAK daerah perdesaan lebih tinggi dibanding dengan TPAK daerah perkotaan, namun hingga tahun 2011 semakin kecil kesenjangannya. Mulai tahun 2012 kembali terjadi kesenjangan yang cukup besar dan berlanjut hingga tahun 2013 meskipun baik di desa maupun di kota angka TPAK cenderung menurun.

TPAK DIY tahun 2013 tercatat sebesar 68,89 persen, lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 70,85 persen, yang berarti terjadi penurunan porsi penduduk yang terserap pada lapangan kerja dan yang siap masuk ke bursa kerja. Ada kecenderungan TPAK daerah perdesaan lebih tinggi dibanding dengan TPAK daerah perkotaan karena ketersediaan lapangan kerja tradisional seperti pertanian yang relatif masif dan bisa menampung angkatan kerja dengan spesifikasi yang lebih sederhana, bahkan para pekerja keluarga.

Fenomena situasi TPAK DIY sebelum tahun 2011 menjelaskan bahwa dalam perkembangannya angkatan kerja di perkotaan semakin bertambah, sedangkan di perdesaan semakin berkurang. Fenomena TPAK setelah 2011 sungguh berbeda, karena di tahun 2012 baik di perdesaan maupun perkotaan sama-sama naik, namun pada tahun 2013 TPAK perdesaan maupun perkotaan semua menurun angkanya.

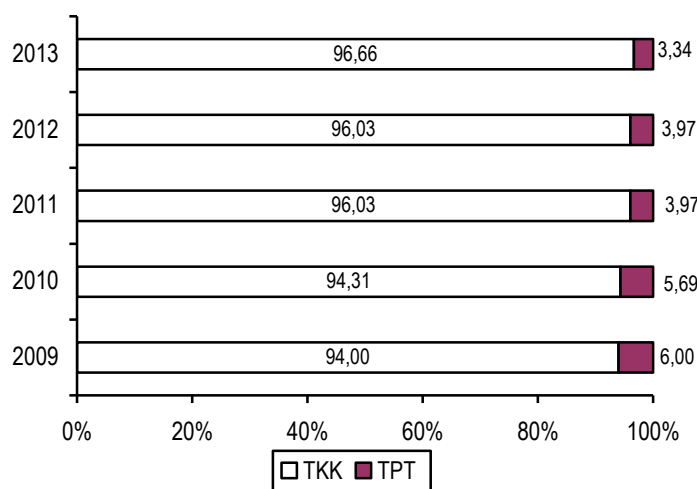
5.2.3 Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

TKK merupakan indikator yang dapat lebih menjelaskan tentang keterlibatan penduduk dalam kegiatan perekonomian karena TKK merupakan bagian angkatan kerja yang benar-benar bekerja untuk memperoleh penghasilan atau membantu memperoleh penghasilan.

Sebaliknya, TPT menunjukkan bagian tenaga kerja yang tidak bekerja, dalam arti sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, sudah mendapatkan pekerjaan tetapi

belum mulai bekerja, atau mereka yang merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan. Keempat kategori angkatan kerja tersebut disebut sebagai penganggur.

Gambar 5.5 TKK dan TPT Penduduk DIY, 2009-2013 (persen)



Dalam kurun waktu 2009-2013 terjadi kecenderungan peningkatan jumlah tenaga kerja yang terserap di pasar kerja, yakni dari 94,0 persen pada tahun 2009 menjadi 96,66 persen pada tahun 2013. Sebaliknya, tingkat pengangguran terbuka semakin berkurang, dari 6,0 persen pada tahun 2009 menjadi 3,34 persen pada kondisi Agustus 2013.

5.2.4 Elastisitas Kesempatan Kerja

Elastisitas kesempatan kerja (EKK) menjelaskan hubungan antara laju pertumbuhan ekonomi dan laju pertumbuhan kesempatan kerja. Dengan menggunakan indikator EKK, suatu kegiatan usaha dapat dianalisis apakah termasuk usaha yang bersifat padat modal atau padat karya secara makro.

Pada kajian ini, EKK dihitung berdasarkan rata-rata pertumbuhan kesempatan kerja dan rata-rata pertumbuhan ekonomi periode tahun 2009-2013. Secara umum, EKK di DIY pada periode pengamatan mencapai 0,24 persen per tahun, artinya setiap kenaikan pertumbuhan ekonomi sebesar 1(satu) persen akan meningkatkan serapan tenaga kerja sebesar 0,24 persen. Dengan angkatan kerja sejumlah 1,85 juta orang pada tahun 2013, maka setiap 1 persen pertumbuhan ekonomi hanya mampu menyerap sekitar 4,4 ribu orang tenaga kerja. Hal ini berarti pula bahwa dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi DIY periode 2009–2013 sebesar 5,19 persen per tahun maka tenaga kerja yang terserap hanya sekitar 22,7 ribu tenaga kerja per tahun.

EKK tertinggi terjadi pada sektor listrik, gas dan air bersih, yakni 3,92. Berarti, setiap kenaikan produksi 1 persen mampu mendorong penyerapan tenaga kerja sebesar 3,92 persen. Namun oleh karena jumlah tenaga kerja pada sektor ini hanya sekitar 0,28 persen dari total tenaga kerja, maka EKK yang tinggi hanya mampu menyerap sekitar 64 jiwa setiap kenaikan 1 persen pertumbuhan ekonomi.

Tabel 5.4 Rata-rata Pertumbuhan Kesempatan Kerja, Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi, Elastisitas Kesempatan Kerja dan Penyerapan Tenaga Kerja menurut Sektor di DIY, 2011-2013 (%)

Sektor	Rata-rata Pertum- buhan Kesempat- an Kerja	Rata-rata Pertum- buhan Ekonomi	Elasti- sitas Kesem- patan Kerja	Penyerapan Tenaga Kerja (%)	
				2011	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pertanian	-0,70	0,60	-1,18	23,97	27,86
2. Pertambangan & Penggalian	-14,88	4,85	-3,07	0,69	0,48
3. Industri Pengolahan	3,07	4,75	0,65	14,83	13,45
4. Listrik, Gas & Air Bersih	21,45	5,47	3,92	0,24	0,28
5. Konstruksi	-6,62	6,33	-1,05	7,40	5,55
6. Perdagangan, Hotel, & Restoran	3,24	5,85	0,55	26,70	25,98
7. Pengangkutan & Komunikasi	-4,22	6,56	-0,64	3,79	3,49
8. Keuangan, Real Estat, & J.Perusahaan	4,47	7,61	0,59	2,78	2,90
9. Jasa-jasa	4,38	6,39	0,69	19,60	20,00
Total	1,23	5,19	0,24	100,00	100,00

Sumber : BPS Provinsi D.I.Yogyakarta, diolah dari data SAKERNAS bulan Agustus

Kondisi sebaliknya terjadi pada EKK sektor pertanian; sektor pertambangan dan penggalian; sektor konstruksi; serta sektor pengangkutan dan komunikasi justru terdepresiasi dengan nilai masing-masing -1,18; -3,07; -1,05; dan -0,64. Penyebab EKK sektor-sektor tersebut negatif adalah penurunan kesempatan kerja di sektor-sektor yang bersangkutan pada periode 2009–2013, sementara proses produksi tetap menghasilkan nilai tambah yang melaju masing-masing sebesar 0,60 persen; 4,85 persen; 6,33 persen; serta 6,56 persen per tahun. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan produksi keempat sektor tersebut tidak dipengaruhi oleh jumlah pekerjaannya. Tenaga kerja di sektor pertanian dan sektor pertambangan dan penggalian cenderung semakin berkurang karena semakin berkurangnya minat menjadi petani atau penambang/penggali batu atau pasir seiring dengan semakin tingginya tingkat pendidikan. Mereka lebih memilih bekerja di sektor formal untuk memperoleh pengalaman dan pendapatan yang lebih tinggi. Menurunnya tenaga kerja di sektor pengangkutan seiring dengan semakin lesunya pekerjaan di sektor angkutan umum karena kecenderungan rumah tangga DIY memfasilitasi diri dengan kendaraan bermotor roda dua untuk berbagai keperluan.

Jika nilai EKK dikaitkan dengan besarnya penyerapan tenaga kerja menurut sektor, terlihat bahwa sektor perdagangan, hotel, dan restoran memiliki peluang lebih besar menampung tenaga kerja dibandingkan sektor lainnya, diikuti oleh sektor jasa-jasa dan sektor industri pengolahan. Sektor listrik, gas dan air bersih meskipun mencatat nilai EKK tertinggi tetapi tidak banyak menyerap tenaga kerja karena daya serap sektor tersebut hanya di bawah 0,3 persen selama 2009-2013.

5.2.5 Produktivitas Tenaga Kerja

Para ekonom menyimpulkan bahwa produktivitas tenaga kerja (PTK) merupakan faktor utama dalam pertumbuhan ekonomi, bukan kuantitas tenaga kerja. PTK sebenarnya diukur dengan nilai tambah per jumlah tenaga kerja per jam kerja. Namun karena keterbatasan data, perhitungan produktivitas dalam kajian ini menggunakan nilai tambah per jumlah tenaga kerja per tahun. Semakin tinggi tingkat produktivitas, berarti semakin tinggi pula tingkat nilai tambah.

Dalam periode 2011-2013, perkembangan pertumbuhan per tahun PTK seluruh sektor ekonomi di DIY relatif stabil (Tabel 5.5). Secara riil, pada tahun 2011 PTK mencapai Rp12,31 juta per pekerja setahun, atau sekitar Rp33,71 ribu per orang per hari; pada tahun 2013 menjadi Rp13,3 juta per pekerja setahun, atau sekitar Rp36,44 ribu per orang per hari. Sektor pertambangan dan penggalian mempunyai rata-rata pertumbuhan PTK terbesar, yakni mencapai 23,26 persen. Hal ini terjadi karena dipengaruhi jumlah tenaga kerja di sektor tersebut yang cenderung mengalami penurunan (Tabel 5.4). Demikian pula rata-rata pertumbuhan PTK di sektor konstruksi yang mencapai 20,8 persen, diakibatkan oleh semakin tingginya kesenjangan penambahan tenaga kerja di sektor ini terhadap tingginya pertumbuhan nilai tambah sektor konstruksi. Pertumbuhan nilai tambah konstruksi tersebut didorong oleh maraknya pembangunan gedung komersial yang baru yang bernilai besar di Kota Yogyakarta dan sekitarnya, seperti semakin banyaknya berdiri hotel-hotel berbintang.

Sektor pertanian mengalami kontraksi pertumbuhan PTK. Produktivitas sektor pertanian dipengaruhi oleh kondisi musim. Oleh karena itu intervensi yang bisa dilakukan di sektor pertanian sifatnya adalah lebih ke arah padat karya meskipun intervensi modal masih sangat diperlukan. Arah perkembangan produktivitas industri pengolahan selama periode 2011-2013 yang cenderung lebih ke padat modal perlu menjadi perhatian karena pemerintah perlu mengarahkan kebijakan untuk memberi kesempatan kerja ke sektor ini. Demikian pula sektor perdagangan, hotel, dan restoran dan sektor pengangkutan dan komunikasi terbuka lebar kesempatan untuk mengarahkan kebijakan peningkatan kesempatan kerja di sektor ini karena kondisi pertumbuhan ekonominya cukup kondusif.

Produktivitas tenaga kerja dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti: jumlah pekerja, tingkat upah, jam kerja, nilai investasi, dan perkembangan teknologi. Jika pertumbuhan produktivitas yang terjadi bersifat padat modal, maka harapan adanya penyerapan tenaga kerja menjadi sangat kecil. Sebaliknya, jika pertumbuhan produktivitas yang terjadi bersifat padat karya, maka tenaga yang terserap untuk pertumbuhan produktivitas tersebut relatif cukup besar. Oleh karena itu, pemerintah dapat mengambil kebijakan untuk menentukan apakah berpihak pada kegiatan yang bersifat padat modal atau padat karya dengan segala konsekuensi pilihan tersebut.

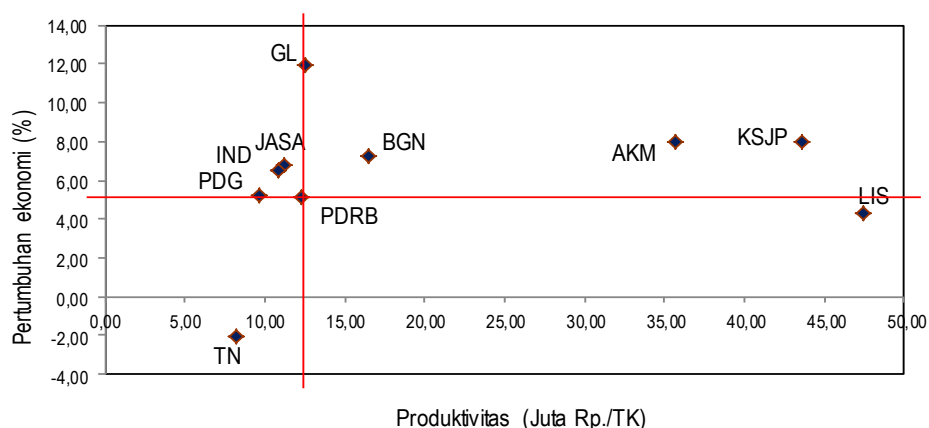
Tabel 5.5 Produktivitas Tenaga Kerja, Rata-rata Pertumbuhan Produksi dan Tenaga Kerja Per Tahun, dan Rata-rata Pertumbuhan PTK Sektoral di DIY, 2011–2013

Sektor	Produktivitas Tenaga Kerja (Juta Rp/ Org./ Th.)		Rata-rata Pertumbuhan 2011 – 2013 (%)		Rata-rata Pertum- buan PTK(%)
	2011	2013	Ekonomi	Tenaga Kerja	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pertanian	8,25	7,25	2,39	9,27	-6,29
2. Pertambangan & Penggalian	12,57	19,10	3,44	-16,08	23,26
3. Industri Pengolahan	11,18	12,65	2,64	-3,49	6,35
4. Listrik, Gas & Air Bersih	47,38	43,88	6,82	11,00	-3,77
5. Konstruksi	16,43	23,98	6,02	-12,23	20,80
6. Perdagangan, Hotel, & Restoran	9,60	10,89	6,45	-0,03	6,47
7. Pengangkutan & Komunikasi	35,64	42,53	6,25	-2,73	9,24
8. Keuangan, Real Estat, & Jasa Perusahaan	43,65	47,68	8,08	3,41	4,52
9. Jasa-jasa	10,83	11,68	6,33	2,37	3,86
Total	12,31	13,30	5,36	1,34	3,97

Sumber : BPS Provinsi D.I.Yogyakarta

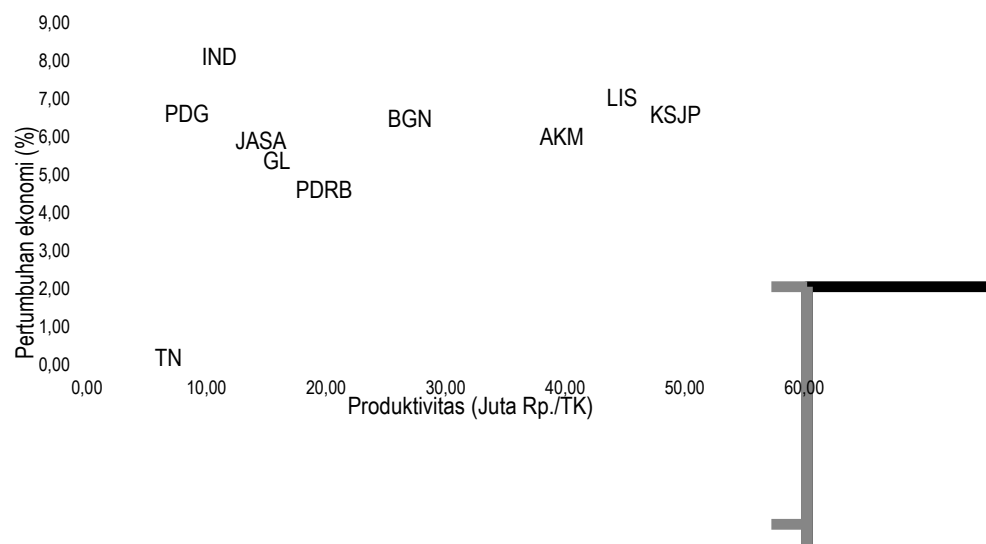
Aplikasi tipologi Klassen secara sektoral menunjukkan adanya perubahan produktivitas dan pertumbuhan menurut sektor dalam periode 2011-2013. Pada tahun 2011 sektor keuangan, real estat dan jasa perusahaan; sektor konstruksi; sektor pengangkutan dan komunikasi; serta sektor penggalian sebagai sektor yang “produktif dan cepat tumbuh”. Sektor listrik, gas dan air bersih merupakan sektor yang “produktif tapi lambat”. Sektor yang terklasifikasi sebagai sektor yang “tidak produktif dan lambat” adalah sektor pertanian. Sementara sektor industri pengolahan; sektor jasa-jasa; serta sektor perdagangan merupakan sektor yang “cepat tumbuh namun tidak produktif”. Terjadi lompatan yang besar untuk pergeseran sektor penggalian, karena tahun sebelumnya masih masuk klasifikasi “tidak produktif dan lambat” (Gambar 5.6).

Gambar 5.6 Plot Produktivitas Tenaga Kerja dan Laju Pertumbuhan Ekonomi menurut Sektor di DIY Tahun 2011



Pada tahun 2013, sektor listrik, gas dan air bersih melompat di kuadran II bersama sektor keuangan, real estat dan jasa perusahaan; sektor konstruksi; serta sektor pengangkutan dan komunikasi, yaitu sebagai sektor “produktif dan cepat tumbuh”. Sektor perdagangan, hotel dan restoran; sektor industri; sektor pertambangan dan penggalian; serta sektor jasa-jasa berada di kuadran I sebagai sektor yang “cepat tumbuh namun tidak produktif”. Sementara sektor pertanian tetap pada kuadran IV, sebagai sektor yang “tidak produktif dan lambat” (Gambar 5.7). Pergeseran posisi sektor dapat terjadi sebagai akibat adanya intervensi program, atau dapat juga adanya stimulan atau pemberdayaan. Namun oleh karena analisis Klassen bersifat relatif terhadap Provinsi, maka pergeseran tersebut masih dalam keterbatasan wilayah.

Gambar 5.7 Plot Produktivitas Tenaga Kerja dan Laju Pertumbuhan Ekonomi menurut Sektor di DIY Tahun 2013



5.3 Kemiskinan dan Ketimpangan

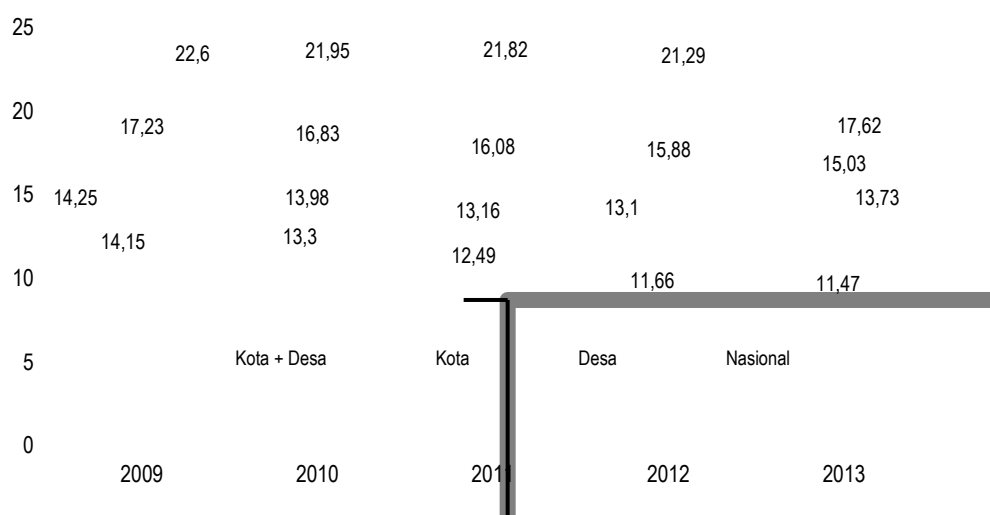
Tujuan akhir program pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan. Pengukuran tingkat keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara atau daerah memerlukan indikator diantaranya besaran nilai PDRB yang tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang cepat. Peningkatan pendapatan belum dapat menjamin kesejahteraan anggota masyarakat luas karena tingkat pendapatan yang bervariasi antarrumah tangga sesuai dengan tingkat penguasaan sumber daya dan kemampuan mengelolanya. Lebih jauh perlu diperhatikan siapa yang akan menumbuhkan perekonomian, sejumlah besar penduduk atau hanya segelintir orang. Jika yang menumbuhkannya hanya pengusaha besar/ orang-orang kaya yang jumlahnya sedikit, maka manfaat pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati oleh mereka saja, sehingga kemiskinan dan ketimpangan pendapatan semakin parah. Namun jika

pertumbuhan dihasilkan oleh banyak orang, mereka pulalah yang akan memperoleh manfaat terbesar, dan buah pertumbuhan ekonomi akan terbagi secara merata.

5.3.1 Kemiskinan

Perhitungan kemiskinan yang dilakukan BPS dengan pendekatan kebutuhan dasar (*basic needs approach*), mengacu pada data Susenas. Pada September 2013 jumlah dan persentase penduduk miskin DIY dibanding September 2012 tercatat mengalami penurunan 4,79 persen, yaitu dari 562,10 ribu orang atau 15,88 persen menjadi sebanyak 535,18 ribu orang atau sebanyak 15,03 persen. Posisi persentase penduduk miskin DIY masih di atas nasional. Dilihat keterbandingan dengan provinsi-provinsi di Pulau Jawa kemiskinan DIY juga masih yang tertinggi (Gambar 5.9).

Gambar 5.8 Persentase Penduduk Miskin di DIY dan Nasional, 2009 - 2013



Persentase penduduk miskin di pedesaan jauh lebih tinggi dibanding di perkotaan. Meskipun demikian kecenderungan laju penurunan persentase penduduk miskin di pedesaan jauh lebih cepat. Persentase penduduk miskin di pedesaan tahun 2009 sebesar 22,6 persen turun menjadi 17,6 persen pada tahun 2013. Sementara di perkotaan persentase penduduk miskin turun dari 14,2 persen pada tahun 2009 menjadi 13,7 persen pada tahun 2013.

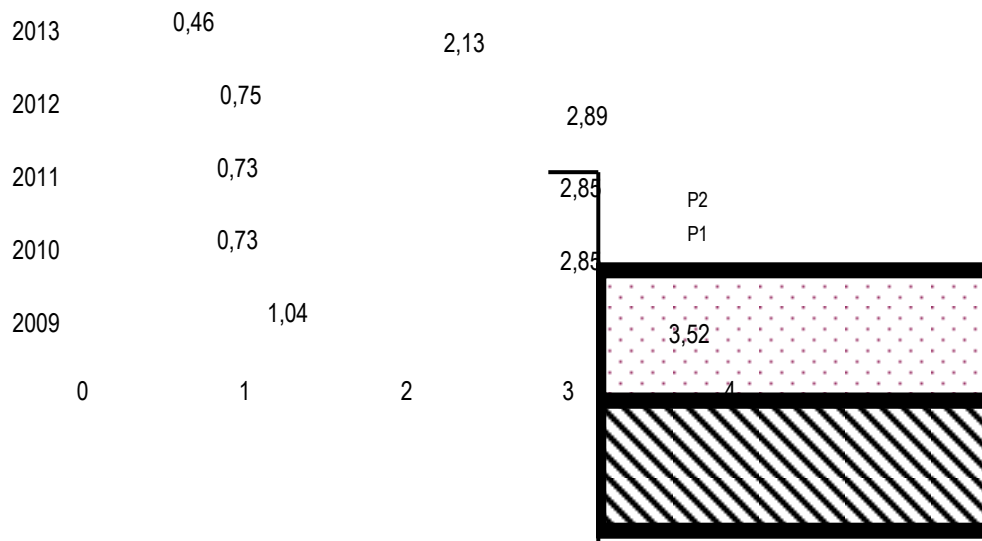
Sampai dengan tahun 2013 implementasi program operasional untuk penanggulangan kemiskinan telah banyak dilakukan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan telah memberikan hasil yang positif, seperti: bantuan beras miskin (Raskin), asuransi kesehatan untuk keluarga miskin (Askeskin), bantuan biaya pendidikan (BOS), bantuan langsung tunai (BLT), dan program keluarga harapan (PKH), dan program perlindungan sosial (PPLS). Kendati demikian, berbagai program tersebut terbatas hanya pada pemberian bantuan yang bersifat sementara, dan belum menggugah motivasi penduduk untuk melakukan kegiatan ekonomi yang produktif. Demikian juga tampaknya

pengembangan ekonomi kreatif perlu lebih banyak diluncurkan untuk menggerakkan ekonomi masyarakat.

Adapun garis kemiskinan (GK) yang digunakan sebagai dasar penghitungan jumlah penduduk miskin seperti yang dijelaskan di atas, menunjukkan peningkatan sebesar 36,88 persen, yaitu dari Rp221.978,- per kapita per bulan pada tahun 2009 menjadi Rp303.843,- per kapita per bulan di tahun 2013. Kenaikan garis kemiskinan disebabkan oleh adanya kenaikan harga (inflasi) komoditas yang dikonsumsi oleh masyarakat.

Ukuran kemiskinan di suatu wilayah tidak hanya jumlah dan persentase penduduk miskin, namun perlu ukuran lain seperti **indeks kedalaman kemiskinan (*poverty gap index*, P_1)** dan **indeks keparahan kemiskinan (*poverty severity index*, P_2)**. Indeks kedalaman kemiskinan (P_1) merupakan kesenjangan/ jarak antara rata-rata standar hidup penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan terhadap garis kemiskinan. Indeks keparahan kemiskinan (P_2) adalah kesenjangan/ sebaran pengeluaran di antara penduduk miskin, dan dapat juga digunakan untuk mengetahui intensitas kemiskinan. Dengan ukuran P_1 dan P_2 dapat diperkirakan seberapa besar kebutuhan dana operasional yang diperlukan untuk mengentaskan penduduk miskin hingga batas garis kemiskinan.

Gambar 5.9 Indeks Kedalaman (P_1) dan Indeks Keparahannya (P_2) Kemiskinan di DIY, 2009 – 2013

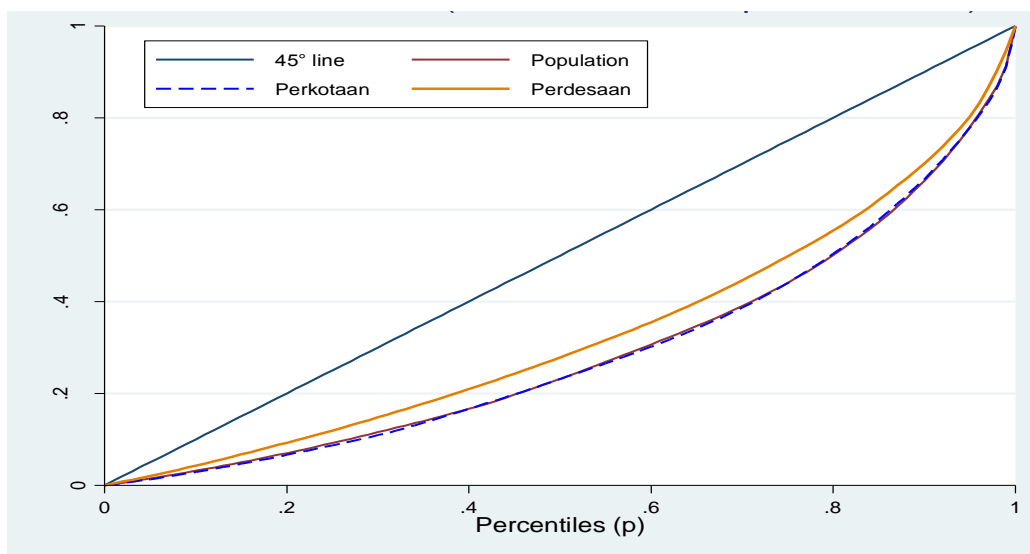


Gambar 5.9 memperlihatkan bahwa kecenderungan angka Indeks kedalaman (P_1) dan indeks keparahan kemiskinan (P_2) selama periode 2009-2013 semakin menurun. Hal ini menunjukkan bahwa kesenjangan/jarak antara rata-rata standar hidup penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan terhadap garis kemiskinan di DIY semakin berkurang. Demikian pula ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin juga semakin kecil. Berdasarkan dua ukuran tersebut (P_1 dan P_2) berarti upaya pengentasan kemiskinan yang diimplementasikan oleh pemerintah telah mulai menunjukkan hasil yang lebih baik.

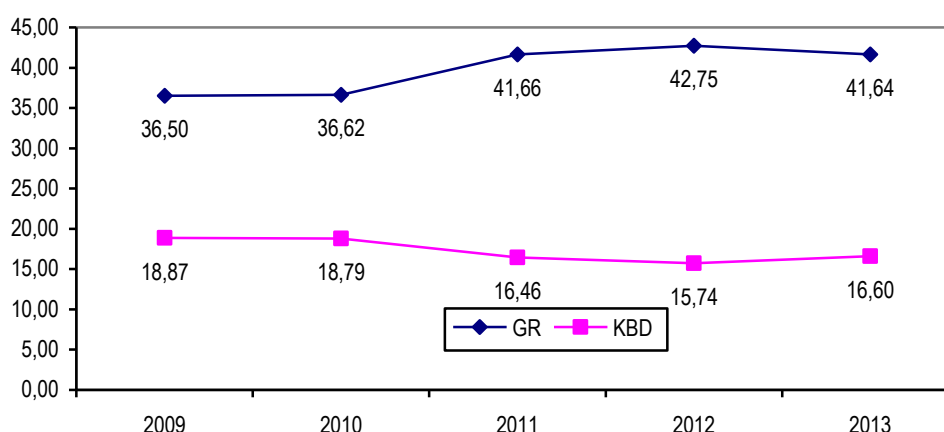
5.3.2 Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Terdapat berbagai kriteria atau tolok ukur untuk menilai pemerataan distribusi pendapatan yang disampaikan para pakar, namun pada kajian ini hanya menggunakan Kurva Lorenz, Rasio Gini, dan Kriteria Bank Dunia yang paling lazim digunakan. Ketiga ukuran ini cukup menjelaskan besaran nilai sehingga tingkat perubahan dari tahun ke tahun dapat diamati.

Gambar 5.10 Kurva Lore nz DIY Hasil Susenas September 2013



Gambar 5.11 Rasio Gini dan KBD (Persentase Pendapatan yang diterima oleh 40 persen Penduduk Berpendapatan Terendah) di DIY, 2009–2013*) (persen)



Keterangan: *) Kondisi triwulan III

Pada Gambar 5.10 terlihat bahwa dari data Susenas September 2013 Kurva Lorenz masih jauh dari garis diagonal maka ini mencerminkan distribusi pendapatan di DIY masih timpang atau belum merata. Demikian pula dari Gambar 5.11 dapat dijelaskan bahwa Rasio Gini tahun 2013 juga masih tinggi yaitu 41,64 persen meskipun relatif menurun dibandingkan Rasio Gini 2012 atau Maret 2013 yang mencapai 43,9 persen. Perkembangan

Rasio Gini periode 2009-2013 masih cenderung meningkat, oleh karenanya masih perlu terobosan kebijakan untuk lebih meningkatkan pendapatan masyarakat golongan bawah untuk mengurangi kesenjangan dengan pendapatan masyarakat golongan atas. Sejalan dengan hasil penghitungan Gini Rasio, ukuran Kriteria Bank Dunia (KBD) juga menjelaskan bahwa persentase pendapatan yang dinikmati oleh 40 persen penduduk berpendapatan terendah memiliki kecenderungan menurun dari 18,87 persen pada tahun 2009 menjadi 16,60 persen pada tahun 2013. Fenomena kenaikan Rasio Gini dan penurunan persentase pendapatan yang dinikmati oleh 40 persen penduduk berpendapatan terendah menyiratkan bahwa distribusi pendapatan penduduk di DIY semakin **timpang**. Meskipun Rasio Gini masih tinggi, namun berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh H.T Oshima, ketimpangan pendapatan penduduk DIY masih termasuk kategori ketimpangan moderat (pada kisaran 30-50 persen). Sementara dengan ukuran kriteria Bank Dunia, pada tahun 2009-2010 ketimpangan pendapatan penduduk DIY masih rendah (lebih dari 17 persen pendapatan), namun pada tahun 2011-2013 semakin timpang pada skala moderat (pada kisaran 12-17 persen pendapatan).

Selama periode 2009–2013, pendapatan yang dinikmati oleh 40 persen penduduk berpendapatan terendah berkurang sebesar 2,27 persen, dan pendapatan yang dinikmati oleh 40 persen penduduk berpendapatan menengah juga berkurang sekitar 3,03 persen. Sekitar 5,30 persen pendapatan dari dua golongan penduduk berpendapatan terendah dan menengah tersebut beralih dinikmati oleh 20 persen penduduk berpendapatan tertinggi. Kondisi ini menjelaskan bahwa distribusi pendapatan penduduk semakin timpang karena porsi yang dinikmati oleh penduduk yang berpendapatan tinggi semakin besar (Tabel 5.6).

Tabel 5.6 Indikator Ketimpangan Pendapatan Penduduk DIY, 2009 – 2013

Indikator	2009	2010	2011	2012	2013 ^{*)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
40% penduduk pendapatan terendah	18,87	18,79	16,46	15,74	16,60
40% penduduk pendapatan menengah	36,48	35,20	34,22	34,47	33,45
20% penduduk pendapatan tertinggi	44,65	46,01	49,32	49,78	49,95
Rasio Gini (%)	36,50	36,62	41,66	42,75	41,64

Keterangan: *) Kondisi triwulan III 2013

Sumber : BPS Provinsi D.I.Yogyakarta, diolah dari data SUSENAS

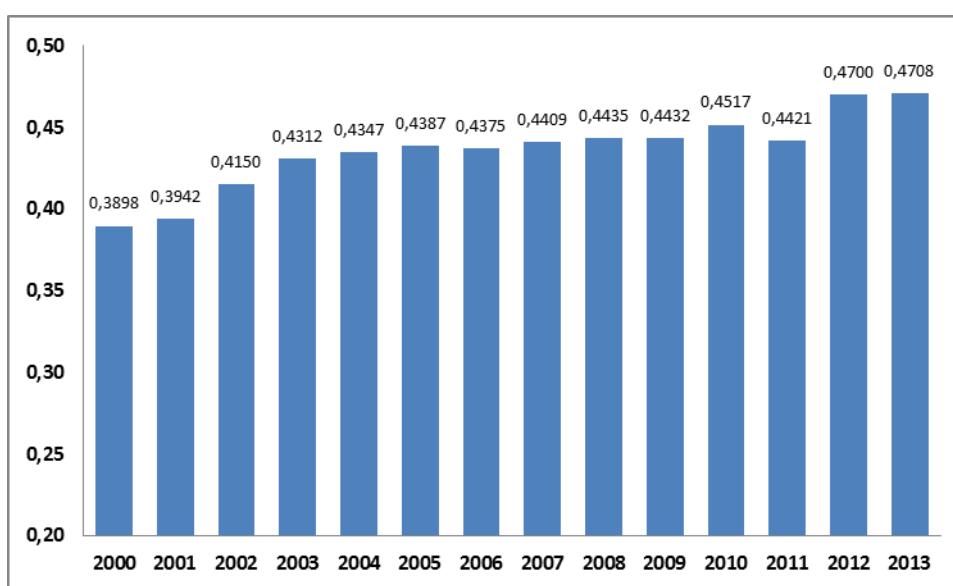
5.4 Disparitas antar Kabupaten/Kota

Disparitas pendapatan antarindividu penduduk seperti yang dijelaskan dengan Gini Rasio dan Kriteria Bank Dunia cukup populer digunakan sebagai salah satu indikator kualitas pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Selain indikator disparitas pendapatan antar individu, disparitas antar wilayah juga perlu dicermati, sebagai indikator ketimpangan antar kabupaten/kota.

5.4.1 Indeks Ketimpangan Regional

Ketimpangan antar region yang diindikasikan oleh Indeks Williamson pada periode 2000-2013 menunjukkan kecenderungan peningkatan, yaitu dari 38,98 persen pada tahun 2000 menjadi 47,08 persen pada tahun 2013 (Gambar 5.12). Peningkatan ini menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan perekonomian antar region (kabupaten/kota) di wilayah DIY semakin memprihatinkan, seperti yang dijelaskan oleh Tipologi Klassen antar kabupaten/kota di DIY yang semakin mengalami kesenjangan.

Gambar 5.12 Indeks Williamson DIY, 2000-2013



5.4.2 Disparitas Sektoral (*Shift Share Analysis*)

Adanya perbedaan faktor potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, maupun modal akan menyebabkan perbedaan kemampuan setiap Kabupaten/Kota dalam menggerakkan roda perekonomian. Perbedaan tersebut akan mempengaruhi perbedaan jenis maupun kemampuan unit ekonomi dalam menghasilkan barang dan jasa. Dipandang dari kegiatan ekonominya, maka output ekonomi suatu wilayah dikelompokkan dalam lapangan usaha atau disebut juga sektor ekonomi. Berdasarkan sektor ekonomi tersebut suatu daerah mempunyai ciri khas yang unik satu dengan yang lainnya. Besaran kinerja hasil output sektor ekonomi daerah tersebut membuat perbedaan skala ekonomi antardaerah termasuk timbulnya kesenjangan ekonomi. Kesenjangan atas perbedaan terjadi karena pendapatan masing-masing sektor ekonomi, kemudian dinamakan disparitas sektoral yang dihitung dengan analisis pergeseran (*shift share analysis*).

Disparitas sektoral dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain dampak pertumbuhan ekonomi daerah sekitarnya, dampak pertumbuhan ekonomi provinsi acuannya dan juga karena kemampuan pelaku ekonomi dalam wilayah itu sendiri. Dalam

upaya menarik pertumbuhan ekonomi provinsi, dipengaruhi oleh peran kabupaten/kota terhadap provinsi dan juga hubungan antarsektornya. Suatu kabupaten/kota atau sektor di kabupaten/kota yang memiliki pertumbuhan tinggi, belum tentu memiliki peran yang besar dalam pertumbuhan provinsi acuan, karena tergantung pada perannya terhadap provinsi juga.

5.4.2.1 Pangsa Regional (PR)

Hasil analisis *shift share* untuk suatu periode yang dipilih memungkinkan perbedaan kesimpulan. Analisis pada kasus laporan ini menggunakan periode penelitian tahun 2009-2013. Berdasarkan hasil perhitungan terhadap data pada periode tersebut, Kabupaten Sleman memiliki nilai PR tertinggi, sehingga dapat dikatakan bahwa kontributor terbesar dalam pertumbuhan ekonomi DIY dalam kurun waktu 2009-2013 adalah Kabupaten Sleman. Dengan kata lain, kabupaten Sleman merupakan pusat pertumbuhan di DIY. Kondisi ini masih sama dengan hasil analisis data periode tahun 2008-2012

Tabel 5.7 Pangsa Regional (PR) menurut Kabupaten/ kota di DIY, 2009–2013

Sektor	Kulon-progo	Bantul	Gunung-kidul	Sleman	Yogya-karta
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pertanian	105.535	204.465	282.938	223.455	3.860
2. Pertambangan & Penggalian	4.120	7.958	12.440	6.427	59
3. Industri Pengolahan	58.050	135.829	75.881	205.015	123.329
4. Listrik, Gas & Air Bersih	2.448	7.661	3.950	12.468	14.947
5. Konstruksi	19.078	96.606	58.233	152.193	92.060
6. Perdagangan, Hotel, & Restoran	65.286	166.085	104.005	302.382	296.789
7. Pengangkutan & Komunikasi	39.897	59.632	48.953	80.362	233.208
8. Keuangan, Real Estat, & Jasa Perusahaan	24.513	51.319	32.379	140.439	161.980
9. Jasa-jasa	65.421	111.051	92.268	233.711	240.146
PDRB	384.349	840.605	711.047	1.356.451	1.166.377

Sumber : BPS Provinsi D.I.Yogyakarta

Dengan mencermati masing-masing sektor pembentuk PDRB di Kabupaten Sleman, nilai PR tertinggi adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran. Hal ini mengindikasikan bahwa sektor perdagangan, hotel dan restoran di Kabupaten Sleman dapat menjadi *leading sector* dalam pembangunan yang bertujuan untuk memacu pertumbuhan ekonomi DIY.

5.4.2.2 Analisis Pergeseran (*Shift Analysis*)

Seperti yang dijelaskan dalam metodologi, bahwa untuk meneliti struktur ekonomi dan perubahannya sebagai indikator kegiatan ekonomi dalam periode 2009-2013 lebih tepat menggunakan analisis pergeseran dari pada analisis PR. Hasil perhitungan PS menunjukkan Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman yang memiliki nilai PS positif (233.183 dan 18.779). Pendorong PS yang tinggi di Kota Yogyakarta tersebut adalah sektor keuangan, real estat dan jasa perusahaan (71.196), diikuti oleh sektor jasa-jasa (69.636),

sektor pengangkutan dan komunikasi (51.739) serta sektor perdagangan, hotel dan restoran (51.728).

Apabila keempat sektor tersebut pada tingkat DIY tumbuh pesat, maka laju pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta akan semakin tinggi. Namun sebaliknya, jika keempat sektor tersebut terpuruk di Kota Yogyakarta maka akan memberikan dampak negatif terhadap pertumbuhan DIY. Implikasinya adalah akan sangat menguntungkan arah pengembangan dan pertumbuhan output sektor ekonomi Kota Yogyakarta dan sekitarnya pada sektor keuangan, real estat dan jasa perusahaan, sektor jasa-jasa, sektor sektor pengangkutan dan komunikasi, dan sektor perdagangan, hotel dan restoran, serta tanpa mengesampingkan sektor-sektor pendukung lainnya.

Tabel 5.8 Proportional Shift (PS) menurut Kabupaten/ kota di DIY, 2009–2013

Sektor	Kulon-progo	Bantul	Gunung-kidul	Sleman	Yogyakarta	DIY
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Pertanian	-78.955	-152.969	-211.678	-167.176	-2.888	-613.665
2. Pertambangan & Penggalian	-29	-55	-86	-45	0	-215
3. Industri Pengolahan	-14.792	-34.612	-19.336	-52.242	-31.427	-152.409
4. Listrik, Gas & Air Bersih	28	88	45	143	171	476
5. Konstruksi	4.772	24.164	14.566	38.068	23.027	104.598
6. Perdagangan, Hotel, & Restoran	11.379	28.948	18.127	52.703	51.728	162.886
7. Pengangkutan & Komunikasi	8.851	13.230	10.861	17.829	51.739	102.509
8. Keu., Real Estat, & Jasa Perusahaan	10.775	22.557	14.232	61.728	71.196	180.487
9. Jasa-jasa	18.970	32.202	26.755	67.770	69.636	215.334
PDRB	-39.000	-66.448	-146.514	18.779	233.183	0

Sumber : BPS Provinsi D.I. Yogyakarta

Tampaknya situasi perkembangan output sektor pertanian dan industri pengolahan masih seperti tahun sebelumnya. Pertumbuhan sektor pertanian justru semakin melamban baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota, terutama pertanian di Kabupaten Gunungkidul. Pertumbuhan ekonomi yang melamban di Kabupaten Gunungkidul adalah akibat pertumbuhan sektor pertanian yang melamban di DIY. Sektor industri pengolahan juga mengalami hal yang sama, meskipun perlambanannya tidak secepat sektor pertanian dan didominasi oleh industri di Kabupaten Sleman. Dapat dikatakan bahwa melambannya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sleman disebabkan oleh melambannya pertumbuhan industri DIY. Meskipun demikian perlambatan pertumbuhan sektor industri pengolahan 2013 tidak sebesar perlambatan tahun sebelumnya.

Hasil perhitungan DS menunjukkan bahwa Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta bertanda negatif. Sementara dua kabupaten lainnya, yaitu Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunungkidul, bertanda positif dengan Kabupaten Bantul mencapai nilai lebih besar. Hal ini berarti Kabupaten Bantul memiliki daya saing regional yang sangat kuat dibandingkan kabupaten/kota lainnya di DIY disusul oleh Kabupaten

Gunungkidul. Keunggulan daya saing Kabupaten Bantul secara relatif di antara kabupaten/kota di DIY didorong oleh pertumbuhan sektor keuangan, real estat dan jasa perusahaan, sektor jasa-jasa, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor industri pengolahan, sektor pengangkutan dan komunikasi, serta sektor listrik, gas, dan air bersih. Sementara keunggulan daya saing Kabupaten Gunungkidul didorong oleh pertumbuhan sektor industri pengolahan, sektor keuangan, real estat dan jasa perusahaan, sektor jasa-jasa, sektor konstruksi, sektor pertanian, sektor penggalian, dan sektor listrik, gas, dan air bersih.

Hasil analisis DS pada periode 2009-2013 tersebut menunjukkan bahwa rata-rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunungkidul lebih cepat dibandingkan rata-rata laju pertumbuhan ekonomi DIY.

Tabel 5.9 Different Shift (DS) menurut Kabupaten/ kota di DIY, 2009–2013

Sektor	Kulon-progo	Bantul	Gunung-kidul	Sleman	Yogya-karta
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pertanian	25.643	-4.304	5.736	-26.933	-141
2. Pertambangan & Penggalian	-3.176	-3.146	2.147	4.203	-28
3. Industri Pengolahan	-25.064	17.156	34.272	-18.692	-7.671
4. Listrik, Gas & Air Bersih	175	935	856	665	-2.632
5. Konstruksi	10.986	-6.843	8.998	11.602	-24.743
6. Perdagangan, Hotel, & Restoran	-2.945	18.705	-10.850	28.641	-33.551
7. Pengangkutan & Komunikasi	-37.738	12.545	-6.675	-1.122	32.990
8. Keuangan, Real Estat, & Jasa Perusahaan	-11.142	29.089	17.833	2.668	-38.447
9. Jasa-jasa	31.792	27.234	16.185	-3.923	-71.288
PDRB	-11.470	91.370	68.502	-2.891	-145.512

Sumber : BPS Provinsi D.I.Yogyakarta

Tabel 5.10 Rekapitulasi Perubahan PDRB dan Nilai Pergeseran Netto di DIY, 2009-2013

Kab/Kota	Perub. PDRB	Pangsa Regional	Nilai Pergeseran		Komponen Pergeseran		
			Netto	%	PS	DS	PS+DS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Kulonprogo	333.878	384.349	-50.471	-15,12	-39.000	-11.470	-50.471
Bantul	865.527	840.605	24.923	2,88	-66.448	91.370	24.923
Gunungkidul	633.035	711.047	-78.012	-12,32	-146.514	68.502	-78.012
Sleman	1.372.340	1.356.451	15.889	1,16	18.779	-2.891	15.889
Yogyakarta	1.254.049	1.166.377	87.671	6,99	233.183	-145.512	87.671

Sumber : BPS Provinsi D.I.Yogyakarta

Nilai pergeseran netto positif (*upward different shift*) terbesar diperoleh Kota Yogyakarta (87.671) yang didominasi oleh sektor perdagangan, hotel, dan restoran. Artinya, Kota Yogyakarta merupakan lokasi yang sangat menguntungkan (*locational advantage*) bagi sektor perdagangan, hotel, dan restoran dibandingkan kabupaten lainnya di DIY.

Sebaliknya, Kabupaten Gunungkidul memiliki nilai pergeseran netto negatif terbesar (*downward different shift*) yang terutama disebabkan oleh sektor pertanian. Kondisi ini bermakna bahwa Kabupaten Gunungkidul memiliki daya saing yang lemah bagi sektor pertanian dibandingkan kabupaten/kota lainnya di DIY terutama untuk tanaman hortikultura (Hasil Sensus Pertanian 2013).

Dari Tabel 5.10 tampak bahwa hanya Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman yang memiliki PS positif, dengan spesialisasi sektor keuangan, real estat dan jasa perusahaan karena memiliki pertumbuhan yang tinggi di tingkat DIY. Dapat dikatakan bahwa Kota Yogyakarta mempunyai struktur ekonomi yang menguntungkan (*favourable economic structure*).

Berdasarkan nilai PS dan DS, kabupaten/kota di DIY dikelompokkan dalam empat kategori, seperti yang disajikan pada Tabel 5.11. Berbeda dengan periode penelitian sebelumnya, untuk tahun 2009-2013 tidak ada kabupaten/kota yang dikelompokkan dalam kategori pertumbuhan ekonominya pesat, karena tidak ada yang mempunyai nilai PS dan DS positif, meskipun Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta rata-rata pertumbuhannya di atas rata-rata pertumbuhan provinsi. Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunungkidul termasuk dalam kategori kota yang sedang berkembang karena nilai PS negatif dan DS positif. Rata-rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunungkidul dalam periode 2009-2013 masing-masing mencapai 5,29 persen dan 4,62 persen. Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta tergolong sebagai kabupaten yang cenderung berpotensi, karena nilai PS positif dan DS negative, kedua kabupaten/kota ini posisinya melorot dibanding periode sebelumnya. Rata-rata pertumbuhan kedua kabupaten/kota tersebut masing-masing mencapai 5,20 persen dan 5,51 persen. Kabupaten Kulonprogo masih tergolong sebagai kabupaten yang memiliki daya saing lemah, karena nilai DS dan PS negatif.

Menurut Myrdal (1957), perbedaan tingkat kemajuan ekonomi antardaerah yang berlebihan akan menyebabkan pengaruh yang merugikan (*backwash effects*) mendominasi pengaruh yang menguntungkan (*spread effects*) terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, yaitu mengakibatkan ketidakseimbangan. Sedangkan proses akumulasi dan mobilisasi sumber-sumber berupa akumulasi modal, ketrampilan tenaga kerja, dan sumber daya alam yang dimiliki suatu daerah merupakan pendorong pertumbuhan ekonomi wilayah yang bersangkutan. Oleh sebab itu, heterogenitas karakteristik suatu wilayah menjadi pemicu ketimpangan antardaerah atau antarsektor di suatu wilayah. Masalah ketimpangan ekonomi antar daerah merupakan masalah yang cukup sulit diatasi. Ardani (1992) mengemukakan bahwa ketimpangan antardaerah merupakan konsekuensi logis pembangunan dan merupakan suatu tahap perubahan dalam pembangunan itu sendiri.

Tabel 5.11 Kategori Pertumbuhan Kabupaten/ Kota di DIY, 2009-2013

Kategori	Komponen Pertumbuhan		
	DS	PS	Rata-rata Pertumbuhan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
Kab/Kota yang pertumbuhan ekonominya pesat (I):			
-	-	-	-
Kab/Kota sedang berkembang (II):			
1. Kabupaten Bantul	91.370	-66.448	5,29
2. Kabupaten Gunungkidul	68.502	-146.514	4,62
Kab/Kota yang cenderung berpotensi (III):			
1. Kabupaten Sleman	-2.891	18.779	5,20
2. Kota Yogyakarta	-145.512	233.183	5,51
Kab/Kota yang mempunyai daya saing lemah (IV):			
1. Kabupaten Kulonprogo	-11.470	-39.000	4,51

Sumber : BPS Provinsi D.I.Yogyakarta

5.5 Kualitas Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas adalah pertumbuhan ekonomi yang dapat memperluas kesempatan kerja. Semakin luasnya kesempatan kerja diharapkan mampu mengurangi tingkat pengangguran. Rendahnya angka pengangguran merupakan indikasi semakin membaiknya tingkat pendapatan masyarakat. Perbaikan tingkat pendapatan masyarakat akan semakin menekan angka kemiskinan. Kaitannya dengan membaiknya pendapatan masyarakat, seharusnya peningkatan tersebut secara merata dan proporsional dapat dinikmati oleh masyarakat pada semua golongan. Inilah yang disebut sebagai pertumbuhan ekonomi berkualitas.

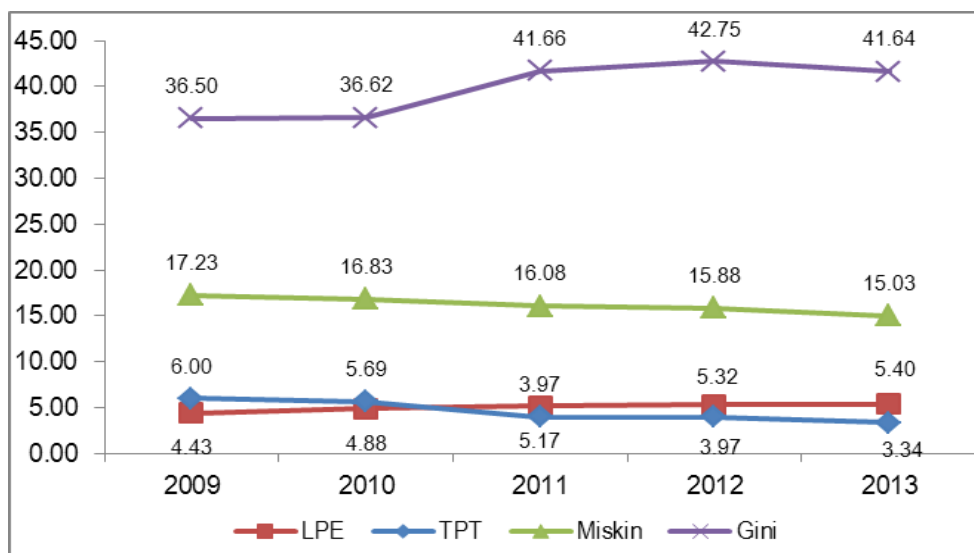
Secara faktual, capaian pertumbuhan ekonomi DIY yang membanggakan selama lima tahun terakhir nampaknya lebih banyak dinikmati oleh penduduk yang berpendapatan tinggi (kaya). Perekonomian memang terus mengalami pertumbuhan bahkan hingga 5,40 persen pada tahun 2013, namun ternyata belum diikuti secara nyata peningkatan kesejahteraan penduduk yang berpendapatan rendah. Indikator kesenjangan pendapatan seperti Kurva Lorenz, Gini Rasio, dan Kemiskinan kriteria Banka Dunia, telah mencatat bahwa meskipun kemiskinan dan ketimpangan pendapatan DIY skalanya moderat namun melihat kecenderungan perkembangannya rentan terhadap resiko gejolak ekonomi.

Sektor pertanian yang menjadi tumpuan hidup hamper 30 persen angkatan kerja dan merupakan sumber penghidupan bagi sebagian besar penduduk miskin DIY, sepanjang tahun 2009 hingga 2013 ternyata tidak dapat tumbuh di atas 4 persen, kecuali tahun 2012 sebesar 4,19 persen. Bahkan, tahun 2010 dan 2011 sektor petanian tumbuh minus. Persoalan ini memancing pemerintah atau instansi dan lembaga terkait untuk mencari terobosan kebijakan dan implikasinya untuk mengangkat sektor pertanian. Purnamadewi, Tambunan, Oktviani, dan Daryanto (2010) dalam kajiannya menyimpulkan bahwa prioritas

alokasi investasi ke kelompok sektor pertanian dan industri berbasis pertanian yang didukung pembangunan infrastruktur dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Mereka juga menyimpulkan bahwa pembangunan infrastruktur menghasilkan dampak terbesar dalam penurunan IHK [inflasi] dan pendapatan riil karena peningkatan investasi infrastruktur mampu menstimulasi peningkatan produktivitas di berbagai sektor perekonomian bahkan dampak produktivitas di sektor pertanian tertinggi.

Berdasarkan indikator-indikator yang telah dibahas di atas, tampak adanya keterkaitan yang signifikan antara laju pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka, tingkat kemiskinan dan gini rasio (Gambar 5.13). Seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang menunjukkan kecenderungan peningkatan, tingkat pengangguran terbuka dan tingkat kemiskinan cenderung semakin berkurang. Artinya, pertumbuhan ekonomi mampu menyerap tenaga kerja dan mengurangi tingkat kemiskinan.

Gambar 5.13 Hubungan Laju Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran, Kemiskinan dan Gini Rasio, 2009-2013

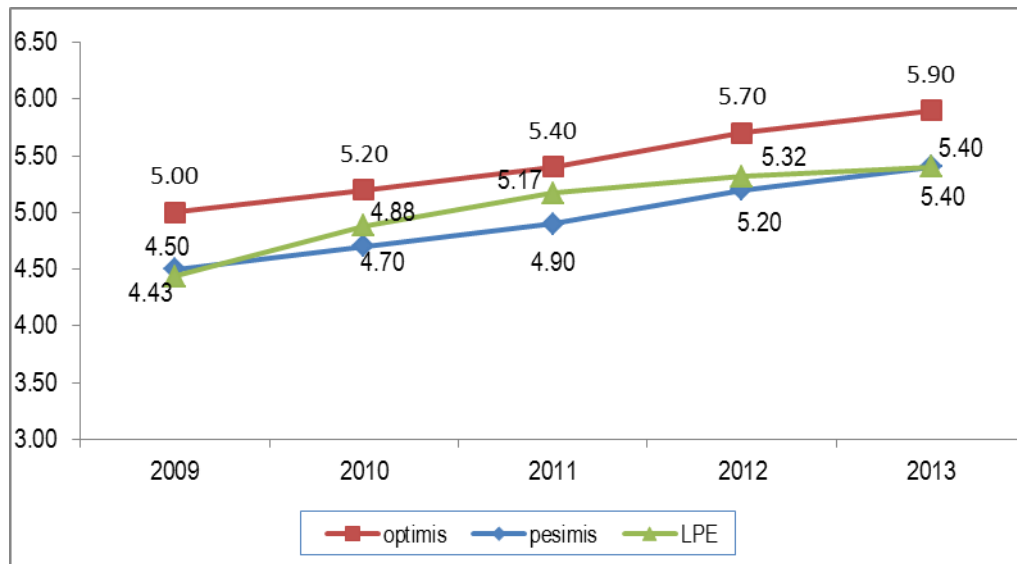


Sementara distribusi pendapatan yang diindikasikan oleh gini rasio yang beberapa tahun terakhir pada skala moderat sisi atas (mengarah timpang) pada tahun 2013 mulai menurun. Hal ini mengindikasikan bahwa ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat mulai berkurang. Namun demikian pada periode tahun 2009-2013 tampak masih terjadi situasi bahwa penduduk yang tergolong kaya (20 persen berpendapatan tertinggi) menikmati bagian pendapatan penduduk yang tergolong miskin (40 persen berpendapatan terendah).

Perbandingan capaian realisasi pertumbuhan ekonomi dalam kurun waktu penelitian terhadap target pertumbuhan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dapat dilihat pada Gambar 5.14. Berdasarkan target yang ditetapkan dalam RPJMD Pemda DIY 2009-2013, realisasi laju pertumbuhan ekonomi tahun 2013 masuk dalam *range* target 5,4-5,9 persen, meskipun

hanya mampu tumbuh seperti pada target optimis. Namun bila dilihat perkembangannya sejak tahun 2009, realisasi laju pertumbuhan ekonomi tahun 2011 tampaknya perlu dijadikan tinjauan pemerintah daerah untuk menerapkan kebijakan dan langkah-langkah strategis pelaksanaan agar kinerja seperti 2011 dapat diteruskan dan ditingkatkan kebaikannya di berbagai sektor kehidupan perekonomian.

Gambar 5.14 Realisasi Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Target RPJMD 2009-2013 (%)



BAB VI

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

6.1 Kesimpulan

1. Pada tahun terakhir masa pelaksanaan RPJMD DIY 2009-2013, nilai nominal PDRB DIY mencapai Rp63,69 triliun, naik sekitar Rp 6,65 triliun dari tahun sebelumnya dan kenaikannya juga Rp1,4 triliun lebih tinggi. Nilai riil PDRB (harga konstan 2000) juga mengalami kenaikan dari Rp23,31 triliun pada tahun 2012 menjadi Rp24,57 triliun di tahun 2013. Artinya, secara riil PDRB tahun 2013 naik sebanyak Rp1,26 triliun.
2. Nilai PDRB per kapita DIY tahun 2013 mencapai Rp17,98 juta atau meningkat 10,81 persen dibanding tahun sebelumnya. PDRB per kapita tertinggi dicapai oleh Kota Yogyakarta sebesar Rp40,47 juta, dan terendah Kabupaten Kulonprogo Rp11,77 juta. Kota Yogyakarta sebagai ibukota DIY, pusat pemerintahan, dan pusat kegiatan ekonomi cenderung memiliki PDRB per kapita yang tinggi setiap tahun. Adapun nilai riil PDRB per kapita DIY 2013 mencapai Rp6,94 juta atau meningkat 4,59 persen dibanding tahun sebelumnya.
3. Selama periode 2009-2013 struktur ekonomi DIY masih didominasi oleh 4 (empat) sektor utama meskipun terjadi pergeseran urutannya. Urutan pada tahun 2013 adalah sektor perdagangan, hotel, dan restoran; sektor jasa-jasa; sektor pertanian; serta sektor industri pengolahan dengan kontribusi masing-masing sebesar 20,65 persen; 20,16 persen; 13,91 persen; dan 13,77 persen.
4. Selama periode 2009-2013, kontribusi kelompok sektor primer cenderung mengalami penurunan, sedangkan andil kelompok sektor sekunder dan kelompok sektor primer semakin meningkat.
5. Hingga tahun 2013 daerah yang berperan sebagai penyumbang utama perekonomian DIY adalah Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta dengan kontribusi keduanya mencapai 57,18 persen.
6. Berdasarkan laju pertumbuhan indeks harga implisit, maka rata-rata kenaikan harga barang dan jasa (laju inflasi) pada tingkat produsen di DIY pada tahun 2013 mencapai 5,95 persen, lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 4,57 persen. Sementara inflasi yang terjadi pada tingkat konsumen tahun 2013 lebih tinggi yaitu 7,32 persen.
7. Dilihat dari sisi penggunaan PDRB tahun 2013, pertumbuhan tertinggi masih terjadi pada komponen konsumsi lembaga swasta nirlaba (*non-profit institution*) yang

mencapai sekitar 8,84 persen. Demikian pula pertumbuhan terendah juga masih terjadi pada komponen pembentukan modal bruto, yaitu sebesar 5,02 persen.

8. Struktur penggunaan PDRB yang dihasilkan di DIY sebagian besar untuk memenuhi konsumsi rumah tangga (52,27 persen) dan kecenderungannya semakin meningkat. Kontribusi terbesar kedua adalah pembentukan modal tetap bruto yang merupakan proksi investasi fisik yaitu sebesar 31,26 persen.
9. ICOR yang didekati dengan indikator ICVAR di DIY masih kurang efisien, yakni mencapai 5,63. Artinya, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar satu persen maka masih diperlukan pertumbuhan investasi sebesar 5,63 persen pada tahun yang bersangkutan.
10. Laju pertumbuhan ekonomi DIY pada tahun 2013 mencapai 5,40 persen, melaju 0,08 poin dari tahun sebelumnya yang sebesar 5,32 persen. Semua sektor mampu tumbuh di atas lima persen kecuali sektor pertanian dan sektor penggalian yang hanya tumbuh 0,63 persen dan 4,92 persen. Pada periode 2009-2013, rata-rata pertumbuhan ekonomi DIY mencapai 5,19 persen per tahun.
11. Dari sisi sektoral, sektor industri pengolahan pada tahun 2013 tumbuh paling pesat yaitu 7,81 persen sebagai akibat membaiknya kinerja produktivitas sektor industri setelah tahun sebelumnya mengalami kontraksi hingga di bawah dua persen. Kendati demikian, sektor yang memberi andil terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi DIY adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran (1,31 persen). Beberapa sektor lainnya yang memberikan andil positif cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi DIY adalah sektor jasa-jasa; sektor industri pengolahan; sektor pengangkutan dan komunikasi; sektor keuangan, real estat dan jasa perusahaan; dan sektor konstruksi.
12. Dilihat secara spasial, pertumbuhan ekonomi semua kabupaten/kota tahun 2013 mencapai di atas lima persen dan tertinggi terjadi di Kabupaten Sleman, yakni mencapai 5,70 persen dengan andil terhadap pertumbuhan DIY sebesar 1,46 persen. Hingga tahun 2012 pertumbuhan tertinggi masih dimiliki oleh Kota Yogyakarta. Oleh karenanya rata-rata pertumbuhan per tahun dalam periode 2009-2013 dimiliki Kota Yogyakarta yaitu sebesar 5,51 persen.
13. Berdasarkan analisis Tipologi Klassen dengan membuat plot antara laju pertumbuhan ekonomi dan nilai PDRB per kapita, kesenjangan ekonomi antar kabupaten/kota di wilayah DIY relatif masih tetap terjadi. Kota Yogyakarta sebagai ibukota DIY menjadi pusat kegiatan ekonomi sehingga mampu menjadi kota yang maju dan tumbuh pesat. Sementara dari lima kabupaten/kota masih terdapat dua daerah tertinggal dalam kemajuan ekonominya yaitu Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Kulonprogo.

14. Elastisitas kesempatan kerja di DIY selama periode 2011–2013 hanya sebesar 0,24 per tahun, artinya bahwa setiap kenaikan pertumbuhan ekonomi 1 (satu) persen hanya mampu meningkatkan serapan tenaga kerja sebesar 0,24 persen. Hal ini berarti dengan angkatan kerja sejumlah 1,85 juta jiwa pada tahun 2013, maka untuk 1 persen pertumbuhan ekonomi hanya mampu menyerap sekitar 4,4 ribu orang tenaga kerja, dan untuk rata-rata pertumbuhan ekonomi DIY periode 2009–2013 sebesar 5,19 persen per tahun maka tenaga kerja yang terserap hanya sekitar 22,7 ribu tenaga kerja per tahun.
15. Produktivitas tenaga kerja DIY pada tahun 2013 secara riil sebesar Rp13,3 juta per pekerja setahun, atau sekitar Rp36,44 ribu per orang per hari. Selama periode 2011–2013, rata-rata pertumbuhan produktivitas tenaga kerja per tahun mencapai 3,97 persen. Secara riil, rata-rata pertumbuhan produktivitas tenaga kerja terbaik dimiliki sektor keuangan, real estat, dan jasa perusahaan karena sumber capaian pertumbuhan berasal dari pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pertumbuhan tenaga kerja. Sementara sektor-sektor lain ada yang mencapai rata-rata pertumbuhan PTK tinggi tetapi lebih disebabkan oleh adanya kontraksi pertumbuhan tenaga kerja di sektor-sektor tersebut.
16. Kajian tipologi Klassen antara produktivitas tenaga kerja dengan pertumbuhan ekonomi menunjukkan bahwa pada tahun 2013 sektor listrik, gas dan air bersih; sektor keuangan, real estat dan jasa perusahaan; sektor pengangkutan dan komunikasi; serta sektor konstruksi merupakan empat sektor yang tumbuh pesat dan produktif. Sebaliknya sektor pertanian masih merupakan sektor yang tertinggal. Sementara sektor penggalian dan sektor industri pengolahan yang tahun sebelumnya masih tertinggal, tahun 2013 masuk kategori daerah dengan pertumbuhan cepat tetapi tidak produktif.
17. Jumlah penduduk miskin DIY pada tahun 2013 (September) tercatat sebanyak 535,18 ribu orang (15,03 persen), atau turun 4,79 dibanding 2012 yang sebanyak 562,1 ribu orang (15,88 persen). Persentase jumlah penduduk miskin di pedesaan jauh lebih tinggi dibanding daerah perkotaan, yakni 17,62 persen dibanding 13,73 persen. Jika dibandingkan dengan persentase penduduk miskin nasional yang mencapai 11,47 persen, tingkat kemiskinan DIY relatif masih lebih tinggi.
18. Selama periode tahun 2009-2013, Indeks kedalaman kemiskinan (P_1) dan Indeks keparahan kemiskinan (P_2) di DIY cenderung menurun dan angkanya di tahun 2013 masing-masing 2,13 persen dan 0,46 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kesenjangan/jarak antara rata-rata standar hidup penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan terhadap garis kemiskinan di DIY semakin berkurang. Demikian pula ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin juga semakin kecil.

19. Berdasarkan Gini Rasio, ketimpangan distribusi pendapatan penduduk DIY pada tahun 2013 sedikit berkurang, terlihat dari besaran Rasio Gini yang turun menjadi 41,64 persen dari 42,75 persen di tahun 2012. Sejalan dengan hal itu, berdasarkan kriteria Bank Dunia, persentase pendapatan yang dinikmati oleh 40 persen penduduk berpendapatan terendah sedikit bertambah menjadi 16,60 persen dari 15,74 persen di tahun sebelumnya.
20. Sebaliknya, ketimpangan ekonomi antarregion yang dicerminkan dengan perhitungan Indeks Williamson (IW) selama 2009–2013 cenderung meningkat, yaitu dari 44,32 persen pada tahun 2009 menjadi 47,16 persen di tahun 2013. Hal ini berarti bahwa tingkat pemerataan perekonomian antarregion (kabupaten/kota) di DIY semakin memprihatinkan, atau dengan kata lain kesenjangan ekonomi antar kabupaten/kota di DIY semakin melebar.
21. Mengacu pada periode data tahun 2009-2013, hasil perhitungan analisis *Shift Share* menunjukkan bahwa selama tersebut tidak ada daerah yang memiliki pertumbuhan ekonomi pesat. Jika tahun periode tahun sebelumnya (2008-2012) Kabupaten Sleman memiliki pertumbuhan ekonomi pesat, di periode 2009-2013 hanya terkategori sebagai “cenderung berpotensi” bersama dengan Kota Yogyakarta. Kabupaten Bantul dan Gunungkidul masuk dalam kategori kabupaten yang sedang berkembang. Sementara Kabupaten Kulonprogo masih merupakan kabupaten yang memiliki daya saing lemah.

6.2 Rekomendasi

1. Program hilirisasi penting karena untuk menambah nilai tambah komoditas. Salah satu kebijakan yang bisa dilakukan pemerintah daerah dalam rangka menghadapi pasar bebas adalah kebijakan hilirisasi berbasis sumber daya alam (SDA). Kebijakan hilirisasi industri berbasis SDA dapat mendorong pertumbuhan investasi daerah.
2. Setiap kabupaten/kota mempunyai corak pertumbuhan ekonomi yang berbeda. Oleh karena itu perencanaan pembangunan ekonomi suatu daerah perlu mengenali dan berlandaskan pada karakter ekonomi, sosial, dan fisik daerah itu sendiri termasuk potensi kemampuan interaksinya dengan daerah lain.
3. Untuk mendorong laju perekonomian daerah sebaiknya tidak bertumpu pada satu sektor tertentu. Keanekaragaman ekonomi diperlukan untuk mempertahankan lapangan pekerjaan dan untuk menstabilkan ekonomi daerah.
4. Sebagai daerah tujuan wisata dan pendidikan, warisan budaya yang dimiliki DIY telah menjadi andalan untuk sektor pariwisata. Nilai tambah pada kegiatan pariwisata dapat lebih dikembangkan melalui wisata ekologi seiring dengan pengemasan yang lebih baik wisata budaya.

5. Perlu ditingkatkan tumbuh kembangnya industri kreatif karena industri kreatif merupakan ide-ide kreatif untuk menghasilkan banyak gagasan dan inovasi. Inovasi memiliki peranan penting bagi unit usaha utamanya Usaha Kecil Menengah (UKM) karena dapat menciptakan efisiensi dan efektivitas. Dengan demikian melalui inovasi tersebut ekonomi DIY dapat bertahan dan terus berkembang di kancah persaingan antarwilayah bahkan internasional dan akhirnya memberikan kontribusi yang besar terhadap PDRB.
6. Permasalahan kemiskinan dan ketimpangan distribusi pendapatan masih membelit perekonomian DIY. Pemerintah daerah sampai dengan tahun 2013 sudah melakukan program intervensi untuk mengurai masalah tersebut. Hasilnya sudah dapat dirasakan, yaitu persentase penduduk miskin dan ketimpangan pendapatan mengalami penurunan meskipun masih relatif kecil.
7. Optimalisasi program bantuan untuk mengurangi beban hidup penduduk miskin masih perlu dilanjutkan, seperti: bantuan beras miskin (Raskin), asuransi kesehatan untuk keluarga miskin (Askeskin), bantuan biaya pendidikan (BOS), dan sebagainya.
8. Keterbatasan anggaran Pemerintah dalam membiaya pembangunan tetap menuntut peran serta masyarakat dunia usaha untuk menggerakkan roda perekonomian daerah, antara lain dengan program kemitraan atau kewirausahaan. Strategi pemberdayaan masyarakat juga perlu ditingkatkan untuk mengimplementasikan paradigma baru dalam pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik RI, 2013, ***“Produk Domestik Regional Bruto Provinsi-Provinsi di Indonesia menurut Lapangan Usaha”***, Badan Pusat Statistik, Jakarta.
- BPS Provinsi DIY, 2013, ***“ICOR Sektorial Provinsi D.I. Yogyakarta 2008-2012”***, Kerjasama BPS DIY Bappeda.
- BPS Provinsi DIY, 2013, ***“Analisis PDRB Provinsi D.I. Yogyakarta 2008-2012”***, Kerjasama BPS DIY Bappeda.
- BPS Provinsi DIY, 2014, ***“Keadaan Angkatan Kerja Di Provinsi D.I. Yogyakarta, Agustus 2013”***, Yogyakarta.
- Herrick Bruce dan Kendleberger Charles P, 1988, ***“Economic Development (diterjemahkan oleh Drs. Komarudin, Drs. A. Hasyuri Ali, Drs. G. Kartasapoetra)”***, Bina Aksara, Jakarta.
- Kartasasmita, Ginandjar, 1996, ***“Pembangunan untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan”***, PT Pustaka CIDESINDO, Jakarta.
- Limbong, Bernhard, 2013, ***“Ekonomi Kerakyatan dan Nasionalisme Ekonomi”***, Margaretha Pustaka, Jakarta.
- Kuncoro, Mudrajad, 2004, ***“Otonomi dan Pembangunan Daerah, Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang”***, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Mubyarto, 2003, ***“Teori Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi dalam Ekonomi Pancasila”*** Seminar Bulanan III, PUSTEP-UGM, Yogyakarta 1 April 2003.
- Nellis, Joseph G. dan David Parker, 2002, ***“The Essence of The Economy”***, Second Edition, Prentice Hall of India, New Delhi.
- Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 2009, ***“Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2009-2013”***, Yogyakarta.
- Sjafrizal, ***“Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional Wilayah Indonesia Bagian Barat”***, Prisma, LP3ES No. 3.
- Todaro, Michael P, and Smith, Stephen C, 2003, ***“Economic Development 8th Edition”***, Addison Wesley, London.
- Thomas, V., Dailami M., Dhareshwar A., Kaufmann D., Kishor N., Lopez R., and Wang Yang, 2001, ***“The Quality of Growth”***, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Widodo, Suseno Triyanto Hg, 1990, ***“Indikator Ekonomi : Dasar Perhitungan Perekonomian Indonesia”***, Kanisius, Yogyakarta.

TABEL 1.
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO D.I. YOGYAKARTA
ATAS DASAR HARGA BERLAKU MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 2009-2013 (JUTA RUPIAH)

LAPANGAN USAHA	2009	2010	2011	2012 ¹⁾	2013 ²⁾
1. PERTANIAN	6.366.771	6.644.695	7.373.852	8.355.326	8.861.281
a. Tanaman Bahan Makanan	4.652.257	4.817.985	5.348.388	6.136.638	6.304.000
b. Tanaman Perkebunan	139.878	147.300	173.453	188.126	207.577
c. Peternakan & Hasil-hasilnya	987.858	1.067.708	1.204.853	1.335.596	1.587.662
d. Kehutanan	419.458	430.726	450.657	462.997	480.884
e. Perikanan	167.320	180.976	196.501	231.969	281.157
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	293.983	304.660	361.793	379.951	416.531
a. Minyak & Gas Bumi	-	-	-	-	-
b. Pertambangan Bukan Migas	-	-	-	-	-
c. Penggalian	293.983	304.660	361.793	379.951	416.531
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	5.528.856	6.396.639	7.434.020	7.609.337	8.771.188
a. Industri Migas	-	-	-	-	-
1. Pengilangan Minyak Bumi	-	-	-	-	-
2. Gas Alam Cair	-	-	-	-	-
b. Industri Bukan Migas	5.528.856	6.396.639	7.434.020	7.609.337	8.771.188
1. Makanan, Minuman & Tembakau	2.650.343	3.385.042	4.237.759	4.278.424	5.032.769
2. Tekstil, Barang dari Kulit & Alas kaki	877.451	843.173	972.033	1.039.011	1.218.083
3. Kayu & Barang dari Kayu Lainnya	455.006	469.291	416.066	379.507	411.298
4. Kertas & Barang Cetak	236.405	245.159	235.655	233.788	254.388
5. Pupuk, Kimia & Barang dari Karet	282.326	351.537	369.169	391.614	401.976
6. Semen & Barang Galian Bukan Logam	249.411	283.281	313.558	318.348	373.086
7. Logam Dasar Besi & Baja	-	-	-	-	-
8. Alat Angkutan, Mesin & Peralatannya	391.774	435.995	465.967	490.244	498.337
9. Barang Lainnya	386.139	383.161	423.814	478.401	581.252
4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH	560.316	607.072	675.912	727.574	796.704
a. Listrik	531.446	576.248	642.759	690.775	756.432
b. Gas	-	-	-	-	-
c. Air Bersih	28.870	30.824	33.153	36.799	40.272
5. KONSTRUKSI	4.431.411	4.833.423	5.580.599	6.186.322	6.908.381
6. PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN	8.165.613	9.008.181	10.246.578	11.457.201	13.152.524
a. Perdagangan Besar & Eceran	3.497.028	3.884.721	4.395.608	4.884.831	5.510.533
b. Hotel	801.873	867.922	1.052.324	1.262.869	1.465.009
c. Restoran	3.866.713	4.255.538	4.798.646	5.309.500	6.176.982
7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI	3.809.094	4.119.970	4.572.928	4.903.522	5.400.530
a. Pengangkutan	2.840.046	3.052.517	3.368.744	3.606.797	4.024.160
1. Angkutan Rel	108.273	116.488	92.322	102.630	103.477
2. Angkutan Jalan Raya	2.325.993	2.479.466	2.714.321	2.845.463	3.144.722
3. Angkutan Laut	-	-	-	-	-
4. Angkutan Sungai, Danau & Penyeberangan	-	-	-	-	-
5. Angkutan Udara	279.763	307.392	379.594	453.148	555.115
6. Jasa Penunjang Angkutan	126.016	149.172	182.508	205.555	220.846
b. Komunikasi	969.048	1.067.453	1.204.184	1.296.725	1.376.370
1. Pos dan Telekomunikasi	877.087	969.135	1.092.873	1.176.253	1.248.485
2. Jasa Penunjang Komunikasi	91.961	98.318	111.312	120.472	127.885
8. KEUANGAN, PERSEWAAN & JASA PERUSAHAAN	4.090.675	4.552.667	5.158.229	5.876.203	6.543.153
a. Bank	735.275	875.831	1.044.942	1.286.608	1.568.864
b. Lembaga Keuangan Bukan Bank	430.102	487.047	620.529	687.369	763.305
c. Jasa Penunjang Keuangan	11.505	11.993	14.531	15.583	16.555
d. Real Estat	2.742.483	2.980.646	3.264.491	3.659.334	3.964.443
e. Jasa Perusahaan	171.310	197.151	213.736	227.309	229.988
9. JASA-JASA	8.160.329	9.158.283	10.381.238	11.536.320	12.840.026
a. Pemerintahan Umum	5.762.623	6.490.409	7.376.908	8.276.612	9.307.831
1. Administrasi Pemerintah & Pertahanan	3.515.340	3.950.219	4.494.533	5.047.312	5.672.360
2. Jasa Pemerintah Lainnya	2.247.283	2.540.190	2.882.375	3.229.300	3.635.471
b. Swasta	2.397.706	2.667.874	3.004.330	3.259.708	3.532.195
1. Jasa Sosial & Kemasyarakatan	1.174.713	1.293.736	1.454.805	1.546.758	1.670.548
2. Jasa Hiburan & Rekreasi	132.694	147.827	172.353	191.224	209.274
3. Jasa Perorangan & Rumah tangga	1.090.299	1.226.312	1.377.171	1.521.726	1.652.373
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	41.407.049	45.625.589	51.785.150	57.031.755	63.690.318

¹⁾ Anaka Sementara

²⁾ Anaka Sanaat Sementara

TABEL 2.
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO D.I. YOGYAKARTA
ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000 MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 2009-2013 (JUTA RUPIAH)

LAPANGAN USAHA	2009	2010	2011	2012*)	2013**)
1. PERTANIAN	3.642.696	3.632.681	3.557.865	3.706.923	3.730.297
a. Tanaman Bahan Makanan	2.773.292	2.757.165	2.654.468	2.773.919	2.779.245
b. Tanaman Perkebunan	93.429	95.772	97.405	99.200	102.371
c. Peternakan & Hasil-hasilnya	493.162	492.699	518.141	536.505	545.115
d. Kehutanan	190.273	190.177	190.700	191.589	192.710
e. Perikanan	92.539	96.868	97.152	105.709	110.856
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	138.748	139.967	156.711	159.808	167.669
a. Minyak & Gas Bumi	-	-	-	-	-
b. Pertambangan Bukan Migas	-	-	-	-	-
c. Penggalian	138.748	139.967	156.711	159.808	167.669
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	2.610.760	2.793.580	2.983.167	2.915.117	3.142.836
a. Industri Migas	-	-	-	-	-
1. Pengilangan Minyak Bumi	-	-	-	-	-
2. Gas Alam Cair	-	-	-	-	-
b. Industri Bukan Migas	2.610.760	2.793.580	2.983.167	2.915.117	3.142.836
1. Makanan, Minuman & Tembakau	1.020.655	1.173.572	1.345.071	1.273.390	1.395.234
2. Tekstil, Barang dari Kulit & Alas kaki	477.007	446.259	476.534	479.031	525.188
3. Kayu & Barang dari Kayu Lainnya	267.691	270.040	237.464	213.889	223.938
4. Kertas & Barang Cetakan	143.755	147.619	141.058	138.820	145.329
5. Pupuk, Kimia & Barang dari Karet	163.472	197.749	205.690	214.368	213.977
6. Semen & Barang Galian Bukan Logam	137.245	151.233	161.558	160.023	175.528
7. Logam Dasar Besi & Baja	-	-	-	-	-
8. Alat Angkutan, Mesin & Peralatannya	220.616	237.318	244.152	246.895	241.772
9. Barang Lainnya	180.317	169.791	171.639	188.701	221.869
4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH	185.599	193.027	201.243	215.542	229.640
a. Listrik	172.772	179.870	187.992	200.981	214.396
b. Gas	-	-	-	-	-
c. Air Bersih	12.827	13.157	13.251	14.561	15.244
5. KONSTRUKSI	1.923.720	2.040.306	2.187.805	2.318.448	2.459.173
6. PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN	4.162.116	4.383.851	4.611.402	4.920.045	5.225.056
a. Perdagangan Besar & Eceran	1.791.892	1.889.077	1.971.863	2.090.487	2.211.703
b. Hotel	364.119	376.543	421.779	487.361	530.389
c. Restoran	2.006.105	2.118.231	2.217.759	2.342.196	2.482.964
7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI	2.128.594	2.250.664	2.430.696	2.581.620	2.744.146
a. Pengangkutan	1.416.841	1.458.821	1.530.366	1.608.411	1.704.159
1. Angkutan Rel	44.028	45.785	34.378	37.466	35.938
2. Angkutan Jalan Raya	1.104.480	1.129.742	1.169.792	1.194.788	1.240.135
3. Angkutan Laut	-	-	-	-	-
4. Angkutan Sungai, Danau & Penyeberangan	-	-	-	-	-
5. Angkutan Udara	209.573	222.471	260.228	304.650	352.728
6. Jasa Penunjang Angkutan	58.759	60.823	65.968	71.507	75.358
b. Komunikasi	711.754	791.843	900.330	973.209	1.039.988
1. Pos dan Telekomunikasi	643.590	715.123	812.899	882.793	943.357
2. Jasa Penunjang Komunikasi	68.164	76.720	87.431	90.416	96.630
8. KEUANGAN, PERSEWAAN & JASA PERUSAHAAN	1.903.411	2.024.368	2.185.221	2.402.718	2.552.445
a. Bank	329.114	372.961	421.524	499.447	571.716
b. Lembaga Keuangan Bukan Bank	202.655	218.339	250.365	264.153	275.124
c. Jasa Penunjang Keuangan	6.027	6.264	6.775	6.745	6.716
d. Real Estat	1.284.735	1.338.835	1.412.809	1.530.192	1.594.592
e. Jasa Perusahaan	80.880	87.969	93.749	102.181	104.297
9. JASA-JASA	3.368.614	3.585.598	3.817.665	4.088.337	4.316.214
a. Pemerintahan Umum	2.332.559	2.491.965	2.642.246	2.843.023	2.995.720
1. Administrasi Pemerintah & Pertahanan	1.460.885	1.557.187	1.652.758	1.779.933	1.874.323
2. Jasa Pemerintah Lainnya	871.674	934.778	989.488	1.063.090	1.121.397
b. Swasta	1.036.055	1.093.633	1.175.419	1.245.314	1.320.495
1. Jasa Sosial & Kemasyarakatan	470.494	493.810	525.092	547.505	581.085
2. Jasa Hiburan & Rekreasi	83.729	88.685	97.039	105.334	112.894
3. Jasa Perorangan & Rumah tangga	481.832	511.138	553.288	592.475	626.516
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	20.064.257	21.044.042	22.131.774	23.308.558	24.567.476

*) Angka Sementara

**) Angka Sanoat Sementara

TABEL 3.
SUSUNAN AGREGAT PDRB DAN PDRB PERKAPITA D.I. YOGYAKARTA
MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 2009-2013

AGREGAT-AGREGAT	2009	2010	2011	2012*)	2013**)
I. ATAS DASAR HARGA BERLAKU					
1. Produk Domestik regional Bruto (juta rupiah)	41.407.049	45.625.589	51.785.150	57.031.755	63.690.318
2. Penyusutan (juta rupiah)	2.436.266	2.788.942	3.159.236	3.466.718	3.466.718
3. Produk Domestik Regional Neto Atas Harga Pasar (juta rupiah)	38.970.784	42.836.648	48.625.914	53.565.037	60.223.600
4. Pajak Tidak Langsung Neto (juta rupiah)	3.390.479	3.890.421	4.480.815	5.002.262	5.002.262
5. Produk Domestik Regional Neto Atas Dasar Biaya Faktor (juta rupiah)	35.580.305	38.946.226	44.145.098	48.562.775	55.221.338
6. Penduduk Pertengahan Tahun (Orang) #)	3.426.637	3.457.769	3.487.325	3.514.762	3.594.854
7. Produk Domestik Regional Bruto Per kapita (Rupiah)	12.083.874	13.195.095	14.849.534	16.226.349	17.717.081
8. Produk Domestik Regional Neto Per Kapita (Rupiah)	10.383.447	11.263.397	12.658.728	13.816.803	15.361.219
9. Pertumbuhan PDRB Perkapita (Persen)	7,61	9,20	12,54	9,27	9,19
10. Pertumbuhan PDRN Perkapita (Persen)	7,01	8,47	12,39	9,15	11,18
II. ATAS DASAR HARGA KONSTAN					
1. Produk Domestik regional Bruto (juta rupiah)	20.064.257	21.044.042	22.131.774	23.308.558	24.567.476
2. Penyusutan (juta rupiah)	1.160.709	1.251.308	1.325.024	1.399.463	1.399.463
3. Produk Domestik Regional Neto Atas Harga Pasar (juta rupiah)	18.903.548	19.792.733	20.806.751	21.909.096	23.168.014
4. Pajak Tidak Langsung Neto (juta rupiah)	1.550.460	1.640.641	1.734.890	1.843.298	1.843.298
5. Produk Domestik Regional Neto Atas Dasar Biaya Faktor (juta rupiah)	17.353.087	18.152.092	19.071.861	20.065.798	21.324.716
6. Penduduk Pertengahan Tahun (Orang) #)	3.426.637	3.457.769	3.487.325	3.514.762	3.594.854
7. Produk Domestik Regional Bruto Per kapita (Rupiah)	5.855.379	6.086.017	6.346.347	6.631.618	6.834.068
8. Produk Domestik Regional Neto Per Kapita (Rupiah)	5.064.174	5.249.654	5.468.908	5.709.006	5.932.012
9. Pertumbuhan PDRB Per kapita (Persen)	3,41	3,94	4,28	4,50	3,05
10. Pertumbuhan PDRN Per kapita (persen)	3,30	3,66	4,18	4,39	3,91

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

#) Angka Hasil Backcasting Sensus Penduduk 2000

TABEL 4.
DISTRIBUSI PERSENTASE PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO D.I. YOGYAKARTA
ATAS DASAR HARGA BERLAKU MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 2009-2013 (PERSEN)

LAPANGAN USAHA	2009	2010	2011	2012*)	2013**)
1. PERTANIAN	15,38	14,56	14,24	14,65	13,91
a. Tanaman Bahan Makanan	11,24	10,56	10,33	10,76	9,90
b. Tanaman Perkebunan	0,34	0,32	0,33	0,33	0,33
c. Peternakan & Hasil-hasilnya	2,39	2,34	2,33	2,34	2,49
d. Kehutanan	1,01	0,94	0,87	0,81	0,76
e. Perikanan	0,40	0,40	0,38	0,41	0,44
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	0,71	0,67	0,70	0,67	0,65
a. Minyak & Gas Bumi	-	-	-	-	-
b. Pertambangan Bukan Migas	-	-	-	-	-
c. Penggalian	0,71	0,67	0,70	0,67	0,65
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	13,35	14,02	14,36	13,34	13,77
a. Industri Migas	-	-	-	-	-
1. Pengilangan Minyak Bumi	-	-	-	-	-
2. Gas Alam Cair	-	-	-	-	-
b. Industri Bukan Migas	13,35	14,02	14,36	13,34	13,77
1. Makanan, Minuman & Tembakau	6,40	7,42	8,18	7,50	7,90
2. Tekstil, Barang dari Kulit & Alas kaki	2,12	1,85	1,88	1,82	1,91
3. Kayu & Barang dari Kayu Lainnya	1,10	1,03	0,80	0,67	0,65
4. Kertas & Barang Cetak	0,57	0,54	0,46	0,41	0,40
5. Pupuk, Kimia & Barang dari Karet	0,68	0,77	0,71	0,69	0,63
6. Semen & Barang Galian Bukan Logam	0,60	0,62	0,61	0,56	0,59
7. Logam Dasar Besi & Baja	-	-	-	-	-
8. Alat Angkutan, Mesin & Peralatannya	0,95	0,96	0,90	0,86	0,78
9. Barang Lainnya	0,93	0,84	0,82	0,84	0,91
4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH	1,35	1,33	1,31	1,28	1,25
a. Listrik	1,28	1,26	1,24	1,21	1,19
b. Gas	-	-	-	-	-
c. Air Bersih	0,07	0,07	0,06	0,06	0,06
5. KONSTRUKSI	10,70	10,59	10,78	10,85	10,85
6. PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN	19,72	19,74	19,79	20,09	20,65
a. Perdagangan Besar & Eceran	8,45	8,51	8,49	8,57	8,65
b. Hotel	1,94	1,90	2,03	2,21	2,30
c. Restoran	9,34	9,33	9,27	9,31	9,70
7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI	9,20	9,03	8,83	8,60	8,48
a. Pengangkutan	6,86	6,69	6,51	6,32	6,32
1. Angkutan Rel	0,26	0,26	0,18	0,18	0,16
2. Angkutan Jalan Raya	5,62	5,43	5,24	4,99	4,94
3. Angkutan Laut	-	-	-	-	-
4. Angkutan Sungai, Danau & Penyeberangan	-	-	-	-	-
5. Angkutan Udara	0,68	0,67	0,73	0,79	0,87
6. Jasa Penunjang Angkutan	0,30	0,33	0,35	0,36	0,35
b. Komunikasi	2,34	2,34	2,33	2,27	2,16
1. Pos dan Telekomunikasi	2,12	2,12	2,11	2,06	1,96
2. Jasa Penunjang Komunikasi	0,22	0,22	0,21	0,21	0,20
8. KEUANGAN, PERSEWAAN & JASA PERUSAHAAN	9,88	9,98	9,96	10,30	10,27
a. Bank	1,78	1,92	2,02	2,26	2,46
b. Lembaga Keuangan Bukan Bank	1,04	1,07	1,20	1,21	1,20
c. Jasa Penunjang Keuangan	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
d. Real Estat	6,62	6,53	6,30	6,42	6,22
e. Jasa Perusahaan	0,41	0,43	0,41	0,40	0,36
9. JASA-JASA	19,71	20,07	20,05	20,23	20,16
a. Pemerintahan Umum	13,92	14,23	14,25	14,51	14,61
1. Administrasi Pemerintah & Pertahanan	8,49	8,66	8,68	8,85	8,91
2. Jasa Pemerintah Lainnya	5,43	5,57	5,57	5,66	5,71
b. Swasta	5,79	5,85	5,80	5,72	5,55
1. Jasa Sosial & Kemasyarakatan	2,84	2,84	2,81	2,71	2,62
2. Jasa Hiburan & Rekreasi	0,32	0,32	0,33	0,34	0,33
3. Jasa Perorangan & Rumah tangga	2,63	2,69	2,66	2,67	2,59
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

*) Angka Sementara

**) Angka Sanaat Sementara

TABEL 5.
DISTRIBUSI PERSENTASE PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO D.I. YOGYAKARTA
ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000 MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 2009-2013 (PERSEN)

LAPANGAN USAHA	2009	2010	2011	2012*)	2013**)
1. PERTANIAN	18,16	17,26	16,08	15,90	15,18
a. Tanaman Bahan Makanan	13,82	13,10	11,99	11,90	11,31
b. Tanaman Perkebunan	0,47	0,46	0,44	0,43	0,42
c. Peternakan & Hasil-hasilnya	2,46	2,34	2,34	2,30	2,22
d. Kehutanan	0,95	0,90	0,86	0,82	0,78
e. Perikanan	0,46	0,46	0,44	0,45	0,45
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	0,69	0,67	0,71	0,69	0,68
a. Minyak & Gas Bumi	-	-	-	-	-
b. Pertambangan Bukan Migas	-	-	-	-	-
c. Penggalian	0,69	0,67	0,71	0,69	0,68
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	13,01	13,27	13,48	12,51	12,79
a. Industri Migas	-	-	-	-	-
1. Pengilangan Minyak Bumi	-	-	-	-	-
2. Gas Alam Cair	-	-	-	-	-
b. Industri Bukan Migas	13,01	13,27	13,48	12,51	12,79
1. Makanan, Minuman & Tembakau	5,09	5,58	6,08	5,46	5,68
2. Tekstil, Barang dari Kulit & Alas kaki	2,38	2,12	2,15	2,06	2,14
3. Kayu & Barang dari Kayu Lainnya	1,33	1,28	1,07	0,92	0,91
4. Kertas & Barang Cetakan	0,72	0,70	0,64	0,60	0,59
5. Pupuk, Kimia & Barang dari Karet	0,81	0,94	0,93	0,92	0,87
6. Semen & Barang Galian Bukan Logam	0,68	0,72	0,73	0,69	0,71
7. Logam Dasar Besi & Baja	-	-	-	-	-
8. Alat Angkutan, Mesin & Peralatannya	1,10	1,13	1,10	1,06	0,98
9. Barang Lainnya	0,90	0,81	0,78	0,81	0,90
4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH	0,93	0,92	0,91	0,92	0,93
a. Listrik	0,86	0,85	0,85	0,86	0,87
b. Gas	-	-	-	-	-
c. Air Bersih	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
5. KONSTRUKSI	9,59	9,70	9,89	9,95	10,01
6. PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN	20,74	20,83	20,84	21,11	21,27
a. Perdagangan Besar & Eceran	8,93	8,98	8,91	8,97	9,00
b. Hotel	1,81	1,79	1,91	2,09	2,16
c. Restoran	10,00	10,07	10,02	10,05	10,11
7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI	10,61	10,70	10,98	11,08	11,17
a. Pengangkutan	7,06	6,93	6,91	6,90	6,94
1. Angkutan Rel	0,22	0,22	0,16	0,16	0,15
2. Angkutan Jalan Raya	5,50	5,37	5,29	5,13	5,05
3. Angkutan Laut	-	-	-	-	-
4. Angkutan Sungai, Danau & Penyeberangan	-	-	-	-	-
5. Angkutan Udara	1,04	1,06	1,18	1,31	1,44
6. Jasa Penunjang Angkutan	0,29	0,29	0,30	0,31	0,31
b. Komunikasi	3,55	3,76	4,07	4,18	4,23
1. Pos dan Telekomunikasi	3,21	3,40	3,67	3,79	3,84
2. Jasa Penunjang Komunikasi	0,34	0,36	0,40	0,39	0,39
8. KEUANGAN, PERSEWAAN & JASA PERUSAHAAN	9,49	9,62	9,87	10,31	10,39
a. Bank	1,64	1,77	1,90	2,14	2,33
b. Lembaga Keuangan Bukan Bank	1,01	1,04	1,13	1,13	1,12
c. Jasa Penunjang Keuangan	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
d. Real Estat	6,40	6,36	6,38	6,56	6,49
e. Jasa Perusahaan	0,40	0,42	0,42	0,44	0,42
9. JASA-JASA	16,79	17,04	17,25	17,54	17,57
a. Pemerintahan Umum	11,63	11,84	11,94	12,20	12,19
1. Administrasi Pemerintah & Pertahanan	7,28	7,40	7,47	7,64	7,63
2. Jasa Pemerintah Lainnya	4,34	4,44	4,47	4,56	4,56
b. Swasta	5,16	5,20	5,31	5,34	5,37
1. Jasa Sosial & Kemasyarakatan	2,34	2,35	2,37	2,35	2,37
2. Jasa Hiburan & Rekreasi	0,42	0,42	0,44	0,45	0,46
3. Jasa Perorangan & Rumah tangga	2,40	2,43	2,50	2,54	2,55
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

*) Angka Sementara

**) Angka Sanoat Sementara

TABEL 6.
INDEKS PERKEMBANGAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO D.I. YOGYAKARTA
ATAS DASAR HARGA BERLAKU MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 2009-2013 (PERSEN)

LAPANGAN USAHA	2009	2010	2011	2012*)	2013**)
1. PERTANIAN	229,73	239,75	266,06	301,48	301,48
a. Tanaman Bahan Makanan	222,28	230,20	255,54	293,20	293,20
b. Tanaman Perkebunan	218,00	229,56	270,32	293,19	293,19
c. Peternakan & Hasil-hasilnya	238,74	258,04	291,19	322,78	322,78
d. Kehutanan	256,14	263,02	275,19	282,73	282,73
e. Perikanan	454,80	491,92	534,12	630,53	630,53
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	250,44	259,53	308,20	323,67	323,67
a. Minyak & Gas Bumi	-	-	-	-	-
b. Pertambangan Bukan Migas	-	-	-	-	-
c. Penggalian	250,44	259,53	308,20	323,67	323,67
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	255,15	295,20	343,07	351,27	351,27
a. Industri Migas	-	-	-	-	-
1. Pengilangan Minyak Bumi	-	-	-	-	-
2. Gas Alam Cair	-	-	-	-	-
b. Industri Bukan Migas	255,15	295,20	343,07	351,27	351,27
1. Makanan, Minuman & Tembakau	376,12	480,39	601,40	606,44	606,44
2. Tekstil, Barang dari Kulit & Alas kaki	190,19	182,76	210,69	225,21	225,21
3. Kayu & Barang dari Kayu Lainnya	149,28	153,96	136,50	122,78	122,78
4. Kertas & Barang Cetakan	209,45	217,21	208,79	207,13	207,13
5. Pupuk, Kimia & Barang dari Karet	281,06	349,96	367,51	389,86	389,86
6. Semen & Barang Galian Bukan Logam	218,45	248,12	274,63	278,83	278,83
7. Logam Dasar Besi & Baja	-	-	-	-	-
8. Alat Angkutan, Mesin & Peralatannya	186,19	207,21	221,45	232,99	232,99
9. Barang Lainnya	244,07	242,19	267,88	310,56	310,56
4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH	562,09	608,99	678,05	730,01	730,01
a. Listrik	588,37	637,97	711,60	764,76	764,76
b. Gas	-	-	-	-	-
c. Air Bersih	308,45	329,32	354,21	394,66	394,66
5. KONSTRUKSI	470,57	513,26	592,60	656,92	656,92
6. PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN	310,19	342,20	389,24	435,23	435,23
a. Perdagangan Besar & Eceran	295,24	327,97	371,11	412,41	412,41
b. Hotel	259,91	281,32	341,09	409,34	409,34
c. Restoran	339,34	373,46	421,12	465,95	465,95
7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI	330,49	357,47	396,77	425,45	425,45
a. Pengangkutan	348,34	374,40	413,19	442,39	442,39
1. Angkutan Rel	182,33	196,16	155,47	172,83	172,83
2. Angkutan Jalan Raya	340,37	362,83	397,19	416,38	416,38
3. Angkutan Laut	-	-	-	-	-
4. Angkutan Sungai, Danau & Penyeberangan	-	-	-	-	-
5. Angkutan Udara	808,73	888,60	1097,32	1309,95	1309,95
6. Jasa Penunjang Angkutan	332,09	393,11	480,96	541,70	541,70
b. Komunikasi	287,34	316,52	357,06	384,50	384,50
1. Pos dan Telekomunikasi	299,16	330,55	372,76	401,20	401,20
2. Jasa Penunjang Komunikasi	208,70	223,12	252,61	273,40	273,40
8. KEUANGAN, PERSEWAAN & JASA PERUSAHAAN	348,44	387,80	439,38	500,53	500,53
a. Bank	622,08	741,00	884,08	1088,54	1088,54
b. Lembaga Keuangan Bukan Bank	323,66	366,51	466,96	517,26	517,26
c. Jasa Penunjang Keuangan	284,50	296,55	359,33	385,34	385,34
d. Real Estat	314,05	341,32	373,82	419,04	419,04
e. Jasa Perusahaan	375,75	432,42	468,80	498,57	498,57
9. JASA-JASA	336,59	377,75	428,20	475,84	475,84
a. Pemerintahan Umum	344,79	388,33	441,37	495,20	495,20
1. Administrasi Pemerintah & Pertahanan	328,31	368,92	419,76	471,38	471,38
2. Jasa Pemerintah Lainnya	374,16	422,93	479,90	537,66	537,66
b. Swasta	318,40	354,27	398,95	432,86	432,86
1. Jasa Sosial & Kemasyarakatan	316,72	348,81	392,24	417,03	417,03
2. Jasa Hiburan & Rekreasi	251,17	279,82	326,24	361,96	361,96
3. Jasa Perorangan & Rumah tangga	331,07	372,37	418,18	462,07	462,07
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	307,16	338,45	384,15	423,08	423,08

*) Anka Sementara

**) Anka Sanaat Sementara

TABEL 7.
INDEKS PERKEMBANGAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO D.I. YOGYAKARTA
ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000 MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 2009-2013 (PERSEN)

LAPANGAN USAHA	2009	2010	2011	2012*)	2013**)
1. PERTANIAN	131,44	131,07	128,37	133,75	133,75
a. Tanaman Bahan Makanan	132,50	131,73	126,83	132,53	132,53
b. Tanaman Perkebunan	145,61	149,26	151,80	154,60	154,60
c. Peternakan & Hasil-hasilnya	119,19	119,07	125,22	129,66	129,66
d. Kehutanan	116,19	116,13	116,45	116,99	116,99
e. Perikanan	251,54	263,30	264,07	287,33	287,33
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	118,20	119,23	133,50	136,14	136,14
a. Minyak & Gas Bumi	-	-	-	-	-
b. Pertambangan Bukan Migas	-	-	-	-	-
c. Penggalian	118,20	119,23	133,50	136,14	136,14
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	120,48	128,92	137,67	134,56	134,56
a. Industri Migas	-	-	-	-	-
1. Pengilangan Minyak Bumi	-	-	-	-	-
2. Gas Alam Cair	-	-	-	-	-
b. Industri Bukan Migas	120,48	128,92	137,67	134,56	134,56
1. Makanan, Minuman & Tembakau	144,85	166,55	190,89	180,50	180,50
2. Tekstil, Barang dari Kulit & Alas kaki	103,39	96,73	103,29	103,83	103,83
3. Kayu & Barang dari Kayu Lainnya	87,82	88,59	77,91	69,20	69,20
4. Kertas & Barang Cetak	127,36	130,79	124,97	122,99	122,99
5. Pupuk, Kimia & Barang dari Karet	162,74	196,86	204,77	213,41	213,41
6. Semen & Barang Galian Bukan Logam	120,21	132,46	141,50	140,16	140,16
7. Logam Dasar Besi & Baja	-	-	-	-	-
8. Alat Angkutan, Mesin & Peralatannya	104,85	112,79	116,03	117,34	117,34
9. Barang Lainnya	113,97	107,32	108,49	122,48	122,48
4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH	186,19	193,64	201,88	216,28	216,28
a. Listrik	191,28	199,14	208,13	222,51	222,51
b. Gas	-	-	-	-	-
c. Air Bersih	137,04	140,57	141,57	156,16	156,16
5. KONSTRUKSI	204,28	216,66	232,32	246,19	246,19
6. PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN	158,11	166,53	175,17	186,90	186,90
a. Perdagangan Besar & Eceran	151,28	159,49	166,48	176,49	176,49
b. Hotel	118,02	122,05	136,71	157,97	157,97
c. Restoran	176,05	185,89	194,63	205,55	205,55
7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI	184,69	195,28	210,90	223,99	223,99
a. Pengangkutan	173,78	178,93	187,71	197,28	197,28
1. Angkutan Rel	74,14	77,10	57,89	63,09	63,09
2. Angkutan Jalan Raya	161,62	165,32	171,18	174,84	174,84
3. Angkutan Laut	-	-	-	-	-
4. Angkutan Sungai, Danau & Penyeberangan	-	-	-	-	-
5. Angkutan Udara	605,83	643,12	752,26	880,68	880,68
6. Jasa Penunjang Angkutan	154,85	160,29	173,85	188,44	188,44
b. Komunikasi	211,05	234,79	266,96	288,57	288,57
1. Pos dan Telekomunikasi	219,52	243,92	277,26	301,10	301,10
2. Jasa Penunjang Komunikasi	154,69	174,11	198,42	205,19	205,19
8. KEUANGAN, PERSEWAAN & JASA PERUSAHAAN	162,13	172,44	186,14	204,66	204,66
a. Bank	278,45	315,55	356,63	422,56	422,56
b. Lembaga Keuangan Bukan Bank	152,50	164,31	188,41	198,78	198,78
c. Jasa Penunjang Keuangan	149,02	154,91	167,53	166,78	166,78
d. Real Estat	147,12	153,31	161,78	175,23	175,23
e. Jasa Perusahaan	177,40	192,95	205,63	224,12	224,12
9. JASA-JASA	138,95	147,90	157,47	168,63	168,63
a. Pemerintahan Umum	139,56	149,10	158,09	170,10	170,10
1. Administrasi Pemerintah & Pertahanan	136,44	145,43	154,36	166,23	166,23
2. Jasa Pemerintah Lainnya	145,13	155,64	164,74	177,00	177,00
b. Swasta	137,58	145,23	156,09	165,37	165,37
1. Jasa Sosial & Kemasyarakatan	126,85	133,14	141,57	147,62	147,62
2. Jasa Hiburan & Rekreasi	158,49	167,87	183,68	199,38	199,38
3. Jasa Perorangan & Rumah tangga	146,31	155,21	168,01	179,90	179,90
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	148,84	156,11	164,18	172,91	172,91

*) Angka Sementara

**) Angka Sanoat Sementara

TABEL 8.
INDEKS HARGA IMPLISIT PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO D.I. YOGYAKARTA
MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 2009-2013 (PERSEN)

LAPANGAN USAHA	2009	2010	2011	2012*)	2013**)
1. PERTANIAN	174,78	182,91	207,25	225,40	237,55
a. Tanaman Bahan Makanan	167,75	174,74	201,49	221,23	226,82
b. Tanaman Perkebunan	149,72	153,80	178,07	189,64	202,77
c. Peternakan & Hasil-hasilnya	200,31	216,71	232,53	248,94	291,25
d. Kehutanan	220,45	226,49	236,32	241,66	249,54
e. Perikanan	180,81	186,83	202,26	219,44	253,62
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	211,88	217,67	230,87	237,75	248,42
a. Minyak & Gas Bumi	-	-	-	-	-
b. Pertambangan Bukan Migas	-	-	-	-	-
c. Penggalian	211,88	217,67	230,87	237,75	248,42
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	211,77	228,98	249,20	261,03	279,09
a. Industri Migas	-	-	-	-	-
1. Pengilangan Minyak Bumi	-	-	-	-	-
2. Gas Alam Cair	-	-	-	-	-
b. Industri Bukan Migas	211,77	228,98	249,20	261,03	279,09
1. Makanan, Minuman & Tembakau	259,67	288,44	315,06	335,99	360,71
2. Tekstil, Barang dari Kulit & Alas kaki	183,95	188,94	203,98	216,90	231,93
3. Kayu & Barang dari Kayu Lainnya	169,97	173,79	175,21	177,43	183,67
4. Kertas & Barang Cetak	164,45	166,08	167,06	168,41	175,04
5. Pupuk, Kimia & Barang dari Karet	172,71	177,77	179,48	182,68	187,86
6. Semen & Barang Galian Bukan Logam	181,73	187,31	194,08	198,94	212,55
7. Logam Dasar Besi & Baja	-	-	-	-	-
8. Alat Angkutan, Mesin & Peralatannya	177,58	183,72	190,85	198,56	206,12
9. Barang Lainnya	214,14	225,67	246,92	253,52	261,98
4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH	301,90	314,50	335,87	337,56	346,94
a. Listrik	307,60	320,37	341,91	343,70	352,82
b. Gas	-	-	-	-	-
c. Air Bersih	225,08	234,28	250,19	252,73	264,18
5. KONSTRUKSI	230,36	236,90	255,08	266,83	280,92
6. PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN	196,19	205,49	222,20	232,87	251,72
a. Perdagangan Besar & Eceran	195,16	205,64	222,92	233,67	249,15
b. Hotel	220,22	230,50	249,50	259,12	276,21
c. Restoran	192,75	200,90	216,37	226,69	248,77
7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI	178,95	183,06	188,13	189,94	196,80
a. Pengangkutan	200,45	209,25	220,13	224,25	236,14
1. Angkutan Rel	245,92	254,42	268,55	273,93	287,93
2. Angkutan Jalan Raya	210,60	219,47	232,03	238,16	253,58
3. Angkutan Laut	-	-	-	-	-
4. Angkutan Sungai, Danau & Penyeberangan	-	-	-	-	-
5. Angkutan Udara	133,49	138,17	145,87	148,74	157,38
6. Jasa Penunjang Angkutan	214,46	245,26	276,66	287,46	293,06
b. Komunikasi	136,15	134,81	133,75	133,24	132,34
1. Pos dan Telekomunikasi	136,28	135,52	134,44	133,24	132,34
2. Jasa Penunjang Komunikasi	134,91	128,15	127,31	133,24	132,34
8. KEUANGAN, PERSEWAAN & JASA PERUSAHAAN	214,91	224,89	236,05	244,56	256,35
a. Bank	223,41	234,83	247,90	257,61	274,41
b. Lembaga Keuangan Bukan Bank	212,23	223,07	247,85	260,22	277,44
c. Jasa Penunjang Keuangan	190,91	191,44	214,49	231,04	246,51
d. Real Estat	213,47	222,63	231,06	239,14	248,62
e. Jasa Perusahaan	211,81	224,11	227,99	222,46	220,51
9. JASA-JASA	242,25	255,42	271,93	282,18	297,48
a. Pemerintahan Umum	247,05	260,45	279,19	291,12	310,70
1. Administrasi Pemerintah & Pertahanan	240,63	253,68	271,94	283,57	302,64
2. Jasa Pemerintah Lainnya	257,81	271,74	291,30	303,77	324,19
b. Swasta	231,43	243,95	255,60	261,76	267,49
1. Jasa Sosial & Kemasyarakatan	249,68	261,99	277,06	282,51	287,49
2. Jasa Hiburan & Rekreasi	158,48	166,69	177,61	181,54	185,37
3. Jasa Perorangan & Rumah tangga	226,28	239,92	248,91	256,84	263,74
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	206,37	216,81	233,99	244,68	259,25

*) Anaka Sementara

**) Anaka Sanaat Sementara

TABEL 9.
INDEKS HARGA IMPLISIT BERANTAI PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO D.I. YOGYAKARTA
MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 2009-2013 (PERSEN)

LAPANGAN USAHA	2009	2010	2011	2012*)	2013**)
1. PERTANIAN	102,76	104,65	113,31	108,75	105,39
a. Tanaman Bahan Makanan	101,49	104,17	115,30	109,80	102,53
b. Tanaman Perkebunan	88,84	102,73	115,78	106,50	106,92
c. Peternakan & Hasil-hasilnya	108,98	108,18	107,30	107,06	117,00
d. Kehutanan	108,93	102,74	104,34	102,26	103,26
e. Perikanan	105,17	103,33	108,26	108,49	115,58
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	104,64	102,73	106,06	102,98	104,49
a. Minyak & Gas Bumi	-	-	-	-	-
b. Pertambangan Bukan Migas	-	-	-	-	-
c. Penggalian	104,64	102,73	106,06	102,98	104,49
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	107,20	108,12	108,83	104,75	106,92
a. Industri Migas	-	-	-	-	-
1. Pengilangan Minyak Bumi	-	-	-	-	-
2. Gas Alam Cair	-	-	-	-	-
b. Industri Bukan Migas	107,20	108,12	108,83	104,75	106,92
1. Makanan, Minuman & Tembakau	105,39	111,08	109,23	106,64	107,36
2. Tekstil, Barang dari Kulit & Alas kaki	106,92	102,71	107,96	106,33	106,93
3. Kayu & Barang dari Kayu Lainnya	106,67	102,24	100,82	101,27	103,51
4. Kertas & Barang Cetak	105,72	100,99	100,59	100,81	103,94
5. Pupuk, Kimia & Barang dari Karet	107,28	102,93	100,96	101,79	102,83
6. Semen & Barang Galian Bukan Logam	106,41	103,07	103,61	102,50	106,84
7. Logam Dasar Besi & Baja	-	-	-	-	-
8. Alat Angkutan, Mesin & Peralatannya	106,55	103,46	103,88	104,04	103,80
9. Barang Lainnya	114,14	105,38	109,42	102,67	103,34
4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH	108,15	104,18	106,79	100,50	102,78
a. Listrik	108,04	104,15	106,72	100,52	102,65
b. Gas	-	-	-	-	-
c. Air Bersih	108,06	104,09	106,79	101,01	104,53
5. KONSTRUKSI	103,91	102,84	107,67	104,61	105,28
6. PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN	105,79	104,74	108,13	104,80	108,10
a. Perdagangan Besar & Eceran	105,23	105,37	108,40	104,82	106,63
b. Hotel	105,12	104,67	108,24	103,86	106,60
c. Restoran	106,41	104,23	107,70	104,77	109,74
7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI	96,13	102,30	102,77	100,96	103,61
a. Pengangkutan	96,98	104,39	105,20	101,87	105,30
1. Angkutan Rel	96,69	103,46	105,55	102,00	105,11
2. Angkutan Jalan Raya	97,13	104,21	105,72	102,64	106,48
3. Angkutan Laut	-	-	-	-	-
4. Angkutan Sungai, Danau & Penyeberangan	-	-	-	-	-
5. Angkutan Udara	96,71	103,51	105,57	101,97	105,80
6. Jasa Penunjang Angkutan	103,99	114,36	112,80	103,90	101,95
b. Komunikasi	94,59	99,01	99,22	99,62	99,33
1. Pos dan Telekomunikasi	94,68	99,44	99,20	99,11	99,33
2. Jasa Penunjang Komunikasi	93,73	94,99	99,35	104,66	99,33
8. KEUANGAN, PERSEWAAN & JASA PERUSAHAAN	103,51	104,64	104,96	103,61	104,82
a. Bank	102,39	105,11	105,56	103,92	106,52
b. Lembaga Keuangan Bukan Bank	97,27	105,11	111,11	104,99	106,62
c. Jasa Penunjang Keuangan	111,55	100,28	112,04	107,72	106,70
d. Real Estat	104,74	104,29	103,79	103,50	103,96
e. Jasa Perusahaan	105,12	105,81	101,73	97,57	99,13
9. JASA-JASA	105,31	105,44	106,46	103,77	105,42
a. Pemerintahan Umum	105,21	105,42	107,19	104,27	106,73
1. Administrasi Pemerintah & Pertahanan	105,15	105,42	107,20	104,28	106,72
2. Jasa Pemerintah Lainnya	105,21	105,40	107,20	104,28	106,72
b. Swasta	105,52	105,41	104,78	102,41	102,19
1. Jasa Sosial & Kemasyarakatan	104,21	104,93	105,75	101,97	101,76
2. Jasa Hiburan & Rekreasi	103,69	105,18	106,55	102,21	102,11
3. Jasa Perorangan & Rumah tangga	107,24	106,03	103,75	103,19	102,69
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	104,06	105,06	107,92	104,57	105,95

*) Angka Sementara

**) Angka Sanoat Sementara

TABEL 10.
INFLASI ATAS DASAR INDEKS HARGA IMPLISIT BERANTAI PDRB D.I. YOGYAKARTA
MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 2009-2013 (PERSEN)

LAPANGAN USAHA	2009	2010	2011	2012*)	2013**)
1. PERTANIAN	2,76	4,65	13,31	8,75	5,39
a. Tanaman Bahan Makanan	1,49	4,17	15,30	9,80	2,53
b. Tanaman Perkebunan	-11,16	2,73	15,78	6,50	6,92
c. Peternakan & Hasil-hasilnya	8,98	8,18	7,30	7,06	17,00
d. Kehutanan	8,93	2,74	4,34	2,26	3,26
e. Perikanan	5,17	3,33	8,26	8,49	15,58
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	4,64	2,73	6,06	2,98	4,49
a. Minyak & Gas Bumi	-	-	-	-	-
b. Pertambangan Bukan Migas	-	-	-	-	-
c. Penggalian	4,64	2,73	6,06	2,98	4,49
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	7,20	8,12	8,83	4,75	6,92
a. Industri Migas	-	-	-	-	-
1. Pengilangan Minyak Bumi	-	-	-	-	-
2. Gas Alam Cair	-	-	-	-	-
b. Industri Bukan Migas	7,20	8,12	8,83	4,75	6,92
1. Makanan, Minuman & Tembakau	5,39	11,08	9,23	6,64	7,36
2. Tekstil, Barang dari Kulit & Alas kaki	6,92	2,71	7,96	6,33	6,93
3. Kayu & Barang dari Kayu Lainnya	6,67	2,24	0,82	1,27	3,51
4. Kertas & Barang Cetak	5,72	0,99	0,59	0,81	3,94
5. Pupuk, Kimia & Barang dari Karet	7,28	2,93	0,96	1,79	2,83
6. Semen & Barang Galian Bukan Logam	6,41	3,07	3,61	2,50	6,84
7. Logam Dasar Besi & Baja	-	-	-	-	-
8. Alat Angkutan, Mesin & Peralatannya	6,55	3,46	3,88	4,04	3,80
9. Barang Lainnya	14,14	5,38	9,42	2,67	3,34
4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH	8,15	4,18	6,79	0,50	2,78
a. Listrik	8,04	4,15	6,72	0,52	2,65
b. Gas	-	-	-	-	-
c. Air Bersih	8,06	4,09	6,79	1,01	4,53
5. KONSTRUKSI	3,91	2,84	7,67	4,61	5,28
6. PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN	5,79	4,74	8,13	4,80	8,10
a. Perdagangan Besar & Eceran	5,23	5,37	8,40	4,82	6,63
b. Hotel	5,12	4,67	8,24	3,86	6,60
c. Restoran	6,41	4,23	7,70	4,77	9,74
7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI	-3,87	2,30	2,77	0,96	3,61
a. Pengangkutan	-3,02	4,39	5,20	1,87	5,30
1. Angkutan Rel	-3,31	3,46	5,55	2,00	5,11
2. Angkutan Jalan Raya	-2,87	4,21	5,72	2,64	6,48
3. Angkutan Laut	-	-	-	-	-
4. Angkutan Sungai, Danau & Penyeberangan	-	-	-	-	-
5. Angkutan Udara	-3,29	3,51	5,57	1,97	5,80
6. Jasa Penunjang Angkutan	3,99	14,36	12,80	3,90	1,95
b. Komunikasi	-5,41	-0,99	-0,78	-0,38	-0,67
1. Pos dan Telekomunikasi	-5,32	-0,56	-0,80	-0,89	-0,67
2. Jasa Penunjang Komunikasi	-6,27	-5,01	-0,65	4,66	-0,67
8. KEUANGAN, PERSEWAAN & JASA PERUSAHAAN	3,51	4,64	4,96	3,61	4,82
a. Bank	2,39	5,11	5,56	3,92	6,52
b. Lembaga Keuangan Bukan Bank	-2,73	5,11	11,11	4,99	6,62
c. Jasa Penunjang Keuangan	11,55	0,28	12,04	7,72	6,70
d. Real Estat	4,74	4,29	3,79	3,50	3,96
e. Jasa Perusahaan	5,12	5,81	1,73	-2,43	-0,87
9. JASA-JASA	5,31	5,44	6,46	3,77	5,42
a. Pemerintahan Umum	5,21	5,42	7,19	4,27	6,73
1. Administrasi Pemerintah & Pertahanan	5,15	5,42	7,20	4,28	6,72
2. Jasa Pemerintah Lainnya	5,21	5,40	7,20	4,28	6,72
b. Swasta	5,52	5,41	4,78	2,41	2,19
1. Jasa Sosial & Kemasyarakatan	4,21	4,93	5,75	1,97	1,76
2. Jasa Hiburan & Rekreasi	3,69	5,18	6,55	2,21	2,11
3. Jasa Perorangan & Rumah tangga	7,24	6,03	3,75	3,19	2,69
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	4,06	5,06	7,92	4,57	5,95

*) Angka Sementara

**) Angka Sanoat Sementara

TABEL 11.
LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI D.I. YOGYAKARTA
MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 2009-2013 (PERSEN)

LAPANGAN USAHA	2009	2010	2011	2012*)	2013**)
1. PERTANIAN	3,37	-0,27	-2,06	4,19	0,63
a. Tanaman Bahan Makanan	3,74	-0,58	-3,72	4,50	0,19
b. Tanaman Perkebunan	5,20	2,51	1,71	1,84	3,20
c. Peternakan & Hasil-hasilnya	1,86	-0,09	5,16	3,54	1,60
d. Kehutanan	-0,04	-0,05	0,27	0,47	0,58
e. Perikanan	6,08	4,68	0,29	8,81	4,87
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	0,30	0,88	11,96	1,98	4,92
a. Minyak & Gas Bumi	-	-	-	-	-
b. Pertambangan Bukan Migas	-	-	-	-	-
c. Penggalan	0,30	0,88	11,96	1,98	4,92
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	1,88	7,00	6,79	-2,26	7,81
a. Industri Migas	-	-	-	-	-
1. Pengilangan Minyak Bumi	-	-	-	-	-
2. Gas Alam Cair	-	-	-	-	-
b. Industri Bukan Migas	1,88	7,00	6,79	-2,26	7,81
1. Makanan, Minuman & Tembakau	5,70	14,98	14,61	-5,44	9,57
2. Tekstil, Barang dari Kulit & Alas kaki	5,46	-6,45	6,78	0,52	9,64
3. Kayu & Barang dari Kayu Lainnya	-16,74	0,88	-12,06	-11,18	4,70
4. Kertas & Barang Cetak	2,87	2,69	-4,44	-1,59	4,69
5. Pupuk, Kimia & Barang dari Karet	13,07	20,97	4,02	4,22	-0,18
6. Semen & Barang Galian Bukan Logam	0,78	10,19	6,83	-0,95	9,69
7. Logam Dasar Besi & Baja	-	-	-	-	-
8. Alat Angkutan, Mesin & Peralatannya	1,51	7,57	2,88	1,12	-2,07
9. Barang Lainnya	-2,68	-5,84	1,09	12,89	17,58
4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH	6,10	4,00	4,26	7,13	6,54
a. Listrik	6,51	4,11	4,52	6,91	6,67
b. Gas	-	-	-	-	-
c. Air Bersih	0,88	2,58	0,71	10,30	4,70
5. KONSTRUKSI	4,64	6,06	7,23	5,97	6,07
6. PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN	5,43	5,33	5,19	6,69	6,20
a. Perdagangan Besar & Eceran	5,48	5,42	4,38	6,02	5,80
b. Hotel	6,37	3,41	12,01	15,55	8,83
c. Restoran	5,22	5,59	4,70	5,61	6,01
7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI	5,96	5,73	8,00	6,21	6,30
a. Pengangkutan	4,84	2,96	4,90	5,10	5,95
1. Angkutan Rel	11,42	3,99	-24,91	8,98	-4,08
2. Angkutan Jalan Raya	2,92	2,29	3,55	2,14	3,80
3. Angkutan Laut	-	-	-	-	-
4. Angkutan Sungai, Danau & Penyeberangan	-	-	-	-	-
5. Angkutan Udara	13,06	6,15	16,97	17,07	15,78
6. Jasa Penunjang Angkutan	9,98	3,51	8,46	8,40	5,39
b. Komunikasi	8,25	11,25	13,70	8,09	6,86
1. Pos dan Telekomunikasi	8,15	11,11	13,67	8,60	6,86
2. Jasa Penunjang Komunikasi	9,25	12,55	13,96	3,41	6,87
8. KEUANGAN, PERSEWAAN & JASA PERUSAHAAN	6,11	6,35	7,95	9,95	6,23
a. Bank	3,22	13,32	13,02	18,49	14,47
b. Lembaga Keuangan Bukan Bank	11,73	7,74	14,67	5,51	4,15
c. Jasa Penunjang Keuangan	8,89	3,95	8,15	-0,44	-0,43
d. Real Estat	6,14	4,21	5,53	8,31	4,21
e. Jasa Perusahaan	4,25	8,77	6,57	8,99	2,07
9. JASA-JASA	4,49	6,44	6,47	7,09	5,57
a. Pemerintahan Umum	4,56	6,83	6,03	7,60	5,37
1. Administrasi Pemerintah & Pertahanan	3,66	6,59	6,14	7,69	5,30
2. Jasa Pemerintah Lainnya	6,10	7,24	5,85	7,44	5,48
b. Swasta	4,32	5,56	7,48	5,95	6,04
1. Jasa Sosial & Kemasyarakatan	4,41	4,96	6,33	4,27	6,13
2. Jasa Hiburan & Rekreasi	5,08	5,92	9,42	8,55	7,18
3. Jasa Perorangan & Rumah tangga	4,11	6,08	8,25	7,08	5,75
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	4,43	4,88	5,17	5,32	5,40

*) Angka Sementara

**) Angka Sanoat Sementara

TABEL 12.
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN KULONPROGO
ATAS DASAR HARGA BERLAKU MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 2009-2013 (JUTA RUPIAH)

LAPANGAN USAHA	2009	2010	2011	2012*)	2013**)
1. PERTANIAN	792.463	821.569	915.596	985.507	1.061.783
a. Tanaman Bahan Makanan	508.072	497.159	561.534	605.505	614.935
b. Tanaman Perkebunan	43.080	42.002	43.906	49.270	56.982
c. Peternakan & Hasil-hasilnya	155.796	178.502	201.094	222.746	276.339
d. Kehutanan	70.900	84.164	88.131	85.120	85.987
e. Perikanan	14.615	19.742	20.930	22.866	27.539
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	34.555	24.835	31.548	36.684	43.827
a. Minyak & Gas Bumi	-	-	-	-	-
b. Pertambangan Bukan Migas	-	-	-	-	-
c. Penggalian	34.555	24.835	31.548	36.684	43.827
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	496.185	550.513	553.335	585.909	650.234
a. Industri Migas	-	-	-	-	-
b. Industri Bukan Migas	496.185	550.513	553.335	585.909	650.234
4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH	28.379	31.366	33.525	35.844	40.010
a. Listrik	26.111	28.918	31.004	33.009	36.887
b. Gas	-	-	-	-	-
c. Air Bersih	2.268	2.448	2.521	2.835	3.123
5. KONSTRUKSI	189.629	209.221	239.507	269.980	310.850
6. PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN	538.809	587.485	656.244	715.396	801.751
a. Perdagangan Besar & Eceran	482.316	525.538	588.345	639.475	714.809
b. Hotel	153	167	184	207	231
c. Restoran	56.340	61.780	67.716	75.714	86.711
7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI	346.569	359.493	383.612	375.562	392.771
a. Pengangkutan	325.368	336.310	358.715	349.385	364.248
1. Angkutan Rel	6.773	6.833	7.002	6.285	5.937
2. Angkutan Jalan Raya	314.777	325.455	347.451	338.632	353.453
3. Jasa Penunjang Angkutan	3.818	4.022	4.263	4.468	4.858
b. Komunikasi	21.202	23.183	24.897	26.177	28.524
8. KEUANGAN, PERSEWAAN & JASA PERUSAHAAN	204.966	225.679	237.799	255.377	289.955
a. Bank	66.185	72.693	76.868	80.963	96.344
b. Lembaga Keuangan Bukan Bank	29.115	35.591	35.805	39.644	45.832
c. Jasa Penunjang Keuangan	-	-	-	-	-
d. Real Estat	104.886	112.288	119.598	128.805	141.407
e. Jasa Perusahaan	4.780	5.107	5.528	5.964	6.372
9. JASA-JASA	654.723	736.894	815.969	936.190	1.050.724
a. Pemerintahan Umum	556.746	630.964	706.230	818.521	922.831
b. Swasta	97.977	105.930	109.740	117.669	127.893
1. Jasa Sosial & Kemasyarakatan	64.744	69.851	71.264	75.412	81.315
2. Jasa Hiburan & Rekreasi	5.721	6.096	6.518	7.321	7.813
3. Jasa Perorangan & Rumah tangga	27.513	29.983	31.957	34.935	38.765
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	3.286.278	3.547.056	3.867.136	4.196.448	4.641.905

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

TABEL 13.
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN KULONPROGO
ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000 MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 2009-2013 (JUTA RUPIAH)

LAPANGAN USAHA	2009	2010	2011	2012 ^{*)}	2013 ^{**)}
1. PERTANIAN	474.560	467.714	495.676	517.404	526.782
a. Tanaman Bahan Makanan	304.158	281.341	303.788	317.671	323.499
b. Tanaman Perkebunan	30.834	32.754	32.800	34.292	35.540
c. Peternakan & Hasil-hasilnya	92.966	101.961	106.703	114.791	116.118
d. Kehutanan	37.607	39.852	40.498	37.969	38.140
e. Perikanan	8.995	11.806	11.887	12.681	13.486
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	18.527	12.664	15.395	17.376	19.443
a. Minyak & Gas Bumi	-	-	-	-	-
b. Pertambangan Bukan Migas	-	-	-	-	-
c. Penggalian	18.527	12.664	15.395	17.376	19.443
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	261.033	271.689	268.349	273.125	279.227
a. Industri Migas	-	-	-	-	-
b. Industri Bukan Migas	261.033	271.689	268.349	273.125	279.227
4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH	11.007	11.586	12.068	12.850	13.657
a. Listrik	9.896	10.416	10.889	11.530	12.243
b. Gas	-	-	-	-	-
c. Air Bersih	1.110	1.170	1.179	1.320	1.414
5. KONSTRUKSI	85.790	91.657	100.658	110.071	120.627
6. PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN	293.574	307.245	329.807	347.231	367.294
a. Perdagangan Besar & Eceran	262.391	274.887	296.062	311.495	329.136
b. Hotel	90	93	97	106	116
c. Restoran	31.093	32.265	33.648	35.630	38.042
7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI	179.405	184.299	188.623	183.855	190.415
a. Pengangkutan	164.616	168.444	171.986	166.255	170.462
1. Angkutan Rel	2.857	2.872	2.838	2.525	2.371
2. Angkutan Jalan Raya	159.714	163.445	166.950	161.474	165.543
3. Jasa Penunjang Angkutan	2.045	2.127	2.198	2.256	2.548
b. Komunikasi	14.789	15.856	16.637	17.601	19.953
8. KEUANGAN, PERSEWAAN & JASA PERUSAHAAN	110.230	116.678	117.684	123.572	134.375
a. Bank	29.119	31.715	30.093	31.056	36.469
b. Lembaga Keuangan Bukan Bank	18.372	19.893	19.447	21.041	22.775
c. Jasa Penunjang Keuangan	-	-	-	-	-
d. Real Estat	59.978	62.191	65.105	68.292	71.795
e. Jasa Perusahaan	2.761	2.879	3.039	3.183	3.337
9. JASA-JASA	294.178	317.694	341.076	377.543	410.362
a. Pemerintahan Umum	235.794	256.520	279.280	313.213	342.380
b. Swasta	58.384	61.174	61.796	64.331	67.981
1. Jasa Sosial & Kemasyarakatan	38.940	40.696	40.484	41.639	43.553
2. Jasa Hiburan & Rekreasi	3.711	3.960	4.108	4.472	5.221
3. Jasa Perorangan & Rumah tangga	15.733	16.518	17.204	18.220	19.207
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	1.728.304	1.781.227	1.869.338	1.963.028	2.062.182

^{*)} Angka Sementara

^{**)} Angka Sangat Sementara

TABEL 14.
LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN KULONPROGO
MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 2009-2013 (PERSEN)

LAPANGAN USAHA	2009	2010	2011	2012*)	2013**)
1. PERTANIAN	4,38	-1,44	5,98	4,38	1,81
a. Tanaman Bahan Makanan	3,96	-7,50	7,98	4,57	1,83
b. Tanaman Perkebunan	10,35	6,23	0,14	4,55	3,64
c. Peternakan & Hasil-hasilnya	6,52	9,68	4,65	7,58	1,16
d. Kehutanan	-2,02	5,97	1,62	-6,25	0,45
e. Perikanan	6,02	31,25	0,69	6,68	6,35
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	8,81	-31,65	21,56	12,87	11,89
a. Minyak & Gas Bumi	-	-	-	-	-
b. Pertambangan Bukan Migas	-	-	-	-	-
c. Penggalian	8,81	-31,65	21,56	12,87	11,89
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	2,20	4,08	-1,23	1,78	2,23
a. Industri Migas	-	-	-	-	-
b. Industri Bukan Migas	2,20	4,08	-1,23	1,78	2,23
4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH	6,52	5,26	4,16	6,48	6,28
a. Listrik	6,79	5,25	4,55	5,89	6,18
b. Gas	-	-	-	-	-
c. Air Bersih	4,16	5,41	0,73	11,94	7,17
5. KONSTRUKSI	4,50	6,84	9,82	9,35	9,59
6. PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN	4,32	4,66	7,34	5,28	5,78
a. Perdagangan Besar & Eceran	4,24	4,76	7,70	5,21	5,66
b. Hotel	3,90	2,87	4,31	9,09	9,30
c. Restoran	4,99	3,77	4,29	5,89	6,77
7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI	4,71	2,73	2,35	-2,53	3,57
a. Pengangkutan	4,72	2,33	2,10	-3,33	2,53
1. Angkutan Rel	14,16	0,50	-1,17	-11,04	-6,10
2. Angkutan Jalan Raya	4,55	2,34	2,14	-3,28	2,52
3. Jasa Penunjang Angkutan	5,95	4,01	3,34	2,65	12,94
b. Komunikasi	4,64	7,21	4,93	5,79	13,36
8. KEUANGAN, PERSEWAAN & JASA PERUSAHAAN	8,55	5,85	0,86	5,00	8,74
a. Bank	16,06	8,92	-5,11	3,20	17,43
b. Lembaga Keuangan Bukan Bank	7,87	8,28	-2,24	8,19	8,24
c. Jasa Penunjang Keuangan	-	-	-	-	-
d. Real Estat	5,56	3,69	4,69	4,89	5,13
e. Jasa Perusahaan	5,75	4,27	5,56	4,73	4,85
9. JASA-JASA	1,96	7,99	7,36	10,69	8,69
a. Pemerintahan Umum	1,31	8,79	8,87	12,15	9,31
b. Swasta	4,64	4,78	1,02	4,10	5,67
1. Jasa Sosial & Kemasyarakatan	4,67	4,51	-0,52	2,85	4,60
2. Jasa Hiburan & Rekreasi	11,07	6,71	3,74	8,86	16,75
3. Jasa Perorangan & Rumah tangga	3,17	4,99	4,15	5,90	5,42
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	3,97	3,06	4,95	5,01	5,05

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

TABEL 15.
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN BANTUL
ATAS DASAR HARGA BERLAKU MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 2009-2013 (JUTA RUPIAH)

LAPANGAN USAHA	2009	2010	2011	2012 ^{*)}	2013 ^{**)}
1. PERTANIAN	1.705.935	1.834.746	2.006.932	2.239.466	2.459.169
a. Tanaman Bahan Makanan	1.383.501	1.512.900	1.654.819	1.855.692	1.997.869
b. Tanaman Perkebunan	30.496	31.872	33.915	39.402	47.402
c. Peternakan & Hasil-hasilnya	251.162	247.553	271.960	293.341	356.212
d. Kehutanan	21.815	22.068	23.502	24.832	26.559
e. Perikanan	18.960	20.353	22.735	26.198	31.126
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	75.592	85.446	94.174	98.745	105.798
a. Minyak & Gas Bumi	-	-	-	-	-
b. Pertambangan Bukan Migas	-	-	-	-	-
c. Penggalian	75.592	85.446	94.174	98.745	105.798
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	1.527.505	1.750.151	1.991.819	2.142.812	2.426.154
a. Industri Migas	-	-	-	-	-
b. Industri Bukan Migas	1.527.505	1.750.151	1.991.819	2.142.812	2.426.154
4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH	98.549	108.148	114.736	124.112	137.628
a. Listrik	95.463	104.998	111.440	120.532	133.673
b. Gas	-	-	-	-	-
c. Air Bersih	3.086	3.150	3.296	3.580	3.955
5. KONSTRUKSI	988.181	1.104.073	1.206.859	1.333.501	1.517.928
6. PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN	1.454.135	1.602.662	1.799.008	2.055.059	2.361.458
a. Perdagangan Besar & Eceran	744.466	809.915	907.089	1.041.953	1.178.489
b. Hotel	26.330	28.358	31.516	36.863	42.785
c. Restoran	683.339	764.388	860.403	976.243	1.140.184
7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI	560.368	623.940	691.451	770.174	884.323
a. Pengangkutan	480.174	536.737	598.107	667.632	774.491
1. Angkutan Rel	-	-	-	-	-
2. Angkutan Jalan Raya	461.876	513.107	572.099	637.887	742.322
3. Jasa Penunjang Angkutan	18.297	23.630	26.008	29.745	32.169
b. Komunikasi	80.194	87.203	93.344	102.542	109.832
8. KEUANGAN, PERSEWAAN & JASA PERUSAHAAN	527.028	615.172	698.763	787.194	899.379
a. Bank	94.709	116.686	132.391	161.330	196.413
b. Lembaga Keuangan Bukan Bank	105.998	125.613	145.801	161.012	184.237
c. Jasa Penunjang Keuangan	-	-	-	-	-
d. Real Estat	312.538	358.216	404.241	447.193	499.813
e. Jasa Perusahaan	13.782	14.657	16.330	17.660	18.916
9. JASA-JASA	1.210.568	1.352.064	1.493.604	1.691.088	1.938.004
a. Pemerintahan Umum	918.620	1.019.816	1.126.615	1.285.365	1.480.144
b. Swasta	291.948	332.248	366.989	405.723	457.860
1. Jasa Sosial & Kemasyarakatan	193.340	221.696	245.515	274.169	313.166
2. Jasa Hiburan & Rekreasi	16.530	18.605	20.420	22.849	25.243
3. Jasa Perorangan & Rumah tangga	82.078	91.946	101.053	108.705	119.451
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	8.147.860	9.076.401	10.097.345	11.242.151	12.729.840

^{*)} Angka Sementara

^{**)} Angka Sangat Sementara

TABEL 16.
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN BANTUL
ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000 MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 2009-2013 (JUTA RUPIAH)

LAPANGAN USAHA	2009	2010	2011	2012 ^{*)}	2013 ^{**)}
1. PERTANIAN	919.417	933.260	920.459	955.730	966.610
a. Tanaman Bahan Makanan	773.765	786.824	771.193	801.504	808.112
b. Tanaman Perkebunan	17.765	17.953	18.321	19.807	20.532
c. Peternakan & Hasil-hasilnya	108.851	108.874	110.726	113.174	116.197
d. Kehutanan	9.945	9.692	9.908	10.139	10.338
e. Perikanan	9.091	9.917	10.311	11.107	11.431
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	35.783	36.525	38.782	39.568	40.539
a. Minyak & Gas Bumi	-	-	-	-	-
b. Pertambangan Bukan Migas	-	-	-	-	-
c. Penggalian	35.783	36.525	38.782	39.568	40.539
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	610.781	647.939	690.977	692.762	729.153
a. Industri Migas	-	-	-	-	-
b. Industri Bukan Migas	610.781	647.939	690.977	692.762	729.153
4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH	34.448	36.289	37.969	40.373	43.132
a. Listrik	33.260	35.059	36.697	39.013	41.655
b. Gas	-	-	-	-	-
c. Air Bersih	1.188	1.230	1.273	1.361	1.477
5. KONSTRUKSI	434.409	454.480	486.930	511.749	548.336
6. PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN	746.833	789.789	839.997	901.754	960.570
a. Perdagangan Besar & Eceran	372.563	391.383	413.953	445.869	472.344
b. Hotel	12.890	13.682	14.857	16.282	17.772
c. Restoran	361.380	384.724	411.186	439.603	470.454
7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI	268.145	287.236	311.285	333.271	353.552
a. Pengangkutan	219.181	233.841	250.191	265.954	280.785
1. Angkutan Rel	-	-	-	-	-
2. Angkutan Jalan Raya	210.319	224.522	240.178	255.100	269.223
3. Jasa Penunjang Angkutan	8.862	9.318	10.013	10.854	11.562
b. Komunikasi	48.964	53.395	61.094	67.317	72.767
8. KEUANGAN, PERSEWAAN & JASA PERUSAHAAN	230.768	252.015	279.556	305.347	333.732
a. Bank	45.208	52.281	59.349	69.133	79.617
b. Lembaga Keuangan Bukan Bank	44.399	46.586	52.705	56.833	61.958
c. Jasa Penunjang Keuangan	-	-	-	-	-
d. Real Estat	134.616	146.205	160.042	171.457	183.720
e. Jasa Perusahaan	6.544	6.943	7.460	7.925	8.437
9. JASA-JASA	499.364	530.397	571.248	619.758	669.852
a. Pemerintahan Umum	367.088	390.163	420.672	457.979	493.948
b. Swasta	132.276	140.234	150.576	161.779	175.904
1. Jasa Sosial & Kemasyarakatan	86.665	91.540	98.271	105.395	115.511
2. Jasa Hiburan & Rekreasi	8.621	9.470	10.551	11.560	12.490
3. Jasa Perorangan & Rumah tangga	36.989	39.224	41.754	44.824	47.903
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	3.779.948	3.967.928	4.177.204	4.400.313	4.645.476

^{*)} Angka Sementara

^{**)} Angka Sangat Sementara

TABEL 17.
LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN BANTUL
MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 2009-2013 (PERSEN)

LAPANGAN USAHA	2009	2010	2011	2012 ^{*)}	2013 ^{**)}
1. PERTANIAN	4,46	1,51	-1,37	3,83	1,14
a. Tanaman Bahan Makanan	4,40	1,69	-1,99	3,93	0,82
b. Tanaman Perkebunan	4,33	1,06	2,05	8,11	3,66
c. Peternakan & Hasil-hasilnya	4,72	0,02	1,70	2,21	2,67
d. Kehutanan	2,55	-2,54	2,23	2,33	1,96
e. Perikanan	8,97	9,08	3,97	7,72	2,92
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	-0,13	2,07	6,18	2,03	2,45
a. Minyak & Gas Bumi	-	-	-	-	-
b. Pertambangan Bukan Migas	-	-	-	-	-
c. Penggalian	-0,13	2,07	6,18	2,03	2,45
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	2,45	6,08	6,64	0,26	5,25
a. Industri Migas	-	-	-	-	-
b. Industri Bukan Migas	2,45	6,08	6,64	0,26	5,25
4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH	8,75	5,34	4,63	6,33	6,83
a. Listrik	9,02	5,41	4,67	6,31	6,77
b. Gas	-	-	-	-	-
c. Air Bersih	1,80	3,49	3,50	6,93	8,53
5. KONSTRUKSI	-0,63	4,62	7,14	5,10	7,15
6. PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN	6,33	5,75	6,36	7,35	6,52
a. Perdagangan Besar & Eceran	5,53	5,05	5,77	7,71	5,94
b. Hotel	8,27	6,14	8,59	9,59	9,15
c. Restoran	7,11	6,46	6,88	6,91	7,02
7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI	7,78	7,12	8,37	7,06	6,09
a. Pengangkutan	7,00	6,69	6,99	6,30	5,58
1. Angkutan Rel	-	-	-	-	-
2. Angkutan Jalan Raya	6,96	6,75	6,97	6,21	5,54
3. Jasa Penunjang Angkutan	8,03	5,15	7,46	8,40	6,53
b. Komunikasi	11,43	9,05	14,42	10,19	8,10
8. KEUANGAN, PERSEWAAN & JASA PERUSAHAAN	8,40	9,21	10,93	9,23	9,30
a. Bank	6,15	15,65	13,52	16,49	15,16
b. Lembaga Keuangan Bukan Bank	10,26	4,93	13,14	7,83	9,02
c. Jasa Penunjang Keuangan	-	-	-	-	-
d. Real Estat	8,56	8,61	9,46	7,13	7,15
e. Jasa Perusahaan	8,53	6,08	7,45	6,23	6,47
9. JASA-JASA	5,56	6,21	7,70	8,49	8,08
a. Pemerintahan Umum	5,45	6,29	7,82	8,87	7,85
b. Swasta	5,88	6,02	7,37	7,44	8,73
1. Jasa Sosial & Kemasyarakatan	5,47	5,62	7,35	7,25	9,60
2. Jasa Hiburan & Rekreasi	9,78	9,84	11,42	9,56	8,04
3. Jasa Perorangan & Rumah tangga	5,97	6,04	6,45	7,35	6,87
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	4,47	4,97	5,27	5,34	5,57

^{*)} Angka Sementara

^{**)} Angka Sangat Sementara

TABEL 18.
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN GUNUNGKIDUL
ATAS DASAR HARGA BERLAKU MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 2009-2013 (JUTA RUPIAH)

LAPANGAN USAHA	2009	2010	2011	2012*)	2013**)
1. PERTANIAN	2.144.859	2.311.480	2.453.461	2.720.629	2.963.519
a. Tanaman Bahan Makanan	1.558.047	1.690.396	1.777.317	1.984.245	2.138.135
b. Tanaman Perkebunan	27.059	27.086	28.765	31.537	34.461
c. Peternakan & Hasil-hasilnya	249.704	271.606	303.880	341.328	397.101
d. Kehutanan	293.995	303.652	323.453	341.465	367.975
e. Perikanan	16.054	18.740	20.046	22.055	25.846
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	111.573	117.970	132.562	135.206	152.019
a. Minyak & Gas Bumi	-	-	-	-	-
b. Pertambangan Bukan Migas	-	-	-	-	-
c. Penggalian	111.573	117.970	132.562	135.206	152.019
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	549.414	643.563	736.606	767.162	878.828
a. Industri Migas	-	-	-	-	-
b. Industri Bukan Migas	549.414	643.563	736.606	767.162	878.828
4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH	55.517	62.761	69.366	75.512	82.814
a. Listrik	51.486	58.631	64.940	70.650	77.436
b. Gas	-	-	-	-	-
c. Air Bersih	4.030	4.130	4.427	4.862	5.377
5. KONSTRUKSI	542.153	611.964	696.465	773.087	878.365
6. PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN	890.178	972.726	1.058.551	1.159.258	1.297.672
a. Perdagangan Besar & Eceran	694.826	756.466	821.933	903.875	1.002.927
b. Hotel	5.725	6.315	7.506	8.413	9.712
c. Restoran	189.627	209.946	229.112	246.970	285.034
7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI	384.896	421.370	461.010	495.428	547.880
a. Pengangkutan	359.302	393.987	428.874	460.795	510.473
1. Angkutan Rel	-	-	-	-	-
2. Angkutan Jalan Raya	346.832	379.332	411.412	441.972	489.948
3. Jasa Penunjang Angkutan	12.470	14.655	17.462	18.823	20.525
b. Komunikasi	25.594	27.383	32.136	34.633	37.407
8. KEUANGAN, PERSEWAAN & JASA PERUSAHAAN	294.102	338.321	387.989	435.246	503.638
a. Bank	94.764	114.799	136.326	159.259	192.494
b. Lembaga Keuangan Bukan Bank	37.090	40.467	48.509	52.827	60.472
c. Jasa Penunjang Keuangan	-	-	-	-	-
d. Real Estat	154.406	174.436	193.067	212.626	239.628
e. Jasa Perusahaan	7.841	8.619	10.088	10.534	11.043
9. JASA-JASA	1.015.091	1.144.419	1.254.671	1.401.078	1.597.671
a. Pemerintahan Umum	893.085	1.008.318	1.102.543	1.236.010	1.415.084
b. Swasta	122.006	136.100	152.128	165.068	182.587
1. Jasa Sosial & Kemasyarakatan	54.065	60.526	67.349	71.562	78.291
2. Jasa Hiburan & Rekreasi	11.622	13.122	15.508	17.197	20.273
3. Jasa Perorangan & Rumah tangga	56.319	62.452	69.271	76.309	84.023
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	5.987.783	6.624.572	7.250.682	7.962.605	8.902.405

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

TABEL 19.
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN GUNUNGKIDUL
ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000 MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 2009-2013 (JUTA RUPIAH)

LAPANGAN USAHA	2009	2010	2011	2012*)	2013**)
1. PERTANIAN	1.272.290	1.268.080	1.275.104	1.329.212	1.349.286
a. Tanaman Bahan Makanan	931.635	937.387	939.947	980.214	993.221
b. Tanaman Perkebunan	17.591	17.229	17.429	18.180	18.798
c. Peternakan & Hasil-hasilnya	168.260	159.608	163.308	171.857	176.749
d. Kehutanan	143.479	141.597	142.097	146.319	147.233
e. Perikanan	11.326	12.258	12.323	12.642	13.286
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	55.939	58.472	64.730	65.277	70.440
a. Minyak & Gas Bumi	-	-	-	-	-
b. Pertambangan Bukan Migas	-	-	-	-	-
c. Penggalian	55.939	58.472	64.730	65.277	70.440
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	341.216	368.423	398.588	401.011	432.034
a. Industri Migas	-	-	-	-	-
b. Industri Bukan Migas	341.216	368.423	398.588	401.011	432.034
4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH	17.760	18.999	19.777	21.207	22.611
a. Listrik	15.786	17.117	17.879	19.144	20.413
b. Gas	-	-	-	-	-
c. Air Bersih	1.974	1.882	1.898	2.063	2.197
5. KONSTRUKSI	261.856	279.518	299.722	318.995	343.653
6. PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN	467.680	496.688	518.641	543.361	578.962
a. Perdagangan Besar & Eceran	344.985	362.790	378.558	395.944	419.280
b. Hotel	3.191	3.441	3.846	4.173	4.550
c. Restoran	119.504	130.457	136.237	143.244	155.132
7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI	220.126	234.644	246.973	260.966	273.265
a. Pengangkutan	201.008	213.540	222.746	234.847	245.024
1. Angkutan Rel	-	-	-	-	-
2. Angkutan Jalan Raya	194.854	206.836	215.130	226.834	236.584
3. Jasa Penunjang Angkutan	6.154	6.704	7.615	8.013	8.440
b. Komunikasi	19.118	21.104	24.228	26.120	28.241
8. KEUANGAN, PERSEWAAN & JASA PERUSAHAAN	145.597	159.910	176.430	190.701	210.040
a. Bank	42.711	48.593	55.419	62.661	72.226
b. Lembaga Keuangan Bukan Bank	18.466	19.794	22.599	24.269	26.126
c. Jasa Penunjang Keuangan	-	-	-	-	-
d. Real Estat	79.961	86.747	92.971	98.110	105.769
e. Jasa Perusahaan	4.460	4.777	5.441	5.661	5.919
9. JASA-JASA	414.901	445.345	474.322	511.830	550.109
a. Pemerintahan Umum	353.905	380.208	404.095	437.645	469.841
b. Swasta	60.996	65.137	70.226	74.185	80.269
1. Jasa Sosial & Kemasyarakatan	25.215	27.062	28.937	30.099	32.313
2. Jasa Hiburan & Rekreasi	6.770	7.220	8.252	8.894	10.341
3. Jasa Perorangan & Rumah tangga	29.011	30.855	33.037	35.192	37.615
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	3.197.365	3.330.080	3.474.288	3.642.562	3.830.400

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

TABEL 20.
LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN GUNUNGKIDUL
MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 2009-2013 (PERSEN)

LAPANGAN USAHA	2009	2010	2011	2012*)	2013**)
1. PERTANIAN	5,91	-0,33	0,55	4,24	1,51
a. Tanaman Bahan Makanan	8,18	0,62	0,27	4,28	1,33
b. Tanaman Perkebunan	1,71	-2,06	1,16	4,31	3,40
c. Peternakan & Hasil-hasilnya	0,77	-5,14	2,32	5,24	2,85
d. Kehutanan	-0,77	-1,31	0,35	2,97	0,62
e. Perikanan	1,03	8,24	0,53	2,59	5,09
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	0,90	4,53	10,70	0,84	7,91
a. Minyak & Gas Bumi	-	-	-	-	-
b. Pertambangan Bukan Migas	-	-	-	-	-
c. Penggalian	0,90	4,53	10,70	0,84	7,91
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	1,21	7,97	8,19	0,61	7,74
a. Industri Migas	-	-	-	-	-
b. Industri Bukan Migas	1,21	7,97	8,19	0,61	7,74
4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH	10,98	6,98	4,09	7,23	6,62
a. Listrik	11,16	8,43	4,46	7,07	6,63
b. Gas	-	-	-	-	-
c. Air Bersih	9,53	-4,64	0,81	8,73	6,50
5. KONSTRUKSI	4,57	6,74	7,23	6,43	7,73
6. PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN	4,42	6,20	4,42	4,77	6,55
a. Perdagangan Besar & Eceran	4,41	5,16	4,35	4,59	5,89
b. Hotel	2,50	7,83	11,78	8,50	9,04
c. Restoran	4,48	9,17	4,43	5,14	8,30
7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI	2,68	6,60	5,25	5,67	4,71
a. Pengangkutan	2,52	6,23	4,31	5,43	4,33
1. Angkutan Rel	-	-	-	-	-
2. Angkutan Jalan Raya	2,53	6,15	4,01	5,44	4,30
3. Jasa Penunjang Angkutan	2,26	8,94	13,60	5,22	5,33
b. Komunikasi	4,41	10,39	14,80	7,81	8,12
8. KEUANGAN, PERSEWAAN & JASA PERUSAHAAN	2,66	9,83	10,33	8,09	10,14
a. Bank	2,65	13,77	14,05	13,07	15,26
b. Lembaga Keuangan Bukan Bank	4,49	7,19	14,17	7,39	7,65
c. Jasa Penunjang Keuangan	-	-	-	-	-
d. Real Estat	2,14	8,49	7,18	5,53	7,81
e. Jasa Perusahaan	4,66	7,11	13,90	4,04	4,57
9. JASA-JASA	2,20	7,34	6,51	7,91	7,48
a. Pemerintahan Umum	1,96	7,43	6,28	8,30	7,36
b. Swasta	3,60	6,79	7,81	5,64	8,20
1. Jasa Sosial & Kemasyarakatan	3,74	7,32	6,93	4,02	7,35
2. Jasa Hiburan & Rekreasi	6,34	6,64	14,30	7,78	16,27
3. Jasa Perorangan & Rumah tangga	2,86	6,36	7,07	6,52	6,89
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	4,14	4,15	4,33	4,84	5,16

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

TABEL 21.
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN SLEMAN
ATAS DASAR HARGA BERLAKU MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 2009-2013 (JUTA RUPIAH)

LAPANGAN USAHA	2009	2010	2011	2012 ^{*)}	2013 ^{**)}
1. PERTANIAN	1.701.995	1.771.743	1.922.985	2.153.451	2.461.394
a. Tanaman Bahan Makanan	1.253.642	1.295.288	1.404.740	1.576.821	1.773.364
b. Tanaman Perkebunan	49.402	50.487	55.546	59.990	67.535
c. Peternakan & Hasil-hasilnya	275.651	291.735	318.021	352.399	420.523
d. Kehutanan	8.920	8.805	9.355	9.946	10.637
e. Perikanan	114.380	125.427	135.323	154.295	189.334
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	62.263	73.245	86.671	90.599	109.786
a. Minyak & Gas Bumi	-	-	-	-	-
b. Pertambangan Bukan Migas	-	-	-	-	-
c. Penggalian	62.263	73.245	86.671	90.599	109.786
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	1.773.101	1.927.170	2.171.967	2.274.445	2.655.364
a. Industri Migas	-	-	-	-	-
b. Industri Bukan Migas	1.773.101	1.927.170	2.171.967	2.274.445	2.655.364
4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH	160.205	174.868	192.383	208.066	233.811
a. Listrik	155.119	169.327	186.463	201.811	226.876
b. Gas	-	-	-	-	-
c. Air Bersih	5.086	5.540	5.920	6.255	6.935
5. KONSTRUKSI	1.588.699	1.744.700	1.921.438	2.135.294	2.491.502
6. PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN	2.853.437	3.097.398	3.453.129	3.872.092	4.444.679
a. Perdagangan Besar & Eceran	1.000.290	1.103.785	1.223.767	1.360.462	1.536.658
b. Hotel	354.152	359.954	417.799	502.788	591.775
c. Restoran	1.498.995	1.633.658	1.811.563	2.008.842	2.316.245
7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI	710.888	780.674	857.248	922.507	1.021.779
a. Pengangkutan	580.190	636.537	694.288	743.842	822.585
1. Angkutan Rel	-	-	-	-	-
2. Angkutan Jalan Raya	557.799	610.691	664.309	709.349	783.421
3. Jasa Penunjang Angkutan	22.391	25.846	29.979	34.492	39.164
b. Komunikasi	130.698	144.137	162.960	178.666	199.194
8. KEUANGAN, PERSEWAAN & JASA PERUSAHAAN	1.339.653	1.482.757	1.645.918	1.861.498	2.092.642
a. Bank	117.484	133.652	151.708	182.687	226.306
b. Lembaga Keuangan Bukan Bank	151.418	164.154	190.567	213.841	246.783
c. Jasa Penunjang Keuangan	651	678	753	784	863
d. Real Estat	1.042.349	1.152.748	1.268.484	1.426.220	1.577.739
e. Jasa Perusahaan	27.751	31.524	34.405	37.966	40.952
9. JASA-JASA	2.313.518	2.559.171	2.845.861	3.178.630	3.594.543
a. Pemerintahan Umum	1.526.496	1.687.970	1.878.961	2.109.659	2.393.380
b. Swasta	787.022	871.201	966.901	1.068.971	1.201.164
1. Jasa Sosial & Kemasyarakatan	282.309	307.566	339.061	370.400	413.898
2. Jasa Hiburan & Rekreasi	31.729	35.228	39.459	43.409	47.932
3. Jasa Perorangan & Rumah tangga	472.984	528.406	588.381	655.162	739.334
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	12.503.760	13.611.725	15.097.600	16.696.582	19.105.499

^{*)} Angka Sementara

^{**)} Angka Sangat Sementara

TABEL 22.
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN SLEMAN
ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000 MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 2009-2013 (JUTA RUPIAH)

LAPANGAN USAHA	2009	2010	2011	2012 ^{*)}	2013 ^{**)}
1. PERTANIAN	1.004.808	1.001.698	979.024	1.019.264	1.034.154
a. Tanaman Bahan Makanan	786.139	780.159	751.941	781.793	789.220
b. Tanaman Perkebunan	27.032	26.619	27.303	27.912	28.777
c. Peternakan & Hasil-hasilnya	125.392	124.931	128.154	132.665	135.212
d. Kehutanan	3.443	3.298	3.335	3.393	3.438
e. Perikanan	62.802	66.690	68.291	73.501	77.507
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	28.901	33.304	38.084	38.636	39.486
a. Minyak & Gas Bumi	-	-	-	-	-
b. Pertambangan Bukan Migas	-	-	-	-	-
c. Penggalian	28.901	33.304	38.084	38.636	39.486
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	921.892	950.029	1.010.358	1.005.640	1.055.973
a. Industri Migas	-	-	-	-	-
b. Industri Bukan Migas	921.892	950.029	1.010.358	1.005.640	1.055.973
4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH	56.066	58.768	61.282	65.150	69.343
a. Listrik	53.976	56.579	59.069	62.843	66.935
b. Gas	-	-	-	-	-
c. Air Bersih	2.090	2.189	2.213	2.307	2.408
5. KONSTRUKSI	684.367	729.456	780.153	827.196	886.231
6. PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN	1.359.722	1.436.205	1.526.308	1.636.136	1.743.449
a. Perdagangan Besar & Eceran	479.159	507.514	535.072	568.675	601.772
b. Hotel	151.402	149.934	164.663	190.054	209.345
c. Restoran	729.160	778.757	826.573	877.407	932.332
7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI	361.363	384.891	410.324	433.134	458.431
a. Pengangkutan	275.452	290.340	303.176	315.557	329.758
1. Angkutan Rel	-	-	-	-	-
2. Angkutan Jalan Raya	264.161	278.195	289.991	301.073	314.230
3. Jasa Penunjang Angkutan	11.291	12.144	13.185	14.484	15.528
b. Komunikasi	85.911	94.551	107.148	117.577	128.673
8. KEUANGAN, PERSEWAAN & JASA PERUSAHAAN	631.510	669.291	715.317	779.721	836.345
a. Bank	57.214	62.009	68.098	78.680	91.387
b. Lembaga Keuangan Bukan Bank	60.544	65.003	71.588	76.850	83.137
c. Jasa Penunjang Keuangan	306	315	338	337	340
d. Real Estat	499.437	526.909	559.156	606.461	642.740
e. Jasa Perusahaan	14.010	15.056	16.137	17.394	18.741
9. JASA-JASA	1.050.928	1.109.558	1.183.251	1.264.352	1.348.486
a. Pemerintahan Umum	668.781	707.758	751.591	806.080	854.037
b. Swasta	382.147	401.800	431.660	458.272	494.449
1. Jasa Sosial & Kemasyarakatan	131.979	137.122	145.391	152.471	164.684
2. Jasa Hiburan & Rekreasi	18.597	19.628	21.420	22.995	25.219
3. Jasa Perorangan & Rumah tangga	231.571	245.049	264.849	282.806	304.546
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	6.099.557	6.373.200	6.704.100	7.069.229	7.471.898

^{*)} Angka Sementara

^{**)} Angka Sangat Sementara

TABEL 23.
LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN SLEMAN
MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 2009-2013 (PERSEN)

LAPANGAN USAHA	2009	2010	2011	2012 ^{*)}	2013 ^{**)}
1. PERTANIAN	1,75	-0,31	-2,26	4,11	1,46
a. Tanaman Bahan Makanan	1,26	-0,76	-3,62	3,97	0,95
b. Tanaman Perkebunan	2,65	-1,53	2,57	2,23	3,10
c. Peternakan & Hasil-hasilnya	2,35	-0,37	2,58	3,52	1,92
d. Kehutanan	1,64	-4,20	1,12	1,72	1,34
e. Perikanan	6,65	6,19	2,40	7,63	5,45
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	-4,84	15,24	14,35	1,45	2,20
a. Minyak & Gas Bumi	-	-	-	-	-
b. Pertambangan Bukan Migas	-	-	-	-	-
c. Penggalian	-4,84	15,24	14,35	1,45	2,20
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	1,93	3,05	6,35	-0,47	5,01
a. Industri Migas	-	-	-	-	-
b. Industri Bukan Migas	1,93	3,05	6,35	-0,47	5,01
4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH	6,21	4,82	4,28	6,31	6,44
a. Listrik	6,37	4,82	4,40	6,39	6,51
b. Gas	-	-	-	-	-
c. Air Bersih	2,21	4,73	1,09	4,24	4,39
5. KONSTRUKSI	6,51	6,59	6,95	6,03	7,14
6. PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN	6,48	5,62	6,27	7,20	6,56
a. Perdagangan Besar & Eceran	5,94	5,92	5,43	6,28	5,82
b. Hotel	6,40	-0,97	9,82	15,42	10,15
c. Restoran	6,86	6,80	6,14	6,15	6,26
7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI	6,52	6,51	6,61	5,56	5,84
a. Pengangkutan	5,59	5,40	4,42	4,08	4,50
1. Angkutan Rel	-	-	-	-	-
2. Angkutan Jalan Raya	5,49	5,31	4,24	3,82	4,37
3. Jasa Penunjang Angkutan	7,89	7,56	8,57	9,85	7,21
b. Komunikasi	9,62	10,06	13,32	9,73	9,44
8. KEUANGAN, PERSEWAAN & JASA PERUSAHAAN	5,57	5,98	6,88	9,00	7,26
a. Bank	4,15	8,38	9,82	15,54	16,15
b. Lembaga Keuangan Bukan Bank	8,09	7,37	10,13	7,35	8,18
c. Jasa Penunjang Keuangan	5,34	2,76	7,47	-0,41	0,92
d. Real Estat	5,35	5,50	6,12	8,46	5,98
e. Jasa Perusahaan	8,77	7,47	7,18	7,79	7,74
9. JASA-JASA	4,44	5,58	6,64	6,85	6,65
a. Pemerintahan Umum	4,17	5,83	6,19	7,25	5,95
b. Swasta	4,92	5,14	7,43	6,16	7,89
1. Jasa Sosial & Kemasyarakatan	3,70	3,90	6,03	4,87	8,01
2. Jasa Hiburan & Rekreasi	5,79	5,55	9,13	7,35	9,67
3. Jasa Perorangan & Rumah tangga	5,56	5,82	8,08	6,78	7,69
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	4,48	4,49	5,19	5,45	5,70

^{*)} Angka Sementara

^{**)} Angka Sangat Sementara

TABEL 24.
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KOTA YOGYAKARTA
ATAS DASAR HARGA BERLAKU MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 2009-2013 (JUTA RUPIAH)

LAPANGAN USAHA	2009	2010	2011	2012*)	2013**)
1. PERTANIAN	30.884	32.440	34.080	35.572	38.728
a. Tanaman Bahan Makanan	3.725	3.778	3.994	4.133	4.250
b. Tanaman Perkebunan	340	355	371	381	395
c. Peternakan & Hasil-hasilnya	26.187	27.626	29.010	30.304	33.259
d. Kehutanan	-	-	-	-	-
e. Perikanan	632	681	705	754	824
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	525	566	631	662	690
a. Minyak & Gas Bumi	-	-	-	-	-
b. Pertambangan Bukan Migas	-	-	-	-	-
c. Penggalian	525	566	631	662	690
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	1.049.608	1.205.980	1.246.480	1.305.602	1.502.348
a. Industri Migas	-	-	-	-	-
b. Industri Bukan Migas	1.049.608	1.205.980	1.246.480	1.305.602	1.502.348
4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH	202.338	215.193	229.038	246.075	266.631
a. Listrik	187.932	198.955	211.751	227.032	245.733
b. Gas	-	-	-	-	-
c. Air Bersih	14.405	16.238	17.287	19.043	20.897
5. KONSTRUKSI	896.647	948.797	1.056.256	1.171.420	1.322.424
6. PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN	2.465.111	2.777.716	3.118.148	3.494.900	3.975.539
a. Perdagangan Besar & Eceran	658.377	704.725	762.725	846.170	943.280
b. Hotel	409.375	466.598	546.338	659.123	758.210
c. Restoran	1.397.359	1.606.393	1.809.085	1.989.607	2.274.048
7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI	1.736.299	1.886.358	2.059.134	2.222.297	2.458.788
a. Pengangkutan	1.054.906	1.141.613	1.230.641	1.346.867	1.541.276
1. Angkutan Rel	100.098	112.425	87.392	95.591	99.777
2. Angkutan Jalan Raya	615.770	651.637	687.311	713.649	795.404
3. Angkutan Udara	279.763	307.392	372.939	445.221	545.440
4. Jasa Penunjang Angkutan	59.275	70.159	83.000	92.407	100.656
b. Komunikasi	681.393	744.745	828.493	875.430	917.511
8. KEUANGAN, PERSEWAAN & JASA PERUSAHAAN	1.628.995	1.802.227	2.011.360	2.288.101	2.513.401
a. Bank	355.171	413.786	479.600	580.628	690.650
b. Lembaga Keuangan Bukan Bank	119.143	130.712	147.767	163.570	179.993
c. Jasa Penunjang Keuangan	10.486	11.571	14.202	14.809	15.853
d. Real Estat	1.028.115	1.113.518	1.220.498	1.365.804	1.459.620
e. Jasa Perusahaan	116.080	132.640	149.293	163.290	167.285
9. JASA-JASA	2.596.831	2.908.302	3.207.308	3.562.936	3.903.385
a. Pemerintahan Umum	1.641.633	1.832.989	2.035.393	2.264.733	2.518.122
b. Swasta	955.198	1.075.313	1.171.914	1.298.203	1.385.263
1. Jasa Sosial & Kemasyarakatan	502.895	526.585	559.105	619.356	655.427
2. Jasa Hiburan & Rekreasi	71.305	82.764	91.045	100.857	113.045
3. Jasa Perorangan & Rumah tangga	380.997	465.963	521.764	577.990	616.790
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	10.607.237	11.777.579	12.962.435	14.327.563	15.981.933

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

TABEL 25.
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KOTA YOGYAKARTA
ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000 MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 2009-2013 (JUTA RUPIAH)

LAPANGAN USAHA	2009	2010	2011	2012*)	2013**)
1. PERTANIAN	17.359	17.455	17.755	17.939	18.190
a. Tanaman Bahan Makanan	2.139	2.082	2.072	2.090	2.101
b. Tanaman Perkebunan	207	211	215	218	221
c. Peternakan & Hasil-hasilnya	14.687	14.824	15.128	15.285	15.520
d. Kehutanan	-	-	-	-	-
e. Perikanan	325	338	340	347	347
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	265	272	293	296	296
a. Minyak & Gas Bumi	-	-	-	-	-
b. Pertambangan Bukan Migas	-	-	-	-	-
c. Penggalian	265	272	293	296	296
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	554.574	594.845	606.849	598.159	638.805
a. Industri Migas	-	-	-	-	-
b. Industri Bukan Migas	554.574	594.845	606.849	598.159	638.805
4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH	67.212	68.725	71.777	75.936	79.699
a. Listrik	60.691	61.893	64.887	68.384	71.743
b. Gas	-	-	-	-	-
c. Air Bersih	6.521	6.832	6.889	7.551	7.955
5. KONSTRUKSI	413.965	426.840	449.854	475.073	504.309
6. PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN	1.334.570	1.393.111	1.460.971	1.559.070	1.649.536
a. Perdagangan Besar & Eceran	385.983	394.601	404.601	427.014	446.258
b. Hotel	183.619	194.860	214.874	246.464	269.881
c. Restoran	764.968	803.651	841.496	885.591	933.397
7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI	1.048.667	1.098.383	1.185.006	1.268.866	1.366.604
a. Pengangkutan	549.733	568.879	601.050	652.800	712.552
1. Angkutan Rel	41.170	42.896	31.587	33.824	32.763
2. Angkutan Jalan Raya	272.733	275.652	281.869	285.368	297.003
3. Angkutan Udara	209.573	222.471	257.457	301.414	348.968
4. Jasa Penunjang Angkutan	26.257	27.860	30.137	32.194	33.817
b. Komunikasi	498.934	529.503	583.956	616.066	654.053
8. KEUANGAN, PERSEWAAN & JASA PERUSAHAAN	728.375	770.658	820.765	886.591	923.103
a. Bank	155.568	168.030	181.667	207.738	232.718
b. Lembaga Keuangan Bukan Bank	56.932	60.364	64.027	66.605	68.661
c. Jasa Penunjang Keuangan	5.492	6.017	6.544	6.511	6.486
d. Real Estat	463.318	486.181	514.288	547.044	555.025
e. Jasa Perusahaan	47.064	50.066	54.238	58.693	60.212
9. JASA-JASA	1.079.864	1.135.751	1.203.297	1.269.751	1.318.358
a. Pemerintahan Umum	675.252	709.318	749.899	794.460	829.269
b. Swasta	404.612	426.433	453.398	475.291	489.089
1. Jasa Sosial & Kemasyarakatan	197.694	202.130	208.683	217.251	222.234
2. Jasa Hiburan & Rekreasi	42.028	44.406	46.994	48.937	52.442
3. Jasa Perorangan & Rumah tangga	164.890	179.897	197.721	209.103	214.413
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	5.244.851	5.505.942	5.816.568	6.151.679	6.498.900

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

TABEL 26.
LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI KOTA YOGYAKARTA
MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 2009-2013 (PERSEN)

LAPANGAN USAHA	2009	2010	2011	2012*)	2013**)
1. PERTANIAN	-4,31	0,56	1,72	1,04	1,40
a. Tanaman Bahan Makanan	-1,22	-2,66	-0,48	0,84	0,55
b. Tanaman Perkebunan	-0,69	1,95	1,89	1,30	1,53
c. Peternakan & Hasil-hasilnya	-4,97	0,93	2,05	1,04	1,54
d. Kehutanan	-	-	-	-	-
e. Perikanan	4,85	3,80	0,59	2,02	0,06
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	2,70	2,63	7,69	0,89	0,14
a. Minyak & Gas Bumi	-	-	-	-	-
b. Pertambangan Bukan Migas	-	-	-	-	-
c. Penggalian	2,70	2,63	7,69	0,89	0,14
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	2,12	7,26	2,02	-1,43	6,80
a. Industri Migas	-	-	-	-	-
b. Industri Bukan Migas	2,12	7,26	2,02	-1,43	6,80
4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH	2,63	2,25	4,44	5,79	4,96
a. Listrik	3,28	1,98	4,84	5,39	4,91
b. Gas	-	-	-	-	-
c. Air Bersih	-3,06	4,77	0,84	9,61	5,35
5. KONSTRUKSI	0,24	3,11	5,39	5,61	6,15
6. PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN	6,51	4,39	4,87	6,71	5,80
a. Perdagangan Besar & Eceran	4,84	2,23	2,53	5,54	4,51
b. Hotel	6,75	6,12	10,27	14,70	9,50
c. Restoran	7,31	5,06	4,71	5,24	5,40
7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI	6,49	4,74	7,89	7,08	7,70
a. Pengangkutan	7,88	3,48	5,66	8,61	9,15
1. Angkutan Rel	11,23	4,19	-26,36	7,08	-3,14
2. Angkutan Jalan Raya	3,98	1,07	2,26	1,24	4,08
3. Angkutan Udara	13,06	6,15	15,73	17,07	15,78
4. Jasa Penunjang Angkutan	5,26	6,11	8,17	6,83	5,04
b. Komunikasi	5,00	6,13	10,28	5,50	6,17
8. KEUANGAN, PERSEWAAN & JASA PERUSAHAAN	4,53	5,81	6,50	8,02	4,12
a. Bank	6,20	8,01	8,12	14,35	12,03
b. Lembaga Keuangan Bukan Bank	10,79	6,03	6,07	4,03	3,09
c. Jasa Penunjang Keuangan	6,35	9,55	8,76	-0,51	-0,38
d. Real Estat	3,26	4,93	5,78	6,37	1,46
e. Jasa Perusahaan	4,41	6,38	8,33	8,21	2,59
9. JASA-JASA	3,18	5,18	5,95	5,52	3,83
a. Pemerintahan Umum	2,62	5,04	5,72	5,94	4,38
b. Swasta	4,11	5,39	6,32	4,83	2,90
1. Jasa Sosial & Kemasyarakatan	0,52	2,24	3,24	4,11	2,29
2. Jasa Hiburan & Rekreasi	6,53	5,66	5,83	4,13	7,16
3. Jasa Perorangan & Rumah tangga	8,11	9,10	9,91	5,76	2,54
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	4,46	4,98	5,64	5,76	5,64

^{*)} Angka Sementara

^{**)} Angka Sangat Sementara

TABEL LAMPIRAN 35. INDIKATOR KEMISKINAN DI YOGYAKARTA 2009-2013

Daerah/Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bln)	Jumlah Penduduk Miskin (000)	Persentase Penduduk Miskin
(1)	(2)	(3)	(4)
Perkotaan			
Maret 2009	228.236	311,47	14,25
Maret 2010	240.282	308,36	13,98
Maret 2011	265.752	304,34	13,16
Maret 2012	274.662	305,89	13,13
September 2012	284.549	306,50	13,10
Maret 2013	297.391	315,47	13,43
September 2013	317.925	325,53	13,73
Perdesaan			
Maret 2009	182.706	274,31	22,60
Maret 2010	195.406	268,94	21,95
Maret 2011	217.923	256,55	21,82
Maret 2012	231.855	259,44	21,76
September 2012	241.975	255,60	21,29
Maret 2013	256.558	234,73	19,29
September 2013	275.786	209,66	17,62
Kota+Desa			
Maret 2009	221.978	585,78	17,23
Maret 2010	224.258	577,30	16,83
Maret 2011	249.629	560,88	16,08
Maret 2012	260.173	565,32	16,05
September 2012	270.110	562,10	15,88
Maret 2013	283.454	550,19	15,43
September 2013	303.843	535,18	15,03

